



DIREKTORAT  
RISET &  
PENGABDIAN  
MASYARAKAT

INFEBRIA  
JIPPI  
PUBLISHING



# MENITI ARUS LOKAL-GLOBAL

JEJARING BUDAYA KAMPUNG

EDITOR: MELANI BUDIANTA & DHITA HAPSARANI



# MENITI ARUS LOKAL-GLOBAL: JEJARING BUDAYA KAMPUNG

Editor: Melani Budianta dan Dhita Hapsarani



DIREKTORAT  
RISET &  
PENGABDIAN  
MASYARAKAT

## **Meniti Arus Lokal-Global: Jejaring Budaya Kampung**

@Editor: Melani Budianta dan Dhita Hapsarani

ISBN 978-602-53457-3-9

Penyelaras Aksara: Nor Islafatun

Tata letak: M. Nichal Zaki

Desain Cover: Aan Mahfudzi

Gambar sampul: Kegiatan kesenian Amuba (Alunan Musik Bambu)  
di Pasar Slumpring, Desa Cempaka, Bumijawa, Kabupaten Tegal

Cetakan pertama, November 2018

Penerbit:

Infermia Publishing

Gang Haji Atan No 49, Kemirimuka, Beji, Depok, Jawa Barat

Email: [Infermiapublishing@gmail.com](mailto:Infermiapublishing@gmail.com)

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang. Penulis dan penerbit mengizinkan penggandaan karya ini, sejauh tidak untuk kepentingan komersial dan tetap menyantumkan nama penulis sebagai pemegang hak cipta.

Buku ini disusun berdasarkan kerja sama dengan Jaringan Kampung Nusantara.

Pendanaan:

Hibah Kajian Strategis 2018, UI Peduli, DRPM UI

# Sekapur Sirih

Penyusunan buku ini bermula dari sebuah perjumpaan dan proses panjang saling silang gagasan antara akademikus, pegiat seni budaya, dan pendamping masyarakat. Mereka disatukan oleh kepedulian dan gairah untuk mewujudkan komunitas desa dan kampung yang mandiri dan berlingkungan asri, dengan identitas berbasis pada sumber daya kultural.

Dengan pengalaman panjang berkarya di bidangnya masing-masing, para pegiat ini dipertautkan oleh sosial media, yakni kelompok *WhatsApp* (WA) yang disebut Japung Nusantara (Jaringan Kampung Nusantara). Terbentuknya jaringan pertemanan informal ini berawal dari seorang seniman bernama Redy Eko Prastyo yang menginisiasi kegiatan festival kampung. Dari situ, jaringan melebar, saling kait-mengait dan secara bertahap mempertemukan individu dari berbagai bidang yang berbeda-beda, dari seni musik ke berbagai cabang seni lainnya, modern dan tradisional. Kelompok itu berangkat dari kalangan akademisi, pegiat lingkungan, dan pendamping desa. Setelah satu tahun Japung dideklarasikan di Banyuwangi pada tahun 2016 dan diperingati ulang tahunnya di sebuah pertemuan di Batu, Jawa Timur, muncullah diskusi di sosial media, yakni keinginan untuk menghimpun pengalaman kerja masing-masing dalam bentuk tulisan yang dibukukan agar dapat menjadi bahan refleksi kritis dan sarana membangun pengetahuan bersama.

Keinginan ini mendapatkan jalannya melalui Program Kajian Strategis yang didanai Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Indonesia (UI). Tim dosen dari Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UI, terdiri dari kami berdua, Prof. Melani Budianta dan Dr. Dhita Hapsarani, bersama Dr. Ari Anggari Harapan dan Adrianna Rahajeng Mintarsih, M.Hum., memprakarsai proses penulisan buku ini. Proses mengumpulkan bahan bermula dari diskusi kelompok terarah di Malang pada bulan Juli 2018 dengan beberapa pegiat kampung dan budayawan yang berdomisili di Malang, Banyuwangi, dan Jember. Mereka adalah Prof. Maryaeni, M. Dwi Cahyono, Ir. Bambang Irianto, Kristanto Budiprabowo, Redy Eko Prastyo, Bachtiar Djanan M., Danis Setya Budi Nugroho, dan Farha Ciciek.

Selanjutnya, kami melakukan wawancara kepada beberapa pegiat kampung di Jakarta, juga berkunjung ke beberapa kampung binaan Ir. Bambang Irianto di Karawaci dan Dusun Karanggreneng, Jamuskauman, dan Magelang. Melalui program yang sama, dengan dukungan dana dari Association of Cultural Studies dan Universitas Shanghai, tim pengabdian masyarakat UI mempresentasikan sebuah panel yang terdiri dari para pegiat kampung di Konferensi Internasional Crossroads di Shanghai pada pertengahan Agustus 2018. Tindaklanjutnya adalah Simposium

Pemberdayaan Kampung di UI pada tanggal 25-26 Oktober yang menghadirkan sebagian besar dari penulis buku ini, pegiat kampung dari Karawaci, dan peneliti UI dari berbagai rumpun ilmu (sosial-humaniora, sains-teknologi, dan kesehatan). Simposium yang didanai oleh KPPRI UI tersebut ditujukan untuk membangun refleksi kritis bersama. Empat orang akademisi dari Thailand, Singapura, China, dan Indonesia ikut membagi pengalaman, memberikan masukan dan pengetahuan mereka dalam simposium tersebut.

Dari proses yang panjang dan berbagai kegiatan tersebut, terhimpunlah 17 bab dalam buku ini. Keseluruhan buku ini membahas isu-isu dan permasalahan yang dihadapi oleh komunitas kampung dan desa di Indonesia di era globalisasi, strategi, dan inovasi sosial yang digerakkan oleh masyarakat di berbagai kampung di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, dan Kalimantan Timur. Tentu cakupan ini sangat kecil dan terbatas, karena gerakan memajukan budaya dan komunitas kampung dilakukan para pegiat di berbagai wilayah. Penerbitan buku ini diharapkan mampu menjadi langkah awal untuk membangun pengetahuan bersama mengenai kampung.

Buku ini ditujukan bagi seluruh warga kampung, pegiat masyarakat, akademisi, budayawan, pengambil kebijakan di berbagai tingkatan, dan semua orang yang peduli pada pengembangan komunitas di desa dan kampung. Keseluruhan proses dan hasil penulisan ini merupakan kerja gotong royong dari berbagai pihak. Untuk itu, kami, Tim Editor, mengucapkan terima kasih kepada semua narasumber yang membagikan ilmunya, para penulis, kelompok WA Japung Nusantara, DRPM UI yang mendanai kegiatan pengabdian masyarakat dan penerbitan buku, KPPRI yang mendanai simposium, serta ACS dan Universitas Shanghai yang membiayai perjalanan dan konferensi di Shanghai. Terima kasih yang paling utama ditujukan kepada seluruh warga kampung yang ikut membangun pengetahuan bersama kami semua. Untuk merekalah buku ini dipersembahkan. Semoga bersama-sama kita dapat mewujudkan kampung dan desa yang kita impikan bersama.

Depok, 28 November 2018

**Melani Budianta, Dhita Hapsarani**

# Daftar Isi

<b>Sekapur Sirih</b> .....	<b>iii</b>
Daftar Isi.....	v
<b>Pendahuluan</b> .....	<b>1</b>
<i>Melani Budianta</i>	
<b>Teori Kampung</b> .....	<b>19</b>
1. <b>Kampung Berbasis Eko-Sosio-Kultura</b> .....	<b>21</b>
<i>M. Dwi Cahyono</i>	
2. <b>Jaringan Kampung Nusantara</b> .....	<b>37</b>
<i>Redy Eko Prastyo</i>	
3. <b>Ember Kampung</b> .....	<b>50</b>
<i>Kristanto Budiprabowo</i>	
4. <b>Sonjo Kampung: Pemberdayaan Kampung Nusantara</b> .....	<b>61</b>
<i>Kristanto Budiprabowo</i>	
5. <b>Dari Festival Menuju Transformasi Sosial</b> .....	<b>72</b>
<i>Akmad Bustanul Arif</i>	
6. <b>Wisata Desa, Bukan Desa Wisata</b> .....	<b>83</b>
<i>Bachtiar Djanan M. dan Tri Andri Marjanto</i>	
7. <b>Etika Pembakti</b> .....	<b>88</b>
<i>Trie Utami dan Melani Budianta</i>	
8. <b>Menabur Benih, Menuai Kebersamaan</b> .....	<b>104</b>
<i>Maryaeni</i>	
<b>Kisah Kampung</b> .....	<b>113</b>
9. <b>Kampung Cempluk di Tengah Kepungan Real Estat</b> .....	<b>115</b>
<i>Dhita Hapsarani</i>	
10. <b>Tanoker: Kisah Egrang dan Pengasuhan Gotong Royong</b> .....	<b>128</b>
<i>Adriana Rahajeng Mintarsih, Farha Ciciek, dan Sisillia Velayati</i>	
11. <b>Cerita dari Karanggeneng Jamuskauman</b> .....	<b>136</b>
<i>Paryati</i>	
12. <b>Kampung Kopi Rakyat di Lereng Gunung Ijen</b> .....	<b>141</b>
<i>Bachtiar Djanan M. dan Tri Andri Marjanto</i>	
13. <b>Kampungmu, Kampungku</b> .....	<b>148</b>
<i>Tri Andi Yuniarso</i>	
14. <b>Kampung dan Ekologi: Glintang Go Green</b> .....	<b>156</b>
<i>Bambang Irianto dan Ari Anggari Harapan</i>	

15. <b>Melestarikan Mata Air, Mengelola Wisata Desa Cempaka .....</b>	<b>164</b>
<i>Bachtiar Djanan M. dan Tri Andri Marjanto</i>	
16. <b>Terobosan Transparansi di Gondowangi.....</b>	<b>177</b>
<i>Ari Anggari Harapan</i>	
17. <b>Belajar dari Kampung Temenggungan.....</b>	<b>187</b>
<i>Bachtiar Djanan M. dan Tri Andri Marjanto</i>	
<b>Pesan dari Kampung .....</b>	<b>207</b>
<b>Pesan dari Kampung .....</b>	<b>209</b>

**Daftar Acuan**

**Biodata Penulis dan Pembakti**

# Pendahuluan

*Melani Budianta*

Jika kita menyanyikan lagu “Kampung nan Jauh di Mato” atau “Desaku yang Tercinta”, akan muncul gambaran sebuah pedesaan dengan alam yang asri dan terbersit sebuah komunitas dengan tradisi dan ikatan sosial yang guyub. Bayangan ini berkontras dengan ingatan tentang kota yang bising oleh lalu lintas, udara yang terpolusi, gedung-gedung bertingkat, dan kesendirian di tengah mal.

Dikotomi semacam ini akan buyar ketika kita mengunjungi desa dan kampung di berbagai wilayah di Indonesia saat ini. Bahkan, sepuluh tahun lalu, di sebuah desa di Jawa Timur, batang pohon yang berjajar di tepi sawah tertutup papan reklame motor, tawaran kredit, dan lowongan kerja sebagai TKI. Petani kekeringan air, orang tua mengeluh anak-anaknya ketagihan gawai, dan warga sibuk mengurus kebutuhan ekonomi keluarga yang tak punya waktu berkumpul. Persoalan urban ternyata dapat ditemui di wilayah pedesaan atau perkampungan. Permasalahan yang terjadi bukan sekadar penyakit kota masuk ke desa atau gejala urbanisasi yang semakin masif, melainkan suatu perubahan tatanan global yang merambah bukan hanya kota, tapi juga pelosok desa yang terhubung dengan infrastruktur dan teknologi informasi.

Memasuki dekade kedua abad ke-21, arus migrasi penduduk, benda, uang, modal, teknologi, dan informasi bergerak secara ulang-alik dan menyebar melintasi batas-batas wilayah desa, kota, dan bahkan negara. Globalisasi, selain mempercepat lalu lintas, juga membawa berbagai masalah yang kompleks. Arus yang masuk dan keluar ikut menyusupkan narkoba dan memperjualbelikan manusia. Ketika migrasi lintas batas semakin intens, *xenophobia* atau ketakutan dan prasangka pada hal yang dianggap asing meningkat. Ketika fundamentalisme pasar menyebar di dunia, menguat pula berbagai fundamentalisme yang lain, termasuk di bidang agama. Di tingkat nasional desentralisasi berpotensi menguatkan “raja-raja” lokal dan adanya kecenderungan konservatif (Hadiz, 2017). Tersedianya pilihan berbagai budaya mancanegara yang memiliki daya tawar tinggi dan dipasarkan masif di media massa, tak pelak menggusur ingatan budaya, bahasa, dan kesenian lokal.

Di sisi lain, globalisasi memberikan peluang yang tak terbatas karena komunitas dapat terhubung dengan jejaring di mana saja, melalui teknologi informasi dan media sosial. Kaitan saling membutuhkan antara desa-kota melebarkan kesempatan inovasi sosial dan kreativitas. Sebagai wilayah yang mempunyai sumber daya ekologi

dan budaya yang berbeda dan unik, desa dan perkampungan memiliki daya tawar untuk memberikan keragaman bagi dunia yang cenderung menjadi serupa.

Bagaimana kampung-kampung di berbagai wilayah Indonesia, di dekade kedua abad ke-21 ini, meniti arus budaya lokal-global yang kompleks tersebut? Buku ini menghimpun “cerita-cerita kampung”, pengalaman para pegiat –dan penggiat— komunitas di berbagai daerah, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, sampai Kalimantan Timur. Konteks, kondisi, dan jenis setiap kampung yang dibahas sangat beragam. Masalah yang dihadapi tiap kampung juga berbeda. Ada persoalan lingkungan alam, seperti kekeringan atau banjir, masalah sosial seperti tingkat kriminalitas dan radikalisme, terbengkalainya anak-anak buruh migran, buruknya tata laksana pemerintahan desa, kemiskinan, hingga ancaman kehilangan lahan. Para pegiat, yang sekaligus menjadi penulis atau narasumber dari buku ini –dengan latar posisi dan profesi berbeda-beda— mendampingi kampungnya untuk bernegosiasi dengan berbagai kekuatan, pasar, agama, negara, dan kepentingan politik. Inovasi dan strategi itu dibangun dengan cara berbeda-beda, dengan kelebihan dan kekurangannya, keberhasilan dan kegagalannya, dan semua masih merupakan proses yang belum selesai.

Buku ini bertujuan untuk membangun pengetahuan tentang gerakan kampung yang meningkat di abad ke-21 di Indonesia. Dengan mengabstraksikan pola, prinsip, dan strategi yang dilakukan para aktor –dalam konteks dan kondisi yang berbeda-beda— dan belajar dari kegagalan, kelemahan, dan capaian mereka, cerita-cerita kampung ini menyumbangkan gagasan bagi para pengambil kebijakan dan pegiat di lapangan.

## **Batasan Kampung**

Sebelum masuk pada kasus-kasus yang diurai dalam buku ini, pertama-tama perlu dibicarakan terlebih dahulu batasan kata “kampung”, seperti diuraikan lebih rinci oleh Dwi Tjahjono pada Bab 1. Kata “kampung”, berbeda dengan RT, RW, dusun, atau desa, tidak mengacu pada wilayah administratif tertentu. Dalam pembicaraan sehari-hari, kampung biasa diasosiasikan pada pemukiman tak terencana dan bersifat informal di wilayah urban (Barlocco, 2010), sedangkan desa berkonotasi wilayah rural. Pengertian yang demikian direvisi oleh Dwi Tjahjono, yang mendefinisikan kampung sebagai “sebutan terhadap kesatuan sosial yang berada di suatu tempat di dalam desa atau kelurahan, tapi di atas RT (Rukun Tetangga)” (hlm. 24).

Dalam buku ini, kesatuan sosial tersebut dapat berupa satu RW yang berada di wilayah urban (Kampung Glintung), satu desa di wilayah rural seperti Desa Ledokombo, atau satu dusun seperti Kampung Karanggreneng, di Desa Jamuskauman. Di wilayah perkotaan, dikenal juga kampung *peri-urban*, yakni

pemukiman yang tumbuh ketika kota melebarkan wilayahnya dengan zona-zona industri di pinggiran. Keterkaitan antara urban dan rural juga dicakup dalam istilah yang dikenalkan oleh Mc Gee (1991, 2009), yakni desa-kota. Desa-kota adalah daerah pedesaan yang kehidupannya bertumpu pada dua sistem penghasilan, yakni pertanian dan mata pencaharian yang terkait dengan kota terdekat. Dalam definisi ini, Kampung Karanggreneng dan Desa Ledokombo dapat diletakkan dalam kategori desa-kota. Apapun kategorinya, istilah kampung yang dipakai oleh masyarakat dan para pegiat di dalam buku ini merupakan suatu atribut (informal, bukan administratif) yang dikenakan pada suatu komunitas di wilayah tertentu untuk membangun satu identitas atau rasa kepemilikan bersama.

Jika penamaan tempat (atau toponimi) di beberapa kampung –menurut Dwi Tjahjono— seringkali mengacu pada kekhasan alam atau kondisi lingkungan setempat seperti kampung dekat muara, rawa, atau tempat tumbuhnya tanaman tertentu (kondisi yang bisa berubah karena pembangunan), di tahun 2010-an muncul kecenderungan kampung tematik, yakni pemberian nama berdasarkan kekhasan yang sedang atau akan dikonstruksikan (atau “dijual”), seperti kampung kelir, kampung jamu, atau kampung hidrophonik. Penamaan kampung dengan kekhasan tertentu seperti yang terlihat di Indonesia saat ini menggarisbawahi sifat afektif dan informal kampung. Berawal dari eksperimen di desa-desa di Austria dan Jerman di tahun 1980-an, kampung tematik ditujukan untuk membangkitkan partisipasi dan kreativitas warga dalam membuat perubahan sosial melalui inovasi dan kreativitas, yang berujung pada kemandirian ekonomi dan rasa bangga pada kampungnya. Upaya melakukan perubahan itu menjadi penting di Eropa karena menyusutnya lahan-lahan pertanian dan ditinggalkannya pedesaan oleh warganya (Kłoczko-Gajewska, 2014).

## **Kampung dan Modernitas Kolonial**

Di Indonesia, penamaan kampung dengan identitas yang membanggakan menjadi penting karena kampung telah terlanjur mendapatkan konotasi negatif, seperti yang disiratkan dari istilah *kampung* yang berarti berselera rendah, ketinggalan zaman, dan terbelakang. Dalam konotasi yang buruk di atas, kampung diposisikan berseberangan dengan kemajuan atau modernitas. Dalam konteks Indonesia, konotasi ini bisa dirunut sebagai warisan kolonial, ketika kota-kota bergaya Eropa merambah pemukiman penduduk lokal di masa VOC dan pendudukan Hindia Belanda. Gedung-gedung bergaya Eropa berkontras dengan pemukiman penduduk yang tergusur ke luar tembok perkotaan. Wilayah kampung dianggap kumuh dan kurang sehat, serta menjadi ancaman penularan penyakit.

Dengan paradigma membersihkan kampung Pemerintah Hindia Belanda di awal abad ke-20 (juga akibat dorongan Politik Etis), mencetuskan program perbaikan kampung (*kampung verbetering*), terutama dengan membangun saluran pembuangan air dan sanitasi (Colombijn and Cote, 2015). Di era kemerdekaan, baru pada tahun 1970-an program perbaikan kampung dilanjutkan melalui proyek Husni Thamrin yang juga menyasar infrastruktur kampung, seperti jalan, saluran pembuangan, dan air bersih (Djajadiningrat, 1994). Paradigma modernitas yang meletakkan kampung sebagai wilayah yang harus ditaklukkan dan dibersihkan masih terus dipakai oleh pemerintah kota, khususnya dalam menggusur kampung-kampung urban yang dianggap sebagai tempat maksiat atau permukiman ilegal di bantaran sungai atau jalur hijau lainnya. Suatu proses menjadikan suatu wilayah yang tadinya kumuh menjadi “naik kelas” dalam perspektif modernisasi adalah gentrifikasi, yang umumnya ditandai dengan pencaplokan lahan kampung menjadi hunian, tempat rekreasi, atau konsumsi yang bernuansa kelas menengah atas. (Pola yang sama, yakni peluasan kota sampai ke wilayah pedesaan dan gentrifikasi dapat dilihat dalam kasus Kampung Cempluk yang ditulis oleh Dhita Hapsarani).

Terobosan untuk menghindari penggusuran kampung dilakukan oleh Romo Mangunwijaya dengan memberikan sentuhan estetik bernilai seni pada rumah-rumah kampung ilegal di bantaran sungai Kali Code di tahun 1983. Pendekatan Romo Mangunwijaya yang membagikan keahliannya sebagai seorang arsitek untuk mendampingi warga selama bertahun-tahun guna mempertahankan huniannya dan membangkitkan kebanggaan atas tempat tinggalnya merupakan model aktivisme yang terlihat dalam kegiatan para pegiat kampung dalam buku ini. Ironisnya, peniruan yang superfisial dan masal terhadap pengecatan warna-warni justru menjadi perusak inisiatif para pegiat kampung, seperti terlihat dalam kasus Kampung Temenggungan (Bachtiar Djanan M. dan Tri Andri Marjanto).

Menjamurnya kampung tematik di Indonesia diawali oleh inisiatif Gubernur Jakarta Jokowi yang mencanangkan 100 kampung tematik dalam waktu satu tahun di 2013. Gagasan yang bersifat keputusan sepihak dari atas dan bersifat instan ini tidak berhasil dilaksanakan karena adanya penolakan dari warga (Kuwado, 2013). Padahal, paparan hasil pengalaman membangun kampung tematik di Eropa menggarisbawahi pentingnya proses pemetaan masalah dan pengumpulan gagasan dan kreativitas yang partisipatif dari warganya (Kloczko-Gajewska A., 2014).

Pendekatan kampung tematik versi pemerintah tidak dapat dilepaskan dari paradigma pariwisata, yakni upaya untuk membangun ekonomi dengan menjual eksotisme budaya kampung dan alam. Jika pembangunan seperti ini dibarengi dengan masuknya investasi modal untuk melakukan “gentrifikasi” untuk kepentingan wisata (dengan masuknya hotel-hotel berbintang dan kenyamanan urban lainnya), maka budaya kampung akan tergerus, dan warganya, jika tidak

tergusur, akan menjadi penonton atau pemasok kerja manual –bukan pemilik kampungnya lagi—. Bab “Wisata Desa, Bukan Desa Wisata” yang ditulis Bachtiar Djanan M. dan Tri Andri Marjanto melihat paradigma wisata secara kritis, lalu menawarkan alternatif dengan membalikkan perspektif pariwisata fisik ke arah pemberdayaan berbasis pada aktivitas sehari-hari dan sumber daya budaya yang diolah secara partisipatif oleh warga.

Modernitas dan ekonomi pasar memiliki dua sisi mata uang dalam memposisikan kampung, yakni melihat kampung sebagai masalah atau sebagai komoditi. Dalam mendampingi kampung, para pegiat harus berhadapan dan menyasiasi dua kutub ini, seperti yang dibahas dalam berbagai kasus dalam buku ini. Tren untuk memakai nama kampung sebagai identitas yang membanggakan pada satu sisi merupakan strategi untuk menghilangkan stereotip kampung. Namun, komodifikasi kampung yang tak terarah pada akhirnya mereduksi kampung sebagai objek belaka.

## **Aktor dan Jejaring**

Hal lain yang tak kalah penting untuk membingkai bab-bab dalam buku ini adalah jejaring media sosial dan teknologi informasi yang menjadi jalan lahir bagi kelompok WA para pegiat dan pendamping kampung yang menyusun buku ini, seperti yang dibahas oleh Redy Eko Prastyo. Keterhubungan virtual adalah konteks kampung abad ke-21 yang tidak dapat ditemui sebelumnya. Melalui WA Japung, para pegiat yang terhubung secara individual dengan satu pegiat lain dapat berkenalan dengan pegiat lain dan memanfaatkan koneksi tersebut untuk kegiatan pendampingan kampung.

Saat ini telah berkembang pendekatan aktor dan jejaring untuk melihat keterkaitan kampung dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, bisnis, LSM, kelompok agama, dan akademisi (Richter 2017). Richter memakai istilah “embedded intermediaries” untuk menyebut fungsi para pegiat kampung sebagai perantara dengan berbagai pihak di luar kampung dan pada saat yang sama mempunyai keterikatan kuat dengan komunitas kampung. Sebagian besar aktor dan pegiat yang sekaligus menjadi penulis atau yang dibahas dalam buku ini dapat dikategorikan sebagai perantara yang mengakar, walaupun hanya dua orang yang berasal dari kampung yang didampinginya. Laiknya cerminan dari proses “mengindonesia”, sebagian para pegiat berasal dari kawasan di luar desa, bahkan dari luar pulau, tetapi tinggal dan hidup bersama masyarakat yang didampinginya. Bahkan, beberapa pegiat yang mempunyai jarak secara fisik dari desa dampingan karena tinggal di kota, membangun kedekatan dan keterikatan dengan mengunjungi dan berinteraksi dengan warga desa secara berkala dan *kontinyu*. Singkatnya, para

pendamping desa tidak melakukan kegiatan sebagai proyek yang terbatas waktu dan administrasinya, melainkan sebagai suatu relasi sosial yang mengikat.

Kesemua penggerak yang menulis atau menjadi subjek dari buku ini mempunyai modal sosial dan kultural sebagai seniman, *entrepreneur* sosial, jurnalis, juga aktivis yang berpengetahuan dan berjejaring. Kebanyakan mempunyai penghasilan, umumnya dari kota untuk menunjang kehidupan mereka di desa. Dengan demikian, para penggerak berada di dalam dan sekaligus di luar desa, dan dengan demikian mereka dapat membawa jejaring mereka di luar ke dalam desa.

Salah satu kelemahan dari gerakan yang bertumpu pada aktor individual adalah ancaman terhadap keberlanjutan. Trie Utami pada bab tentang “Etika Pembakti” menengarai munculnya masalah. Jika jejaring bertumpu pada individu pendamping tertentu, yang terjadi adalah ketergantungan pada individu, bukan pemberdayaan komunitas kampung. Kaitan para aktor penggerak dari berbagai kampung dengan sendirinya mengaitkan satu kampung ke kampung lainnya. Salah satu kegiatan yang dicetuskan oleh jejaring WA Japung, seperti yang dibahas oleh Kristanto Budiprabowo adalah yang disebut dengan *sonjo kampung*. Para penggerak dari satu kampung mengunjungi kampung lainnya untuk saling berbagi dengan warga kampung dan mendukung kegiatan mereka. Bagaimana kegiatan *sonjo kampung* ini terjalin untuk membangun sinergi antarkampung dalam arti sesungguhnya (bukan sekadar pertemanan antar penggerak), masih perlu evaluasi lebih lanjut.

## **Migrasi dan Urbanitas**

Keterkaitan antara kampung dengan kota di dalam dan luar negeri pertamanya terjalin dengan terinternalisasinya gaya hidup urban yang menurut Bachtiar Djanan M. dalam “Wisata Desa, Bukan Desa Wisata” berkembang menjadi suatu “zona nyaman” yang diidealkan oleh warga kampung. Zona nyaman ini tidak muncul begitu saja, tetapi merupakan suatu proses ketika modernitas kota dengan kemewahan dan sebagai pusat sirkulasi uang, pengetahuan, dan kekuasaan dipromosikan melalui televisi, budaya populer, teknologi digital, dan sosial media. Di lain pihak, zona nyaman tidak hanya terjadi karena kampung yang menginternalisasi urbanitas, tapi juga karena kota semakin mendekat ke wilayah pedesaan. Dhita Hapsaran menguraikan bagaimana Kampung Cempluk yang semula terisolasi, mulai “dikepung” oleh pemukiman urban kelas menengah yang menyeberang dan melebar ke kawasan kampung.

Kaitan antara desa, kampung, dengan kota-kota di dalam dan di luar negeri juga terjalin oleh perjalanan warga kampung, baik kerja ulang alik dari desa atau kampung ke kota seperti yang dilakukan tukang bangunan dan tukang kayu Desa Cempluk, perpindahan dari desa ke kota dalam proses urbanisasi atau migrasi

kerja ke luar negeri, seperti yang dilakukan oleh sebagian besar warga Desa Ledokombo, Jember. Tersedotnya tenaga kerja usia produktif dari Desa Ledokombo menunjukkan posisi kampung dalam arus dua arah globalisasi. Ketika globalisasi membawa arus pengetahuan, kapital, budaya populer, dan teknologi ke berbagai pelosok dunia, desa dan kampung memasok tenaga kerja, khususnya pekerja kasar, ke negara-negara maju. Desa terhubung oleh suatu sistem ekonomi kompetitif yang menciptakan perbedaan modalitas negara maju dan negara berkembang. Sistem ini juga menciptakan kesenjangan antara kota dengan perputaran ekonomi tinggi dan daerah pelosok yang tertinggal.

Sebagai bagian dari tatanan ekonomi global, desa menunjang devisa negara melalui ekonomi remitansi, yakni penghasilan dari masuknya uang kiriman hasil kerja di luar negeri. Bersamaan dengan itu, kembalinya TKI ikut mengubah desa dengan dibangunnya rumah-rumah gedung dan konsumsi produk urban yang menjadi “zona nyaman” yang diidealkan. Perputaran ekonomi semacam ini semakin menguatkan perkotaan dan memiskinkan daerah pedesaan. Seperti dibahas oleh Parjati, Desa Karanggreneng, Jamuskauman, walaupun letaknya tak jauh dari Kota Yogya dan Magelang di Jawa Tengah, merupakan dusun yang terisolasi dan tertinggal secara ekonomi. Sebagian besar penduduknya terdiri dari janda yang berpenghasilan kurang dari satu juta per bulan dari upah buruh tani dan pemukul emping, sedangkan para pemuda usia produktif meninggalkan desa untuk bekerja di kota.

Saat ini mulai menguat kesadaran untuk menanggulangi kesenjangan ekonomi antara kota dan pedesaan. Pemerintahan Jokowi mengusung slogan “Membangun Indonesia dari Desa” dan menggelontorkan dana desa yang terus ditingkatkan sejak 2015, dari Rp.20,777 triliun menjadi Rp.60 triliun di tahun 2018 (dari Rp.750 juta ke Rp.800 juta per desa). Dana itu terutama diprioritaskan untuk membangun infrastruktur fisik (seperti jalan, jembatan, dan instalasi listrik) untuk memenuhi kebutuhan daerah terisolasi yang selama ini tak terjangkau. Namun, kasus-kasus yang dibahas dalam buku ini menunjukkan bahwa persoalan bukan terhenti pada infrastruktur. Dalam kasus Dusun Karanggreneng, dana desa yang sudah disalurkan langsung ke Desa Jamuskauman tidak menyentuh dusun tersebut karena kurangnya transparansi dalam penggunaannya. Selain itu, program padat karya yang dititipkan pemerintah melalui pembangunan infrastruktur dana desa, menurut Supriyadi (melalui wawancara, 2018), justru berpotensi mematikan semangat gotong royong karena membuat warga cenderung menunggu datangnya proyek pembangunan. Seperti yang terjadi di Kampung Cempluk, Ledokombo, dan Dusun Karanggreneng, orientasi urban tidak selalu berujung pada kesejahteraan warga. Hilangnya ingatan budaya, ruang bersama gotong royong dan berbagai sumber daya budaya dan alam desa justru terjadi karena “keputusan kota”. Oleh karena itu, masih ada pekerjaan

rumah yang panjang untuk menyiapkan warga terisolasi terhadap serbuan kota yang menyergap secara tiba-tiba setelah infrastruktur yang dibutuhkan terbangun.

## **Membalik Stereotip: Solusi Kampung untuk Masalah Perkotaan**

Dengan mengutip pakar ekonomi dunia, Kristanto Budiprabowo pada Bab 3, menegaskan bahwa yang perlu dikuatkan adalah ekonomi kampung, karena “masa depan ketahanan ekonomi terletak pada ketahanan masyarakat dalam komunitas-komunitas kecil yang saling menghidupi” (hlm. 52). Kristanto Budiprabowo dalam “Ember Kampung” membalikkan teori ember bocor Gordon Cunningham dengan merefleksikannya secara kritis pada praktik ekonomi kampung. Alih-alih dilihat sebagai praktik ekonomi yang perlu ditingkatkan, sistem ekonomi yang berbasis kemurahan berbagi di kampung dapat menjadi suatu sistem alternatif yang jarang ditemui di ruang urban. Para pegiat dan penulis buku ini berpendapat bahwa upaya menyerahkan kampung yang berkelanjutan adalah yang bertumpu pada kebutuhan dan kondisi alam, sosial, dan budaya masing-masing kampung yang unik dan dinamis (Dwi Tjahjono), bukan pada komodifikasi yang secara superfisial ditentukan temanya oleh birokrasi.

Bachtiar Djanan M. dan Tri Andri Marjanto mencontohkan pembangunan ekonomi desa melalui bisnis penjualan kopi di Desa Gombengsari dan pemanfaatan sumber air di Desa Cempaka yang dibangun secara gotong royong untuk menjadi identitas sekaligus sumber penghasilan bersama desanya. Diperlukan proses untuk menemukan keunikan dan potensi ekonomi desa, lalu secara bersama membangun sistem yang tidak mengambil model ekonomi kompetitif dan transaksional, melainkan sistem saling berbagi. Eksperimen Dusun Karanggreneng, Jamuskauman, untuk bangkit dari kemiskinan melalui program mendatangkan anak kota untuk mengalami kehidupan di desa menarik dicatat. Koneksi dengan kota dimanfaatkan oleh dusun, bukan saja untuk meningkatkan penghasilan, tetapi juga untuk membangun kebersamaan yang tadinya telah hilang. Perputaran uang dipakai untuk meningkatkan fasilitas desa yang mendukung kegiatan bersama tersebut. Pada contoh-contoh di atas, tujuan kegiatan bukan sekadar “pendayagunaan” alam, sumber daya budaya dan sosial, melainkan pemberdayaan masyarakatnya –seperti yang ditekankan oleh Dwi Tjahjono—. Demikian juga, seperti ditekankan oleh Bachtiar Djanan M. dan Tri Andri Marjanto, inti pembangunan baiknya bukan desa sebagai objek wisata, melainkan wisata yang berbasis pada nilai-nilai dan kegiatan masyarakat desa itu sendiri:

Dengan konsep wisata desa yang berbasis pada *values*, wisatawanlah yang “digiring” untuk belajar memahami, menghargai, menghormati, bahkan tertular nilai-nilai yang diyakini masyarakat desa. Bukan sebaliknya, masyarakat desa yang tertular dan mengikuti perilaku serta budaya yang dibawa wisatawan (Djanan dan Marjanto, hlm. 85)

Fenomena yang sedang terjadi adalah pembalikan dari pendekatan dan perspektif modernitas kolonial yang melihat kampung sebagai masalah dan komoditi. Dalam gerakan kampung dari bawah seperti yang dicanangkan para pegiat dalam buku ini, kampung justru menawarkan solusi terhadap penyakit kota, seperti penanganan radikalisme melalui kampung lintas kampung (Wawancara dengan Redy Eko Prastyo dalam pembahasan tentang Kampung Cempluk) membangun kembali semangat gotong royong yang hilang akibat individualisme dan ekonomi transaksional (Dusun Karanggreneng), mengupayakan *de-urbanisasi* dengan membuat potensi ekonomi desa menarik pemuda dan tenaga usia produktif untuk balik kampung (Ledokombo) dan membuat sistem pengasuhan gotong royong bagi anak-anak yang ditelantarkan akibat urbanisasi dan migrasi. Kampung dan desa menjaga sumber daya alam untuk kelestarian lingkungan (Kampung Glintung dan Cempaka).

Kampung menjadi pusat solusi karena, seperti disebutkan oleh Akmad Bustanul Arif, kampung dan desa adalah “lambung pangan sekaligus lambung harapan keberlangsungan hidup bangsa kita” (hlm. 73). Inovasi masyarakat di Kampung Glintung dan Desa Cempaka, misalnya, membantu mengatasi persoalan lingkungan, khususnya yang terkait dengan air. Enam tahun lalu, Kampung Glintung, sebuah kampung urban di Kota Malang, seperti kampung di sekitarnya, adalah kawasan kumuh yang rawan kriminalitas, terutama rawan banjir. Inovasi sosial digagas oleh seorang Ketua RW, Ir. Bambang Irianto dengan program “menabung air” yang pada awalnya diperkenalkan dengan setengah memaksa. Setelah berproses selama lima tahun, program yang memanfaatkan teknologi sederhana dari bahan-bahan yang ada di kampung berujung pada perubahan. Kampung Glintung bukan saja berhasil menanggulangi persoalan banjir, tetapi juga mengubah kawasan kumuh menjadi hijau dan aman. Desa Cempaka adalah kawasan pedesaan yang dikaruniai tujuh mata air yang terancam pendangkalan oleh lumpur. Tanpa upaya warga desa untuk mempertahankan airnya, Indonesia kehilangan tujuh mata air, yang ketika akhirnya dikelola dengan pendekatan budaya, menjadi sumber kesegaran bukan hanya bagi warganya.

Ingatan budaya, termasuk sejarah kampung, peninggalan arkeologi yang terserak, kuliner lokal, permainan anak, ritual pertanian, dan berbagai jenis kesenian yang sudah tergusur dalam budaya populer dan gaya hidup urban merupakan

sumber-sumber budaya yang dapat disumbangkan oleh kampung dan desa. Baik di Ledokombo maupun di Karanggreneng, Tegal, Banyuwangi, Tenggarong, dan Bangun Mulya di Kalimantan Timur, ingatan yang sudah hilang tersebut direkayasa untuk dihidupkan kembali. Di Ledokombo anak-anak belajar kembali bermain *egrang* sampai bisa menari di atas *egrang* dan memenangkan berbagai lomba di tingkat nasional dan internasional. Di Dusun Karanggreneng, anak-anak dan pemuda belajar gamelan dan memainkan permainan anak agar dapat bermain bersama anak-anak kota yang menginap di dusun.

Tri Andi Yuniarso dalam "Kampungmu, Kampungku" menuturkan pengalamannya mendampingi beberapa desa di Kutai Kartanegara, mengolah alam dan kegiatan budaya sesuai kekhasan desa. Di desa-desa yang kaya dengan perkebunan nipah, dibuat berbagai eksperimen untuk mengolah buah nipah yang tadinya dianggap tidak bermanfaat, menjadi manisan dan makanan olahan lainnya. Di desa yang lain kebiasaan memakai ikat kepala yang dibuat dari daun bengkung dihidupkan kembali dan menjadi ikon dalam festival desa. Pemuda di desa peladang menelusuri lagi teknologi yang dipakai nenek moyangnya untuk menanam padi lokal. Di Kalimantan Timur, seperti dituturkan oleh Akmad Bustanul Arif, ritual dan upacara yang berkaitan dengan pertanian, seperti sedekah bumi, dan pesta rakyat di kaki gunung digali kembali maknanya, dan menjadi sarana bagi warga untuk saling berinteraksi. Di Desa Bangun Mulya maupun di sejumlah desa di Kutai Kartanegara, keragaman etnis yang terdiri dari transmigran Jawa, berbagai suku Dayak, Bugis, Paser, menjadi kondisi yang "perlu disikapi dengan hati-hati", tetapi pada saat yang sama, menjadi peluang untuk membangun suatu kegiatan bersama yang merayakan perbedaan tersebut. Dengan mengunggulkan berbagai modal alam, sosial dan budaya yang menjadi kekhasannya, kampung dan desa menjadi lumbung pengetahuan dan sumber daya yang menghidupi negeri.

## **Festival: Sekadar Pasar atau Pemberdayaan?**

Salah satu sarana untuk "merevitalisasi" kesenian lokal di kampung adalah melalui kegiatan "hari raya budaya" (istilah Trie Utami yang diadopsi oleh berbagai pegiat Japung), atau festival kampung yang diadakan setiap tahun, di luar perayaan 17 Agustus. Festival kampung menjadi sarana membuat suatu kegiatan bersama yang meningkatkan interaksi sosial dan komunikasi, dan jika dikelola swadana, dapat membangun tradisi gotong royong di desa. Acara festival yang berlangsung beberapa hari menjadi tempat warga meneguhkan dan merayakan potensi seni budaya desa yang dihimpun dan dinikmati bersama. Seminggu sesudah Festival Buen ketiga di tahun 2018, misalnya, warga Desa Bangun Mulya yang terdiri dari tiga generasi transmigran dari berbagai daerah di Jawa, tak henti-hentinya membicarakan pentas

ludruk yang dimainkan oleh warga, dari kepala desa, ibu rumah tangga, sampai anak muda. Ada keriaan dan kebanggaan akan partisipasi mereka. Ingatan yang muncul di festival tersebut memang ingatan budaya yang dibawa dari Jawa, dari makanan sampai keseniannya.

Bersamaan dengan itu, suatu proses lain terjadi ketika masyarakat Bangun Mulya mulai menyadari keragaman yang ada di sekitar mereka dan bergerak untuk mengajak komunitas etnis lainnya, Paser, Bugis, Dayak, untuk ikut bergabung. Nama festival diambil dari bahasa Paser, tuan rumah yang bahasa dan budayanya menjadi minoritas di desa transmigran tersebut. Masih diperlukan proses lebih lanjut untuk membuat komunitas etnis yang lain merasa nyaman dan memiliki acara bersama tersebut. Paling tidak, satu langkah telah diambil. Contoh ini menunjukkan bahwa festival adalah sebuah sarana transformasi sosial, bukan tujuan atau sekadar kegiatan seni, seperti ditekankan oleh Akmad Bustanul Arif, Tri Andi Yuniarso, Bachtiar Djanan M. dan Tri Andri Marjanto, juga Trie Utami dan Maryaeni di buku ini.

Seperti dibahas dalam tulisan Trie Utami tentang “Etika Pembakti” catatan kritis tentang festival sangat penting karena mewabahnya demam festival di berbagai pelosok negeri di dekade kedua abad ke-21. Dalam buku ini saja, tercatat berbagai festival yang didampingi oleh para pegiat kampung, antara lain Festival Kampung Cempluk, Festival Kampung Dilem, Festival Bumi Jaya, Festival Kampung Tani, Festival Tanjung Isuy, Festival Kampung Seraong, Festival Kopilego, Festival Jembayan, Festival Buen, dan seterusnya. Jalan festival memang mengawali pembentukan jejaring kampung yang disebut dengan Jaringan Kampung Nusantara. Diawali dengan Festival Kampung Cempluk, seperti dipaparkan oleh Redy Eko Prastyo, sejumlah seniman dan budayawan bersepakat membentuk Jaringan Festival Kampung Nusantara. Dalam perjalanannya, nama ini berubah menjadi Jaringan Kampung Nusantara.

Perubahan ini dilakukan karena para penggagas jejaring kampung menyadari bahwa tujuan utama membangun gerakan bukan untuk sebuah panggung festival, melainkan untuk melakukan transformasi sosial. Trie Utami menegaskan, “Perlu disadari bahwa *event* atau acara festival tidak sama dengan pemberdayaan. *Event* hanya salah satu dari sekian ribu jalan untuk menggerakkan masyarakat” (hlm. 93). Ir. Bambang Irianto, penggagas gerakan menabung air dan kampung hijau bergabung dalam kelompok jejaring ini karena ruang lingkungannya tidak terbatas pada festival saja. “Jika gerakan ini diartikan secara sempit sebagai peristiwa kesenian, aspek lingkungan hidup tidak terkait di situ” (Bambang Irianto, wawancara, 2017). Kegiatan *live in* di Dusun Karanggreneng yang mengubah perilaku masyarakat desa, dari kurang peduli pada satu sama lain menjadi guyub, tidak terjadi karena festival.

Pada saat yang sama, Bachtiar Djanan M. dalam kegiatan pendampingan masyarakat desa di Tegal dan Banyuwangi menggunakan festival sebagai sebuah strategi yang multifungsi:

- pertama, festival menguatkan dan mengemas acara lokal yang sudah ada di desa (seperti pagelaran *suroan*);
- kedua, festival menjadi bagian dari peta jalan untuk mempublikasikan potensi desa yang ada, menghidupkan kesenian lokal yang terlupakan, dan mendisain kesenian baru sesuai dengan kreativitas lokal;
- ketiga, festival menjadi sarana membangun jejaring seni budaya dengan pelaku-pelaku di daerah lain dan menjejaringkan desa dengan pemangku kepentingan lainnya; dan
- keempat, festival menjadi ajang simulasi wisata desa yang dirancang, seperti simulasi *homestay*, layanan, dan latihan menyiapkan dan mengorganisir acara yang didatangi banyak pengunjung (Bachtiar Djanan M., dalam komunikasi melalui WA).

Memakai festival untuk melakukan *branding* sehingga keberadaan satu kampung dirasakan penting bagi warga dan masyarakat sekeliling, dan karenanya tidak rentan “dicaplok” oleh pelebaran kota juga dilakukan di Kampung Cempluk (Dhita Hapsarani). Dalam penyelenggaraan festival, warga mendapat kesempatan untuk belajar bersama, baik untuk mengorganisasikan kegiatan, maupun untuk wawasan kebangsaan yang lebih besar:

Sebuah festival bukan sebatas kegiatan perayaan budaya, tetapi jauh lebih besar daripada itu, yaitu sebagai “momentum” untuk belajar bersama-sama dan sama-sama belajar tentang nilai-nilai kemanusiaan dan semangat keindonesiaan melalui pendekatan kesenian dan kebudayaan. Tujuan utamanya adalah untuk mempererat tali persaudaraan, persatuan, dan kesatuan sebagai sesama bangsa Indonesia dan menggemakan (menyebarkan) semangat itu ke seluruh penjuru tanah air (Akmad Bustanul Arif, hlm. 82)

Meskipun demikian, strategi festival bukannya tidak mengandung masalah dan risiko. Kecenderungan untuk mengukur sukses festival dari tampilnya bintang-bintang tamu dari dalam dan luar negeri, dan jumlah turis asing yang datang, berpotensi membuat strategi festival kampung salah arah (Trie Utami, hlm. 91-92). Setelah membuat festival pertama yang sukses, kampung dan desa mendapat pekerjaan rumah dan beban untuk menyelenggarakannya setiap tahun, dengan ukuran sukses yang semakin ditingkatkan. Akibatnya, alih-alih memberdayakan desa, kegiatan ini membebani warga dari segi tenaga dan juga dana. Apalagi, jika

dalam seluruh proses persiapan maupun acara, warga bersama para turis yang datang hanya menjadi penonton. Itu sebabnya, Maryaeni mengingatkan, bahwa “pemberdayaan peran masyarakat desa jangan sampai terpinggirkan dalam proses pembangunan di desa itu sendiri” (hlm. 109)

Membuat perhelatan yang mendatangkan devisa besar bagi desa mungkin mendatangkan kemakmuran, tetapi paradigma pariwisata pada ujungnya menjadikan desa sebagai objek dan komoditi. Dalam kiasan Bachtiar Djanan M. dan Tri Andri Marjanto, pariwisata diibaratkan, “Seperti api, bisa untuk memasak makanan, tapi bisa pula membakar dapur bahkan rumah kita”. Dalam simposium pemberdayaan kampung di UI (25 November 2018), Bambang Irianto menuturkan bagaimana sukses mendatangkan uang ke kampung dalam jumlah fenomenal (kas sebesar 2 miliar di koperasi dan perputaran uang harian dalam jumlah jutaan per hari dari tarif yang dikenakan pada pengunjung) membawa persoalan baru, yakni kembalinya “preman” pembuat onar yang sebelumnya telah tergusur dari kampung, untuk mengambil alih kuasa di kampung. “Barangkali bukan jumlah yang besar yang perlu ditargetkan, tetapi kesejahteraan warga dalam kampung yang mandiri” (Bambang Irianto, catatan simposium 25 November 2018).

## **Kampung dan Tata Kelola Desa**

Peribahasa “ada gula ada semut” tampaknya berlaku di mana saja, termasuk dalam pengelolaan desa dan kampung. Ada beberapa jenis relasi antara aparat pemerintah lokal dengan warga kampung. Pertama adalah kecenderungan memanfaatkan sukses pemberdayaan kampung untuk kepentingan kuasa dan politik. Pengalaman di Kampung Temenggungan menunjukkan bagaimana pemberdayaan yang dibangun dengan susah payah dari bawah dalam proses yang lama oleh masyarakat dipotong dalam waktu singkat oleh penguasa. Pengambilalihan kegiatan ekonomi warga dan intervensi dari atas melalui kebijakan “pengecatan warna-warni” sebuah kampung yang telah menjaga dengan arif rumah-rumah pusaknya adalah pelajaran yang sangat buruk dalam tata kelola desa. Kebijakan sepihak dari aparat pemerintah, tanpa mempertimbangkan saran komunitas adat adalah perusakan, bukan saja terhadap nilai rumah pusaka, tetapi terhadap proses pemberdayaan warga.

Tipe relasi kedua adalah ketidakpedulian dan pengabaian. Dalam beberapa pengalaman pegiat, sukses warga kampung memberdayakan diri secara mandiri justru tidak mendapat dukungan atau apresiasi dari aparat pemerintah lokal yang berkepentingan. Dukungan yang dijanjikan atau yang diharapkan tidak kunjung datang. Dusun-dusun yang tidak pernah mendapat kucuran dana desa mempertanyakan transparansi proses pengambilan keputusan dan penggunaan

anggaran. Ada kecenderungan umum bahwa ketika sukses pemberdayaan kampung mendapat perhatian media massa dan tersebar luas, berbagai pihak yang semula tidak menunjukkan perhatian, ikut mengklaim keberhasilan tersebut sebagai bagian dari prestasinya. Hal semacam ini dialami oleh beberapa kampung yang dibahas dalam buku ini.

Tipe relasi kedua adalah tipe pemimpin yang ingin cepat memecahkan masalah kampung dan tidak memberikan kesempatan bagi warga untuk berproses menentukan identitasnya sendiri. Dalam tipe tata kelola seperti ini, keputusan datang dari atas untuk menentukan apa yang dianggap baik untuk satu kampung atau desa (dengan maksud untuk membantu). Tamara dan Rahdriawan (2018) menunjukkan bahwa kegagalan Kampung Hidroponik di Kota Semarang disebabkan oleh “kurangnya perencanaan konsep kampung, teknis proses pelaksanaan, ketidaksesuaian tema dengan potensi kampung, serta kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat”.

Bagaimanapun rumitnya relasi antara warga kampung dengan aparat pemerintah lokal, dari kepala desa, camat, dan bupati. Maryaeni dalam “Menabur Benih Menuai Kebersamaan” menekankan bahwa tujuan “peningkatan taraf hidup masyarakat dan secara lebih luas ... untuk mewujudkan desa mandiri yang swasembada, swadaya, dan swakelola” tidak dapat “mengabaikan hadirnya pemerintah. Desa harus tetap bersinergi dengan pemerintah.” (hlm. 112)

Oleh karena itu, bergabungnya berbagai aparat administrasi dan pemerintahan desa dan kampung, dari Ketua RT, RW, kepala dusun, kepala desa, camat, staf dari dinas pemerintahan dalam jejaring pegiat kampung merupakan sesuatu modal yang sangat berharga. Jejaring yang menghubungkan mereka dengan seniman, akademisi, pegiat sosial, petani, dan pemuda kampung dapat menjadi ajang untuk saling belajar dan berkomunikasi dalam relasi yang setara, khususnya dalam menyorot tata kelola desa.

Tata kelola pemerintahan desa merupakan satu kunci penting untuk menjamin proses pengambilan keputusan yang melibatkan warga secara partisipatif dan keterbukaan dalam mempertanggungjawabkan anggaran dan pengelolaan kegiatan desa. Padahal tata kelola semacam ini bukan sesuatu yang diwariskan oleh jenis pemerintahan di masa lampau, sebelum terjadinya reformasi birokrasi di Indonesia dekade awal abad ke-21. Bagaimana mengubah pola pikir aparat pemerintahan bahwa tugas mereka adalah melayani dan bukan menjadi raja-raja kecil yang harus dilayani, bukan soal mudah. Berbagai persoalan tata kelola dan relasi warga dan pemerintah dibahas oleh Akmad Bustanul Arif dalam pembahasannya “Dari Festival Menuju Transformasi Sosial”. Sebagai salah satu contoh, perjuangan Desa Gondowangi, seperti dituturkan oleh Danis Setia Budi Nugroho, Kepala Desa dan sekaligus anggota Jaringan Kampung Nusantara, menunjukkan jerih payah dan

proses mengubah mentalitas feodal menjadi budaya transparansi dalam mengelola desa (Ari Anggari Harapan, hlm. 177).

## **Keriaan Gotong Royong**

Benang merah dari berbagai inovasi sosial yang digagas di berbagai kampung dalam buku ini adalah upaya membangun kembali budaya gotong royong yang telah menyusut dari kehidupan sosial desa. Istilah gotong royong dipakai oleh semua pegiat dan penulis dalam buku ini untuk membicarakan berbagai pengalaman mendampingi kampung dan desa. Dalam tulisannya, untuk menyiapkan acara ulang tahun pertama Jaringan Kampung Nusantara di *website*-nya Bachtiar Djanan M. mengutip kata-kata Ir. Soekarno:

Pancasila, jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan “gotong royong”. Alangkah hebatnya! Negara Gotong Royong!

(Ir. Soekarno, Pidato 1 Juni 1945 pada sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai atau BPUPKI)

Konteks pemakaian kata gotong royong dalam era perjuangan kemerdekaan Indonesia tentu berbeda dengan konteks gerakan pemberdayaan kampung di dekade ke-2 abad ke-21. Demikian pula wacana gotong royong yang menjadi slogan Ore Baru selama 32 tahun, mempunyai muatan yang lain. Bowen (1986) membahas bagaimana Soekarno memakai kata ini untuk memosisikan Indonesia bersebrangan dengan “individualisme persaingan bebas” negara-negara Barat. Kabinet gotong royong ala Soekarno juga dipakai untuk menyatukan kelompok yang berbeda ideologi dalam bingkai nasakom. Dalam era Orde Baru, istilah gotong royong dipakai untuk “memobilisasi tenaga kerja pedesaan” guna melaksanakan berbagai pembangunan desa dengan kebijakan seragam dari atas (Bowen, 1986: 159).

Bagaimana konsep gotong royong dimaknai dalam gerakan kampung yang dibicarakan dalam berbagai inovasi sosial di buku ini? Gotong royong yang dipraktikkan di kampung-kampung, dari pengasuhan gotong royong Ledokombo, Jember, sampai gotong royong antaretnis di Festival Buen, Kalimantan Timur, memiliki beberapa kesamaan. Pertama, sifatnya sukarela, informal dan merupakan inisiatif dari bawah, berdasarkan kesepakatan bersama. Kedua dan yang paling penting, adalah semangat keriaan yang mewarnainya. Walaupun tradisi saling menolong dalam kedukaan, sudah menjadi kebiasaan umum di Indonesia, baik di kota maupun di desa, tetapi yang menonjol dalam geliat desa dan kampung di buku ini adalah keriaan dalam suasana pesta dan perhelatan (baca: festival dan dalam

berbagai kegiatan untuk menghidupkan kembali permainan anak, ritual pertanian, mengkreasikan kesenian baru, mengolah resep lama, merawat situs dan sumber daya alam desa. Bahkan, berbagai program yang diadakan untuk membangun ruang bersama, seperti *jagong* budaya atau *ngobar* (*ngopi* bareng), *sonjo* atau dolan kampung, *sholawatan*, *ngaji cangkrukan*, atau forum komunikasi diwarnai oleh suasana informal dan keriaan kebersamaan (yang sudah pasti tak dapat dilakukan tanpa kopi, rokok, dan kudapan). Munculnya jenis kelompok sosial baru yang disebut “Suku Dalu” di Kampung Glintang (yakni mereka yang berkumpul dan bekerja pada malam hari) juga menyiratkan suasana serius tapi main-main (dan sebaliknya) dalam membangun ruang bersama di kampung.

Pendekatan informal yang rileks tapi serius dan diwarnai keriaan membuat upaya transformasi sosial di desa dan kampung lebih berterima, karena menciptakan kedekatan dan keakraban sosial. Pendekatan ini, dengan dinamika berbeda-beda, di tiap lokasi dan wilayah budaya, menjadi alternatif bagi relasi transaksional dan individualis yang sudah sempat merasuki kehidupan kampung dan desa.

## **Pesan dari Kampung**

Gerakan pemberdayaan budaya kampung pada dekade ke-2 abad ke-21 mendapat corong karena adanya persilangan dengan kebijakan membangun infrastruktur pedesaan dari pemerintahan Jokowi sejak 2015. Pada saat yang sama, gerakan yang informal dan cair ini bertabrakan dengan paradigma pariwisata yang melihat desa dan kampung sebagai objek dan komoditi, serta pendekatan dari atas yang cenderung menyeragamkan dan kurang memerhatikan konteks wilayah dan budaya serta proses pemetaan yang diperlukan. Selain itu, pemberdayaan budaya dari bawah menghadapi berbagai persoalan tata kelola pemerintahan desa.

Di tataran lain, era globalisasi membuat berbagai persoalan yang mengaitkan satu lokasi dengan lokasi lain masuk ke pelosok desa. Ketika kota di mancanegara dan dalam negeri semakin mendekat dan melebar melalui teknologi digital, sosial media dan pencaplokan lahan, desa terimbas sumber daya alam, manusia, dan budayanya oleh pembangunan, migrasi, urbanisasi, dan masuknya paham-paham radikal di desa yang menggerogoti tradisi desa yang bersifat terbuka dan sinkretis, serta konsumsi dan gaya hidup urban, kecanduan gawai dan narkoba.

Jika modernitas kolonial meletakkan desa dan kampung sebagai sumber masalah, kekumuhan dan penyakit, gerakan budaya kampung yang dibahas di buku ini menunjukkan perspektif yang berkebalikan. Desa dan kampung memberikan solusi terhadap penyakit orang kota. Mengutip kata-kata Maryaeni:

Di kota tak lagi damai, tak tampak rukun, masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri. Kejenuhan sudah di ubun-ubun, kepenatan memuncak, pulanglah mereka ke kampung halaman atau ke desanya sekadar melepas penat dan jenuh. ... Daerah dengan udara sejuk lainnya yang menjadi tujuan melepas lelah. Karena alasan ini jugalah, masyarakat desa berbenah menyiapkan segala sesuatu yang menyejukkan, menghibur, dan mendidik. (hlm. 111)

Apakah ini sebuah romantisasi desa, sebuah nostalgia akan hal-hal yang tak bisa ditemui lagi di kota? Tentunya kisah kampung dalam buku ini bukan ditujukan untuk mengagungkan desa di atas kota.

Gerakan memberdayakan budaya kampung melalui jejaring para penggerak, seperti yang dipaparkan dalam buku ini, tidak luput dari berbagai masalah, dan merupakan proses yang belum selesai. Para pegiat, yang menamakan diri pembakti, masih bersoal dengan kepentingan diri, ego, dan kematangan. Bab “Etika Pembakti” menjadi suara kritik diri yang mengingatkan agar para pembakti tidak “memakai kampung sebagai panggung untuk pentas”. Selain itu, jejaring pegiat kampung yang disebut Jaringan Kampung Nusantara, adalah sebuah kelompok *WhatsApp* yang bersifat informal, yang tidak terstruktur dalam aturan organisasi. Kecairan dan informalitas memberikan kelenturan untuk bergerak dan sekaligus ketidakjelasan, karena logo dan nama yang terbangun telah membangun harapan masyarakat atas sebuah entitas yang dapat diandalkan. Tantangan jejaring budaya kampung yang bersifat informal seperti ini adalah kemampuan untuk terus mentransformasi gerakan dan bersinergi dengan berbagai jejaring budaya kampung lainnya yang belum terpetakan dalam buku ini, demi tujuan yang sama. Untuk itu, diperlukan evaluasi diri yang ketat atas pencapaian dan keterbatasan, serta pembuatan peta jalan bersama.

Buku ini adalah upaya untuk saling berbagi pengetahuan dalam mengarifi pengalaman membangun jejaring budaya kampung. Buku ini dibagi atas dua bagian. Pertama, “Teori Kampung”, memberikan konteks kesejarahan dan pemikiran yang mengabstraksikan pengalaman para pembakti kampung dan mengkristalkannya menjadi konsep, pola, metode dan prinsip yang berlaku umum. Bagian kedua berisi kisah-kisah kampung, yakni pengalaman para pembakti di berbagai kampung dengan konteks dan permasalahan beragam. Para pembakti membagikan strategi menghadapi kepungan kota, melakukan pengasuhan pada anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya bermigrasi kerja, mengelola lingkungan, menghidupi warga melalui budaya lokal, mengembalikan tradisi gotong royong, dan membangun transparansi tata pamong. Buku ini berujung pada pesan kampung, yang disarikan dari pengetahuan dan kearifan yang dibangun bersama. Ujung buku ini adalah awal

dari sebuah proses yang diharapkan berkelanjutan. Begitu banyak kerja pembakti kampung yang belum sempat direfleksikan. Perlu diingat bahwa Jaringan Kampung Nusantara hanyalah satu simpul dari begitu banyak jaringan, kelompok, dan komunitas yang bergerak di desa dan kampung. Simpul-simpul tersebut perlu saling dihubungkan agar pemberdayaan budaya kampung dapat menjadi suatu gerakan. Buku ini adalah upaya refleksi kritis terhadap pekerjaan rumah yang masih belum terselesaikan, agar membangun Indonesia dan dunia dari kampung bukan sekadar slogan, tapi langkah bersama.

# TEORI KAMPUNG



# 1

## Kampung Berbasis Eko-Sosio-Kultura

*M. Dwi Cahyono*

### **Salam dari Desa**

Ciptaan: Leo Kristi

Kalau ke kota esok pagi sampaikan salam rinduku  
Katakan padanya padi-padi telah kembang  
Ani-ani seluas padang roda giling berputar-putar  
Siang malam tapi bukan kami punya

Kalau ke kota esok pagi sampaikan salam rinduku  
Katakan padanya tebu-tebu telah kembang  
Putih-putih seluas padang  
Roda lori berputar-putar siang malam  
Tapi bukan kami punya

Anak-anak kini telah pandai menyanyikan gema merdeka  
Nyanyi-nyanyi bersama-sama di tanah-tanah gunung  
Anak-anak kini telah pandai menyanyikan gema merdeka  
Nyanyi-nyanyi bersama-sama tapi bukan kami punya

Tanah pusaka tanah yang kaya  
Tumpah darahku di sana ku berdiri  
Di sana ku mengabdikan dan mati dalam cinta yang suci

Kalau ke kota esok pagi sampaikan salam rinduku  
Katakan padanya nasi tumbuk telah masak

Kan kutunggu sepanjang hari  
Kita makan bersama-sama berbincang-bincang  
Di gubuk sudut dari desa

## Akar dan Sejarah Kampung

Syair lagu “Salam dari Desa” yang diciptakan dan dinyanyikan Leo Kristi pada akhir tahun 1970-an tersebut mengilustrasikan pandangan umum bahwa sebutan *desa* diasosiasikan dengan daerah pedesaan (*rural*) yang berada di luar, bahkan jauh dari perkotaan (*urban*). Ekologi pedesaan acap digambarkan sebagai daerah daratan (*terrestrial*) di pedalaman suatu pulau yang pada syair lagu itu disebut dengan kalimat “di tanah-tanah gunung”. Sesungguhnya, terdapat pula pedesaan di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil. Tipe ekologis yang disebut di awal berupa lingkungan pedesaan-pegunungan dengan pencaharian pokok agraris berupa padi sawah dan tebu.



*Litografi sebuah kampung di Jawa, tahun 1883-1889.*  
Foto koleksi Tropen, Museum Een Kampung op Java.

Paling tidak, ada tiga eksponen pendapat mengenai posisi kampung di dalam desa. Pertama, desa dibedakan dengan kampung menurut lingkungan penggunaannya. Sebutan “desa” pada pendapat ini dipakai untuk lingkungan di pedesaan (*rural*). Adapun sebutan “kampung” untuk lingkungan di perkotaan (*urban*) yang berada di dalam kelurahan. Namun demikian, definisi mengenai kampung tersebut tak sepenuhnya benar. Oleh karenanya, ada pendapat kedua yang menyatakan bahwa sebutan “kampung” merujuk pada area hunian yang lebih kecil dan berada di dalam suatu desa atau kelurahan, terlepas di kawasan *rural* ataukah *urban*. Kampung pada anggapan ini diposisikan sebagai bagian dari suatu desa atau kelurahan.

Sementara itu, eksponen pendapat ketiga mengemukakan bahwa sebuah desa atau kelurahan bisa terdiri atas dua atau lebih dusun (varian sebutannya adalah dukuh). Lebih rinci lagi, sebuah dusun/dukuh bisa terdiri atas dua atau lebih kampung. Misalnya, salah satu dusun di wilayah Desa Gunungsari, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, adalah Dusun Pager Gunung. Dalam Dusun Pager Gunung terdapat sejumlah dusun, satu di antaranya adalah Dusun Lemah Abang. Serupa itu, Kampung Cempluk adalah salah satu kampung di bawah atau di Dusun Sumberejo, Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

Ada kemungkinan sebutan “kampung” diambil dari bahasa Portugis, yaitu *campo* yang berarti tempat perkemahan. Terdapat beberapa sebutan yang mirip dengan “kampung”, seperti *kampung*, *gampong*, *kampung*, dsb. Nama-nama daerah di Kamboja sering disebut *kompong*, yang merupakan sebutan untuk sebuah distrik dan seringkali pula digunakan sebagai nama provinsinya. Dalam bahasa Aceh dikenal sebutan *gampong*, yaitu suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat.

Dalam bahasa Minang disebut dengan *kampung*, yakni suatu wilayah yang didiami oleh orang yang sukunya sejenis dan tidak bercampur dengan orang dari suku-suku lain. *Kampung* adalah bagian dari suatu nagari. Dalam suatu nagari terdapat sejumlah *kampung*. Bila *kampung* dianggap sebagai tempat berkelompoknya satu suku dan syarat bagi suatu nagari adalah sekurang-kurangnya ada empat suku, maka dalam satu nagari terdapat sekurang-kurangnya empat buah *kampung*. Kepala *kampung* disebut *tuo kampung* yang dijabat oleh seorang penghulu suku. Penghulu ini disebut juga *penghulu andiko*. Kampung di Indonesia biasanya diakronimkan dengan *Kp*, sementara di Malaysia disebut *Kg*.



*Gambaran kehidupan Minangkabau di masa lampau, suasana pasar di suatu kampung pada nagari.*

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, kata “kampung” disinonimkan dengan dusun, desa, dan dukuh. Selaras dengan itu, Undang-Undang (UU) Republik Indonesia No.6 Tahun 2004 tentang desa, Pasal 8 ayat (4) menyatakan, “Dalam wilayah Desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa”. Boleh jadi, nama lain dari dusun yang dimaksudkan oleh UU ini adalah apa yang di Jawa dinamai dukuh atau kampung. Jika benar demikian, kampung, dusun, atau dukuh adalah bagian dari desa, wilayahnya lebih kecil dan berada dalam wilayah suatu desa. Hal ini sejalan dengan pengertian yang menyatakan bahwa dusun menunjuk pada bagian wilayah desa, yang merupakan lingkungan pelaksanaan pemerintah desa. Kampung adalah nama alternatif untuk dusun, *dujuh*, dan banjar, yang kurang lebih sama dengan apa yang pada Orde Baru disebut dengan Rukun Kampung (RK). Kampung sebagai sinonim dari dusun digunakan di Jawa, Nusa Tenggara Barat, dan tempat-tempat tertentu.

### **Urgensi Makna Toponimis Desa, Dusun, atau Kampung**

Kampung adalah sebutan terhadap kesatuan sosial yang berada di suatu tempat di dalam desa atau kelurahan, tapi di atas RT (Rukun Tangga). Konon, kampung acap kali disebut dengan RK (Rukun Kampung). Ada yang menganggap RK sama dengan RW (Rukun Warga). Dalam KBBI, dinyatakan bahwa Rukun Kampung adalah Rukun

Warga. Padahal, seharusnya RK berada di atas RW. Jika kampung sama dengan dusun, di mana dalam satu dusun terdapat dua atau lebih RW, maka suatu RK bisa terdiri dari dua atau lebih RW. Sebagaimana halnya RT dan RW, rincian sebutan bagi RK lazim menggunakan angka romawi, seperti RK I, RK II, RK III, dst. Hal ini berlainan dengan penyebutan kampung yang menggunakan nama tertentu, seperti Kampung Lemah Abang dan Kampung Cempluk yang disebutkan dalam contoh kasus pada alinea di atas.

Sudah barang tentu, ada perbedaan makna antara penyebutan kampung dengan angka romawi dengan nama tertentu. *Digid* angka romawi hanya menggambarkan tata urutan, sedangkan di balik nama suatu kampung terkandung informasi mengenai keadaan khas yang bersifat lokal dari kampung bersangkutan, yang boleh jadi kini keadaannya telah jauh berbeda dengan keadaan ketika nama itu digunakan. Kata “sengkaling” dalam sebutan Kampung Sengkaling pada Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, misalnya, menginformasikan tentang jenis ikan tertentu, yaitu *iwak sengkaling* (kini sebuatannya adalah *iwak sengkaring*, konsonan “l” berubah menjadi “r”). Ikan jenis ini konon banyak didapati di suatu telaga, yang setelah telaga itu dijadikan fasilitas taman rekreasi, lambat laun tak lagi terdapat ikan sengkaling (sengkaring) di dalamnya, yang alih-alih masih kedapatan dalam jumlah terbatas di Sungai Brantas yang mengalir di sebelah utaranya. Toponimi “sengkaling” itu sendiri bersasal dari dua kata, yaitu *sang* dan *kaling* (dengan kata kata dasar atau *lingga: kaling*).

Contoh kasus pada nama Kampung Sengkaling tersebut memberikan gambaran bahwa nama dari suatu kampung mengabadikan atau menginformasikan tentang kondisi kampung itu, baik berupa informasi ekologis, historis, sosial, maupun kultural. Toponimi “badut” misalnya, adalah nama pohon atau suatu jenis pohon nangka yang konon banyak tumbuh di sekitar Candi Badut pada Dusun Badut, Desa Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Nama-nama desa, dusun, atau kampung yang menggunakan unsur nama pohon tergambar pula pada Desa Sukun, Desa Blimbing, Waringinpitu, Kebon Kacang, Kebon Kopi, Kebon Nanas, Kebon Duren, Kebon Jeruk, dsb. Pada nama-nama yang disebut terakhir itu bahkan terinformasikan mengenai budi daya tanaman lewat kegiatan pertanian dalam bentuk perkebunan. Terkadang, suatu kebun terletak di tepi hutan, yang semula adalah areal hutan dan kemudian tepiannya dibuka untuk dijadikan areal perkebunan, yang dalam bahasa Jawa Kuna dan Tengahan dinamai *talun*. Apabila kebun atau persawahan itu luas, maka muncul sebutan Kebon Agung (*Kubwan Hageng*), Ketawang Gede, Jawar Ombo, dsb.

Ada pula toponimi desa atau kampung yang mengambil nama unsur fisis-alamiah yang berupa air, tanah, batu, gunung, pulau, permukaan tanah, dsb. Misalnya, nama Banyuwangi, Sumbersari, Kalidawir, Muara Angke, Oro-oro Dowo,

Jurang Kwali, Pager Gunung, Pulogadung, Lok Suruh, Lowok Waru, Balong Bendo, dsb. Nama-nama yang disebut terakhir adalah topografi yang berupa tanah cekung berisi air (*lok, lowok, balong*) yang dipadukan dengan nama tumbuhan tertentu yang banyak tumbuh di sekitarnya, seperti suruh, waru, atau bendo. Boleh jadi, kondisi geografis yang tergambar pada toponimi itu kini telah berubah. Seperti tak didapati lagi pulau di Pulau Gadung. Demikian pula Muara Angke, yang meski menggunakan unsur nama muara –sebagai gambaran mengenai adanya sungai yang bermuara ke laut, kini tidak lagi tepat berada di tepian laut Jawa, tapi berjarak beberapa kilometer dari garis pantai.– Dengan demikian, toponimi tersebut mengabadikan kondisi ekologis lokal dari desa atau kampung di suatu tempat pada suatu masa di masa lampau, yang boleh jadi kini telah jauh berubah. Kata “muara” tak senantiasa merujuk pada bermuaranya sungai ke laut, tapi bisa juga pada bermuaranya anak sungai ke sungai induk, seperti sungai Kedang Kepala ke Sungai Mahakam di daerah Muara Kaman. Kenampakan alam yang demikian seakan menjadi petanda alam (*land mark*) baginya, karenanya dijadikan sebagai unsur bagi penyebutannya.



Poster Festival Kampung Muara Kaman tahun 2016.

*Muara Kaman adalah kampung bersejarah, petanda awal mula sejarah nusantara.*

Selain itu, ada sejumlah toponimi yang sebutannya berhubungan dengan tokoh pada legenda lokal, yaitu seseorang yang konon berjasa dalam membuka hutan (*sing mbabad, sing bedah krawang*). Misalnya, Kampung Karuman pada Kelurahan

Tlogomasa, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, dikaitkan dengan Mbah Aruman, yakni seseorang yang hidup di era Kasutaan Mataram sebagai sang pemula (*sing mbabat*) Kampung Karuman. Serupa itu, Mbah Wastu dilegendakan sebagai *sing babad* daerah Batu. Sebenarnya, tidak selamanya tepat bila tokoh-tokoh itu diartikan sebagai orang yang pertama kali membuka hutan di suatu tempat untuk dijadikan areal permukiman, sebab jauh sebelum keberadaannya, di desa atau kampung tersebut telah terdapat permukiman. Bahkan, sebagai desa kuno, ketika itu telah menyanggah status sebagai desa perdikan (*sima, swatantra*). Misalnya, menurut kitab *Gancaran Pararaton* terdapat tokoh bernama Bango Samparan, salah satu ayah angkat Ken Angrok yang tinggal di Karuman. Bila menilik temuan berupa *watu sima* di Karuman, sangat boleh jadi di masa Singhasari Desa Karuman telah menyanggah status *sima*, sebagai balas jasa Ken Angrok terhadap ayah angkatnya. Sebagai petanda untuk tokoh-tokoh yang berjasa dalam kegiatan *mbabat* atau *mbedah krawang* desa atau kampung, maka dibuat *punden desa* atau *punden dusun/kampung* yang berupa makam atau artefak megalitik untuk jasadnya, atau bisa jadi hanya berupa makam semu atas kehadirannya di tempat itu.



*Arca Siwa dan Batu Sima di halaman sisi barat-laut punden Mbah Aruman, bukti perolehan status "perdikan (sima)" Desa Karuman di era Singhasari.*

Paparan pada beberapa alinea di atas memberi petunjuk bahwa studi toponimi penting artinya untuk mendapatkan gambaran kesejarahan, lingkungan kuno (paleo-ekologi), dan ciri khusus desa, dusun, atau kampung di masa lampau. Oleh karenanya diperlukan ikhtiar "bedah sejarah kampung" guna menarasikan kampung dengan

perspektif historis untuk mamahamkan warga kampung atau warga luar kampung tentang dinamika eko-sosio-kultura kampung lintas masa. Bedah sejarah kampung bisa dilakukan pada acara tersendiri atau bisa juga dibarengkan dengan acara *sonjo kampung*. Sejarah kampung masuk dalam kategori sejarah mikro (*microhistory*), baik mikro areal maupun keluasan aspek kajiannya.



*Bedah sejarah Kampung Karangkates, diselenggarakan bersamaan dengan acara sonjo kampung.*

Lantaran sifatnya yang mikro itu, studi sejarah kampung kurang mendapat perhatian sejarawan, sehingga tak sedikit desa atau kampung yang masih remang-remang kesejarahannya. Padahal, bukan tidak mungkin kampung itu memiliki beragam jenis sumber data masa lalu, baik data artefaktual, tekstual, ekofaktual, maupun oral. Hanya saja, sumber data itu masih belum didayagunakan secara *scientific* untuk merekonstruksikan kesejarahan kampung. Di sisi lain, legenda lokal yang berkenaan dengan sejarah lisan kampung lebih menguat. Warga setempat belum tentu memiliki kemampuan untuk mendayagunakan sumber data yang

spesifik itu secara akedemis, sehingga kemitraan dengan pihak yang membidangi keilmuan itu menjadi penting artinya.

Kaitannya dengan kearifan lingkungan, studi toponimi kampung memberi informasi mengenai kearifan dan kalkulasi ekologis, sebagai ekspresi adaptif manusia terhadap lingkungan di mana ia berhuni. Pilihan lokasi tinggal dekat sumber air (*tuk*), sungai, sekaligus sumber bahan makanan menjadi petunjuk mengenai kalkulasi ekologis dalam pemilihan lokasi tinggal. Oleh karena itu, ada banyak desa atau kampung yang memiliki unsur sebutan *sumber*, *sendang*, *kedung*, *balong*, atau kata lain sejenis, seperti Sumpersari, Sumberejo, Sumbermanjing, Sendangbiru, Sendangharjo, Sendangsono, Kedungwaru, Kedungsingkal, Kedungbanteng, Balongan, Balodowo dsb. Tempat rawan bencana, seperti lereng gunung berapi, tidak senantiasa menjadi “faktor penolak” untuk dihindari, tapi justru menjadi “faktor pemikat” untuk dipilih lantaran kesuburan tanahnya. Oleh karena itu, terdapat desa, dusun, atau kampung yang unsur sebutannya diambil dari nama material dan peristiwa vulkanik, seperti Udanawu, Ngancar, Waturejo, Wedi Ireng, Pasir, dsb.

## **Kesejarahan Kampung dalam Pertumbuhan dan Perkembangan Desa**

Di antara sejumlah kampung yang ada di sebuah desa, terdapat apa yang dinamakan dusun atau Kampung Krajan. Lazimnya, Kampung Krajan menunjuk pada kampung terawal (*kampung mula*) dibanding kampung-kampung lain di desa yang sama. Kini, Kampung Krajan cenderung dijadikan sebagai pusat desa, meski ada pula yang menempatkan pusat desa di luar Kampung Krajan karena pertimbangan kemudahan akses. Bermula dari Kampung Krajan, kemudian dibentuklah kampung-kampung lain pada penjuru mata angin menurut pola *manca lima* (4+1) atau bahkan lebih dari lima kampung atau desa/dusun dalam suatu desa. Bukan tidak mungkin pula, yang semula hanya berupa suatu kampung atau dusun, pada perkembangannya meningkat statusnya menjadi desa. Sebaliknya, yang konon merupakan desa kini menciut menjadi sebuah dusun atau kampung dari suatu desa.

Pada masa Hindu-Buddha, kampung atau dusun diistilahkan dengan *anak wanua/wanwa* dan sejak era pemerintahan Kerajaan Kadiri (abad medio XI, awal abad XIII Masehi) disebut juga dengan *anak thani* yang bersinonim pula dengan *duwan*. Bisa jadi, Kampung Krajan adalah apa yang konon dinamai *dalem thani*, yaitu *anak thani* yang terawal sekaligus yang utama di antara anak-anak *thani* lainnya di sebuah *thani* (*wanua*). Anak *wanua* atau *anak thani* ataupun *duwan* dikepalai oleh seseorang dengan nama jabatan *rama*. Istri dari *rama* dinamai *rena*. Dalam sumber data epigrafis (*prasasri*), *rama* dan *rena* adalah tokoh yang berperan penting dalam

ritus penetapan *sima* (*swatantra*), sebab mereka adalah pemuka masyarakat yang wilayahnya ditetapkan sebagai *sima*.

Masih mengenai ritus penetapan tanah atau Desa Sima, ada kebiasaan dalam momentum perubahan status dari “desa biasa” menjadi “desa istimewa”, beserta hak-hak istimewanya. Ada sejumlah desa tetangga di penjuru mata angin pada lingkaran I, II, hingga III yang diundang hadir sebagai saksi. Desa-desanya tetangga itu dinamai *wanua tpi siring*. Istilah *tpi* (tepi) menunjukkan posisinya yang berada di perbatasan (*parwatanan*) dari desa yang ditetapkan sebagai *sima*, sehingga dinamai juga *desa-desanya parwatanan*. Hal ini menjadi petunjuk bahwa kala itu perihal kerukunan ataupun hubungan ketetangga, baik antardesa bertetangga, ditekan, seperti yang berskala lebih diistilahkan dengan *tonggo teparo* (tetangga kanan-kiri rumah). Terkait dengan desa-desanya tetangga itu, sejak era pemerintahan Kerajaan Kadiri terdapat kesatuan sejumlah desa yang dinamai dengan *wisaya pumpunan*, yang memperlihatkan adanya hubungan koordinatif antarsejumlah desa yang bertetangga.

Gambaran mengenai kerukunan atau hubungan ketetangga itu hadir pula dalam bentuk gotong royong antardesa ataupun antarkampung dalam sejumlah hal. Misalnya, pada kegiatan kerja bakti (*gugur gunung, ngayah*), perhelatan desa/kampung, ketika musibah menimpa desa/kampung, dsb. Tidak jarang peristiwa itu melibatkan dan bahkan berintikan generasi muda (*sinoman*). Terkait itu, hal yang penting untuk disimak adalah di wilayah Kota Batu terdapat tradisi pertukaran generasi muda (*ijol sinoman*) antardesa atau antarkampung secara bergantian ketika berlangsung perhelatan desa seperti *bersih deso, sedekah bumi, ruwat deso*, dsb. Namun demikian, bukan tidak mungkin pada waktu tertentu terjadi ketegangan antarkampung dalam suatu desa. Misalnya, ketika terjadi pemilihan kepala desa. Calon kepala desa (*petinggi, lurah*) yang berasal dari suatu dusun mendapat dukungan dari warga dusunnya dan pada saat bersamaan bersaing dengan calon kepala desa dari kampung lain yang juga mendapat dukungan dari warga kampungnya. Meski terdapat ketegangan, proses pencalonan nyaris tidak disertai dengan bentur fisik antarwarga kampung pendukung calonnya. Ketegangan itu hanya berlangsung sesaat. Setelah berlangsungnya pemilihan kepada desa, ketegangan itu pun berlalu. Bahkan, tidak sedikit desa yang warganya menyikapi momentum pemilihan kepala desa dalam suasana suka cita daripada tegang yang menjurus pada bentur fisik antarpengukung. Dengan suasana demikian, maka kompetisi tidak menjurus kepada rivalitas yang mengalahkannya integritas.

### **Trisaka Karakter Kampung: Eko-Sosio-Kultura**

Sebuah mutiara kata Jawa menyatakan bahwa *deso mowo coro* (desa memiliki caranya). Hal ini memberikan ilustrasi bahwa tata cara yang berlaku di suatu desa

setempat (*local*) dalam sejumlah hal bisa berbeda dengan yang berlaku di desa lain. Oleh sebab itu, pentinglah artinya untuk mempraktikkan apa yang dinyatakan oleh sebuah peribahasa “di mana bumi dipijak di situ langit dijinjing”. Tata cara yang diberlakukan di desa dituangkan dalam aturan atau ketentuan, sebagai hasil kesepakatan warga setempat guna menciptakan tertib sosial (*social order*). Hasil kosensus itu diformulasikan menjadi peraturan tak tertulis (lisan, konvensi), tapi ada pula yang diformulasikan secara tertulis sebagaimana *awig-awig desa* pada masyarakat Bali. Bukan tidak mungkin tata cara berkehidupan demikian diberlakukan dalam skala yang lebih mikro, yakni pada tingkat kampung, sebab pada dasarnya kampung memiliki otonomi untuk membuat tata cara lokal yang bisa sama, tapi boleh juga berbeda dengan kampung-kampung lain pada desa yang sama. Hal itu merupakan petunjuk mengenai khasanah budaya lokal yang berlaku di suatu desa. Terdapat gagasan, aktivitas, ataupun produk budaya lain yang berlaku lokal di suatu desa atau kampung, sehingga terdapat ciri khusus dalam bidang budaya yang menjadi karakter kultural desa atau kampung bersangkutan.

Selain hadir dalam unsur-unsur budaya, karakter desa atau kampung juga hadir dalam unsur-unsur sosialnya. Latar etnik warga desa atau kampung bisa memperlihatkan: (a) masyarakat monososial yang berarti sebagian besar berasal dari etnis yang sama, atau (b) masyarakat multisosial yang berarti warga desa berasal dari beragam etnik. Pencarian pokok dari warga dapat juga memberi karakter pada dirinya, sehingga muncullah sebutan masyarakat agraris, masyarakat bahari, masyarakat *undagi* (perajin), dsb. Dalam hal demikian, ciri khususnya bukan sebatas pada aspek ekonomi, melainkan hadir pula pada aspek-aspek lain seperti organisasi sosial, tata nilai, ritual spesifik, kesenian, dan banyak lagi.

Karakter ini pun perlu diidentifikasi, sehingga dapat diformulasikan model interaksi yang tepat guna dan sesuai dengan karakternya. Agraris tak hanya berurusan dengan hasil dan pengolahan hasil pertanian, tapi juga proses bertani dan tata kehidupan petani. Oleh karena itu, sosio-budaya agraris penting artinya untuk mendapatkan pengetahuan tentang pertanian, seperti bidang sosial ekonomi agraris –bidang yang ironisnya amat kurang diminati mahasiswa di perguruan tinggi—. Hal ini karena pertanian ataupun petani hanya diposisikan setara atau bahkan di bawah “mesin pertanian” dalam kerangka industri pertanian. Pertanian menjadi tidak humanis, sebaliknya menjadi lebih teknologis. Kalaupun ada sebutan “kampung agraris”, jika dilongok, maka isinya adalah orang-orang yang perkerjaan (mata pencahariaannya) sebagai petani di lahan sendiri dengan hasil milik sendiri, bukan hanya menjadi buruh tani di lahan pertanian yang konon menjadi miliknya, seperti pada syair lagunya Leo Kristi di atas “... *tapi bukan kami punya*”.

Sosio-budaya suatu kampung yang berkaraker tidak berada dalam kehampaan ekologis dengan tempat keberadaannya. Manajemen budaya dan rekayasa sosial itu

diformulasikan dari dan untuk mengelola Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Sosial (SDS atau SDM), dan Sumber Daya Budaya (SDB) yang terdapat di kampung. Sumber daya adalah potensi yang terkandung dalam anasir fisis-alamiah yang ada di tempat hunian manusia, yang dieksplorasi, dikonservasi, dan difungsionalisasikan menggunakan manajemen budaya dan rekayasa sosial. Kedua hal terakhir (manajemen budaya dan rekayasa sosial) merupakan upaya, cara (metode, teknik), wahana, media, dan sebagainya untuk mendayagunakan anasir fisis-alamiah agar menjadi sumber daya yang fungsional bagi kebaikan dan kesejahteraan hidup manusia. Manajemen budaya dan rekayasa sosial karenanya dapat juga dinyatakan sebagai operasionalisasi dari adaptasi manusia terhadap lingkungannya.

Paparan pada tiga alinea di atas memberi gambaran bahwa lingkungan (eko), masyarakat (sosio), dan kebudayaan (kultura) –disingkat dan dirangkai menjadi eko-sosio-kultura– adalah tiga pilar (*trisaka*) yang memberi warna lokal bagi (*cleur local*) bagi karakter kampung. Pada satu sisi, tiga pilar tersebut memberi ciri khusus (karakter, jati diri), tapi di sisi lain menjadi unitas (*unity*) bagi sejumlah kampung dalam satu desa, atau bahkan sejumlah desa bertetangga. Oleh karena itu, pemberdayaan (revitalisasi) kampung paling kurang diarahkan pada ketiganya, yang bisa diistilahi dengan pembedayaan eko-sosio-kultura kampung. Salah satu upaya pemberdayaan itu adalah dengan memelihara karakter eko-sosio-kultura kampung.

## **Pemeliharaan Karakter Eko-Sosio-Kultura**

Untuk mengkondisikan dan membuat tegaknya aturan, nilai-nilai, adat kebiasaan, serta karakter sosio-kultura desa atau jenjang di bawahnya, pada sejumlah etnik tradisional dibentuk organisasi sosial informal tingkat lokal berbasiskan adat. Di Bali, terdapat *banjar*, yakni pembagian wilayah administratif yang berada di bawah kelurahan atau desa yang setingkat dengan RW ataupun RK. Sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum, *banjar* mempunyai batas-batas wilayah dan wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga setempat berdasar asal-usul dan adat istiadat setempat. Mulanya masyarakat Bali murni mengandalkan sumber kehidupan dari hasil pertanian, utamanya padi. Ketika itu, fungsi *banjar* sebatas mengurus pengaturan sistem pengairan di antara sawah-sawah penduduk yang menjadi anggota banjar.

Seiring dinamika sosial, fungsi *banjar* berkembang dan meluas hingga mengurus hal administratif seperti pembuatan KTP (bagi penduduk asli), Kipem (bagi pendatang), juga mengurus hal-hal seputar pengaturan upacara-upacara adat. Perkembangan fungsi itu menjadikan dipisahkannya *banjar* menjadi dua jenis berdasar fungsinya: (1) Banjar Dinas, untuk mengurus hal administratif, seperti pembuatan KTP, Kipem, serta program pemerintah berupa Posyandu, PKK, hingga

Pilkada dan Pilpres; (2) Banjar Adat, untuk mengurus kegiatan adat, misalnya upacara perkawinan, kematian, pengadaan aneka pertunjukan seni tradisi yang bersifat ritual. *Banjar* dipimpin oleh seorang kepala lingkungan, dengan sebutan Kelian Banjar. Wilayah *banjar* berada di bawah Kelurahan atau Desa Pekraman. Dalam sebuah *banjar* terdapat balai pertemuan dinamai Balai (Bale) Banjar, tempat untuk berbagai kegiatan, di mana warga *banjar* saling bertemu (*sangkep*) dan membahas masalah lingkungan, aturan *banjar*, upacara keagamaan, pelestarian seni, PKK, Posyandu, dan *sekaa teruna-teruni*, bahkan pemilu.



*Balai Banjar di Bali, tempat beragam kegiatan adat warga banjar.*

Hal serupa didapati pada sosio-budaya Minang yang membentuk Lembaga Adat Nagari. Adapun di *gampong gampong* Aceh terdapat lembaga *Meunasah*. Pada dasarnya, konon setiap kesatuan sosial-budaya memiliki institusinya masing-masing. Namun sayang, kini tak sedikit yang telah tiada. Kalaupun masih ada, tak seluruhnya efektif dalam menjalankan fungsi sosio-kulturalnya. Institusi sosio-budaya ini dibutuhkan untuk pengembangan adat istiadat di masyarakat dalam rangka pemberdayaan, pelestarian ataupun pengembangan adat-kebiasaan masyarakat dalam rangka: (a) mengembakan, (b) melestarikan, (c) memberdayakan, hingga (d) mendayagunakan aset eko-sosio-kulturanya dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan. Sesungguhnya, UU Desa juga mengatur mengenai Lembaga Adat Desa sebagai bagian tersendiri dalam memberikan peran dan fungsinya dalam mengembangkan adat istiadat. Pasal 95 memuat: (1) Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa dapat membentuk Lembaga Adat Desa, (2) Lembaga Adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa.

Pada etnik Jawa, tak semua sub-sub entiknya memiliki lembaga adatnya masing-masing. Subetnik Tengger yang tinggal di lereng dan punggung perbukitan di Gunung Tengger di empat kabupaten, yaitu Malang, Lumajang, Probolinggo, dan Pasuruan terbilang yang beruntung karena hingga kini masih memiliki Lembaga Adat. Ketua adatnya adalah *dukun* yang dibantu oleh Pak Sepuh dan Pak Legen. Sejumlah Desa Tengger berada di kantong Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru (TN BTS), sehingga sikap-perilaku konservatif terhadap lingkungan sekitarnya menjadi keharusan. Nilai-nilai eko-sosio-kultura tradisional terpelihara cukup baik. Kenyataan menunjukkan bahwa beberapa tahun terakhir terdapat sejumlah subetnik Jawa yang tak seberuntung warga Tengger karena nilai sosio-budayanya terkikis, bahkan konstruksi sosio-kultura lamanya telah tercerabut dan tidak tergantikan oleh konstruksi baru yang lebih tepat guna. Terdapat desa-desa Tengger tertentu yang menjadi 1/2 Tengger bahkan tak lagi Tengger. Desa itu tidak mempunyai *dukun* dan tidak lagi melaksanakan dua ritus utama Tengger, yaitu ritus (*yajna*) *kasada* dan *karo*. Pada sub-sub etnik Jawa lainnya, lembaga adat pada tingkat desa atau kampung banyak yang kini telah tiada. Balai di desa yang disebut balai desa yang mulanya adalah fasilitas publik untuk dikontribusikan bagi keperluan sosial-budaya khalayak/ulayat, kini menciut menjadi salah satu gedung dari kompleks kantor desa, yang karenanya fungsi dan peranya lebih dikaitkan dengan urusan kedinasan di tingkat desa.



*Kepala kerbau, binatang korban dalam ritus unan-unan pada masyarakat Tengger.*

Karakter eko-sosio-kultura tidak hadir dengan serta-merta. Butuh waktu panjang bagi suatu desa atau kampung untuk mengakarakan sosoknya. Tidak jarang pula, meski telah melakukan pembentukan diri sekian lama, karakternya

tidak kunjung hadir. Terlebih bagi desa atau kampung baru, baik yang baru ada atau yang dimekarkan dari desa atau kampung yang telah ada. Bagi desa atau kampung yang demikian, dibutuhkan upaya untuk mengidentifikasi dirinya, sehingga sosok khas atau jati dirinya ternarasikan dan dapat dikenali oleh orang atau pihak luar. Karakter tersebut tidak terelakkan bakal dinamis sifatnya, sehingga dari waktu ke waktu terjadi proses *up dating* karakter desa atau kampung. Formulasi karakter itulah yang perlu dipelihara, sehingga tidak terlampaui dinamis, yang dapat menyulitkan warganya untuk menyeleraskan dirinya dengan karakter eko-sosio-kulturanya.

## **Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kampung**

Kota Batu di Provinsi Jawa Timur periode (2017-2022) mempunyai visi daerah yang dituangkan dalam kalimat pendek *Desa Berdaya Kota Berjaya*. Kalimat visioner ini memberikan gambaran bahwa kejayaan daerah (kota) dapat dan tepat dilakukan dengan terlebih dahulu memberdayakan desa-desa di wilayah Kota Batu. Keberdayaan desa tidaklah terjadi dengan sendirinya dan serta-merta, melainkan merupakan buah dari serangkaian upaya yang musti dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberdayaan kampung mesti ditempuh dengan memberdayakan kampung. Sebagai sebuah tahapan dari suatu proses, pemberdayaan kampung adalah tahap yang perlu dilakukan lebih dahulu (lebih awal) sebelum tahap pedayagunaan (pempungsian). Dengan kata lain, tahap (1) pemberdayaan kampung adalah yang pertama dan utama dalam pengelolaan kampung, sebelum kemudian dilanjutkan dengan (2) pendayagunaan kampung, dan bukan yang sebaliknya.

Pemberdayaan kampung terdiri atas beberapa butir kegiatan, yang dimulai dengan: (a) eksplorasi sumber-sumber daya kampung dengan melaksanakan dokumentasi dan inventarisasi –bisa juga dengan redokumentasi dan reinventarisasi— yang hasilnya dituangkan secara literal maupun visual lewat narasi suatu kampung. Cakupan eksplorasi berkenaan dengan aspek: potensi (kekuatan), permasalahan (tantangan), peluang bagi kemajuan maupun kendala untuk dapat memanfaatkan peluang yang ada. Hasil eksplorasi itu menjadi basis data (*data base*) yang penting artinya untuk pemetaan kampung dan yang menjadi referensi penting untuk menetapkan; (b) konsep dan desain bagi pemberdayaan kampung. Berdasarkan konsep-desain itu, aktivitas diteruskan dengan (c) operasionalisasi dengan memformulasikan strategi dan menyusun program-program strategis. Tahap selanjutnya adalah kegiatan praktis dalam pemberdayaan kampung, yang acap diistilahkan dengan (d) pembinaan dan pengembangan kampung.

Sebagaimana dikemukakan di akhir alinea dari subbab ini, pendayagunaan kampung merupakan tahap lanjutan dari pemberdayaan kampung, istilah lainnya

adalah fungsionalisasi kampung. Fungsi yang diharapkan dapat dicapai adalah tujuan pemberdayaan kampung. Sebagai suatu tujuan, bolehlah tujuan dicanangkan lebih dulu, baik untuk memberi arah maupun spirit bagi pemberdayaan kampung. Namun demikian, bukan berarti pendayagunaan lebih dikedepankan dari pemberdayaan, tapi sebaliknya. Pendayagunaan merupakan saat “petik buah” dan “pemanfaatan buah” atau dampak logis dari upaya menjadikan suatu kampung sebagai kampung yang berdaya. Kampung wisata sebagai suatu tujuan, misalnya, adalah dampak atau buah dari kampung yang berdaya. Wisatawan akan datang dengan sendirinya ke kampung yang telah diberdayakan, karena tergambar jelas buah apa yang dapat dipetik dari kampung berdaya yang dikunjunginya.

Demikian tulisan ringkas dan bersahaja perihal pemberdayaan dan pendayagunaan kampung ini. Sesuai dengan unsur-unsur sebutan dari nama Jaringan Kampung Nusantara, di mana kata kampung ditempatkan pada posisi lebih awal daripada kata nusantara, hal itu memberi gambaran bahwa pemberdayaan dilakukan mulai dari lingkup mikro (kampung) menuju ke lingkup makro (nusantara), di mana kejejaringan antarkampung merupakan kata kunci bagi penguatan kampung, laksana benang rajut yang mempertalikan kampung-kampung di penjuru nusantara. Semoga memberi kemanfaatan, paling tidak bagi para pembakti kampung di seantero Indonesia.

## 2

# Jaringan Kampung Nusantara

*Redy Eko Prastyo*

Kampung Nusantara adalah sebuah ruang tinggal masyarakat setingkat dusun dengan tatanan sosial yang masih memegang kaidah kearifan lokal berdasarkan pada perilaku budaya setempat. Hal yang paling mendasar adalah lelaku dari gotong royong. Kampung, dalam hal ini, merupakan tempat hidup yang sangat strategis dalam tatanan bangsa Indonesia. Karakter Kampung Nusantara terletak pada sistem masyarakatnya yang saling terhubung, baik oleh hubungan darah maupun kedekatan batin antartetangga.

### **Kampung Nusantara sebagai Hulu Peradaban**

Mengapa Kampung Nusantara dikatakan sebagai hulu dari peradaban bangsa ini? Karena, pada dasarnya masyarakat di Kampung Nusantara mempunyai DNA yang sudah mapan. Hal ini diperlihatkan melalui perilaku masyarakat di kampung yang sudah mampu bersikap saling mengapresiasi, sehingga kegiatannya sarat dengan kegiatan budaya, salah satunya kegiatan berkesenian. Masyarakat kampung di seluruh Nusantara pada umumnya sangat memegang teguh kaidah kearifan lokal yang berhubungan dengan alam sekitarnya, karena alam dipandang sebagai ibu dari seluruh kehidupan. Dari alam inilah masyarakat Indonesia mengembangkan DNA yang mapan.

Dengan demikian, adanya apresiasi yang tinggi terhadap alam dan manusianya, dapat dikatakan bahwa DNA masyarakat kampung Indonesia bukan lagi termasuk ke dalam kategori masyarakat yang masih berusaha untuk bertahan hidup (*survival*). Cara membangun ruang apresiasi ini di antaranya adalah dengan beragam pesta atau perayaan berupa kegiatan kolektif masyarakat kampung untuk mengucap syukur atas berkah yang dimilikinya, atas potensi alamnya. Hal ini menjelaskan mengapa karakter doa masyarakat kampung di Nusantara selalu merupakan ungkapan dari

rasa syukur kepada Tuhan Sang Pencipta yang dinyatakan melalui berbagai ritual atau upacara yang bersifat spiritual.

## **Latar Belakang Munculnya Gagasan**

Jaringan Kampung Nusantara berawal dari perbincangan di grup *WhatsApp* Indonesia Heritage yang di antaranya beranggotakan Bachtiar Djanan M. (aktivis sosial masyarakat), Renee Sariwulan (Pemerhati Tari), Yosoft Muntaha (videografer), Nyonyo Esha (dokumenter), Tony Masdiono (komikus), dan Redy Eko Prastyo (musisi). Pada obrolan di grup *WhatsApp* tersebut, muncul sebuah ide untuk membuat jejaring festival yang berbasis kampung. Gagasan awal tentang festival kampung berangkat dari keinginan saya untuk mengembangkan kesenian masyarakat di kampung tempat saya tinggal, yaitu di Kampung Cempluk di Desa Kalisongo Sumberejo Dau, Kabupaten Malang. Gagasan ini sudah dilaksanakan dalam bentuk Festival Kampung Cempluk yang pertama kali diadakan pada tahun 2009. Keberhasilan dari Festival Kampung Cempluk ini mendorong saya dan teman-teman di grup Indonesia Heritage untuk lebih meluaskan jangkauan dan menularkan gerakan festival kampung ini ke kampung-kampung lain di seluruh Nusantara, dengan pemikiran festival kampung dapat dijadikan sebagai hari raya kebudayaan kampung di seluruh wilayah Nusantara.

Keinginan ini ternyata mendapat sambutan positif dari atasan tempat saya bekerja, yaitu Universitas Brawijaya TV atau UBTV. Ketika mendengar gagasan untuk membangun jaringan kampung, Direktur UBTV, Dr. Riyanto, M.Hum., yang juga seorang pemerhati seni dan budaya memberikan dukungan penuh serta banyak masukan tentang tahapan-tahapan yang harus saya buat untuk menginisiasi pengembangan jaringan Kampung Nusantara ini. Sayapun semakin bersemangat dan optimis dengan adanya dukungan moril dan masukan-masukan yang sangat dibutuhkan.

Penyelenggaraan festival kampung sebagai sebuah upaya untuk membangkitkan gairah dan potensi kampung direspons oleh salah seorang rekan dari Indonesia Heritage, yaitu Bachtiar Djanan M. dengan membuat festival kampung di luar Malang, yaitu di Kampung Temenggungan Banyuwangi. Bachtiar Djanan M. bekerja bersama Tim HIDORA (Hiduplah Indonesia Raya), sebuah lembaga yang misi utamanya adalah memberikan pendampingan berbasis budaya, seni, dan ekonomi kepada masyarakat. Wilayah yang saat itu menjadi fokus sasaran pembaktian mereka adalah kampung-kampung yang berlokasi di Kabupaten Banyuwangi.

Penyelenggaraan festival kampung di daerah Banyuwangi ini semakin memperkuat keyakinan bahwa kegiatan semacam ini merupakan kegiatan yang tepat sehingga harus terus diupayakan agar dapat terus berkembang dan berkelanjutan.

Diskusi di grup *WhatsApp* Indonesia Heritage pun semakin intensif dan bergairah. Bahasannya meliputi bagaimana pola dan perkembangan yang sudah terjadi ini dapat direspons melalui sinergi antarpenggiat seni budaya.

Akhirnya, pada tanggal 16 Januari 2016 dideklarasikanlah jaringan antarkampung ini dengan nama Japung Nusantara (Jaringan Kampung Nusantara). Deklarasi dilakukan di Balai Desa Temenggungan oleh perwakilan penggiat seni budaya dari beberapa daerah. Japung Nusantara bukan sebuah organisasi, tapi lebih merupakan sebuah forum komunikasi antarpersonal yang secara aktif dan produktif berkreasi di kampungnya atau di kampung yang lain di wilayah nusantara.

Dari hasil diskusi dan pertukaran gagasan, muncul beberapa pemikiran tentang pola dan prinsip kegiatannya, program personal para pembakti (istilah kami untuk penggiat kampung). Selain itu, dibuat juga semacam indikator yang dapat menunjukkan bentuk sinergi antarkampung yang ideal.

Dua indikator dalam membangun pengetahuan jaringan ini adalah:

## **1. Sumber daya manusia**

- a. terbentuknya Jaringan Festival Kampung Nusantara yang mampu mendorong partisipasi masyarakat secara konsisten/stabil;
- b. terbentuknya kemitraan antar-*stakeholder*/antarkampung di Nusantara; dan
- c. peran optimal pemangku kepentingan dalam mengembangkan pengetahuan secara mandiri berdasarkan kebutuhan dan realitas lokal.

## **2. Lingkungan binaan**

- a. adanya lembaga/komunitas yang mampu menaungi pelaksanaan pelestarian lingkungan dan kegiatan kebudayaan yang berbasis akar rumput dengan melibatkan semua *stakeholder* (*quadra helix*); memfasilitasi pembangunan sarana, prasarana, dan SDM; mengawal proses pelestarian alam dan ruang kreatif berbasis seni budaya; serta membangun kerja sama antardaerah, kota/kabupaten, serta antarpelaku produk kreatif dari hulu sampai hilir; dan
- b. terselenggaranya berbagai *event*/festival di ruang publik yang berkontribusi bagi masyarakat sekitar.

Berdasarkan indikator di atas, Japung menjabarkan tentang aktivitas reguler berupa program yang bersifat fleksibel, menyesuaikan ruang serta kapabilitas masyarakat kampungnya. Program tersebut bertujuan untuk:

- mendorong partisipasi aktif warga dalam proses pembangunan melalui pembentukan dan pemberdayaan komunitas yang berbasis budaya akar rumput;

- memetakan potensi dan permasalahan budaya kampung nusantara;
- memetakan potensi pembakti kampung dan permasalahan budaya kampung di sekitar mereka;
- menyosialisasikan dan mendiseminasikan informasi mengenai lokalitas budaya kampung di nusantara;
- menyusun direktori kearifan lokal yang bersandar pada nilai *welas asih*;
- membuat penelitian dan pengarsipan sumber sejarah sebagai basis produksi pengetahuan dan budaya lokal yang terintegrasi dengan teknologi informasi; dan
- merumuskan strategi kebudayaan sebagai rujukan bagi pemerintah daerah/ lembaga/institusi pendidikan/militer.

Berdasarkan tujuan di atas, saya dibantu oleh rekan-rekan dari TIM IT dari Kemuning Banyuwangi membuat grup *WhatsApp* serta *website japungnusantara.org*. Mereka menghibahkan *space server*-nya untuk portal ini dan saya berperan sebagai pengelola teknologi informasi berbasis media sosial tersebut.

Anggota grup WA yang berasal dari berbagai disiplin ilmu tersebut menyepakati untuk tidak membahas persoalan politik praktis dan hal-hal yang berkaitan dengan isu SARA. Pokok bahasan di dalam grup dibatasi pada kegiatan di kampung yang dilakukan oleh penggiat kampung. Profesi anggota grup mencakup:

- |                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| • Ketua RW                          | • Geolog                 |
| • Kepala Desa                       | • Dosen                  |
| • Aktivis                           | • Pengurus Karang Taruna |
| • Penggiat budaya                   | • Aparatur Negara        |
| • Seniman (musisi, penari, pelukis) | • Petani                 |
| • Sejarawan                         | • Jurnalis               |

Selain melaksanakan kegiatan budaya di kampung, para pembakti juga membuat artikel tentang permasalahan budaya, sosial, ekonomi, teknologi, serta upaya pemberdayaan masyarakat kampung.

## **Kendala dan Tantangan**

Kendala yang sering ditemukan di lapangan adalah sebagai berikut:

- pemanfaatan kepentingan, baik oleh individu maupun kelompok;
- daya tarik untuk terlibat dalam politik praktis;
- ketergantungan pada bantuan pemerintah;
- kecemburuan sosial serta ketidakmatangan pribadi;

- rasa tidak percaya diri di antara pemuda untuk mengeksplorasi potensi kampung karena hambatan persoalan psikologis akibat stigma negatif budaya kampung sebagai budaya yang kampungan;
- ketergantungan pada ketersediaan dana untuk melaksanakan kegiatan;
- kurang kepercayaan dari kaum tua atau sesepuh kepada pemuda untuk berkreasi sehingga menghambat inovasi kreatif pemuda;
- perubahan sifat warga kampung menjadi individualis karena dipengaruhi perkembangan zaman dan media komunikasi yang berbasis teknologi; dan
- budaya konsumtif yang mematikan produktifitas kampung.

### **Metode *Sonjo Kampung***

Pola ini sangat efektif dalam mendiseminasi gagasan melalui tukar pikiran di antara para pembakti kampung. Kegiatan ini merupakan gagasan dari para pembakti di Malang, di antaranya Priyo Sidhi, M. Dwi Cahyono, Kristanto Tatok, Restoe, saya, dan Bambang Irianto. M. Dwi Cahyono secara konsisten selalu membuatkan narasi tentang sejarah kampung ketika *sonjo kampung*. Narasi sejarah disusun berdasarkan data dari masyarakat atau dari situs yang ada di kampung tersebut.

### **Dampak dari Berjejaring**

- terbangunnya persaudaraan dan persahabatan antarpembakti kampung;
- terbangunnya pengetahuan baru berdasarkan masukan dan informasi dari pembakti kampung lainnya; dan
- terciptanya hubungan yang akrab antarkampung karena setiap pembakti biasanya merupakan pemimpin di ruang sosial masyarakat kampung atau menjadi *public figure* di kampungnya.

## **Sejarah Kampung: Wawancara Dhita Hapsarani dengan Redy Eko Prastyo.**

### ***Apa makna kampung bagi Anda? Kenapa kampung itu penting?***

Kampung bagi saya adalah *epicentrum* atau ruang utama yang menjadi pondasi peradaban bangsa. Kenapa penting? Karena ini merupakan ruang hulu utama; karena kampung merupakan ruang yang strategis untuk pembangunan sumber daya manusia muda Indonesia. Hal lainnya adalah perlunya mengubah stigma kampung, termasuk masyarakatnya, sebagai warga kelas dua. Tugas kita bersama agar kampung tidak mendapat stigma semacam itu. Kampung bagi saya adalah lumbung ide karena ide-ide berlian itu berasal dari kampung.

### ***Kapan muncul kesadaran akan pentingnya kampung bagi bangsa?***

Setelah 3 tahun saya tinggal di Kampung Cempluk. Sebelum tinggal di sini, saya tinggal di tempat kos di Summersari, Kota Malang.

### ***Permasalahan apa saja yang Anda temui di kampung yang membuat Anda tergerak untuk menjadi penggiat kampung?***

Yang pertama, sikap kurang percaya diri warga, terutama anak mudanya, untuk mengolah potensi kampungnya, karena selama ini potensi kampung dinilai kalah dengan kota dan masyarakat kampung selalu dicap sebagai masyarakat kelas nomor 2. Hal ini menyebabkan banyak pemuda kampung hijrah ke luar dari kampungnya karena tidak ingin dianggap sebagai orang *udik*. Kedua, stereotip masyarakat kampung sebagai masyarakat yang cenderung tertutup terhadap sesuatu yang baru atau orang luar yang mereka anggap asing. Sebaliknya, warga kampung juga berpotensi menjadi korban teknologi informasi yang hanya sebatas menjadi pemakai bukan memanfaatkan teknologi sebagai *tools* untuk menambah nilai tawar kampungnya. Hal lain, berkurangnya perilaku gotong royong karena degradasi empati, karena ikut gaya perilaku masyarakat kota yang cenderung individual.

***Sebagai penggiat kampung, sejak kapan Anda mulai memikirkan pentingnya membangun jejaring kampung? Dari mana datangnya gagasan itu?***

Sejak saya berkeyakinan bahwa manusia nusantara itu pada dasarnya mempunyai DNA berjejaring antara satu dengan yang lainnya, karena kuatnya rasa persaudaraan dan *spirit* gotongroyong, maka penting dibuatkan semacam forum untuk mengokoneksikan satu pembakti kampung dengan yang lainnya. Gagasan datang saat saya terngiang-ngiang membaca salah satu iklan produk HP yang *hits* di era 2000-an, Nokia. *Conecting People*, begitu slogan produknya yg selalu terngiang-ngiang di pikiran saya.

***Bagaimana awal mulanya muncul ide membuat Jaringan Kampung Nusantara atau JAPUNG?***

Awalnya sederhana saja. Para pengisi acara di Cempluk itu juga ingin menghidupkan kampung mereka. *Test case*-nya di kampung dampingannya Bachtiar di Temenggungan, Banyuwangi. Sekaligus waktu itu di tahun 2016 kita deklarasikan Japung.

***Siapa teman pembakti kampung pertama?***

Mas Bachtiar, Mbak Renee, Mas Toni, Mas Yosoft, Mas Nyonyo. Awalnya kami membentuk grup WA Indonesia Heritage. Lantas bergulir diskusinya karena intensitas Cempluk ...

***Jadi dapat dikatakan benih kesadaran akan pentingnya kampung dimulai dengan Kampung Cempluk?***

Ya, betul. Di Malang saya menghubungi pembakti-pembakti kampung lain, di antaranya Pak Win dari kampung Claket, Mas Tatok, Mas Dwi dan beberapa seniman serta budayawan Malang. Saya kenal Pak Bambang Glintung awalnya dari Sonjo Kampung yang pertama kali di Kampung Claket.

***Apa yang diharapkan dari pembentukan jejaring kampung ini (pada awal pembentukannya)?***

Tidak ada ekspektasi yang berlebihan. Yang terpenting pembakti kampung-kampung di Nusantara saling terkoneksi, tehubung dan saling *bersilaturahmi*.

***Apakah harapan itu sekarang sudah terpenuhi? Apakah ada yang belum tercapai?***

Harapan masih banyak yang belum terpenuhi dan tidak harus terpenuhi karena ini adalah kerja panjang yang tidak boleh berhenti dan selesai hanya dalam kurun waktu tertentu.

***Jejaring ini dimulai dengan berapa orang penggiat? Upaya apa yang dilakukan untuk mengembangkan jejaring kampung ini?***

Jumlah orang yang tergabung di grup *WhatsApp* sekitar 80-an orang.

***Sekarang jumlah anggotanya berapa? Terdiri atas siapa saja? Bagaimana Anda dapat melibatkan artis-artis dan tokoh-tokoh budaya lainnya?***

Jumlah anggota yang aktif dan terus bergerak, termasuk yang ada di luar grup *WhatsApp* kurang lebih sekitar 200-an, lebih menyebar di beberapa kampung di Indonesia. Anggota terdiri atas multidisiplin profesi, ada dosen, kepala desa, seniman, musisi, geolog, PNS, budayawan, anggota KPK, Guru, TNI, dan ibu-ibu.

***Kampung-kampung yang tergabung di Japung ini hampir semuanya mengadakan festival budaya kampung setiap tahunnya. Kenapa kegiatan festival yang dipilih sebagai kegiatan kampung?***

Kegiatan festival ini sebetulnya sebagai parameter dari salah satu geliat kampung tersebut, karena gerakan Festival Kampung yang saya sebut sebagai hari raya kebudayaan kampung sangat efektif dalam menyatukan energi bersama, saling sinergi membangun kampung.

***Para penggiat biasanya kritis terhadap program pemerintah daerah atau pemerintah kota yang bersifat penyeragaman karena program seperti ini dinilai mematikan potensi dan kekayaan budaya lokal. Akan tetapi, di lain pihak para penggiat kampung juga menggerakkan kegiatan yang serupa di berbagai kampung, yaitu dengan penyelenggaraan festival kampung. Apakah ini bukan sebuah penyeragaman kegiatan budaya kampung?***

Festival kampung ini sekali lagi saya tekankan sebagai cara menggiring paramuda kampung, melalui karang taruna misalnya, untuk membuat sesuatu yang produktif dan kreatif di ruang lingkup kampungnya.

***Kegiatan festival dapat dikatakan sebagai kegiatan musiman karena diadakan setahun sekali. Bagaimana kegiatan yang bersifat musiman ini memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat kampung dalam hal budaya, kehidupan sosial, dan finansial?***

Dampak pada hal budaya, masyarakat kampung menjadi masyarakat yang apresiatif karena dapat menikmati atau diapresiasi oleh lintas kampung, komunitas, serta lembaga masyarakat. Dalam kehidupan sosial, kegiatan ini akan memunculkan kepercayaan diri, kebanggaan terhadap kampungnya. Peningkatan finansial tidak menjadi tujuan, tapi dapat dikatakan sebagai dampak atau bonus dari terciptanya ruang kreatif dan produktif.

***Hasil apa yang ingin didapatkan dari kegiatan ini? Apakah hasil yang diharapkan sudah tercapai? Jika belum, apa yang belum tercapai dan apa kendalanya?***

Hasil yang ingin didapatkan dalam kegiatan ini adalah kampung-kampung semakin bergeliat sesuai dengan kapasitas dan potensinya. Beberapa masih belum tercapai di antaranya belum terbentuknya jejaring sampai di Papua.

***Apakah ada kendala yang ditemui untuk menggiatkan penduduk kampung? Apakah ada resistensi dari sebagian penduduk kampung? Apa alasan mereka? Bagaimana mengatasi resistensi tersebut?***

Kendala jelas ada, terutama dalam mengupayakan kemandirian gerakan kampung di tengah ekspektasi warga yang terbiasa dengan pola bantuan dari pemerintah. Pola bantuan pemerintah berimbas pada sikap warga “kalau tidak ada uang tidak jalan.” Nah, untuk itu kita melakukan pendekatan *person to person*, terutama pada tokoh masyarakat serta orang yang berpengaruh dulu. Agar gerakan kolektif ini bisa tersosialisasi, kita bergerak dulu dengan warga yang sependapat dengan geliat produktif yang berasaskan gotong royong ini walaupun waktu yang dibutuhkan untuk mengatasi resistensi lumayan lama, minimal 5 tahun.

***Ketika festival kampung, penggiat dari kampung lain akan datang dan ikut berpartisipasi bersama kelompok binaannya. Apakah ini yang dimaksudkan dengan sonjo kampung? Dari mana biaya untuk mobilitas semacam ini didapatkan? Siapa yang mendanai?***

Ya. Dengan ikut berpartisipasi, kita bisa ikut bersinergi, baik dengan ikut menyumbangkan potensi seni, pemikiran, juga biaya urunan. Seperti di

Cempluk, warga diajak untuk ikut memberi urunan untuk biaya bensin, transportasi, dan konsumsi untuk *sonjo* antarkampung. Jika *sonjo* bersifat personal, terutama kalau saya mengunjungi kampung lain di luar pulau, kadang saya pergi dengan biaya sendiri atau dibiayai lembaga tempat saya bekerja. Karena saya bekerja di media kampus Universitas Brawijaya, otomatis *sonjo* saya juga bisa menjadi konten liputan untuk disiarkan dalam tayangan berita di UBTV.

***Apakah ada dampak atau ekses negatif yang terjadi di luar perkiraan sebelumnya? Sebutkan dampak dan penyebab kemunculannya.***

Ekses negatifnya, misalnya ketika sebuah gerakan kampung berdampak pada peningkatan ekonomi kampung. Kadang terjadi saling iri satu dengan yang lainnya dan perebutan peran. Pernah juga kegiatan kampung ditumpangki kepentingan politik untuk diklaim sebagai binaan kampung atau pejabat setempat.



Logo Jaringan Kampung Nusantara diciptakan oleh Toni Masdiono, komikus yang saat ini berdomisili di Jogja.

# **Profil<sup>1</sup>**

## **Jaringan Kampung Nusantara**

### Pengantar

Percepatan dan perkembangan pada semua aspek kehidupan berpengaruh besar pada pola pikir, cara pandang, dan pandangan hidup masyarakat. Bisa jadi semua itu berpengaruh pada aktivitas masyarakat dalam keseharian yang sekaligus mengubah peradaban dan kebiasaan hidup.

Saat ini istilah borderless sudah terbukti dalam peri kehidupan manusia di dunia, terutama dalam hubungan antarbangsa yang tanpa batas, semua terbuka dan merasakan kedekatan luar biasa. Keadaan ini yang mengakibatkan terjadinya pergeseran, persentuhan, dan percampuran budaya bangsa-bangsa. Akibatnya, norma dan nilai melebur dan mungkin juga pudar, sehingga sulit ditemukan hakikat hidup bersama dalam satu falsafah dan dalam satu visi dan misi yang sama sehingga egoisme lebih menonjol daripada kebersamaan yang indah.

Nusantara adalah negara yang multikultur, multietnik, dan multibahasa yang rentan terhadap semua bentuk perbedaan, perselisihan, dan pertikaian. Kekuatan dari berbagai sisi telah dimiliki, begitu pula kelemahannya. Namun, norma dan nilai luhur yang selama ini dijunjung tinggi dan diagungkan tampaknya mulai redup, misalnya kerja sama, gotong royong, dan saling membahu di antara sesama. Karena itu, diperlukan wadah untuk mengantisipasi semua kemungkinan terburuk yang akan terjadi di kemudian hari yang berasal dari bawah.

Nama Wadah: Jaringan Kampung Nusantara

### Visi

Ketahanan Budaya dan menumbuhkembangkan serta memberdayakan masyarakat

---

1 Profil ini disusun oleh Prof. Maryaeni sebagai bahan diskusi dalam acara ulang tahun Jaringan Kampung Nusantara di Batu, 23 Januari 2017.

## Misi

1. Ketahanan budaya sebagai benteng nusantara.
2. Menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap potensi diri dan potensi daerahnya.
3. Mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam demi kemandirian masyarakat kampung/desa.
4. Memberdayakan masyarakat secara gotong royong menuju masyarakat yang mandiri.

## Tujuan

1. Mengembalikan lagi kejayaan nusantara
2. Menjaga nilai-nilai luhur tradisi nusantara
3. Aturan Japung
4. Jaringan sosial yang bergerak berlandaskan dan berasaskan Pancasila dan UUD 45.
5. Japung adalah wadah bagi semua lapisan masyarakat, dari berbagai kalangan, dari semua unsur masyarakat, yang peduli terhadap perkembangan sosio-budaya dan seni di nusantara.
6. Japung adalah wadah para pembakti negeri yang berada/bertempat tinggal di kampung/desa kelahirannya untuk ikut serta membangun local wisdom dan historiografi menuju masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai di dalamnya.
7. Japung adalah wahana untuk memikirkan dan merealisasikan aspek pemberdayaan masyarakat kampung/desa menuju kemandirian.
8. Japung merupakan tempat berkumpulnya insan kreatif-inovatif Nusantara dari berbagai bidang.

## Pembakti

1. Pembakti adalah katalisator dan berfungsi sebagai pemicu gerakan budaya nusantara.
2. Pembakti adalah insan/individu/kelompok masyarakat dengan segala sikap dan aktivitasnya menunjukkan kepedulian disertai ikhlas, asah asih asuh terhadap semua aspek kehidupan kampung/desa di nusantara.
3. Pembakti bukanlah individu yang bertindak sebagai donatur kegiatan Japung.

4. Pembakti bukanlah penguasa yang berhak memutuskan segala sesuatu di suatu kampung/desa.
5. Pembakti bukanlah pimpinan yang boleh mengatur semua hal di kampung/desa.
6. Pembakti hanyalah seseorang yang memberi masukan, memberi spirit dan semangat, serta menggugah pola pikir masyarakat dalam rangka pengembangan dan kemajuan kampung/desa.
7. Pembakti Japung adalah seseorang yang concern dan paham terhadap rules Japung. Japung bukan kendaraan dan sekadar tumpangan demi kepentingan pribadi atau golongan.
8. Pembakti tidak berkaitan dengan profesi pribadi sehingga kegiatan pribadi adalah hak setiap orang, ada saat seseorang bergerak sebagai pribadi dan ada saatnya bergerak bersama-sama Japung.

#### Lain-lain

1. Profesionalisme personal dijunjung tinggi.
2. Profesi bisa dilaksanakan secara mandiri dan bisa bersama dengan Japung.
3. Pelibatan Japung dalam satu kegiatan tertentu bisa secara profesional dan bisa juga atas nama Japung, sesuai dengan kesepakatan.
4. Kerjasama dengan pihak luar (pemerintah, BUMN, dan lain-lain) bisa dilaksanakan dengan catatan tidak mengikat secara administratif.
5. Kerjasama butir 4 tetap berpegang pada rules (aturan) Japung.
6. Kerjasama butir 4 bisa melalui siapa saja secara pribadi yang kemudian melibatkan Japung.
7. Perlu disepakati lebih lanjut apakah diperlukan kas Japung yang berasal dari sumbangan gotong royong.

# 3

## Ember Kampung

*Kristanto Budiprabowo*

*“Uang itu berfungsi seperti energi, dia tidak musnah, hanya berubah bentuk. Celakanya, dia juga bisa dengan cepat berpindah ke tempat lain.” (Guyon Kampung)*

Kampung adalah produsen barang dan jasa generik. Segala bahan dasar yang diperlukan untuk proses produksi selanjutnya, pada dasarnya diserap dari kampung. Seorang tetangga yang sehari-hari bekerja di sawah, ia juga adalah seorang kuli bangunan yang andal. Ketika musim panas tiba, saat para petani mengistirahatkan tanah garapannya, ia bersama beberapa kawannya sering mendapatkan kontrak untuk mengerjakan bangunan-bangunan perumahan dan gedung-gedung megah di kota, bahkan pernah di ibu kota. Kebanyakan dari mereka belajar keterampilan pertukangan dengan cara magang langsung. Mereka mulai dengan menjadi kuli, berperan sebagai orang suruhan untuk melayani kebutuhan tukang menjalankan tugasnya. Dari situ mereka belajar langsung dan selanjutnya bisa menjadi seorang tukang. Tidak ada selembaar kertaspun tersia-sia selama proses transfer ilmu ini. Bahkan, tidak ada bayaran ekstra untuk mendalami secara serius keterampilan menjadi tukang bangunan. Persis seperti proses bagaimana seorang anak muda kampung melanjutkan tugas orang tuanya menjadi petani, pekebun, peternak, pedagang, pembuat kerajinan, dan segala bentuk aktivitas produktif di kampung.

### **Peta Ekonomi Kampung**

Selain sifatnya yang generik, produksi barang dan jasa yang berada di kampung berdasarkan pada relasi yang menguatkan komunitas kampung. Perayaan-perayaan kampung adalah bentuk distribusi barang dan jasa yang dipasarkan dengan cara yang diliputi dengan kedalaman makna. Dari perspektif ekonomi, menghadirkan orang untuk bersama menikmati kebersamaan adalah kunci mengapa terjadi pertukaran dan distribusi. Di kampung hal itu ditandai erat oleh adanya relasi antarmanusianya. Seorang tukang bangunan yang mahir akan meningkatkan kariernya menjadi

pemborong kecil rumah kampung, hingga proyek-proyek bangunan kampung, dan kalau beruntung memiliki keterampilan manajemen yang memadai, menjadi bagian dari pemborong proyek besar di bawah para ahli akademis, seperti arsitek, teknik sipil, *planner*, desainer, dan sebagainya. Tetaplah para pelakunya adalah para tukang dan kuli bangunan yang berasal dari kampung yang memiliki keterampilan dengan cara di atas dan sistem rekrutmen berdasarkan relasi yang terbangun dalam perayaan-perayaan kampung.

Selanjutnya, yang bisa digolongkan sebagai aktivitas ekonomi lokal dalam sebuah komunitas kampung adalah keberadaan warung makan, toko kelontong, dan ruang-ruang khas di kampung tempat orang saling berinteraksi semacam balai kampung, pemandian kampung, tempat ibadah dan juga pasar kaget yang muncul dari perayaan-perayaan kampung. Kadang saya tidak habis pikir bagaimana mungkin sebuah warung makan atau toko kelontong kecil yang barang dagangannya sangat terbatas bisa bertahan dan menghidupi sebuah keluarga di kampung. Namun, justru itulah realitas terdekat yang saya lihat dan layak untuk dipikirkan bersama oleh seluruh penghuni kampung. Inilah yang akan mendasari keseluruhan dari pembahasan dalam tulisan ini.

## **Pergulatan Pemberdayaan (Ekonomi) Kampung**

Saya bukan ahli ekonomi dan sama sekali tidak memiliki keterampilan memadai untuk melakukan analisis teoretis-akademis terhadap pola perilaku ekonomi dalam sebuah kelompok masyarakat tertentu. Literasi ekonomi kampung bagi saya adalah sebagai cerminan pola perilaku ekonomi saya pribadi yang hidup dalam sebuah kampung. Oleh karenanya, saya percaya bahwa itu bisa dimulai dari kesediaan tiap orang untuk secara terbuka melihat budaya dan model kegiatan ekonomi yang dijalani dalam hidupnya. Belajar ekonomi dari praktik ekonomi sehari-hari bagi saya lebih menawarkan wawasan untuk merefleksikan lebih dalam akan makna hidup, nilai-nilai, dan kearifan budaya yang secara dinamis terbangun dalam sebuah kampung. Oleh karenanya, pergulatan pemberdayaan ekonomi kampung mensyaratkan terutama terhadap kesediaan tiap orang untuk terbuka bahkan pada kecenderungan-kecenderungan tersembunyinya ketika terlibat dalam praktik ekonomi di kampung.

Sebagai sebuah komunitas, kampung, sebagaimana satu keluarga, saling membangun sistem interaksi yang tidak bisa dipisahkan dari aktivitas ekonomi. Inilah pondasi dasar yang perlu ditemukan dalam sebuah kampung. Karena pada dasarnya, memetakan aktivitas ekonomi adalah melihat karakter orang-orangnya dan budaya yang dibangun dalam komunitasnya. David Korten dalam bukunya yang terkenal berjudul *The Post-Corporate World: Life After Capitalism*, bahkan berusaha meyakinkan banyak orang bahwa masa depan ketahanan ekonomi terletak pada

ketahanan masyarakat dalam komunitas-komunitas kecil yang saling menghidupi. Bersyukurlah bahwa semangat itu masih tersisa di kampung-kampung nusantara. Bahkan, hal ini berkarakter kuat pada budaya ekonomisnya.

Pada tahun 2011, ketika komunitas pemberdayaan kampung mencoba mengaplikasikan alternatif analisis ekonomi pada konteks masyarakat dengan perspektif dan orientasi pada masyarakat (sesuatu yang jarang dijadikan pertimbangan pembelajaran ekonomi), Gordon Cunningham (2011) menerbitkan buket berjudul *Community Economic Literacy and the "Leaky Bucket."* Sebelum menguatnya propaganda agar tiap kelompok masyarakat siap menghadapi pasar global yang diperkuat dengan semakin canggihnya peralatan dan sistem informasi, munculah banyak lembaga yang tetap percaya dan menaruh harapan besar pada sistem kemasyarakatan yang berbasis pada kekuatan lokal yang mereka miliki. Pada intinya, semangat baru ini mengingatkan orang untuk terus-menerus melakukan analisis ekonomi terhadap segala bentuk aktivitas hidupnya, baik dalam keluarga, kelompok, maupun komunitas kampung di mana ia berada, tinggal, dan menghabiskan sebagian besar waktu hidupnya.

Alat sederhana yang ditawarkan Cunningham adalah apa yang biasa dipakai oleh perusahaan-perusahaan melakukan analisis terhadap konsumen mereka yang disebut analisis *Leaky Bucket* (Andrew Ehrenberg, 1988) itu jelas bukanlah sebuah cara ideal untuk memperlihatkan bagaimana sebuah pola perilaku ekonomi komunitas dapat dipetakan dengan tepat. Ada banyak aspek lain yang perlu dipertimbangkan dengan penyesuaian pada situasi lokal. Dinamika ekonomi yang terjadi di kampung atau komunitas manapun, selalu memiliki keunikan yang dipengaruhi oleh beragam penyebab. Selain letak geografisnya, kondisi politik dan budaya terkini yang diterimanya, realitas sosio-kultural masyarakatnya juga memiliki andil yang cukup signifikan untuk dijadikan pertimbangan. Dari kesemuanya itu, orang-orangnyalah, pola perilaku manusianyalah yang pada akhirnya akan menentukan gerakan dan arah ekonomi kampung.

Oleh karenanya, model pendekatan apapun, sejak awal aplikasinya perlu dibicarakan dalam komunitas kampung itu sendiri agar mereka menemukan alat teoritis yang paling tepat bagi analisis kontekstual pola ekonomi lokal mereka sendiri. Selain itu, saat ini dalam perhatian pada budaya ekonomi kampung, salah satu yang paling menjadi perhatian dunia adalah pembagian dengan adil atas segala aset yang ada dan dimiliki oleh masyarakat. Pendek kata, menemukan model pendekatan analisis ekonomi kampung akan menjadi maksimal jika melibatkan semua pihak, orang berpengalaman di bidang ekonomi, ahli ekonomi, para pengambil kebijakan, karisma para pemimpin sipil lokal, dan terutama orang-orang kampung itu sendiri.

Demikianlah, sekali lagi, tulisan ini adalah sebuah usaha untuk memetakan budaya ekonomi kampung di tempat saya tinggal, pengalaman personal berinteraksi

dengan kegiatan ekonomi kampung, dalam menghadapi kecenderungan model-model kehidupan ekonomis yang diiklankan oleh produsen dan atau distributor yang berasal dari luar kampung itu sendiri, yang pada gilirannya tidak hanya menentukan pola perilaku ekonomi saya pribadi, melainkan juga dalam interaksi saya bersama dengan semua orang di kampung saya tinggal.

Ada sebuah asumsi yang berbeda yang digunakan dalam aplikasi analisis dengan alegori Leaky Bucket. Jika pendekatan pemberdayaan kampung/desa konvensional mengasumsikan ketidakberdayaan, kekurangan, dan ketidaktersediaan aset adalah dasar cara pandang awal terhadap sebuah peta ekonomi komunitas, sehingga yang dibutuhkan mendesak adalah pelatihan-pendidikan-peningkatan ketrampilan, suntikan modal dari luar kampung dan atau ketersediaan modal kapital yang cukup, serta pembangunan infrastruktur dari yang paling kasar hingga yang paling halus, maka pendekatan Leaky Bucket mengasumsikan bahwa justru di kampunglah sebenarnya segala hal itu disediakan dan ada dengan berlimpah. Dengan demikian, pendekatan ini juga mematahkan dikotomi mengenai masyarakat kota yang serba berdaya dan terjamin ketersediaan asetnya dan masyarakat desa yang serba membutuhkan intervensi dari masyarakat kota. Diskusi lebih detail mengenai hal ini mungkin tidak pada tempatnya dibahas di sini, sebagai sebuah refleksi awal, saya akan fokus pada “ember kampung” dan bagaimana mengembangkan cara pikir baru yang kontekstual.

## **Toko Bu Wati Desa Ngijo**

Di dekat perumahan tempat kami tinggal, di pinggir jalan besar terdapat sebuah toko kelontong yang dikelola oleh sebuah keluarga kecil, seorang ayah, ibu, dan empat anak perempuan. Saat pertama kali kami belanja di situ, tampak bahwa toko itu tidaklah terkelola dengan kebahagiaan dan kebanggaan. Barang seadanya yang dikirimkan oleh *sales-sales* keliling, beberapa tampak sangat berdebu dan kadaluarsa. Kedua kali kami ke situ, toko tersebut mencoba juga menjual kopi dan tahu lontong seperti sebuah warung. Maka, semakin tampak tekanan pekerjaan membebani seluruh keluarga. Sang ayah jatuh sakit dan sempat dirawat di rumah sakit. Jelas mereka membutuhkan pertolongan, perhatian, dan hiburan untuk menguatkan kembali kebersamaan keluarga dan kebahagiaan keramahan yang sekalipun tetap diekspresikan, tampak semakin memudar.

Sebagaimana toko kelontong, warung makan, dan *home industri* berbasis keluarga lainnya, sebagai layaknya sebuah unit ekonomi dagang—sekalipun pembeli dan pelanggan yang bisa diandalkan adalah yang terpenting—ketahanan unit ekonomi itu sendiri adalah taruhan terbesar. Letak toko yang berada di pinggir jalan memang memberi harapan karena selalu bisa muncul pelanggan dadakan, orang

yang sedang lewat dan membutuhkan sesuatu, sepeda motor atau mobil kadang berhenti berbelanja di situ. Namun, jelas itu bukanlah jaminan ketahanan sebuah unit dagang bisa bertahan dengan baik. Maka, kami memutuskan untuk sebisanya membeli apa saja yang mereka punya dan menjadi kebutuhan kami. Kalaupun jelas barang yang kami butuhkan tidak ada di situ, kami menanyakannya dengan harapan pemilik toko akan berusaha mengadakannya suatu hari nanti. Kami bahkan secara terang-terangan menyampaikan bahwa akan baik jika kami bisa membeli barang-barang yang diproduksi oleh para tetangga lain yang mungkin bisa dititipkan di situ. Tidak lupa kami juga selalu menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan dan syukur bahwa kami sangat tertolong dengan adanya toko kelontong di dekat rumah kami ini.

Warung Bu Wati sedang menghadapi apa yang oleh alegori Leaky Bucket disebut sebagai proses “pengeringan ember” secara perlahan dan pasti yang tanpa sepenuhnya disadari pemiliknya. Pengeringan ember itu tidak hanya karena kurangnya aset yang masuk, *toh* mereka masih bisa berhutang atau mengambil barang ke *sales* yang tiap hari berseliweran dan membayar belakangan. Bukan juga karena kurangnya beraneka pembeli yang selalu mengharap toko pinggir jalan menyediakan apapun kebutuhan yang sedang dicari, yang selalu saja datang dan pergi. Kebocoran itu terjadi terutama adalah karena, apa yang sering dijadikan pepatah bisnis kampung, yaitu tidak terjadinya aktivitas “memutar uang”.

Aset yang masuk dalam toko keluarga itu tidak berada dan berputar dalam ember ekonomi toko cukup lama dan memberi kesempatan pada aset lain untuk berkembang, terutama aset manusianya. Aset yang masuk secara utuh juga merupakan aset yang keluar secara utuh juga. Ember ekonomi toko keluarga itu laksana jalan lewat yang lancar bagi segala macam proses ekonomi dari pihak lain ke pihak lain lagi. Para *sales* pastilah akan terus semakin banyak berdatangan menawarkan segala jenis barang baru. Para tetangga yang memiliki industri rumahan bisa terus menitipkan barang dagangannya. Pembeli, sedikit atau banyak, pastilah tetap ada. Seberapapun yang terjual di toko Bu Wati, bagi mereka –seluruh anggota keluarga itu— tetaplah sebuah proses ekonomi. Namun, jelas bukan proses ekonomi yang sehat bagi toko Bu Wati. Karena, sekalipun uang datang dan pergi, tidak ada proses pertumbuhan aset yang tetap tinggal, apalagi mampu memenuhi ember ekonomi toko. Pendeknya, tidak ada perputaran uang yang bermakna yang menghidupi.

Dalam situasi demikian, dua toko modern dibangun oleh pengembang dari kota berjarak sekitar lima bangunan ruko bersebelahan dengan toko Bu Wati. Ketika saya tanya apakah mereka tidak merasa makin tertekan dengan kehadiran dua toko modern yang pasti akan mengalihkan perhatian para pelanggan mereka, Pak Sugeng, sang Ayah, mengatakan dengan senyum lebar bahwa biarlah persaingan tetap

terjadi dengan sehat. “Kalau perlu saya akan menjual barang yang mereka tidak menjualnya,” uangnya dengan penuh keyakinan dan harapan. Toko modern yang datang mendesak para pengusaha kecil toko kelontong pastilah pengusaha yang bermodal kuat atau setidaknya memiliki akses cukup leluasa kepada sumber-sumber modal seperti bank dan juga akses cukup lancar pada pengambil kebijakan ekonomi wilayah. Hal yang sangat mencolok, berbeda dengan toko Bu Wati yang akhirnya memiliki sebuah *banner* penanda hanya karena ketekunannya menjadi pengecer sebuah produk rokok. Kebesaran hati, ketulusan, dan pengertian pada sesama pengusaha, seperti yang dimiliki oleh keluarga toko Bu Wati pastilah bukan pertimbangan para pebisnis pemilik modal dari kota ketika membuka usahanya di sebuah kampung.

Dalam sebuah sistem ekonomi di mana kerakusan tidak diukur dan dipertanggungjawabkan secara sosial sebagai yang menyakiti nilai kebersamaan sebuah komunitas, yang dimaksud dengan persaingan sehat oleh Pak Sugeng jelas tidaklah adil. Namun, siapa peduli, siapa bisa beraksi atau setidaknya bersaksi. Beberapa komunitas di kota ada yang berusaha menyuarkan situasi ini, mengkampanyekan belanja di toko tetangga, bahkan *hearing* dengan para “penerus lidah rakyat” di kantor legislatif agar “menertibkan” agresi toko modern. *Toh* kebijakan ekonomi dan tekanan sistem pasar bebas tidaklah bisa disentuh, apalagi hanya oleh kondisi hidup nyata sebuah keluarga sederhana yang nasib usaha ekonominya terancam gulung tikar. Maka, semakin kentarah bagaimana ember bocor yang mengering dari toko Bu Wati itu sangatlah memiliki kerentanan. Bahkan, untuk memikirkan menembel kebocoran itupun yang dihadapi adalah sebuah sistem raksasa tak tertandingi.

Toko Bu Wati adalah gambaran umum pada kerentanan sistem ekonomi kampung yang tidak hanya secara alamiah mengalami pengeringan, tapi yang juga secara sistematis terus dibiarkan kering oleh sistem ekonomi global. Kenapa begitu? Karena secara politis, ember ekonomi diandaikan hanya berada di dalam lingkaran sistem kekuasaan, sistem perbankan dan pasar modal yang (kini sudah harus) bersifat global, sekalipun realitanya terdapat orang-orang atau komunitas kecil yang mengendalikan kelangsungan sistem tersebut. Maka, sebagaimana sebuah sistem ekonomi komersial, sudah waktunya komunitas kampung menetapkan sendiri bagaimana mereka menjalankan perputaran aset tetap ada dalam komunitas mereka sendiri.

Dalam asumsi pemberdayaan desa, kasus toko Bu Wati dan kasus-kasus lain senada, akan mendapatkan perlakuan, di antaranya adalah suntikan modal, pelatihan manajemen dan akuntansi, dan kalau perlu melakukan renovasi menyeluruh terhadap kondisi toko agar tampak seperti dan mampu bersaing dengan toko modern. Namun, bagi Pak Sugeng, hutang adalah hutang apapun namanya.

Ia berusaha untuk tidak memiliki hutang pada siapapun juga. Sekalipun memiliki kalkulator, seringkali ia lebih senang berusaha menghitung jumlah harga belanjaan menggunakan secarik kertas. Dengan begitu, jika da tidak memiliki kembalian tepat seperti jumlah belanjaan, ia dengan sukarela memberi kembalian lebih. Ia juga senang jika hitungannya dikoreksi. Tak pernah ia memberi kembalian berupa permen. Baginya uang tetaplah uang dan pemberian adalah kesempatan berbagi berkah. Sebuah sistem akuntansi yang jelas-jelas tidak sesuai dengan standar operasional bisnis modern dan sistem akademik manapun. Maka, jangankan bicara persaingan dengan toko modern, ketika tepat di samping rumahnya ada seorang ibu menyewa teras rumah tetangganya untuk berjualan mi ayam, dengan suka cita ia memundurkan barang dagangan di depan pagarnya. Satu alasannya, agar tidak menghalangi pandang orang yang lewat pada warung mi ayam di sebelahnya.

Jika dalam pemberdayaan sebuah usaha dagang, kompetisi untuk menjadi yang paling kuat diandaikan sebagai langkah tepat untuk memperoleh hasil sebanyak-banyaknya, maka dalam alegori ember mengering karena bocor dalam versi Pak Sugeng, saling memberi peluang adalah cara yang tepat. Uang harus tetap berputar, tapi tidak bagi dirinya sendiri. Perputaran itu melibatkan para tetangga terdekatnya, dan kebaikan itu menular. Semakin hari, semakin banyak tetangga yang berbelanja di toko Bu Wati. Pernah anak perempuannya mencoba berjualan pulsa, tapi gagal karena kendala modal. Pun demikian tetap disyukuri karena dengan begitu para tetangga tidak lagi memesan pulsa, tapi bisa memesan barang lain untuk diantarkan Pak Sugeng *door to door*. Perlahan, sirkulasi barang dagangannya semakin cepat berputar, semakin para tetangga gembira berbelanja di sana dibandingkan harus pergi ke kota kecamatan atau kota madya.

## **Aktivitas Ekonomi sebagai Tindakan Berbagi**

Mungkinkah memanusiaawikan kembali relasi bisnis dan dagang? Atau, pertanyaan yang lebih tepat adalah, mungkinkah mendasari perjumpaan ekonomi antarmanusia itu dengan nilai-nilai keutamaan hidup? Pertanyaan seperti ini jelas terlalu besar untuk mendapatkan jawaban melalui sebuah refleksi. Oleh karenanya, sebagai usaha untuk memperlihatkan bahwa masih tersedia alternatif bagi terselenggaranya relasi ekonomi yang manusiawi, pengalaman toko Bu Wati adalah salah satu cara untuk menemukan alur “uang berputar” dalam sebuah komunitas kampung.

Pertama, yang paling memperlihatkan kekhasan model ekonomi kampung terletak pada kemampuannya secara kreatif menyiasati apa yang terjadi di ruang ekonomi yang lebih besar yang tidak mampu mereka kendalikan. Kebijakan ekonomi nasional dan penetrasi pasar global sekalipun tidak terhindarkan, pada kenyataannya

tidak berbanding lurus dengan pola ekonomi kampung. Jadi, ada ruang untuk melakukan negosiasi kebijakan yang berorientasi pada kearifan ekonomi kampung. Jikalau itupun terasa berat, sulit atau tidak mungkin, harapannya adalah pada semangat kampung itu sendiri. Mereka tetap bisa membangun literasi ekonomi khas kampung yang bisa diperjumpakan dengan beragam pengalaman kearifan ekonomi kampung-kampung lainnya di Nusantara ini. Karena bagaimanapun juga, perdagangan dan bisnis adalah tentang komitmen bersama untuk hidup layak secara adil dan manusiawi.

Kedua, pola relasi antarmanusia selalu unik dalam tiap kampung dan hal itu memengaruhi pola perilaku ekonomisnya. Pola relasi yang menghidupi kampung seringkali tidak terkalahkan oleh semangat sistem kompetisi bisnis modern sekalipun perlu disadari besaran pengaruhnya. Dalam hal inilah ujian terbesar kohesi sosial masyarakat kampung menemukan tantangannya. Mengonsumsi hanya produk dan toko kelontong yang kita tahu orang-orangnya dan tangan-tangan yang mengerjakan terlibat dalam prosesnya, adalah kesadaran ekologis. Kampung menyediakan kearifan ini sekalipun dihimpit sistem pasar global di mana konsumen sengaja dibuat buta dan dimanipulasi relasinya dengan produsen lewat iklan dan semangat budaya konsumeristis. Literasi ekonomi kampung membuka peluang bagi seluruh penghuni kampung untuk kembali pada dasar relasi manusiawi sekalipun hal itu berhubungan dengan produksi barang dan jasa.

Ketiga, gerakan kesadaran literasi kampung dan yang terutama berhubungan dengan ekonomi menjumpai godaan terbesarnya ketika jatuh pada kecenderungan yang berorientasi pada ide kesejahteraan-kesuksesan-keberhasilan yang diproduksi oleh para motivator penyuar pesan korporasi dan bukan ide hidup bermakna dalam sebuah komunitas kampung yang berbudaya. Nenek moyang kita sudah menyadari hal itu. Maka, tepat di sinilah pentingnya disediakan dan diciptakan ritual-ritual kampung yang memberi ruang pada setiap orang untuk terlibat dan berpartisipasi. Sebuah perayaan budaya atau sesuatu yang dijalani bersama seluruh penghuni kampung yang peninggalannya masih banyak dijumpai di kampung-kampung. Kekuatan perayaan budaya kampung terletak pada kemampuannya menyediakan kesempatan bagi siapa saja untuk mengekspresikan dirinya, termasuk juga dalam aspek ekonominya. Hal inilah yang oleh segala bentuk iklan dan mekanisme pasar modern dengan sengaja dikikis untuk dilepaskan dari sistem integritasnya dengan sistem pengelolaan hidup yang lain. Literasi ekonomi kampung dengan demikian juga bersifat kultural, adalah usaha mengembalikan dan mempertahankan sebuah sistem berkommunitas yang bermakna yang membuat hidup bisa dinikmati dengan bahagia.

## Langkah-langkah Kecil yang Mungkin

“Jangan mengkritik pola perilaku ekonomi sebuah komunitas atau organisasi jika Anda belum pernah terlibat di dalamnya”. Begitu seringkali saya dengar ketika saya dengan perasaan heran membandingkan kenyataan dua buah organisasi yang memiliki misi dan visi yang sama dan bahkan juga bentuk kegiatan yang relatif sama. Di desa, di sebuah kampung, organisasi Y memiliki 100 anggota dengan total pembiayaan organisasi 100 juta per tahunnya yang harus ditanggung oleh seluruh anggotanya. Tiap laporan tahunan dibuat, selalu disebutkan bahwa organisasi masih mengalami kekurangan ini-itu di sana-sini agar dapat beroperasi lebih sehat dan baik, dan untuk itu diharapkan para anggota semakin giat memberi kontribusi dukungan dana pada organisasi lebih besar lagi. Di kota, organisasi Y juga dengan kondisi yang relatif sama ternyata memiliki total pembiayaan pada organisasi sebesar 1 miliar satu tahunnya. Anehnya, pada saat laporan tahunan dibuat, keluhannya sama persis dengan organisasi X yang ada di desa. Bagi saya, ini menimbulkan pertanyaan besar yang mengherankan. Biasanya jawaban di ataslah yang saya peroleh.

Jawaban tersebut di atas bagi saya adalah gambaran nyata akan begitu banyaknya pemakluman yang diberikan kepada sebuah pola perilaku ekonomi. Atau, malah bisa dikatakan bahwa sebuah pola perilaku ekonomi itu tidak perlu dipertanggungjawabkan secara publik. Inilah yang saya bayangkan ketika mempertanyakan diri apa yang bisa saya lakukan lebih lanjut, atau apa yang bisa dilakukan oleh sebuah komunitas kampung dalam mengembangkan literasi ekonominya? Beberapa hal yang kami alami dan sangat membantu membangun kesadaran baru tentang ekonomi kampung di antaranya:

- Langkah pertama, mulai dari diri sendiri, terbuka dan jujur tentang pola ekonomi yang kita jalani di tengah masyarakat. Dengan begitu, asumsi-asumsi yang bisa keliru mudah dibicarakan. Akuntabilitas bisa dibangun secara alami ketika tiap orang memperlihatkan keaslian pola perilaku ekonominya di tengah komunitas terdekatnya. Bahkan jika perlu, dalam membuka diri terhadap pola perilaku ekonomi ini, sebuah komunitas akan menemukan model mekanisme akuntabilitas publik bagi budaya relasi ekonomis yang tidak manipulatif dan koruptif.
- Kedua, membiasakan berbicara dan berdiskusi dengan tetangga, para pelaku ekonomi, para pengambil kebijakan terdekat (RT/RW/Lurah) untuk melihat peta ekonomi lokal. Dari situ akan tampak keragaman pola perilaku ekonomi tiap pribadi sebagai bahan-bahan yang penting bagi literasi ekonomi kampung selanjutnya. Membiasakan bertanya tentang asal-muasal sebuah produk, bagaimana sebuah produk dibuat, siapakah orang-orang yang terlibat dalam

produksi-distribusi dan pengecer, adalah bahan diskusi kampung yang menyenangkan serta membuka wawasan baru.

- Ketiga, meninggalkan budaya gengsi atas segala jenis produk yang berasal dari luar kampung yang sebenarnya diproduksi oleh kampung. Jangan sampai pengalaman saya membeli *souvenir* di Belanda berupa kincir angin keramik yang cukup mahal, yang ternyata berasal dan diproduksi oleh tetangga kampung saya, menjadi kisah tolol yang dilazimkan oleh budaya gengsi itu. Tindakan mengapresiasi produk setempat sembari secara kreatif mendorong peningkatan kualitasnya adalah tanggung jawab semua orang penghuni kampung. Saya hanya membayangkan bahwa ketika seluruh penghuni kampung bangga dan mengonsumsi apa yang diproduksi oleh kampungnya, maka perputaran ekonomi yang terjadi menjadi sepenuhnya bermanfaat bagi mereka.
- Keempat, adalah langkah yang melibatkan integrasi dengan kegiatan lain yang bersama-sama melibatkan seluruh penduduk kampung. Katakanlah ini sebagai langkah budaya. Orientasinya adalah mengubah *mindset* dari kesadaran ekonomi kesejahteraan berbasis persaingan kreatif menuju kesadaran ekonomi kebahagiaan yang bermakna berbasis pada kesadaran berbagi. Keindahan, kebahagiaan, rasa lega, hilangnya rasa was-was atas kehidupan ekonomis dalam sebuah kampung tampak jelas dalam bagaimana tiap-tiap anggotanya berinteraksi ekonomi.
- Kelima, upaya berkelanjutan pengenalan literasi di kampung adalah dengan selalu mencari alternatif baru pola relasi ekonomi yang lebih baik dan bermakna. Ada banyak macam metode dan teori yang bisa diperkenalkan, dan itu akan bermanfaat jika dilengkapi dengan pengalaman terbaik sebuah komunitas dalam membangun kesadaran ekonomi kampung secara bersama-sama. Jadi, jika dipertanyakan kapan proyek literasi ekonomi kampung bisa dimulai, maka pertanyaan itu hendaknya ditujukan pada diri kita sendiri dengan penuh kesadaran akan tempat kita tinggal. Gerak pemberdayaan kampung bisa dimulai dari mana saja dan oleh siapa saja, bahkan bisa dilakukan kapanpun dalam kehidupan kita di kampung. Begitulah kiranya yang menyemangati para penggerak kampung yang selalu kreatif mencari alternatif baru yang membahagiakan dan indah bagi kehidupan kampung yang bermakna dan berbudaya.

## Penutup

Di kampung, ember, apalagi yang bocor tentu tidaklah berguna. Maka, analogi ember bocor, juga tentu susah dibayangkan karena tidak terlalu dikenal sebagai wadah untuk menampung sesuatu yang memiliki makna. Keranjang adalah nama

yang lebih tepat. Tapi, di kampung, mana ada keranjang yang tidak bocor? Semua keranjang bahkan dibuat dengan lobang yang tertata rapi merata di sekujur tubuhnya dengan besaran yang relatif sama. Namun, itulah kearifan ekonomi kampung. Aset berharga memang selalu harus ditampung di wadah yang kuat dan indah, tapi wadah itu bukan untuk dijadikan alat untuk menguasai aset yang ada di komunitas. Wadah itu adalah ruang berputarnya aset yang kemudian akan mengalir merata bagi sekelilingnya.

Di sekeliling rumah guru mengaji, pastilah banyak generasi baru yang pandai mengaji. Di sekeliling rumah pecinta tradisi dan seni, pastilah muncul generasi baru yang menghargai seni tradisi. Di sekitar seorang pemilik modal kapital –yang selalu didiskreditkan sebagai orang jahat, rentenir, tukang membungakan uang, dan lain sebagainya oleh bank dan para pelanggannya, yang pada praktiknya melakukan hal yang sama– selalu ada orang-orang yang memiliki peluang memberdayakan diri secara ekonomi dan bahkan sosial. Di sekeliling orang berpendidikan, akan terbangun sebuah komunitas yang kritis dan berwawasan luas. Segala bentuk aktivitas sosial ekonomi semacam ini hanya tersedia di kampung-kampung, dan tidak atau kurang di peradaban kota. Begitulah dulunya –yang sekarang sisa-sisanya masih sedikit terpelihara– kearifan Nusantara ini terbangun, sebelum dihancurkan oleh kebijakan otoritarian di bawah panji-panji sistem modern. Maka, literasi ekonomi kampung dengan menggunakan analogi keranjang bocor, sebagaimana tentu banyak metode lain yang bisa digunakan sebagai alat pemberdayaan masyarakat, adalah alternatif yang menjanjikan. Tidak hanya bagi ketahanan ekonomi kampung, melainkan juga ketahanan sosio-politik-budaya. Mereka akan menjadi terbuka untuk dibicarakan dengan semangat khas kampung, yaitu musyawarah dan gotong royong.

## 4

# ***Sonjo Kampung: Pemberdayaan Kampung Nusantara***

*Kristanto Budiprabowo*

*Sonjo Kampung* adalah sebuah kegiatan bersama yang diinisiasi oleh para pembakti Kampung yang sebenarnya telah lama ada dan tersebar di seluruh Nusantara dengan beragam model, penamaan, dan beragam corak ragam jenis perjumpaan. Nama dan aktivitas yang lalu diberi nama sonjo kampung ini, bermula dari diskusi kecil di sebuah kampung tua di tengah Kota Malang. Kala itu, seorang pembakti kampung bernama Winarto (Cak Win) yang tinggal di Kampung Celaket, Malang, mengundang kawan-kawan pembakti kampung di sekitar Malang Raya untuk membicarakan usahanya melaksanakan hajad kampung berupa pesta budaya kampung. Hal ini disambut baik oleh pembakti kampung dari Desa Kalisongo bernama Priyo Sunanto Sidhy (Mbah Priyo), Kabupaten Malang, dan saya dari Kampung Ngijo yang juga berlokasi di Kabupaten Malang. Dengan didorong oleh satu semangat untuk saling memperjumpakan para penggerak kampung, kami mengedarkan undangannya pada jaringan perkawanan perorangan dan komunitas yang memiliki kepedulian pada pemberdayaan kampung berbasis seni-tradisi-budaya lokal.

Setelah mengeksplorasi pengalaman terbaik dari setiap orang yang hadir dalam perjumpaan perdana itu, disepakatilah sebuah kegiatan bernama sonjo kampung yang akan diwartakan melalui jejaring perkawanan di media sosial. Seorang kawan yang ahli desain grafis yang hadir saat itu, bernama Andrew Grotesque, menyediakan diri dengan sukarela membuat logo kegiatan, *flyer*, undangan berupa poster, dan bahkan kemudian juga desain yang dibutuhkan pada setiap perayaan budaya kampung yang didahului dengan kegiatan sonjo kampung. Di samping itu, kegiatan sonjo kampung ini juga didukung oleh Redy Eko Prastyo, penggagas Jaringan Kampung Nusantara (Japung). Redy menginspirasi bagaimana sebuah kampung kembali menjadi sumber ide.

Beberapa kawan yang hadir dalam pertemuan tersebut di antaranya adalah penggiat paguyuban ritual tradisi, inisiator komunitas peduli kota, seniman, perangkat desa, pegawai negeri, dan wirausahawan yang kemudian menawarkan kampung-kampungnya sebagai tempat melaksanakan kegiatan sonjo kampung. Semangat awal yang muncul adalah keyakinan bahwa ketika sebuah kampung mendapatkan perkunjungan dari orang lain dan atau komunitas lain, kampung tersebut akan membangun rasa dihargai dan mendapat penghormatan. Di sinilah kami memiliki satu pertanyaan besar. Akan hadir sebagai apakah dan berlaku seperti apakah kami yang terlibat dalam kegiatan ini? Meskipun belum memiliki bayangan, sebenarnya setiap pembakti kampung memahami makna dasar dari kunjungan. Kegiatan sonjo kampung dilaksanakan dengan satu tujuan, yaitu berjumpa sesama di sebuah kampung, mengapresiasi apa saja yang ada di kampung tersebut, menghormati segala usaha yang pernah dan telah dilakukan oleh warga setempat dalam rangka pemberdayaan kampung, dan sepenuhnya menyediakan waktu untuk mendengarkan warga kampung bercerita tentang kehidupan dan impian mereka.

Setelah melalui beberapa tahapan proses sonjo kampung dan dengan semakin intensifnya diskusi melalui media sosial yang terbuka terhadap segala bentuk ide dan masukan, muncullah konsep dasar kegiatan, yaitu:

1. fokus kegiatan sonjo kampung adalah apresiasi terhadap sebuah kampung dengan segala potensi, aset, talenta, kisah hidup, dan cita-cita masa depannya, di mana ekspresi seni, tradisi, dan ritual budaya berada pada inti pemaknaan hidup;
2. kunjungan ke kampung dilakukan secara terencana dengan tujuan meyakinkan warga kampung bahwa apa yang mereka miliki (terutama yang sering terlanjur disepelekan dan dianggap remeh) adalah sesuatu yang luar biasa dan berharga bagi dunia, bahwa usaha hidup seutuhnya dalam kesadaran sejarah budaya merupakan kekuatan yang tak akan pernah lekang oleh zaman; dan
3. penyebaran berita melalui media yang tersedia bahwa ada banyak kampung yang semakin sadar pada kekuatan kemandiriannya dan siap untuk berjejaring dan tolong-menolong untuk menciptakan kehidupan yang berbudaya.

Sebagai penyemangat bersama, maka pada pertemuan awal disepakati *motto* kegiatan, yaitu *Indonesia adalah perjumpaan kampung-kampung*. Harapannya sederhana dan jelas, yaitu semakin banyak kampung yang terhubung dan berjumpa secara nyata dalam kegiatan bersama yang bersifat natural dan kultural, sehingga akan semakin meneguhkan dan memperkokoh pondasi keindonesiaan.

## Perjumpaan Kultural

Perjumpaan kultural antarkampung terjadi dalam banyak bentuk. Selain dialog tentang ruang bersama, seperti gunung, sungai, sumber air, jalan, dan segala jenis fasilitas alami dan infrastruktur buatan manusia, termasuk juga di dalamnya adalah pasar desa, tersedia pula bentuk perjumpaan yang bersifat sosial dan yang berkaitan dengan tradisi, adat, dan budaya yang menjadi milik dan tanggung jawab bersama. Dalam tiap-tiap perjumpaan itu, musyawarah dikedepankan dan penghormatan kepada eksistensi masing-masing serta ketajaman sensitivitas pembakti kampung terus diasah ketajaman sensitifitasnya.

Demikian juga dengan apa yang disebut dengan sonjo kampung itu. Kalau mau dilihat sebagai momen, sonjo kampung adalah momen kultural. Dalam kegiatan itu kampung satu menjumpai atau dijumpai oleh kampung yang lain dengan keseluruhan diri, kepentingan bersama, dan harapan terbaik bagi alam dan generasi berikutnya. Karena inti dari perjumpaan itu adalah dialog otentik antarmanusia yang memiliki ketulusan dan kesungguhan bagi kemanusiaan holistik di dalam kesatuannya dengan lingkungan alam, maka sifatnya terbuka dan terbebas-merdekakan dari jeratan politisasi dan komersialisasi apapun.

Jadi, dilihat dari karakteristiknya, tepatnya, sonjo kampung adalah sebuah metode perjumpaan. Maka pembahasan terbaik tentang sonjo kampung perlulah dimulai dari pertanyaan, “Bagaimana hal itu dilakukan?”.

## Apakah Pengalaman Terbaik yang Menjadi Kebanggaan?

Untuk menjawab pertanyaan itu, berikut ini beberapa pengalaman terbaik yang saya kumpulkan dengan tujuan memberikan gambaran tentang langkah-langkah awal dalam melakukan *sonjo kampung*. Tentu masih sangat terbuka langkah alternatif lainnya. Tambahan dan masukan dari siapa pun sangat diharapkan agar dapat melengkapi dan menyempurnakan metode ini. Perlu ditegaskan bahwa siapapun, pihak kampung manapun, dapat mengambil inisiatif untuk melakukan, mencoba, ataupun membicarakan agar momen perjumpaan dapat terlaksana.

1. Sonjo Kampung: tindakan apresiatif dan afirmasi positif pada aset bersama sebuah kampung.

Setiap kampung mempunyai kisah hidupnya sendiri, beragam kenangan, pengalaman, dan tantangan, serta harapan yang berbeda. Setiap kampung secara natural dan kultural menemukan bentuk terbaiknya dalam proses tak henti untuk menjadi sebuah ruang yang membahagiakan bagi seluruh penghuninya. Di ruang itu segala ekspresi diri dihargai, segala perayaan budaya

dan ritual tradisional dihormati, dan segala usaha baik dan perdamaian dalam keadilan dipelihara dan didukung bersama.

Kampung memiliki peran penting dalam membangun karakter orang yang tinggal di dalamnya. Dinamika kampung adalah dinamika kehidupan yang paling nyata di tengah pergeseran dan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Kemampuan kampung untuk menerima, menyerap, dan lantas mentransformasi interupsi kultural dan gerakan modernitas dapat dikatakan luar biasa. Sejarah telah membuktikan itu. Di kampunglah orang membangun kebiasaan berjumpa dan bersikap terhadap perbedaan, ide baru, dan impian paling liar yang menghujam keharmonisan para penghuninya sekalipun.

Dengan kesadaran tersebut, aktivitas sonjo kampung berusaha menjauhkan diri dari sebagai bentuk kritik dan kecenderungan berperspektif *problem solving*. Perjumpaan kampung bukan untuk mencari apa yang salah, siapa yang tidak baik, apalagi kekurangan dan kelemahan di kampung. Perjumpaan dalam sonjo kampung adalah perjumpaan bahagia dalam semangat menguatkan, meyakinkan, mendukung, serta mendorong apa yang terbaik yang sudah dan akan dilakukan oleh warga kampung. Dalam dialog dapat terjadi *sharing* pengalaman, yang semata bertujuan untuk memberikan afirmasi positif dan dalam rangka meluaskan wawasan bersama.

Ada banyak objek yang bisa dieksplorasi bersama untuk menemukan apa yang terbaik yang ada pada sebuah kampung. Dalam pengalaman kami, eksplorasi bisa dilakukan dengan melihat nama kampung dan *etiologi* kampung melalui perspektif warga kampung, dengan membicarakan bersama tentang tanaman endemik setempat, tentang tempat-tempat penting bagi kepercayaan dan urusan praktis warga kampung, tentang kebiasaan, dialek, gaya hidup, dan hal-hal kecil yang khas kampung. Dengan tetap mempertahankan semangat apresiasi, sekalipun mungkin sebelumnya dianggap sepele dan remeh oleh warga kampung, hal-hal kecil itu akan menjadi sarana dialog yang menggembirakan dan memberi makna baru.

2. Pengalaman puncak yang membanggakan: deskripsi awal terpenting dalam proses dialog.

Setiap kampung memiliki kisah tentang asal-muasalnya, semacam kisah penciptaan dalam kitab suci yang di dalamnya terkandung cara dan pilihan mereka membangun kosmologinya. Kisah awal keberadaan kampung selalu menarik untuk dijadikan refleksi bagi kondisi terkini dan impian masa depan masyarakat kampung. Tak jarang, apa yang ada dan berlangsung saat ini di sebuah kampung dengan mudah ditemukan alasan dan hubungannya dengan kisah awal berdirinya kampung. Kisah tersebut bahkan merefleksinya identitas

kultural mereka. Oleh sebab itu, “bedah karawang” yang dilakukan secara partisipatif untuk menggali apa yang mereka ketahui dan ingat secara turun-temurun adalah sebuah langkah penting karena dapat menggali makna dan nilai-nilai keutamaan kampung. Di situlah bisa diketemukan siapa saja, dalam proses sejarah kampung yang pernah menjadi tokoh-tokoh penting dan juga yang hingga sekarang berperan menjadi *invisible leader* kampung.

Sekalipun begitu, dalam dialog bersama tentang sejarah kampung, dapat mengemuka kisah tentang peristiwa-peristiwa sensitif yang menakutkan dan menghantui warga. Namun, di sisi lain, dialog ini dapat menjadi katarsis sehingga menjadikannya perjumpaan yang melegakan dan memberi harapan. Sikap yang penting dijaga dalam melaksanakan kegiatan dialog ini adalah kejujuran, ketulusan, dan keberanian untuk terbuka, serta keberanian untuk berubah, terutama keberanian untuk menatap masa depan terbaik bagi kampungnya. Setidaknya, dialog semacam ini bisa menjadi ruang untuk berbagi semangat, saling menguatkan dan menghidupi apapun peristiwa masa lalu yang pernah dialami oleh kampung.

Fokus pada peristiwa-peristiwa puncak yang bermakna dan memberi harapan baru bagi kampung menjadi agenda yang perlu secara disiplin dihargai semua pihak. Sonjo kampung bukan tempat untuk melakukan investigasi, apalagi penghakiman terhadap masa lalu sebuah kampung. Bukan juga tempat untuk berpolemik dengan pilihan-pilihan kepercayaan, politik, dan tradisi lokal yang dijalani oleh warga kampung. Fokus pada peristiwa puncak adalah upaya bersama untuk menyadari diri, bahwa selalu tersedia kesempatan –kapanpun itu— untuk menghadirkan yang terbaik, paling indah, dan bermakna bagi warga kampung.

Demikianlah perjalanan sonjo kampung sebagai aktivitas untuk meneguhkan penghargaan pada otentisitas kampung, pada keberaniannya membangun kisah hidup barunya, pada perkembangan kedewasaan komunitas untuk menjadi kampung yang terbuka, baik secara fisik maupun secara wawasan terhadap kampung lain di sekitarnya. Dari situ selalu muncul kabar baik, kisah keberhasilan, cerita keindahan, keberhasilan perjuangan yang selalu penting untuk dievaluasi, direfleksikan, dan dikabarkan kepada masyarakat dunia.

3. Keterhubungan aset bersama antarkampung: ruang berbagi untuk saling menguatkan dan menghidupi.

Sekalipun diterpa angin perubahan zaman, kadang ditelantarkan oleh pertumbuhan baru jalur perekonomian, dan dianaktirikan oleh model baru struktur birokrasi pemerintahan, sebuah kampung selalu akan terlihat tetap setia pada kreativitas yang ada padanya untuk mempertahankan makna hidup

dirinya, memelihara tanda-tanda, ujaran, dan kisah kearifan yang membuat para penghuninya tetap merasa bangga dan percaya diri. Di kota, pertumbuhan dan sistem kemasyarakatannya direkayasa agar memenuhi standar dan prasyarat kehidupan modern yang serba memudahkan penghuninya memenuhi kehidupan sehari-harinya tanpa terlalu banyak gangguan dan interupsi relasi dan komunikasi sosial. Dibandingkan dengan kota, keberadaan kampung tradisional yang masih menyimpan kekayaan sejarah dan penanda budaya menjadi sangat berharga dan perlu untuk diberi perhatian dan penghargaan. Peradaban kampung memberi pesan tegas bahwa kekuatan keutuhannya terbangun di atas relasi-relasi antarmanusianya.

Pertanyaan yang mendasar adalah siapakah yang akan menjaga, menghargai, menghormati dan terutama tetap bersedia hidup di dalam keagungan dan keindahan kampung seperti itu? Tentu saja jawabnya adalah mereka sendiri, para penghuni kampung itu sendiri. Mereka itu berarti mencakup generasi tua dengan segala memori dan romantikanya, generasi muda yang kadang harus teragap menghadapi realitas perubahan sosial di sekitarnya, dan (inilah kekuatan Indonesia) para penghuni kampung-kampung lain di sekitarnya yang menghadapi tantangan dan persoalan yang sama.

Apa yang terjadi pada sebuah kampung akan berdampak pada kampung lain. Pengaruh terjadi bukan hanya karena mereka terhubung atau tergantung secara ekonomi, atau karena mereka terkelompok dalam sebuah kekuasaan geografis administratif tertentu. Bukan pula karena adanya hubungan darah dan kekerabatan. Kampung-kampung itu terhubung karena ada kompleksitas sistem tanda dan makna yang (sayangnya) kelestariannya sejajar dengan kemampuan masing-masing kampung untuk mempertahankan jati dirinya. Jadi, ketika menemukan sebuah kampung tradisional yang masih menyisakan sistem tanda dan makna yang terkait dengan kampung yang lain, itu sama halnya dengan menemukan harta karun nan berharga yang telah ditinggalkan dan disia-siakan oleh keangkuhan perkembangan zaman.

Lapangan terbuka yang digunakan bersama antarkampung, jalan kampung, pasar tradisional, model dan cara mendirikan rumah lengkap dengan segala ritual tradisionalnya adalah penanda-penanda yang memperlihatkan bahwa sebuah kampung tidak pernah hidup sendiri. Terlebih lagi jika kita menemukan tempat atau bangunan tertentu yang merupakan saksi langsung dan objek utama penciptaan mitos yang masih dikenali oleh warga kampung. Tempat ibadah, pohon tua, barang peninggalan nenek moyang, baik yang bertahan berupa “punden” dan “petrén” maupun yang tersimpan dalam museum atau bahkan yang hanya tinggal

dalam ingatan bersama warga kampung adalah penanda-penanda kunci yang seringkali bisa membuka kesadaran baru pada sejarah, kebiasaan, dialek, seni, tradisi ritual dan banyak aspek kehidupan kekinian kampung. Dengan melihat pada penanda terpenting kampung, dalam keterbukaan pada segala bentuk interpretasinya, banyak hal bisa dialami bersama oleh banyak orang.

Nama sebuah kampung juga bisa merupakan sebuah penanda komunal karena mengandung banyak makna. Nama itu bisa berasal dari stereotipe yang terbangun dalam diri para penghuninya atau berasal dari olok-olok penduduk di sekitar, bisa pula berupa cerminan sebuah idealisme komunal – semacam visi komunitas—. Pendek kata, dalam konteks kampung tradisional, penelusuran sebuah nama kampung dapat dilihat dari beragam perspektif.

Tanda-tanda alam berupa topografi dan vegetasi yang paling mudah tumbuh atau yang paling banyak dijumpai adalah sumber penamaan kampung yang paling umum. Adanya kekayaan mineral dan alam lainnya termasuk bagaimana orang mengelolanya juga tidak jarang menjadi sumber penamaan. Nama kampung selalu menarik untuk dijadikan tema dalam menelusuri bagaimana sebuah sejarah dan budaya dalam sebuah kampung itu terproses, bertahan, dan menjadi bagian penting bagi identitas para anggotanya, baik yang tinggal tetap di situ maupun yang berasal dari situ tapi telah berada di tempat lain.

Maka, tampaklah bahwa tindakan mensyukuri apa yang ada di dalam sebuah kampung akan memberikan ruang belajar dan proses literasi yang berguna, tidak hanya bagi kampung yang bersangkutan, tapi juga bagi proses penelitian sejarah, serta pemahaman tradisi dan kebiasaan. Aspek lain yang ada di kampung adalah ditemukannya dinamika perjuangan sebuah komunitas dalam mengarungi perubahan zaman.

4. Nilai utama yang dikembangkan dan dihidupi: kesetaraan, keterbukaan, penghargaan, dan penghormatan.

Di kampunglah nilai-nilai keutamaan hidup mudah ditemukan dalam bentuknya yang paling nyata. Sebuah contoh yang menarik adalah dengan melihat bagaimana bagian-bagian dalam masyarakat kampung itu mengambil peran dirinya dalam pengalaman sonjo kampung. Hubungan antara kelompok seniman, praktisi ritual-tradisional, budayawan, dan masyarakat kampung bersifat dinamis dalam sejarah bangsa ini, tetapi tidak selalu terkelola dengan kesadaran untuk bertumbuh dalam pemaknaan hidup yang sama. Seniman, sebagai aset kampung yang signifikan telah terganti oleh orang-orang yang mampu menampilkan kekuasaan otoritatif dan kerakusan sistematis. Kampung telah menjadi ajang pertengkaran ideologis yang bersumber bukan dari kampung manapun. Maka, kampung yang sadar adalah yang selalu

merefleksikan identitas dirinya berbasis nilai utama yang diyakininya, yaitu nilai kemanusiaan dan kerukunan yang telah mengakar. Ketulusan, dalam hal ini, menjadi anugerah illahi yang diturunkan bagi mereka yang hidup dalam damai. Begitulah pengelolaan persaudaraan terjaga bukan karena ideologi tertentu, melainkan karena kearifan dan keikhlasan. Begitulah relasi komunitas seniman dengan masyarakat membentuk karakter yang kuat bagi kedua belah pihak dan membangun nilai bersama dengan cara yang sangat natural.

Seniman berbasis kampung dan perannya bagi pembentukan identitas kebangsaan di tengah masyarakat bukan sebuah impian kosong belaka yang direkayasa demi kepentingan tertentu dan berlangsung sesaat saja. Seniman ini bekerja di kampung, terutama dengan kesadaran pada nilai-nilai keutamaan kemanusiaan. Pada saat merefleksikan ekspresi pementasan “Bantengan dan Macanan” dalam perspektif peristiwa spiritual estetik misalnya, ternyata hal itu perlu didahului dengan proses dialog penghapusan stigma yang berasal dari persaingan kebenaran agama. Langkah selanjutnya adalah menemukan titik transformasi yang dapat melengkapi kehausan pesan spiritual sekaligus mudah dicerna dari cara pandang seni dan hiburan. Tentu saja ada banyak contoh lain yang ditengarai sebagai tantangan bagi para seniman berbasis kampung, tapi jalan-jalan alternatif selalu tersedia bagi kebahagiaan bersama dan terutama bagi pesan kehidupan mulia yang diidamkan tiap manusia. Demikianlah pengelolaan persaudaraan antara seniman dan masyarakat menguat saat terjadi dialog terbuka bermodal ketulusan dan keterbukaan. Itulah nilai-nilai utama yang terjadi, bertumbuh dan berkembang di kampung.

5. Visi tercapai jika semakin banyak warga kampung mampu mengenali dan menghargai kekayaan di kampungnya dan mampu membuat perjumpaan kultural untuk membangun keterhubungan antarkampung.

Kendala geografis yang—secara administratif— semakin membatasi perjumpaan kultural nonbirokratis antarkampung memang merupakan tantangan yang masih terus ada sejak era kolonialisme berjaya di nusantara. Namun, para pembakti kampung tahu bagaimana menyiasati hal itu. Pengalaman sonjo kampung membuktikan bahwa keterhubungan antarkampung yang berbasis semangat gotong royong untuk secara tulus saling membantu adalah cara kampung di Nusantara membangun harga dirinya. Pada satu kesempatan, saat diadakan sonjo kampung mempersiapkan perayaan budaya di sebuah kampung, seorang peserta diskusi menyatakan, “Jika sebuah kampung sedang memiliki ‘hajat’ untuk menyelenggarakan perayaan budaya kampung, para tetangga kampung di sekelilingnyalah yang paling efektif dapat berbagi pertolongan”.

Para leluhur dan tetua pemerhati budaya kampung sudah menetapkan sebuah dunia ideal bersama, yaitu kampung sebagai tempat edukasi, pelestarian, dan inovasi terbaik bagi gerak karya dan laku seni tradisi dan budaya. Dengan kesadaran akan masa depan, pesan itu diharapkan akan bergulir kepada generasi berikutnya dengan memanfaatkan cara dan teknologi yang semakin baik. Oleh karena itu, agar generasi muda memiliki jiwa sosial yang tinggi, mereka perlu diperkenalkan dan disegarkan terus dengan karya agung leluhurnya karena merekalah masa depan ketahanan budaya bangsa. Di tangan generasi barulah budaya akan menghidupi dan menjadi spirit utama dalam membangun masyarakat yang beradab dengan kearifan dan kedamaian. Oleh karena itulah generasi muda menjadi pusat dari segala upaya laku budaya yang dijalani. Pada merekalah mekanisme keterhubungan antarkampung itu dipertaruhkan.

Dengan melihat langsung apa yang ada dalam sebuah kampung, kita dapat mengetahui bahwa dalam sejarah bangsa ini ada masa-masa di mana masyarakat tidak hanya sengaja dijauhkan, tapi juga dilarang dengan ancaman hukuman, bahkan dilecehkan sebagai *tradisional*, *ndeso*, *klenik*, *mistik*, *sesat*, *animis*, *dinamis*. Sayangnya, stigma ini masih dipercayai oleh banyak anggota masyarakat sehingga memutuskan hubungan dengan tradisinya sendiri. Lebih parahnya lagi, mereka juga mengupayakan terputusnya hubungan budaya kampungnya dengan budaya kampung-kampung lain. Sesungguhnya, masyarakat kampunglah yang mampu melihat dan merasakan bahwa tradisi dan budayanya ada dalam darahnya, tapi mereka tidak mampu lagi berpikir karena sudah diracuni oleh proyek kolonialisme yang menggunakan penghancuran budaya sebagai senjata untuk melemahkan masyarakat. Penghancuran budaya ini bahkan semakin diteruskan oleh zaman sesudah kolonial. Namun, kita percaya bahwa roh tradisi dan budaya itu masih kuat terjaga dan ada di kampung, menunggu para warganya –para generasi mudanya— untuk kembali mencintainya, menunggu kita semua untuk kembali hidup dalam kejayaannya.

6. Inisiatif awal sonjo kampung bisa berasal dari siapa saja, dari kampung mana saja, komunitas apa saja asal diterima dan disambut oleh sebuah kampung.

Sempat terjadi polemik tentang siapa yang berhak menyelenggarakan sonjo kampung, kampung manakah yang layak di-*sonjo*-i (dikunjungi), apakah ada petugas khusus sonjo kampung, apakah ada persyaratan ketat agar terjadi perjumpaan itu, dan pertanyaan senada lainnya. Bahkan, polemik bisa berujung pada seturut selera kekinian— siapakah tokoh dari sonjo kampung? Beragam pertanyaan yang sesungguhnya mengajak setiap orang untuk menapaki kembali awal mula proses perjalanan bersama dalam kegiatan sonjo kampung ini. Idealnya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak perlu muncul karena

pada dasarnya kegiatan sonjo kampung itu ada dalam semangat setiap warga Nusantara ini, setiap kampung yang jalin-menjalin, setiap wilayah, setiap pulau-pulaunya.

Oleh karena itulah, perlu ditegaskan lagi bahwa sonjo kampung adalah sebuah cara penamaan saja terhadap sebuah metode kuno yang sekalipun diterpa arus dinamika zaman tetap teguh berada di sana. Bisa saja orang memberi nama berbeda dalam konteks yang berbeda. Bisa jadi langkah-langkah yang ditempuh beragam, disesuaikan dengan konteks masyarakatnya dan kondisi lingkungan yang ada. Satu hal yang pasti kita jumpai sama adalah semangat perjumpaan manusiawi dalam keindahan yang bermakna untuk terus meneguhkan nilai-nilai manusiawi sebagai sebuah bangsa berbudaya. Maka, jika Anda sudah membaca sampai sejauh ini, Anda bisa memulainya sekarang di tempat Anda berada, dengan siapa saja, pada kampung mana saja.

Sonjo kampung, apalagi jika bisa dilengkapi dengan kegembiraan “menjelajah kampung” dalam sebuah kelompok tertentu dengan tujuan dan metode di atas, akan memberi ruang apresiasi dan pemberdayaan pada kelompok tersebut, pun pada sebuah kampung. Ingat, fokus utamanya adalah kampung, bukan segala jenis agenda dan kepentingan para pembakti kampung dan aktivisnya. Hargai apa yang ada dan yang semaksimal mungkin sudah mereka usaha-kerjakan, lantas yakinkan warga kampung bahwa apa yang mereka miliki adalah berkah yang luar biasa yang jelas telah menghidupi mereka, dengan cara penuh kegembiraan, kebanggaan, serta syukur.

## 7. Sarasehan Kampung

Mungkin ada istilah lain yang bisa memberi ketepatan makna dari sebuah peristiwa ketika semua orang duduk bersila melingkar dalam kesetaraan yang apa adanya. Sekalipun ada kepala desa, profesor yang menjabat sebagai dekan, ketua paguyuban nasional, petani, pengusaha winyak wangi, wanita karier, kelompok pemuda bertato, murid SMA penyuka seni, Korlap suporter sepak bola, dan sebagainya dalam sarasehan kampung, semua mendapat hak dan perlakuan yang sama. Mereka setara, semua boleh dengan merdeka mengutarakan kegembiraan dan harapannya, tertawa dan berdoa dengan caranya masing-masing, serta diberi kesempatan menjadi manusia.

Jika dimungkinkan, dibuat sarasehan kampung pada saat sonjo kampung. Sarasehan itu bisa diselenggarakan di balai desa, balai kampung rukun warga, teras rumah warga, lapangan, atau di mana saja sejauh kesetaraan dan kemerdekaan tiap orang yang hadir dihargai. Tidak diperlukan penata acara jika memang tidak dibutuhkan agar perjumpaan bisa berlangsung alamiah. Pembicaraan bisa dimulai dari siapa saja yang dengan spontan ingin

berbagi sesuatu. Bisa jadi akan muncul kelompok-kelompok diskusi kecil yang kemudian berkembang menjadi diskusi besar. Serasehan kampung bukan untuk mencari kesimpulan dan memberikan jawaban memuaskan pada setiap orang, melainkan untuk menjadi momen perayaan yang memberi pesan bahwa hidup dalam perjumpaan formal sekalipun bisa membahagiakan dan melegakan.

## **Kesimpulan**

Dari penggalan-penggalan pengalaman sonjo kampung di atas, tanpa sedikitpun membatasi berbagai kreativitas dalam melaksanakan perjumpaan antarkampung, berikut langkah-langkah dalam pelaksanaannya:

1. yakinlah bahwa pada dasarnya kita semua adalah warga kampung tertentu dan bahwa jika tidak secara fisik, maka secara simbolik kita terhubung padanya. Oleh karenanya, siapapun dapat melaksanakan acara sonjo kampung;
2. melibatkan orang atau komunitas yang memiliki kepedulian yang sama untuk mengapresiasi kampung yang berusaha untuk memberdayakannya, dan bukan memperdayakannya. Oleh karena itu, segala tanda politisasi dan komersialisasi terhadapnya perlu dibongkar secara kritis sehingga seluruh acara berada dalam kontrol masyarakat kampung;
3. bersama dengan warga kampung yang hendak dijadikan ruang perjumpaan menyepakati bentuk dan peristiwa yang hendak dialami dan dijalani bersama;
4. mengabarkan kepada khalayak bahwa akan terselenggara perjumpaan (sonjo) kampung dengan satu tujuan, yaitu memberi inspirasi baru agar selalu terjadi perjumpaan manusiawi antarkelompok masyarakat; dan
5. merayakan perjumpaan dengan sepenuhnya menyadari bahwa peristiwa itu adalah ruang untuk berbagi, menemukan inspirasi, mensalingsilangkan ide, belajar bersama, berefleksi bersama, dan mendewasakan diri.

Jika dilihat dari perspektif teori pemberdayaan komunitas, mungkin cara sonjo kampung sekilas tampak tidak berorientasi pada hasil, bahkan tidak bisa diukur dengan pasti sistematika dan tingkat pencapaian tujuannya. Namun, kami percaya bahwa inilah metode yang –berdasarkan pengalaman kami— membahagiakan untuk memanusiaikan sesama manusia yang hidup di bumi ini.

## 5

# Dari Festival Menuju Transformasi Sosial

*Akmad Bustanul Arif*

Sebuah perubahan sosial tak akan terjadi tanpa adanya intervensi. Entah itu kemudian disebut evolusi atau revolusi, semua melibatkan proses “rekayasa” yang didesain sedemikian rupa sehingga menampakkan hasil yang diharapkan. Tidak mudah, memang, karena semua melibatkan proses dialektik yang kadang juga menyakitkan. Konflik sering menjadi bagian tak terelakkan dari setiap proses perubahan. Pun dalam hal proyek besar pembangunan manusia, dibutuhkan pula upaya “rekayasa” itu. Sebuah desain, sebuah *blue print*, sebuah rancang bangun menjadi keniscayaan sebagai pemandu kita untuk menyusun tiap langkahnya sehingga proses pembangunan itu akan berjalan dengan baik, tepat, dan efisien.

Merujuk pada hal tersebut, Indonesia saat ini membutuhkan “sentuhan” rekayasa yang berbasis pada nilai lokalitas karena infiltrasi budaya dan nilai dari luar begitu kuatnya sehingga menceraabut masyarakat dari akar kulturalnya. Diperparah lagi oleh tsunami informasi yang lebih banyak berisi sampah (dan sumpah serapah) daripada sesuatu yang akurat dan bernilai. Hal itu semakin melumat kesadaran kita sebagai entitas yang seharusnya berperan memberi nilai pada kehidupan, pada kemanusiaan.

### **Kembali pada Nilai Kultural**

Setiap bangsa memiliki budayanya sendiri dan setiap budaya memiliki nilainya sendiri. Nilai ini adalah inti dari budaya yang mengatur kehidupan, menggerakkan kesadaran, dan menghasilkan tindakan. Dalam konteks keindonesiaan, kita adalah bangsa yang satu. Meski berasal dari suku dan kultur berbeda, kita mempunyai nilai yang sama. Kalau kita runut satu per satu dari setiap suku dan budaya yang ada di Indonesia, nilai yang terkandung di dalamnya tak lain adalah nilai penghormatan, penghargaan, toleransi, cinta kasih, tolong menolong, dan gotong royong.

Nilai-nilai itu kini mulai luntur di beberapa kelompok masyarakat, terutama masyarakat urban. Banyak orang tergilas dalam ego, individualitas, dan narsisismenya sendiri. Sayangnya, sikap semacam ini juga mulai merambah masyarakat di pedesaan. Paling tidak, nilai-nilai sosial dan kemanusiaan mulai luntur karena kuatnya gelombang materialisme.

Contoh nyata adalah di Kalimantan Timur. Di sini orang berlomba-lomba membangun kesuksesan dan kenyamanan hidup dengan bekerja keras mengumpulkan uang dan membangun kekayaan. Jika sudah demikian, sedikit sekali waktu yang bisa dialokasikan untuk hal-hal yang bersifat sosial, kemasyarakatan, atau kemanusiaan.

Mereka yang belum mencapai kesuksesan dan kekayaan juga demikian. Mereka mau bergerak jika ada uang yang menstimulasi mereka. Dalam hal ini, orientasi utamanya adalah uang, sehingga sebuah program cenderung sulit digerakkan jika tidak menawarkan uang. Ini sungguh penyakit mental yang buruk. Oleh karena itu, perlu ada upaya dan strategi untuk mengembalikan masyarakat pada nilai yang sebenarnya telah mereka miliki, yang melekat secara kultural di dalam diri mereka sebagai bagian dari entitas sosial. Jika mereka kembali pada identitas diri mereka, maka orientasinya akan berubah. Nilai kebermanfaatannya diutamakan, yakni sumbangsih yang bisa mereka berikan kepada orang lain, lingkungan, dan sesuatu yang lebih besar, yakni bagi kehidupan dan kemanusiaan.

## **Desa dan Harapan Baru Indonesia**

Pemerintah telah mengalihkan orientasi pembangunan Indonesia dari yang sebelumnya ke pusat menjadi ke daerah-daerah. Lebih ekstrem lagi, sekarang diarahkan ke desa-desa. Triliunan rupiah digelontorkan untuk pembangunan Indonesia yang digerakkan oleh desa. Di antaranya melalui anggaran Dana Desa (DD) yang disalurkan melalui Kementerian Desa (Kemendes). Ini membuktikan bahwa pemerintah telah melihat harapan baru akan bangkitnya Indonesia yang bisa dimulai dari desa. Desa dipilih karena merupakan hulu dari segala produk yang dikonsumsi seluruh negeri. Desa adalah kekuatan inti dari bangsa ini. Desa adalah lumbung pangan sekaligus lumbung harapan keberlangsungan hidup bangsa kita. Tanpa penguatan desa, upaya membangun Indonesia akan sia-sia. Inilah mengapa desa-desa di Indonesia saat ini sangat difasilitasi oleh pemerintah, tak lain adalah demi memaksimalkan pengelolaan sumber-sumber strategis yang ada di Indonesia yang mayoritas berada di desa.

Masalahnya terletak pada kurang tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di desa. Banyak potensi yang tidak terkelola dengan baik karena tidak ada SDM berkualitas dan memiliki kualifikasi untuk mengelolanya. Ini persoalan serius yang

hampir dihadapi semua desa di Indonesia. Karena itulah dibutuhkan ruang untuk meningkatkan kapasitas mereka agar dapat menjadi sumber daya yang mumpuni dalam mengelola segala potensi yang ada di desa.

Contoh nyata permasalahan SDM yang sering dihadapi desa adalah BUMDes. BUMDes adalah badan usaha yang dimiliki oleh desa yang di-*ajangi ombo* (diberi ruang dan kesempatan yang luas) oleh pemerintah dengan sumber pendanaan yang besar. Sayangnya, SDM yang ada di desa sangat kurang. Sementara pemerintah desa sendiri banyak yang gagap menangkap peluang ini dan mencari solusi untuk mengatasi permasalahan yang ditemui. Alhasil, dana ratusan juta hingga miliaran yang disiapkan untuk memfasilitasi usaha (untuk mengelola segala potensi yang ada di desa) tidak terserap dengan baik.

Inilah yang menjadi dilema dan permasalahan utama di desa-desa. Di satu sisi, pemerintah telah berbaik hati membuat satu kebijakan yang sangat menguntungkan desa, di sisi lain SDM di desa sangat kurang untuk merespons kebaikan hati itu. Ini hanya salah satu contoh permasalahan yang ada di desa.

## **Desa: Isu dan Permasalahan Masyarakatnya**

Selain permasalahan kurangnya SDM, desa juga masih mempunyai masalah yang berkaitan dengan pengelolaan sumber ekonomi strategis. Beberapa dari masalah ini sekarang sudah mulai terurai berkat upaya banyak pihak, khususnya para aktivis kampung yang berupaya membangun kesadaran masyarakat agar dapat dan mau berpartisipasi dalam proses pembangunan yang ada di desa.

Isu yang mendasar adalah minimnya partisipasi publik dalam mengontrol kebijakan, pembangunan, dan penganggaran desa. Selain itu, pemahaman atas konsep “pembangunan” juga sempit dan reduktif, yakni sebatas sesuatu yang bersifat fisik, sehingga persepsi mereka tentang pembangunan cenderung terbatas pada infrastruktur saja. Celakanya, ini juga diamini oleh pemerintahan desanya yang lebih banyak berorientasi pada pembangunan fisik daripada pembangunan kualitas manusianya.

Jika bisa dirumuskan, permasalahan-permasalahan yang ada di desa adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi politik masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik di tingkat desa rendah. Ini dapat dilihat dari rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam memenuhi undangan atau keterlibatan mereka dalam Musyawarah Desa (Musdes) atau Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Padahal, di Musdes atau Musrenbangdes itulah masyarakat memiliki peran strategis untuk memengaruhi arah kebijakan dan arah pembangunan, termasuk terlibat dalam proses penganggaran pembangunan.

2. Kepedulian terhadap pembangunan desa kurang. Alih-alih turut terlibat dalam mengontrol dan mengawasi pembangunan desa, masyarakat lebih suka mengkritik, menyalahkan, atau *rasan-rasan* (menggosip) di belakang.
3. Mayoritas masyarakat menuntut pemerintahan desa untuk melayani mereka dengan baik dan memenuhi kebutuhan sosialnya, sementara hal itu tidak diikuti dengan partisipasi mereka dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan di desa.
4. Ada kecenderungan untuk lebih berorientasi pada materi daripada tindakan peduli. Artinya, jika ada uangnya mereka mau terlibat, jika sebaliknya, mereka tidak mau ikut serta.
5. Adanya pemahaman yang salah tentang istilah dan konsep pembangunan. Istilah pembangunan cenderung dipahami sebagai menciptakan sesuatu yang bersifat fisik (infrastruktur). Padahal, pembangunan yang sesungguhnya dan paling substansial adalah membangun kualitas manusianya (suprastruktur).
6. Minimnya SDM yang mumpuni untuk mengelola aset-aset dan potensi ekonomi strategis desa.

### **Strategi Penanganan Isu dan Permasalahan**

Permasalahan-permasalahan yang muncul itu membutuhkan solusi yang tepat untuk menanganinya. Berdasarkan pengalaman itu, berikut inilah hal-hal yang perlu dilakukan:

1. menciptakan ruang dialog/diskusi yang membuka wawasan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran dan partisipasi mereka terhadap kemajuan kampung/desanya;
2. membuat kegiatan-kegiatan yang menuntut partisipasi mereka sebagai wujud kesadaran akan tugas sosial mereka sebagai warga desa;
3. memberikan ruang bagi mereka untuk menunjukkan potensi yang dimiliki, termasuk menampung keluh kesah dan ide mereka terhadap permasalahan-permasalahan yang dikeluhkan;
4. membangun kepercayaan diri mereka dengan menyerahkan tugas yang harus mereka selesaikan dalam satu kegiatan tertentu dengan penuh tanggung jawab; dan
5. menempatkan pemerintah desa sebagai *partner* masyarakat dalam pembangunan desa.

## Pendekatan

Selama ini, pendekatan secara struktural yang langsung dilakukan oleh pemerintah ternyata gagal dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran mereka dalam pembangunan desa. Sebagian masyarakat hanya mau hadir sebagai formalitas belaka. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan lain, yakni pendekatan kultural. Pendekatan ini diupayakan dalam bentuk dialog antarmasyarakat untuk sama-sama memikirkan desanya di luar bingkai penyelenggaraan pemerintahan. Tampaknya cara ini lebih bisa diterima dan lebih berhasil dalam menggugah kesadaran masyarakat.

Ketika masyarakat mampu melepaskan diri dari bayang-bayang pemerintah (yang menurut mereka adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap pembangunan), maka tingkat kepedulian dan partisipasi mereka mulai meningkat. Mereka kini mulai ikut memikirkan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk membuat desa mereka berkembang menjadi lebih baik. Mereka mulai tergugah untuk membangun nilai positif dan konstruktif agar citra desa menjadi lebih cemerlang. Selain itu, tentu saja, mereka mulai sadar bahwa keterlibatan aktif mereka adalah energi positif bagi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Dari sinilah kemudian kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat mulai terjadi.

## Bentuk Kegiatan

Beberapa bentuk kegiatan dapat dilakukan sebagai media penyadaran dan pelatihan masyarakat untuk berpartisipasi dalam “memikirkan” desa. Kegiatan itu sebaiknya merupakan gagasan yang berasal dari bawah, yang diinisiasi oleh elemen-elemen masyarakat sendiri dan tidak bersifat formalistik pemerintahan. Beberapa kegiatan yang dilakukan di sejumlah tempat, khususnya di Kalimantan Timur adalah:

### 1. *Ngobar (Ngopi Bareng)*

Kegiatan ini tidak dinamai demikian, tapi bentuknya adalah kumpul-kumpul bebas di rumah salah satu tokoh masyarakat, *ngopi* bareng dan berdiskusi tentang tema apa saja, mulai dari masalah politik, agama, budaya, kemanusiaan, dan lain-lain. Tujuannya, selain menambah wawasan dan ilmu, juga untuk melatih cara berpikir dan untuk membangun kesadaran akan tanggung jawab masing-masing individu sebagai bagian dari masyarakat, desa, dan bangsa. Kegiatan ini dilakukan hampir tiap malam.

### 2. *Istighotsah dan Shalawatan*

Ini adalah kegiatan doa dan *shalawatan* bersama yang digelar di halaman masjid/musala, di halaman Yayasan Khatulistiwa, atau di rumah anggota masyarakat.

Kegiatan biasanya dilakukan dua minggu sekali. Selain kegiatan *amaliah*, di sesi akhir diisi dengan menambah wawasan keagamaan dan kebangsaan.

3. **Forum Komunikasi Masyarakat**

Forum ini diadakan jika ada hal-hal yang mendesak untuk dibicarakan, untuk didiskusikan secara publik terkait masalah desa. Forum ini dibuat untuk menjembatani aspirasi dan kritisisme masyarakat yang tidak mampu bersuara jika langsung berhadapan dengan pemerintah desa atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Forum ini juga dibuat sebagai kanal komunikasi warga dengan pemerintah desa di luar jalur resmi yang disediakan pemerintah sendiri, yakni melalui Musdes. Selain itu, tujuannya agar isu tidak berkembang dengan liar dan menyesatkan. Forum ini biasanya diinisiasi oleh anggota masyarakat sendiri.

4. **Ngaji Cangkrukan**

Meski namanya *ngaji*, kegiatan ini tidak selalu bersifat keagamaan. Topik yang dibahas dan dipelajari bisa apa saja, entah itu bersifat keagamaan, kebangsaan, atau masalah politik dan kebudayaan. Formatnya sengaja dibuat *cangkrukan* agar tidak terlalu formal. Salah satu contoh dari kegiatan ini adalah *ngaji cangkrukan* yang diadakan setiap hari Rabu malam Kamis di teras musala Darussalam, di perbatasan antara kelurahan Waru dan Bangun Mulya.

5. **Pagelaran Kesenian dan Diskusi Kebudayaan**

Pagelaran kesenian dilakukan dalam rangka memperingati sesuatu, seperti Hari Sumpah Pemuda, tahun baru masehi, tahun baru hijriah, 17 Agustus, dan lain-lain. Selain itu, ada kegiatan reguler setiap bulan sekali yang menampilkan berbagai kreasi para pemuda, komunitas-komunitas di desa, dan masyarakat umum. Biasanya kegiatan-kegiatan ini akan diikuti dengan diskusi bersama untuk membahas tema tertentu.

6. **Sedekah Bumi dan Wisata Ekologi**

Dua kegiatan ini terkait dengan kesadaran ekologis, kesadaran akan kondisi alam sekitar, yang menggerakkan orang untuk merawat dan menjaganya. Sedekah bumi merupakan kegiatan kebudayaan tahunan yang digelar di daerah mata air yang berbasis pertanian. Biasanya digelar di tengah sawah dengan melibatkan para petani yang ada di sekitar mata air. Di Kelurahan Waru, ada Kampung Tua yang letaknya di pinggir sungai. Dulu di situ banyak bekantan, namun populasinya mulai menurun. Masyarakat mengadakan wisata susur sungai untuk memantau populasi bekantan. Untuk konservasinya mereka dibantu oleh STT Migas, bekerjasama dengan UGM. Di Kelurahan Kampung Baru dikembangkan wisata bakau yang dikelola oleh masyarakat dan kelurahan.

## 7. **Festival Kesenian**

Visi besar festival adalah membangun kesadaran hidup dalam komunitas, baik komunitas kampung maupun komunitas yang lebih besar, yakni komunitas kebangsaan. Oleh karena itu, festival bersifat inklusif, merangkul keragaman masyarakat. Festival Buen, misalnya, di Desa Bangun Mulya, Penajem Paser Utara meliputi semua suku yang ada. Semua secara bersama-sama terlibat dan memberikan kontribusi pada acara ini, khususnya dalam menampilkan produk budaya dan keseniannya. Banyak elemen yang dilibatkan yang tidak lagi terbatas orang-orang Bangun Mulya, tetapi juga elemen-elemen lain masyarakat seluruh Penajam Paser Utara, termasuk berbagai organisasi besar dan komunitas yang tersebar di PPU.

Ada juga sejumlah festival yang lebih kecil atau yang dikhususkan untuk kondisi geografis tertentu, misalnya Festival Kaki Gunung yang menandai karakter wilayah kepulauan vulkanik Nusantara. Festival semacam ini diadakan setahun sekali di Kampung Cendana RT 005 di Bangun Mulya. Festival ini digerakkan sebagai agenda rutin tahunan sekaligus sebagai prakondisi dari festival yang lebih besar, yakni Festival Buen. Festival Buen telah digelar dua kali. Tahun 2018 ini adalah tahun ketiga dan dilaksanakan pada tanggal 26-29 Oktober 2018. Ruang lingkup Festival Buen jauh lebih besar dari dua acara kesenian lain yang ada di Bangun Mulya dan telah menjadi perhatian serius di tingkat kabupaten.

## **Siapa Penggeraknya?**

Di setiap kegiatan tentu ada penggerak yang memotorinya dan tentunya ada aktor intelektual yang mendesain di belakang layar. Mereka adalah para pemuda yang memiliki kesadaran dan komitmen untuk membangun masyarakat, ditambah memiliki bekal pengetahuan yang cukup untuk mengomunikasikan segala gagasan pembangunan masyarakat. Secara umum ada tiga kategori penggerak:

### 1. **Tokoh Intelektual**

Mereka adalah orang-orang yang memiliki basis akademis perguruan tinggi dan umumnya adalah aktivis pergerakan. Mereka ini memiliki kemampuan untuk mengembangkan wacana kritis, kemampuan analitis yang kuat dan kemampuan memetakan masalah, juga membuat strategi pengorganisasian komunitas sehingga lebih mudah dalam menggerakkan elemen-elemen yang ada di masyarakat.

## 2. **Para pemuda dan Komunitas**

Para pemuda menjadi kunci utama untuk memulai sebuah pergerakan. Merekalah yang kemudian mengeksekusi setiap rencana yang ada. Ketika sebuah gagasan dilontarkan dan berhasil dikomunikasikan serta didialogkan dengan para pemuda itu, maka upaya perwujudan setiap gagasan menjadi kenyataan akan jauh lebih mudah. Dalam hal ini, mereka adalah eksekutor lapangan.

Begitu juga dengan komunitas-komunitas yang ada. Mereka juga menjadi ujung tombak dalam setiap eksekusi rencana kegiatan. Tanpa mereka, kegiatan tidak akan berjalan. Justru dengan semangat para pemuda dan komunitas itulah masyarakat luas tergerak untuk turut andil dalam setiap proses kegiatan. Mereka lebih mudah untuk dimobilisasi untuk kemudian dilibatkan sebagai bagian dari subjek yang bergerak.

Dari awal peran sebagai eksekutor inilah kemudian dicari bibit-bibit pemimpin yang kemudian disiapkan untuk menjadi generasi penggerak utama berikutnya. Dalam hal ini, mereka mulai diberi peran-peran strategis yang bisa mengeluarkan segenap potensi dan daya kreatifnya sehingga dapat memperlihatkan sekaligus mengasah kemampuan yang mungkin selama ini tak pernah ditunjukkan karena ketiadaan ruang untuk mengekspresikannya.

## 3. **Agama dan Tokoh Masyarakat**

Tokoh agama dan tokoh masyarakat ini berfungsi dan berperan sebagai legitimasi atas gagasan-gagasan yang diusung oleh para penggerak kampung agar masyarakat luas lebih percaya. Pengaruh mereka sangat penting karena selama ini yang didengar oleh masyarakat luas adalah tokoh agama dan tokoh masyarakat, bukan tokoh pemerintahan.

Kolaborasi tiga elemen masyarakat ini ternyata bisa menghasilkan sesuatu yang dahsyat, yakni memacu lompatan kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif memikirkan dan bergerak untuk pembangunan desa dan kemajuan masyarakat itu sendiri. Kolaborasi itu menjadi bahan bakar masyarakat untuk bergerak secara partisipatif dalam berbagai kegiatan, baik yang bersifat pemerintahan maupun sosial.

## **Bagaimana Hasilnya?**

Hasilnya, sekali lagi, adalah lompatan kesadaran. Lompatan tindakan. Lompatan partisipasi. Saat ini lebih mudah untuk mengajak masyarakat terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan, dan pemerintahan. Kepedulian

masyarakat terhadap desanya mulai terbangun dengan baik. Kontribusi mereka meningkat drastis. Mereka yang tidak dapat berkontribusi secara finansial dapat menyumbangkan tenaga. Keberhasilan Desa Bangun Mulya dalam mengubah *mindset* dan perilaku warganya ditunjukkan dengan diperolehnya penghargaan sebagai desa dengan gotong royong dan swadaya masyarakat terbaik sekabupaten Penajam Paser Utara dan nomor dua seprovinsi Kalimantan Timur pada tahun 2018.

## **Festival dan Transformasi Sosial**

Festival hanyalah salah satu cara untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yakni melakukan transformasi sosial. Meskipun demikian, harus diakui bahwa sebuah festival sangat besar perannya untuk mendorong lompatan partisipasi masyarakat. Semangat gotong royong yang digelorakan sangat bersambut. Meskipun pada awalnya kegiatan ini hanya dilakukan sedikit orang, lambat laun seiring keberhasilan yang bisa dilihat oleh siapa saja yang memperhatikannya, semua pihak terdorong untuk ikut terlibat secara aktif.

Salah satu contohnya adalah Festival Buen yang telah menginspirasi banyak pihak, terutama masyarakat Bangun Mulya sendiri, bahwa dengan semangat gotong royong dan kebersamaan apapun bisa dilakukan. Dana tidak menjadi masalah meskipun tidak ada. Tidak seperti acara yang diselenggarakan oleh pemerintah yang sudah terjamin penganggarannya, Festival Buen membuktikan bahwa tanpa dukungan anggaran dari pemerintahpun kegiatan itu berhasil dilaksanakan dengan baik dan berdampak besar.

Belajar dari berbagai aktivitas masyarakat di Kalimantan Timur, dapat dirumuskan sejumlah konstruksi penting yang dapat dipakai sebagai landasan pemikiran dalam mengembangkan kebudayaan, yaitu:

- Indonesia adalah negara yang unggul dalam hal budaya karena memiliki beragam suku dan agama yang masing-masing memiliki kekhasan (keunikan) dan nilai luhur yang melandasi setiap perilaku keseharian.
- Kekhasan dan nilai luhur itu saat ini mulai luntur dihantam modernitas yang menyebabkan perilaku sosial dan budaya masyarakat berubah.
- Perubahan ini sekaligus mempersempit ruang kemanusiaan, sehingga yang menonjol kemudian adalah individualisme dan materialisme (lebih suka mementingkan diri sendiri dan lebih berorientasi pada materi/kekayaan/uang).
- Diperlukan “ruang” untuk membuka kembali kesadaran masyarakat akan nilai dasar mereka sebagai manusia Indonesia yang lekat dengan budaya sekaligus nilai-nilai luhur di dalamnya, seperti nilai kebersamaan, gotong royong, saling

peduli, saling menghormati dan menghargai, saling menolong, dan sangat dekat dengan alam (memiliki keramahan terhadap lingkungan).

- Ruang yang dimaksud adalah ruang interaksi, ruang dialog, dan ruang belajar untuk melihat dan menemukan kembali identitas (siapa diri kita sesungguhnya) sekaligus hakikat keberadaan kita (apa tugas kita), baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari entitas sosial (bagian dari suatu masyarakat atau suatu satuan budaya hingga sebagai sebuah bangsa).

Festival adalah salah satu ruang budaya yang disediakan untuk maksud-maksud di atas, sehingga keberadaannya bukan semata-mata sebagai sebuah *event* pesta atau perayaan budaya, tetapi lebih sebagai media edukasi untuk mendialogkan berbagai nilai, wacana, dan kesadaran kemanusiaan.

Selain itu, yang perlu diingat adalah visi dalam melakukan berbagai aktivisme di masyarakat, yakni:

- membangun kebersamaan dalam keberagaman;
- mengakomodasi (menampung) perbedaan sebagai potensi dan kekuatan;
- mengedukasi (mendidik) masyarakat akan nilai humanitas (kemanusiaan);
- membangun kesadaran kolektif (kesadaran bersama) akan pentingnya kebersatuan kita sebagai sebuah bangsa;
- menghargai dan membumikan lagi nilai-nilai luhur kita sebagai bangsa indonesia;
- menghormati leluhur;
- mencintai dan menjaga lingkungan; dan
- menebar cinta dan kasih sayang.

Untuk mencapai visi itu, dilakukan berbagai kegiatan dengan misi sebagai berikut:

- menghadirkan ragam budaya yang ada di kampung dan di wilayahnya masing-masing, mulai dari produk budaya, kesenian, hingga nilai-nilainya;
- menyediakan ruang ekspresi kesenian dan kebudayaan bagi para pelaku kesenian, pemerhati kebudayaan, aktivis sosial dan lingkungan, pelajar, pendidik, dan masyarakat umum;
- menyediakan ruang dialog/diskusi budaya dan *workshop* kesenian dan kebudayaan;
- menggali potensi masyarakat untuk dikelola secara produktif sehingga memberi imbal balik yang positif bagi mereka;
- melibatkan masyarakat lokal sebagai bagian dari aktor (pelaku) perayaan budaya sekaligus sebagai pemilik sebuah peristiwa kebudayaan dan sosial;

- menyebarkan virus kemanusiaan (empati, peduli, tolong-menolong, gotong royong, dan cinta kasih);
- melakukan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat, komunitas, dan kelompok kepentingan (*stakeholders*), tentang pentingnya menghargai budaya dan membumikan nilai kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari;
- membangun sikap dan semangat selalu siap belajar kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa/apa saja;
- membangun sikap siap berubah untuk kehidupan (individual, sosial, dan kebangsaan) yang lebih baik; dan
- menguatkan semangat persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa yang hebat, yaitu bangsa Indonesia.

## Penutup

Sebuah festival bukan sebatas sebuah kegiatan perayaan budaya, tetapi jauh lebih besar daripada itu, yaitu sebagai momentum untuk belajar bersama-sama dan sama-sama belajar tentang nilai-nilai kemanusiaan dan semangat keindonesiaan melalui pendekatan kesenian dan kebudayaan. Tujuan utamanya adalah untuk mempererat tali persaudaraan, persatuan, dan kesatuan sebagai sesama bangsa Indonesia dan menggemakan (menyebarkan) semangat itu ke seluruh penjuru tanah air. Festival ini menjadi terminal (titik jeda dan keberangkatan kembali) kita untuk menata langkah dan memperjelas tujuan kita sebagai manusia Indonesia yang telah dianugerahi tanah air yang luar biasa kayanya sampai dianggap surga oleh bangsa-bangsa lain, sehingga layak diperebutkan.

Melalui festival ini kita berusaha merawat nilai dan potensi kita sebagai sebuah bangsa agar kita tidak mudah dipecah-belah dengan berbagai isu rasial, agama, propaganda, dan adu domba, sehingga terkikis rasa cinta dan kasih sayang kita sebagai sesama manusia. Festival ini sekaligus sebagai ruang penjernihan kita dari virus negativisme yang ada di luar yang berusaha masuk ke dalam diri kita. Dengan ruang penjernihan ini diharapkan kita tetap memiliki kesadaran positif bahwa nilai kemanusiaan adalah nilai universal yang melampaui segala pembatas, termasuk agama, ras, suku, golongan, dan lain sebagainya.

Pada akhirnya, festival adalah sebuah pintu menuju transformasi sosial, sebuah perubahan sosial, perubahan pola pikir, mentalitas, dan perilaku masyarakat menuju tatanan yang lebih baik. Jadi, siapapun yang terlibat, sekecil apapun keterlibatannya dalam kegiatan festival ini, sesungguhnya mereka sedang terlibat dalam sebuah proyek besar: membangun (manusia) Indonesia.

# 6

## **Wisata Desa, Bukan Desa Wisata**

*Bachtiar Djanan M. dan Tri Andri Marjanto*

Manusia memiliki fitrah untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Bagaimana dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, manusia secara naluriah membangun keyakinan (*spirit*), dan tindakan-tindakan fisik (ritual). Itulah spiritual. Spritual membangun “zona nyaman”, suatu hal yang mendasar bagi manusia dan kelompoknya. Lahirlah rasa kedamaian, ketenangan jiwa, dan kebahagiaan. Kesepakatan nilai rasa bersama (spiritual) dalam proses menciptakan zona nyaman inilah yang disebut sebagai budaya.

Budaya merupakan hasil interaksi antara manusia dengan manusia, dan interaksi manusia dengan alam, baik dengan alam yang nyata terlihat maupun dengan alam supranatural, sebagai sesuatu yang diyakini ada walaupun tidak tampak secara fisik. Budaya terbentuk dari banyak unsur, baik berupa gagasan, tindakan, maupun artefak atau karya yang meliputi sistem bahasa, sistem pengetahuan, sistem kekerabatan dan organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem ekonomi atau mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

Semua itu melahirkan berbagai wujud aktivitas manusia untuk mempertahankan hidupnya serta beragam ritual dan tradisi sebagai bentuk apresiasi manusia terhadap berbagai peristiwa yang dialami, misalnya menghindari musibah dan mensyukuri hal-hal baik yang dialami. Terciptanya bermacam-macam bentuk karya seni merupakan perwujudan dari respons manusia terhadap segala sesuatu yang dialami dan dirasakannya.

### **Budaya dan Zona Nyaman**

Lahirnya berbagai bentuk budaya yang unik dan khas pada masyarakat adat menggambarkan kondisi masyarakat adat yang berhasil membangun zona nyaman mereka. Mereka telah menemukan ekosistem kehidupan yang bersinergi dan

harmoni dengan sesamanya, dengan alam fisik tempat mereka hidup, dan dengan alam spiritual yang mereka yakini. Budaya akan bisa terwarisi secara berkelanjutan bila generasi selanjutnya pun mampu mencapai kesadaran untuk membangun kondisi zona nyaman mereka. Terciptanya zona nyaman melahirkan kondisi rasa damai, ketenangan jiwa, kebahagiaan, yang menjadi salah satu kunci terwariskannya budaya tradisi masyarakat dari generasi ke generasi. Namun, kehidupan modern yang sarat dengan aspek materiil membuat banyak pergeseran dalam cara pandang dan cara hidup masyarakat dalam mendapatkan zona nyamannya.

Semakin terbukanya jendela informasi di era digital ini menjadi salah satu penyebab utama pergeseran ini. Iming-iming gaya hidup hedonis metropolitan menyelinap sampai ke pelosok desa melalui media digital, menularkan angan-angan semu tentang zona nyaman modern kepada masyarakat desa. Terbitlah keinginan-keinginan baru yang menjelma menjadi kebutuhan hidup baru. Akibatnya, sebagian masyarakat desa menjadi semakin jauh dari bumi yang seharusnya dipijak dan langit yang seharusnya dijunjung. Mereka tidak sanggup lagi mengolah alam dan potensi desanya, gagal berpikir dalam menemukan cara menciptakan zona nyaman mereka di desanya sendiri. Mereka kehilangan sinergi dan harmonisasi dengan manusia, alam, dan spiritual, yang ada di lingkungan desanya.

Demi pemenuhan kebutuhan hidup (dan keinginannya), sebagian masyarakat desa memilih cara instan. Mereka memilih meninggalkan desanya dalam upaya mencari nafkah, baik merantau bekerja di kota-kota besar, bahkan bekerja di luar negeri sebagai TKI. Desa ditinggalkan. Akibatnya, warisan budaya dari generasi sebelumnya (berupa cara bertahan hidup bersama alam, tradisi, dan ritual) terputus dan terlupakan karena tidak lagi ada yang meneruskan. Hilanglah zona nyaman, hilanglah rasa kedamaian, dan lunturlah kebudayaan yang akan diikuti oleh runtuhnya sebuah bangsa.

Bagaimana solusi untuk menjaga kelestarian budaya, khususnya di desa? Salah satu hal yang perlu dijawab adalah bagaimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan zona nyaman (terutama untuk pemenuhan kebutuhan hidup dasar) di desanya sendiri. Di sinilah negara wajib hadir dan harus mampu memfasilitasi serta mendorong munculnya langkah-langkah yang solutif.

## **Wisata Desa**

Dari kacamata Hidora (Hiduplah Indonesia Raya), wisata desa dapat menjadi salah satu solusi untuk menjawab pemenuhan kebutuhan hidup dan menahan gelombang urbanisasi pemuda desa ke kota (dan luar negeri), sekaligus sebagai salah satu alat untuk melestarikan budaya dan alam serta lingkungan hidup di desa.

Alam desa yang indah disertai kekhasan dan keunikan budaya (kesenian, tradisi, kearifan tradisional, kehidupan pertanian, kehidupan nelayan, dll.) yang dimiliki oleh masyarakat desa sebenarnya dapat dilihat sebagai daya tarik wisata. Dalam dunia pariwisata, budaya menjadi salah satu unsur penting yang menjadi daya tarik berkunjungnya wisatawan ke suatu daerah. Berdasarkan riset, didapatkan data bahwa daya tarik wisata di Indonesia meliputi alam (35%), budaya (60%), dan *man made*/buatan (5%). Pariwisata dianggap sebagai solusi yang strategis karena pariwisata tidak mengenal batas negara, suku, agama, ras, gender, dan tidak bisa diembargo. Pariwisata hanya akan terhambat jika terjadi bencana alam dan perang atau kekacauan keamanan.

Dari segi ekonomi, pariwisata juga mampu menyerap keuntungan finansial yang bisa terdistribusi langsung kepada masyarakat sampai ke pelosok desa yang menjadi tujuan wisata. Namun, tidak bisa dipungkiri, ada risiko-risiko yang harus diperhitungkan dan ada koridor-koridor yang harus dijaga agar wisata desa tidak malah menimbulkan permasalahan baru. Karena pariwisata itu seperti api, bisa untuk memasak makanan, namun bisa pula membakar dapur bahkan rumah kita. Oleh sebab itu, diperlukan konsep serta pengelolaan yang benar dan bijak agar tidak menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari.

## **Berbasis Values**

Konsep wisata desa berbeda dengan konsep desa wisata. Dalam konsep desa wisata, sebuah desa dikembangkan untuk dijadikan objek wisata. Dengan tujuan menjadikannya desa wisata, tidak jarang desa menciptakan sesuatu yang bukan berasal dari budaya asli yang ada di desa demi mengejar dan menyesuaikan tren serta kebutuhan wisatawan. Sebaliknya, konsep wisata desa beroperasi dengan cara yang berbeda. Dalam konsep wisata desa, yang dilakukan adalah mengemas potensi wisata dan budaya yang sudah ada dan yang dimiliki oleh desa agar menarik wisatawan datang berkunjung. Dalam konsep ini, karakter alam dan budaya masyarakat desanya yang dijadikan daya tarik wisata. Jadi, jika **desa wisata berbasis pada venue atau place** (tempat), **wisata desa lebih berbasis pada values** (nilai-nilai).

Dengan konsep wisata desa yang berbasis pada *values*, wisatawanlah yang "digiring" untuk belajar memahami, menghargai, menghormati, bahkan tertular nilai-nilai yang diyakini masyarakat desa. Bukan sebaliknya, masyarakat desa yang tertular dan mengikuti perilaku serta budaya yang dibawa wisatawan. Oleh karena itu, alam, budaya, dan nilai-nilai warisan leluhur perlu digali, dipetakan, dan dipelajari kembali oleh anak-anak muda, dijaga serta dilestarikan oleh seluruh masyarakat desa. Selain itu, organisasi, sistem manajerial, penguatan SDM, rambu-rambu, dan

koridor dalam pengelolaan wisata desa harus dibangun dan disepakati bersama agar desa tidak kehilangan akar budayanya akibat hadirnya aktivitas wisata di desa. Agar tidak terjadi salah visi, salah arah, dan salah kelola dalam pengembangan wisata desa diperlukan pendampingan dan akselerasi dalam membangun sinergi dengan berbagai elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, akademisi, praktisi, media, seniman, budayawan, pelaku UMKM, sesepuh desa, tokoh masyarakat, hingga pemuda desa.

## **Pemuda dan Desanya**

Pemuda desa menjadi ujung tombak dalam mengonservasi budaya, melestarikan alam dan lingkungan hidup, mengembangkan wisata desa, dan membangun desa. Di zaman serba digital dan material ini, membangun ketertarikan pemuda desa terhadap potensi alam di desanya dan membuat mereka dapat menghargai harta karun budaya desanya serta tergerak untuk melestarikannya merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Diperlukan “jembatan” yang bisa membangun keyakinan anak muda akan pentingnya keterlibatan mereka dalam menjaga warisan leluhur tanpa membuat mereka merasa tertinggal dalam hal teknologi dan perkembangan di era digital.

Wisata desa dapat menjadi salah satu cara untuk menjembatani hal tersebut. Keunikan dan kekhasan alam serta budaya desa yang menjadi daya tarik wisata dapat menjadi media pembelajaran bagi anak muda desa untuk mengembangkan diri dalam memanfaatkan teknologi digital secara produktif bagi kemajuan desanya. Melalui teknologi digital, anak muda dapat mendokumentasikan, memetakan, mempublikasikan, sampai memasarkan potensi desanya secara digital dengan jangkauan global tanpa batasan teritorial. Selain itu, melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan wisata desa, anak muda desa akan belajar mengenai kepemimpinan, organisasi, wirausaha, pelayanan, pemasaran, pelestarian alam, budaya, dan segala hal yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

## **Dari Desa untuk Nusantara dan Dunia**

Dengan konsep dan pengelolaan yang benar dan bijak, maka wisata desa bisa menjadi salah satu cara yang cukup efektif dalam membangkitkan semangat untuk kembali ke desa. Masyarakat desa bisa menemukan kembali cara membangun “zona nyaman” dalam memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan spiritualnya tanpa harus meninggalkan desa. Melalui cara ini akan terbangun kesadaran masyarakat desa untuk menjaga alam, serta menggali, mempelajari kembali, dan merawat budaya yang mereka miliki. Kelestarian alam dan budaya masyarakat desa akan

menjadi nilai positif yang menarik untuk dipelajari dan menjadi sumber inspirasi bagi wisatawan yang datang ke desa dan tentunya bagi pemerintah daerah setempat.

Dengan paradigma ini perlu ada orang yang mau dan mampu bergerak di bidang pariwisata, tapi tidak memperlakukan pariwisata sebagai urusan bisnis, finansial, dan bahkan politik. Pariwisata perlu digerakkan dalam koridor yang produktif bagi kemaslahatan masyarakat. Pariwisata sebenarnya perihal kemanusiaan dan masyarakat, dan dapat dijadikan satu metode efektif untuk merawat alam dan budaya, serta melahirkan nilai-nilai. Pariwisata juga dapat dijadikan alat untuk membangun kedamaian dan perdamaian.

*Nilai-nilai dari desa menginspirasi nusantara.*

*Nilai-nilai dari desa menginspirasi dunia.*

# Etika Pembakti

*Trie Utami dan Melani Budianta*

## **Tugas Seorang Pembakti**

Istilah CSR atau *Community Social Responsibility* sudah lazim dikenal. Biasanya, istilah itu dilekatkan pada program-program kemasyarakatan yang dilakukan oleh perusahaan komersial. Perusahaan dituntut untuk mempunyai tanggung jawab sosial dengan turut serta mengembangkan komunitas di sekitar wilayah operasionalnya. Tentu ada kriteria yang menentukan program CSR yang baik dan tidak melenceng dari sasaran. CSR yang baik bertujuan untuk memberdayakan komunitas, bukan sekadar amal atau berupa pemberian cuma-cuma pada waktu tertentu. CSR yang buruk terjadi kalau kegiatan sosial itu menyebabkan masyarakat tergantung pada perusahaan atau kegiatan yang dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk mengiklankan atau mempromosikan merek perusahaan.

## ***Personal Social Responsibility (PSR)***

Bagaimana dengan individu yang terpenggil untuk menjadi “pembakti”, seseorang yang mengabdikan waktu dan keahliannya untuk mendampingi kampung dan komunitas tertentu? Untuk individu seperti ini, istilah yang dipakai adalah PSR (*Personal Social Responsibility*) atau tanggung jawab sosial secara pribadi. Istilah ini terlontar begitu saja ketika saya, Trie Utami, sedang memberikan sebuah presentasi tentang tanggung jawab seorang pembakti.

Seperti halnya CSR, kegiatan pembakti dalam membantu masyarakat memiliki nuansa yang positif. Meskipun tujuan dan niatnya baik, cara untuk mencapai niat tersebut bisa keliru. Jika keliru, maka dampaknya kurang baik. Untuk menjadi pembakti, individu dituntut memiliki kematangan psikologis, kondisi mental yang baik, dan kesadaran yang tinggi agar tidak mudah tergoda untuk memanfaatkan komunitas sebagai panggung bagi dirinya sendiri. Uluran tangan hendaknya tidak menciptakan ketergantungan. Gagasan untuk memberdayakan masyarakat –sebaik

apapun—, jika dilaksanakan dengan cara *top-down* atau dengan memaksakan keinginan pembakti sendiri, pada akhirnya tidak akan memberdayakan masyarakatnya. Dalam pendekatan satu arah seperti itu, masyarakat tidak mendapatkan kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam proses yang bersifat demokratis, suatu proses pembelajaran untuk berinisiatif, kreatif, percaya diri, dan mandiri.

Demikian halnya bila gagasan atas nama pemberdayaan –secemerlang apapun— jika dilaksanakan tanpa perencanaan dan pemetaan, serta tidak disertai pengetahuan yang cukup, pada akhirnya justru akan menggiring masyarakat menuju ke arah sebaliknya. Dalam proses aplikasi program, masyarakat tidak mendapatkan kesempatan untuk melebarkan wacana, meniti pengalaman, dan mengalami pembelajaran. Pembakti, layaknya seorang filantropi, membuat suatu karya atau tinggalkan agar dapat dimanfaatkan seluas-luasnya bagi kepentingan masyarakat umum dalam jangka waktu yang tak terbatas. Dalam kapasitasnya, seorang pembakti akan selalu berupaya memaksimalkan fungsi dirinya dengan cara mengoptimalkan kehadiran dan kebermanfaatannya sebagai seorang manusia.

Dalam konteks keindonesiaan, seorang pembakti akan bertindak sebagai seorang warga negara yang berkewajiban membela tanah airnya. Sementara itu, dalam konteks berkebangsaan, seorang pembakti akan bekerja sebagai pemangku dan pelaku budaya yang bermartabat untuk dan atas nama bangsanya. Sebagai anak bangsa, seorang pembakti wajib memiliki perasaan cinta tanah air yang mengakar, giat menumbuhkan rasa persaudaraan, menjunjung tinggi kebhinekaan, serta senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan. Dengan dasar itulah ia merasa memiliki tanggung jawab sosial secara pribadi yang ia wujudkan dalam kerja kemasyarakatan yang konkret dan riil untuk tujuan pemberdayaan masyarakat. Tujuan akhirnya jelas, yaitu agar bangsanya maju, berdaya, mandiri, dan sejahtera. Demikianlah kepribadian seorang pembakti yang memiliki PSR, yakni rasa tanggung jawab yang besar terhadap masyarakatnya.

Apa saja yang perlu dicermati oleh seorang pembakti dalam mewujudkan PSR-nya?

## **Posisi Pembakti**

Pertama-tama, pembakti perlu bertanya bukan untuk apa ia bekerja, tetapi untuk siapa. Jika pembakti sudah menyadari untuk siapa ia bekerja, maka diperlukan pemosisian diri. Pembakti adalah orang luar yang berada di dalam untuk menemani proses pengembangan diri komunitas yang didampinginya. Pada tahap ini, pembakti perlu masuk dalam kehidupan masyarakatnya. Diperlukan kerendahan hati untuk duduk sejajar dan mengupayakan agar dirinya dapat diterima oleh masyarakat.

Meskipun ada di dalam komunitas, pembakti tidak ikut larut di dalamnya karena ia mempunyai peran sebagai:

- Fasilitator/Katalisator

Pembakti perlu menggerakkan dinamika kelompok dalam komunitas tersebut agar dapat bersama-sama memberdayakan diri. Ada yang perlu diberi penguatan dan dorongan agar berani maju. Ada yang perlu diberi tantangan. Hal yang paling penting, masyarakat dibuat bergairah untuk maju. Keberhasilan pembakti bisa diukur dengan cara yang sederhana, yaitu semakin tidak dibutuhkan, berarti semakin berhasil. Jika pembakti terus-menerus dibutuhkan, berarti ia menciptakan ketergantungan dan tidak berhasil membuat masyarakatnya mandiri. Pembakti berhasil jika usahanya menghasilkan penggiat-penggiat baru dari masyarakatnya, yang membangun berbagai inisiatif baru. Di sini pembakti berperan menjadi teman, pendamping, dan pendorong yang tidak selalu harus tampil. Ia belajar untuk melebur dan tak terlihat.

- “Penjahit”

Pembakti harus memiliki kemampuan untuk merajut dan mempertemukan berbagai sumber daya sesuai kebutuhan. Sumber daya tersebut bisa datang dari luar komunitas, misalnya dari komunitas lain, kalangan akademisi atau tenaga ahli. Namun, seringkali solusi sebenarnya sudah ada dalam masyarakat itu sendiri atau dari suatu potensi yang semula terabaikan. Dalam hal inilah dibutuhkan kejelian pembakti sebagai orang luar untuk mengenali potensi yang ada dan menunjukkan apa yang tidak dilihat warga sebelumnya.

Pembakti adalah orang yang bersukacita ketika warga yang ditemaninya berhasil naik panggung. Ia akan mengambil tempat paling belakang dan bertepuk tangan dalam kesunyian, ibarat seorang guru tanpa nama yang menitikkan air mata kebahagiaan ketika melihat anak didiknya mampu melampaui kepandaian dirinya. Seorang pembakti adalah pejalan kehidupan yang singgah dari satu tempat ke tempat lainnya, menebar manfaat dan sudi menyediakan dirinya untuk menjadi jembatan yang dilalui banyak orang.

## **Pemetaan dan Pengetahuan Kemasyarakatan**

Dalam mengenali berbagai potensi tersebut, pembakti berfungsi menjadi pembelajar untuk bersama masyarakat menggali peluang, masalah, dan tantangan yang mereka miliki dan hadapi. Tahap ini adalah tahap pemetaan, yang mau tidak mau harus melibatkan partisipasi dari berbagai elemen masyarakat. Dalam menjawab hal yang mendasar ini, pembakti dituntut berpikir secara holistik, yakni

mampu melihat masyarakat dalam keseluruhan tatanan sosial budayanya, bukan mencari terobosan di bagian-bagian tertentu saja.

Sekalipun pembakti –sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya— ternyata mampu menggerakkan satu bagian kecil saja dari seluruh aspek yang ada di desa tersebut, seyogyanya ia tetap berpikir secara utuh dan menyeluruh, sadar bahwasanya apa yang dikerjakannya merupakan bagian yang menunjang elemen lain, baik secara langsung maupun tidak. Terobosan sekecil apapun merupakan rangkaian dari seluruh denyut kegiatan masyarakat di wilayah tersebut.

Pemetaan sangat penting sebagai proses awal pemberdayaan komunitas. Aspek demografi, ikatan-ikatan sosial, bahasa dan kosa kata, nilai-nilai budaya dan kebiasaan yang ada, relasi dengan alam dan lingkungan, perlu diidentifikasi dan dicatat, bukan oleh pembakti, tapi oleh warga komunitas. Dalam proses pembelajaran ini, pembakti dan warga perlu memahami sistem, aturan main, dan regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Desa yang mengatur administrasi kampung, termasuk kegiatannya.

Perlu juga dipetakan berbagai peluang dan persoalan yang menyangkut berbagai kekuatan yang ikut bermain dalam kehidupan sehari-hari di kampung. Ada kampung yang berada di dekat perumahan, perkantoran, atau pabrik dan perkebunan tertentu. Ada kampung yang mempunyai kedekatan dengan lembaga-lembaga keagamaan. Selain perangkat pemerintahan desa atau kampung, seperti camat, lurah, ketua RT dan RW, perlu dilihat posisi dan relasi dengan pemodal, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan, kaum ulama, dan lembaga adat. Jejaring sosial dan teknologi yang menjembatani warga kampung dengan dunia di luar termasuk yang trans-nasional dan global saat ini juga sudah perlu diperhitungkan, baik sebagai peluang maupun ancaman.

Proses pemetaan inilah yang akan mengantar setiap kampung untuk menentukan arah masa depannya sendiri. Pembakti hanya perlu memberikan gambaran dan masukan, mendorong, mengarahkan (bila perlu), atau memberikan alih pengetahuan tentang cara melakukan pemetaan. Adakalanya warga masyarakat berpikir sederhana (terutama yang tinggal di daerah terpencil dan sulit dijangkau). Mereka seringkali merasa tidak perlu melakukan pemetaan terhadap potensi kampungnya. Di sinilah pembakti berfungsi untuk menemani dan menjadi mitra kerja warga untuk kemajuan di segala bidang.

## **Penentuan Kegiatan dan Program**

Ketika bekerja untuk komunitas, seringkali orang terdorong untuk berorientasi pada suksesnya suatu kegiatan. Acara yang meriah, diliput media, serta dihadiri turis mancanegara dan pejabat, tentu membangkitkan kebanggaan. Namun, perlu

ditinjau kembali apa implikasi sosial budaya dari atraksi gegap gempita seperti itu. Jangan sampai gagasan gemilang yang sudah diwujudkan justru menimbulkan masalah baru setelah semua acara usai. Terlebih jika target untuk mengusung acara yang hebat memberikan beban kepada komunitas. Jika demikian, yang akan muncul kemudian adalah hutang masalah yang justru dapat meretakkan ikatan-ikatan sosial yang ada.

Jika pemetaan sudah dilakukan, maka dengan sendirinya pembakti bersama masyarakat dapat membaca dan memprediksi implikasi apa yang akan terjadi jika suatu program dilaksanakan. Ada kegiatan, misalnya, yang alih-alih menguatkan nilai guyub masyarakat, malah berpotensi menimbulkan persaingan dan kecemburuan sosial. Prediksi atauantisipasi terhadap dampak yang akan terjadi sangat penting dilakukan.

Sebelum menentukan kegiatan, komunitas perlu mengingat kembali tujuan akhir yang ingin dicapai. Jika masalah kampung adalah tergusurnya nilai-nilai kekerabatan dan seni budaya yang ada oleh gaya hidup urban, maka tujuan kegiatan adalah untuk: 1) mengembalikan kebanggaan akan sumber daya dan budaya kampung; 2) membangkitkan kembali kebersamaan dan kebiasaan gotong royong; dan 3) menggerakkan kegiatan ekonomi kampung berdasarkan pekerjaan utama masyarakat. Ketiga tujuan ini perlu dirumuskan bersama berdasarkan pemetaan yang sudah dilakukan.

Banyak kasus yang menunjukkan program-program di desa mengubah pola penghasilan dari masyarakat petani menjadi masyarakat jasa (melayani turis, menyediakan berbagai jasa pelayanan), dan mengubah desa dengan menciptakan ikon atau daya tarik visual untuk menjadikannya destinasi wisata. Apakah memang itu tujuan akhir yang ingin dicapai? Apa dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari dan relasi sosial di desa? Banyak kegiatan yang cenderung dipaksakan karena terpantik oleh program yang kabarnya sukses di tempat atau desa lain sehingga adopsi dan replikasi program dilakukan tanpa adanya proses pemetaan dan pembelajaran terlebih dahulu. Walaupun pada awalnya tampak bagus dan sukses, dalam langkah selanjutnya ternyata kegiatan itu malahan menjadi program bunuh diri bagi desa tersebut.

Membuat skema besar dari situasi dan kondisi yang spesifik di setiap desa atau kampung akan mempermudah pembakti dan warga untuk membuat *road map* atau peta perjalanan kegiatan secara bersama-sama. Rangkaian perjalanan yang panjang dapat dibagi ke dalam beberapa fase kegiatan, lengkap dengan target capaian pada setiap fasenya. Dengan demikian, akan muncul skala prioritas, masalah apa yang harus diselesaikan terlebih dahulu karena satu fase dengan fase yang lain saling terhubung dalam suatu garis eskalasi yang terukur.

Dari *road map* itulah, pembakti dan warga dapat mengembangkan gagasan bersama dan mengukur rentang waktu kerjanya, sekaligus dapat memprediksi hambatan dan tingkat keberhasilan serta potensi kegagalan. Dengan memiliki *road map*, seluruh kegiatan pemberdayaan dapat diposisikan sebagai langkah yang terintegrasi dengan situasi dan kondisi dalam skala yang lebih besar, sehingga pembakti dapat memberi masukan sesuai dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan warga, serta selaras dengan ritme kemajuan masyarakat secara umum. Selain itu, *road map* akan menjadikan warga secara bersama-sama memiliki kesempatan untuk ikut terlibat dan bekerja, ikut memerhatikan dan mengawal setiap rangkaian kegiatan yang dilakukan di desa atau kampung tersebut.

## **Festival Kampung: Pesta Rakyat atau Memanfaatkan Kampung sebagai Panggung?**

Ada sejumlah program yang menjadi populer sejak dekade pertama abad ke-21, yakni kampung tematik dan festival kampung. Kedua program ini sejalan dengan orientasi pada wisata budaya yang didukung oleh pemerintah. Sejak suksesnya Jember Fashion Carnivale di awal 2000-an, setiap kota dan wilayah administratif mencari ikon budaya untuk ditampilkan. Untuk memasarkan wilayah dengan ikon dan tema tertentu, diselenggarakan festival dalam kurun beberapa waktu. Banyaknya turis dan uang yang mengalir, serta gencarnya berita di media massa menjadi ukuran kesuksesannya.

Perlu disadari bahwa *event* atau acara festival tidak sama dengan pemberdayaan. *Event* hanya salah satu dari sekian ribu jalan untuk menggerakkan masyarakat. Untuk itu, perlu dikaji makna sebuah festival. Festival yang akar katanya berarti sebuah keramaian atau pesta besar, diadakan untuk memperingati sesuatu. Dalam festival biasanya ada berbagai pertunjukan dan “pasar” untuk menjual berbagai macam dagangan. Tidak ada salahnya dengan panggung dan pasar. Masalahnya, apakah panggung dan pasar menjadi sarana yang tepat untuk memberdayakan rakyat? Jika festival merupakan pesta rakyat, maka subjeknya adalah rakyat itu sendiri. Panggung untuk rakyat dan pasar dari rakyat untuk semua. Pembakti, pemerintah, dan pendamping mendorong kapasitas masyarakat agar secara percaya diri dapat tampil dan mengekspresikan diri.

Pun misalnya, ternyata salah satu jalan keluarnya adalah membuat panggung kesenian atau pesta rakyat, maka pembakti seyogyanya memiliki “bekal yang cukup” untuk dapat menemani kegiatan tersebut, mulai dari pengetahuan tentang sistem, metode, hingga mekanisme pelaksanaannya, belum lagi banyak hal yang terkait dengan aspek produksi di lapangan. Hal ini seringkali tidak diperhatikan karena si pembakti sendiri ternyata bukan orang yang memahami sistem dan proses dari

pekerjaan tersebut. Berbekal semangat tanpa disertai ilmu dan pengetahuan akan berakibat fatal. Wajah pesta rakyat berbasis budaya dan kesenian yang semula diproyeksikan sebagai pemberdayaan, kemungkinan akan melahirkan percikan masalah baru yang tidak dikenali sebelumnya dikarenakan tidak adanya proses alih pengetahuan dan pendidikan yang seharusnya dilakukan oleh si pembakti sebagai penggagas sebelum, selama, dan sesudah proses selesai.

Ini merupakan indikator bahwa gagasan pembakti mungkin tidak sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas dirinya. Kegagalan atau kesalahan dalam membangun sebuah produksi acara tidak lantas secara sembarangan dapat diartikan sebagai bagian dari proses. Hal ini dapat diminimalisasi bila pembakti melakukan pembekalan yang cukup kepada masyarakat atau mengundang teman pembakti lain yang memahami masalah atau ahli di bidangnya untuk ikut berpartisipasi dalam persiapan penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Sebaiknya, setiap kegiatan, apapun bentuknya, harus dapat difungsikan sebagai alat ukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terkait secara langsung dengan proses pemberdayaan di kampung atau daerah tersebut. Kalau hanya membuat panggung dan bazar kampung, setiap tahun masyarakat sudah sangat terbiasa menyelenggarakan pesta tahunan 17 Agustus yang isinya kurang lebih sama. Kalau sekadar ingin sukses mendatangkan banyak pengunjung dengan target perputaran ekonomi sesaat, maka pembakti lebih baik belajar saja pada pengusaha pasar malam dan komedi putar keliling.

Dari sudut pandang yang lebih khusus, pesta rakyat sesungguhnya dapat dijadikan wajah terluar atau titik puncak dari suatu proses panjang kegiatan pemberdayaan. Dengan demikian, perhelatan tersebut menjadi salah satu bagian saja dari seluruh rangkaian program yang telah dirintis sebelumnya dan menjadi target antara kegiatan yang akan dilakukan sesudahnya yang memungkinkan kegiatan berjalan secara berkelanjutan. Dalam hal ini, pesta rakyat dapat difungsikan sebagai salah satu alat ukur bagi program-program pemberdayaan yang telah lebih dulu dilaksanakan.

Untuk membuat sebuah “pesta rakyat”, tidak perlu mendatangkan selebriti yang harus didanai dan disiapkan akomodasi serta transportasinya, terlebih jika di panggung dan pesta itu rakyat hanya menjadi penonton atau sekadar menjadi pelayan untuk sebuah acara yang didatangi oleh penggemar selebriti dari berbagai penjuru. Kalau itu yang terjadi, maka desa dan kampung tak pelak hanya menjadi lokasi dari sebuah acara. Apalagi, jika rakyat harus “patungan” untuk menyediakan panggung yang diisi oleh selebriti atau malah si pembakti sendiri. Jika demikian, akan lebih efektif untuk memanggil *Event Organizer* atau pemodal, lalu membagikan keuntungannya untuk masyarakat.

Untuk itulah, ceruk-ceruk budaya beserta produknya, baik yang berwujud maupun tak wujud, apakah itu berupa tarian, nyanyian, musik, situs bersejarah, sandiwara, ritual, legenda atau cerita rakyat, kuliner, kriya, dan lain sebagainya, sebaiknya didata dan dipetakan dengan cermat terlebih dahulu. Produk budaya mana yang masih ada dan mana yang hampir punah, mana yang masih bisa dibangkitkan, dan mana yang tidak bisa. Dalam kegiatan pesta rakyat, yang patut dilakukan adalah mengupayakan agar masyarakat dapat diberdayakan melalui sektor kesenian dan kebudayaan serta dapat memiliki ruang untuk dapat tampil seluas-luasnya dalam perhelatan tersebut.

Kehidupan budaya dan kesenian masyarakat, terutama yang bernafas etnik dan tradisional merupakan kekayaan setiap suku, kampung, desa, atau wilayah. Dalam hal memberdayakan seni budaya lokal, menghidupkan kembali seluruh elemen adat istiadat, terutama yang hampir punah, merupakan salah satu kegiatan yang paling pantas diupayakan dan ditampilkan dalam suatu perhelatan kebudayaan atau pesta rakyat. Semakin sedikit jumlah penampil dari luar, semakin mendekat pada makna dan filosofi pesta rakyat itu sendiri.

## **Proses Pemberdayaan**

Idealnya, apapun kegiatan yang dipilih bertujuan untuk memberdayakan dan melestarikan semangat gotong royong. Pemberdayaan tidak semata berorientasi pada hasil. Proses untuk mengajak dan melibatkan warga sangatlah penting. Warga menyisihkan waktu untuk berkumpul, saling menggali gagasan dan pikiran, lalu bersama-sama menentukan kegiatan yang sesuai dengan hasil pemetaan.

Untuk melakukan suatu kegiatan, masyarakat juga perlu disiapkan untuk memahami pengorganisasian dan sumber daya yang diperlukan, serta mengatur pembagian tugas. Kegiatan juga menjadi ajang belajar serta menemukan bibit pemimpin dan pegiat masyarakat. Proses kaderisasi merupakan salah satu poin penting dari pemberdayaan. Peran, kemampuan, dan bekal ilmu pembakti yang mencukupi akan sangat membantu percepatan proses pemberdayaan tersebut. Alih pengetahuan dan ketekunan dalam pendampingan akan menjadi daya dorong yang kuat bagi masyarakat.

Di samping itu, pembakti tidak boleh sekadar melontarkan gagasan, memberi gambaran besar, atau cerita sukses yang diambil dari kegiatan lain, tapi tidak menyediakan waktu atau tidak memiliki kemampuan untuk mendampingi proses pelaksanaannya. Pembakti bukan sekadar pengobar dan pembakar semangat, tapi ia juga harus memfungsikan dirinya secara tepat dan proporsional. Bila seorang pembakti berkesempatan untuk mengambil peran dalam suatu komunitas, maka

ia akan mencari celah untuk mendorong segenap proses pemberdayaan tersebut secara konstruktif, apapun bentuk kegiatannya.

Suatu kegiatan mungkin masih bersifat sederhana dan kurang sempurna, atau hanya meliputi satu bidang tertentu, tetapi akan lebih bermanfaat jika merupakan hasil kerja yang dilakukan secara gotong royong. Kegiatan yang tampak meriah dan gemilang tapi bertumpu pada satu orang saja (*one person's show*) dengan pendekatan satu arah, tidak akan membuat perubahan yang berarti. Pembakti dalam hal ini harus cerdas dalam membidik situasi karena merajut gotong royong bukan hal yang mudah, terlebih di daerah yang sudah cenderung individual. Bisa saja pemantiknya adalah gagasan kecil dan sederhana, tapi dapat memanggil kembali kebiasaan gotong royong untuk kemajuan bersama.

Semangat gotong royong merupakan proses kunci, sehingga jangan sampai ditukar dengan transaksi keuangan. Jika itu terjadi, bisa muncul persaingan dan kecemburuan sosial. Pengorganisasian yang guyub akan terjadi jika masyarakat sudah melakukan pemetaan sumber daya dengan baik. Dengan sendirinya akan terpetakan keahlian dari setiap warga.

Ada pola yang sama di wilayah yang berhasil memberdayakan masyarakatnya, yaitu ketika pembakti yang menginisiasi dan mengawal seluruh proses pemberdayaan adalah seseorang yang:

- lahir, tumbuh atau tinggal di tengah masyarakat yang digerakannya dan merupakan pemimpin, apakah pemimpin pemerintahan (dari tingkat RT, RW, lurah atau camat), sesepuh, tokoh pemuda, atau tokoh masyarakat sehingga memiliki kemampuan untuk mengantisipasi dan menyelesaikan masalah secara bijak;
- memiliki dedikasi tinggi, selalu mengedepankan urusan masyarakat dibanding urusan pribadinya, tekun mendampingi dan senantiasa menemani proses yang berlangsung;
- mau masuk dan diterima oleh semua kalangan, serta mempunyai jejaring sosial yang luas, baik di dalam, maupun di luar daerah tempat tinggalnya; dan mempunyai daya kreativitas yang cukup tinggi.

Pembakti dengan keempat faktor internal seperti di atas biasanya menjadi ujung tombak pemberdayaan dan pembangunan manusia dengan tingkat keberhasilan yang jauh lebih tinggi daripada pembakti dari luar yang masuk dan memberdayakan desa yang bukan tempat tinggalnya. Gagasan kegiatan yang lahir dari warga yang didampingi dan dipimpin oleh seorang penggerak atau pembakti dengan pola ini biasanya menjadi proyeksi geliat dari situasi yang ada, sehingga program pemberdayaan –dengan sistem gotong royong— dapat dilaksanakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Suatu proses pemberdayaan yang

dikawal dengan tingkat intensitas yang tinggi merupakan suatu kondisi ideal yang perlu diupayakan oleh setiap pembakti.

## **Evaluasi**

Jika acara telah selesai dilakukan, sangat penting bagi pembakti untuk menemani warga melakukan evaluasi. Beberapa poin yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- Apakah kegiatan itu membuat generasi muda dan warga menjadi tertarik untuk menghidupkan seni dan budaya kampung?
- Apakah terjadi ruang baru untuk interaksi antarwarga?
- Apakah terjadi pelebaran kegiatan UMKM?
- Pola-pola baru apa yang muncul dalam kampung?
- Apakah jumlah pengangguran menurun, tetap, atau naik?
- Bagaimana relasi dan sinergi antarwarga, aparat kampung, pemerintah daerah?
- Hambatan dan masalah apa yang masih belum teratasi?

Siapa aktor-aktor yang ikut berperan dalam kegiatan kampung (pemodal, pembakti, akademisi, lembaga adat, agama, dll.), dan apa evaluasi warga terhadap peran para aktor?

Di samping delapan poin di atas, setiap kampung dapat mencatat hal-hal lain yang terkait dengan konteks khusus kampungnya masing-masing. Proses dan hasil evaluasi merupakan kerja bersama warga. Berdasarkan hasil evaluasi itu, pembakti dapat menemani warga untuk menentukan langkah perbaikan yang perlu diambil untuk melanjutkan atau memperbaiki suatu program atau mungkin menghentikan program tersebut apabila hasilnya justru kontra produktif. Evaluasi hanya dapat dilakukan bila kegiatan tersebut benar-benar dilaksanakan menggunakan pemetaan awal yang cermat, teliti, dan taat pada proses serta patuh pada sistematika yang terukur sebelum kegiatan dilakukan. Tanpa adanya dasar konstruksi tersebut, evaluasi kegiatan mustahil dilakukan dan potensi masalah tidak dapat dikenali.

Membangun sebuah komunitas, menggerakkan suatu kelompok, atau membantu program pemberdayaan masyarakat tidak bisa dengan gaya uji coba. Gagasan yang berhasil di satu tempat belum tentu berhasil di tempat lain. Fungsi dari evaluasi adalah untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu aplikasi gagasan di dalam sebuah kegiatan, terutama bila dikaitkan dengan situasi dan kondisi spesifik dari sebuah wilayah tertentu. Hasil dari evaluasi inilah yang dapat dibagikan kepada warga masyarakat secara transparan atau kepada pembakti lain sebagai bahan diskusi dan pembelajaran.

Seringkali evaluasi sulit dilakukan apabila gagasan tersebut dilaksanakan tanpa disertai sistem kerja, atau apabila pembakti dan masyarakat tidak memandang penting evaluasi karena ukuran kesuksesan kegiatan diletakkan pada tataran euforia, atau apabila kegiatan yang dilakukan dianggap sebagai hasil akhir, sehingga kegiatan itu tidak difungsikan sebagai bagian dari program berkelanjutan yang terintegrasi. Hal semacam ini harus dihindari karena mengakibatkan tidak terjadinya suatu pola pengenalan, perbaikan, dan pengembangan kegiatan yang berujung pada pemberdayaan masyarakat.

Poin yang penting untuk diwaspadai adalah ketika seorang pembakti terjebak pada ruang-ruang *glorifikasi*. Hal ini dapat berlaku seperti penyakit menular yang menjangkit warga masyarakat yang ikut terlibat dalam kegiatan tersebut atau menjangkiti teman pembakti. Kecenderungan ini sering menyebabkan menurunnya tingkat kesadaran sebagai pembakti karena perasaan puas atau euforia yang berlebihan. Secara perlahan hal ini dapat menimbulkan sikap arogan yang akan mengakibatkan terhambatnya atau terlupakannya proses evaluasi.

Adapun evaluasi merupakan kunci keberhasilan untuk mengukur setiap langkah, baik pendek atau panjang, kecil maupun besar. Proses ini merupakan sarana belajar yang efektif dengan tujuan mengembangkan potensi positif sekaligus dapat meminimalisasi potensi negatif, baik secara individual maupun komunal.

## **Strategi Pembakti: Menyebar Virus**

Pada akhirnya, setiap pembakti perlu menyadari keterbatasan dirinya. Setiap pembakti juga memiliki potensi, kepakaran, dan kepribadian yang berbeda-beda. Apa yang dapat dilakukan oleh satu pembakti, tidak dapat ditiru begitu saja oleh pembakti lainnya karena masing-masing memiliki kemampuan sosial dan pendekatan berbeda-beda. Demikian pula, tidak ada satu pembakti “super” yang bisa memecahkan masalah satu kampung. Sekali lagi, pembakti hanyalah seorang pendamping dan mitra. Ada kalanya, dalam kondisi tertentu (lihat tulisan Bachtiar Djanan M.), seorang pembakti harus tahu, kapan ia harus mundur atau berhenti.

Fungsi dari sebuah komunitas atau jejaring adalah untuk berdiskusi, berbagi masalah dan bersama-sama mencari solusi. Masyarakat adalah target utama dari kerja seorang pembakti. Menyadari kapasitas dan mengukur kapabilitas diri adalah hal yang sangat penting. Dengan demikian, ia dapat bekerja sama dengan yang lain, bahkan mungkin justru memberikan peran lebih luas kepada pembakti lain yang memahami masalah tersebut. Hal ini dimungkinkan karena dalam diri seorang pembakti selalu ada kepentingan yang lebih tinggi, yaitu kemajuan masyarakat itu sendiri.

Kondisi yang ideal dari seorang pembakti adalah ketika ia sudah tuntas dengan kepentingan dan ego dirinya dan sudah ke luar dari cangkang agenda pribadi yang terselubung (dalam tingkat kesadaran tertentu, hal ini bahkan tidak disadari oleh para pembakti sendiri). Keinginan untuk terkenal, dikenal, mendapatkan kredit pujian dan tepuk tangan, atau target untuk mencapai suatu level tertentu, sesungguhnya adalah ancaman paling nyata bagi pembakti maupun masyarakat yang didampinginya.

Pembakti juga harus mampu memilah, kapan ia perlu tampil, kenapa ia mesti menunjukkan diri dan apa efeknya ketika ia maju ke depan. Sadar akan peran, situasi, posisi, dan berbagai dampak yang mungkin terjadi akan membuat pembakti memahami untuk siapa ia bekerja dan untuk tujuan apa ia mengabdikan diri. Bila ia sudah menyatakan dirinya sebagai pembakti, maka sejatinya ia tak lagi butuh panggung, karena secara psikologis ia telah matang dan siap bekerja untuk masyarakat.

Seorang pembakti juga harus cerdas dalam menganalisis situasi, peka terhadap kondisi, dan memiliki peta besar, sehingga sekecil apapun kegiatan yang dikerjakannya bersama masyarakat sesungguhnya adalah bagian tak terpisahkan dari sebuah mesin kebangsaan bernama Indonesia. Setiap gerakan yang berkaitan dengan proses kegiatan itu sebaiknya selaras dan terintegrasi dengan situasi dan kondisi nasional karena tidak bisa hanya dipikirkan dalam konteks lokal dan parsial. Langkah kecil tapi tepat, jauh lebih baik daripada langkah besar tetapi keliru. Gagasan kecil tapi strategis, jauh lebih efektif daripada ide besar tapi *ngawur*.

Selain itu, pembakti juga perlu mengukur kemampuannya ketika memilih desa atau kampung yang akan ditemani. Desa yang sudah sukses dan mandiri tidak perlu diberdayakan lagi. Pada saat yang sama, pembakti tidak harus memulai di sebuah wilayah yang terlalu berat karena potensinya sulit untuk diangkat. Di sinilah gunanya ketika seorang pembakti bekerja dengan sistem, menggunakan proses yang terstruktur, mengerti metode, dan memahami mekanismenya. Otak yang berpikir konstruktif akan melahirkan gagasan solutif yang dapat diterapkan dengan tolok ukur yang logis di lapangan. Cara berpikir yang kontekstual dapat melahirkan ide-ide cemerlang yang substantif, sesuai dengan kondisi yang ada di tempat ia mengabdikan diri.

Salah satu cara untuk melakukan perubahan sosial secara efektif adalah mengembangkan strategi “menebar virus”. Untuk itu, pembakti perlu memilih satu titik sebar yang strategis. Jika pembakti mempunyai akses terhadap satu kampung tertentu dan dapat menjalin relasi sosial yang baik dengan masyarakatnya, maka terbuka kemungkinan yang besar untuk menemani kampung itu. Oleh sebab itu, tak jarang pembakti menemani desa atau kampung di tempat atau dekat ia bermukim, walaupun hal itu tidak selalu menjamin bahwa ia dapat diterima.

Ada tiga hal yang menjadi indikasi dari titik tebar virus yang efektif, yaitu pembakti dapat diterima oleh masyarakatnya, kondisi kampung memungkinkan untuk ditemani, dan pembakti menemukan orang-orang yang ditengarainya dapat didorong untuk menjadi penggiat mandiri. Dengan memilih kampung yang strategis dan bisa ditemani untuk mengolah diri menjadi kampung yang bergairah, maka kampung tersebut dapat menjadi inspirasi bagi kampung-kampung yang lain. Itulah inti dari program sonjo kampung yang digagas oleh Jaringan Kampung Nusantara. Melalui kegiatan berbagi gagasan, satu kampung mendorong geliat kampung yang lainnya. Pembakti yang sukses adalah pembakti yang dapat menebarkan virus semangat bergotong royong semacam itu.

Menemani sebuah kampung untuk menggeliat dalam seni budaya, bersemangat gotong royong dan menjadi mandiri, tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kisah pembakti dalam buku ini menunjukkan bagaimana kesabaran, keuletan, komitmen, dan ketangguhan diperlukan dalam prosesnya. Jatuh bangun dan kegagalan juga merupakan bagian dari proses tersebut, karena yang berproses bukanlah kampung yang ditemaninya, melainkan pembakti dan masyarakat yang ditemaninya.

Untuk itu, seorang pembakti selayaknya adalah seorang pembelajar. Namun, dalam belajar dan jatuh bangun, ia harus memegang satu hal, yaitu ia tidak boleh menggunakan masyarakat sebagai alat uji coba atau sebuah eksperimen. Kembali pada PSR, inti panggilan pembakti adalah sebuah obligasi moral, rasa tanggung jawab kepada masyarakat, kepada bangsa, negara, dan tanah air, Indonesia.

## **Metode Aak**

Agus Wayan Gusindra Djoko Prihatin, pemuda kelahiran Pasuruan yang menjadi guru musik di Malang dikenal di Japung dengan panggilan akrab Aak. Dalam komunikasi WA Japung, Aak muncul sebagai sosok “badut” yang diolok-olok. Ia adalah tokoh “gembul” yang doyan makan dan tidur. Foto yang diambil teman-temannya, yang juga melibatkan posenya sendiri, selalu memperlihatkan Aak yang sedang menghabiskan makanan, makan dengan rakus, atau tidur menggeletak di mana saja. Jarang ada perbincangan panjang lebar atau bernada serius yang ditampilkannya, kecuali untuk memberi tahu di mana ia berada. Uniknyanya, ia selalu berada di mana-mana. Hampir di setiap kegiatan yang dikelola pembakti Japung, ada foto Aak di sana. Tentu ada juga foto ketika ia melakukan profesi yang

ditekuninya, yaitu bermain musik (dawai) bersama pemusik Japung lainnya, seperti Redy Eko Prastyo, Jamal, Ali Gardy. Selain itu, ia sering ditampilkan bepergian bersama Trie Utami dan suaminya Rully Fabian.

Di balik sosoknya yang dijadikan bulan-bulanan warga Japung, Aak—menurut beberapa rekannya— justru seorang pembakti kampung yang perlu dijadikan teladan, karena ia mempunyai metode khusus untuk memberdayakan budaya kampung. Di tahun 2018, ia bahkan mendapat penghargaan sebagai motivator budaya lokal dari *Radar Malang*. Siapa sebetulnya Aak dan apa yang dikerjakannya?

Pada tanggal 2 Juli 2018, Melani Budianta melakukan wawancara dengan Aak. Berikut petikannya:

***Bagaimana Aak hidup dari bermusik?***

Sejak masih kuliah, saya sudah terpanggil untuk menyiapkan siswa sekolah untuk tampil dalam pentas kesenian. Saya juga mengajar di Panti Asuhan Anak Yatim Piatu, biasanya pada akhir minggu, dengan cuma-cuma. Selama 2 tahun saya menyiapkan siswa sekolah untuk pentas, saya tidak pernah menarik bayaran. Cukup jika saya mendapat makan dan kaos.

Untuk membiayai kehidupan sehari-hari saya memberi les gitar untuk anak-anak. Dengan itu saya bahkan bisa membiayai kuliah saya sendiri. Lama kelamaan, pihak sekolah atau yayasan merasa sungkan dan memberi saya uang imbal jasa. Mula-mula Rp.200.000 untuk mengajari anak-anak sekolah tampil dengan dua lagu (15 menit). Angka itu naik, sampai satu juta, dua juta, sampai 4,5 juta untuk tampil maksimal 15 menit. Kalau sekolahnya tidak mampu, saya tidak mau menerima bayaran. Yang penting kepala sekolah ingin memajukan seni.

***Aak kabarnya sering menyumbangkan alat musik untuk sekolah di kampung-kampung. Uangnya dari mana?***

Saya punya dua pundi-pundi. Satu untuk membiayai kehidupan saya sehari-hari, satu untuk musik. Kalau saya dapat *fee* untuk main musik, uangnya tidak untuk pribadi, tapi untuk pundi-pundi musik. Saya juga sering diminta membelikan alat musik untuk sekolah-sekolah, tapi saya tidak mengambil untung. Penjual biasanya memberi saya persen, seratus ribu atau berapa, saya tidak ambil, dan minta untuk disimpan di tempat penjual. Setelah beberapa lama, “tabungan” mencapai jumlah yang cukup

untuk beli alat musik. Itu yang saya pakai untuk membeli alat musik dan menyumbangannya untuk sekolah-sekolah. Penjual dapat amal, sekolah dapat amal juga.

### ***Kapan berkenalan dengan Japung? Apa kegiatan Aak bersama Japung?***

Saya mulai bergabung dengan Japung setelah acara festival Japung di Banyuwangi. Sebenarnya saya tidak tahu apa itu Japung, saya hanya membantu kegiatan bermusik saja. Tak lama kemudian, saya diikutkan masuk kelompok WA Japung. Waktu itu namanya masih Jaringan Festival Kampung.

Ketika saya pergi ke beberapa festival kampung, saya berpikir, *kok* teman-teman hanya main di panggung? Kenapa *workshop* diadakan di tempat acara, bukan di sekolah dan di masyarakat? Mengapa penduduk lokal hanya menonton? Padahal, festival *kan* merupakan ladang untuk mengenalkan seni?

Saya biasanya datang di hari H-3 atau H-4, lalu jalan-jalan ke masyarakat, penduduk, dan sekolah-sekolah. Di situ saya mengamati potensi sekolah-sekolah untuk main musik. Ada yang tidak punya alat musik apapun. Tapi benda apa saja kan bisa dimainkan. Di beberapa sekolah, saya malah heran. Saya lihat ada stan untuk memajang alat musik tradisional macam-macam. Ada gambang, kenong, dan alat musik lokal. Saya tanya, ada gurunya atau program untuk memainkan? Tidak ada, karena tidak ada yang mengajarkan. *Kok* bisa dapat alat musik seperti ini? Sumbangan dari pemerintah. Lalu saya menawarkan, Boleh saya bantu? Tapi ada syaratnya. Yang penting, harus ada pendamping gurunya. Guru-guru lalu ditanya, siapa yang mau? Setelah itu, beberapa guru-guru ikut dan mendampingi. Ini cara main angklung, ini cara main ini dan itu. O, begitu. Mereka jadi bisa mengajarkan untuk wisuda sekolah dan lainnya.

Akhirnya saya masuk ke beberapa sekolah. Saya melatih dan mengajak teman-teman yang mau diajak. Di Festival Buen yang pertama di Kalimantan Timur, ada Giles, “bule” dari Perancis, penggarap musik dan teater, yang tinggal di Ubud, Bali. Dalam waktu kurang 2 hari, kira-kira 20 anak berlatih dan bisa tampil dalam acara festival. Akhirnya mereka tampil, banyak yang menangis terharu. Semua amat bangga. Banyak anak yang menangis terharu. Keluarganya, tetangganya ikut nonton.

Kenapa harus mengundang orang di luar kampung? Tidak perlu mengeluarkan uang untuk mengundang pemusik dari daerah lain. Ketika pemusik tamu main, siapa yang nonton? Ketika anak main, penonton penuh berdesakan. Tidak perlu mengundang orang yang sama terus-menerus. Apalagi yang dimainkan bukan musik yang berasal dari daerah itu. Kalau panitia memanfaatkan pemuda dan anak-anak di daerah itu, mereka akan membawa teman-teman dan massanya.

Saya ingin mengajak teman-teman pemusik Japung lainnya untuk mengajar anak-anak di sekolah-sekolah. Di Festival Buen kedua, saya mengajak Ganzer, pemusik Sasando. Mula-mula ia minder, karena tidak biasa mengajar, jadi sulit berbicara. Setelah sesi kedua, komunikasi sudah mulai baik. Di sesi ketiga ia sudah sangat percaya diri.

### ***Apa manfaat Japung bagi Aak?***

Japung sangat membuat pikiran saya semakin luas, karena saya bisa bertemu orang-orang dengan berbagai ilmu. Jika tujuannya memberdayakan budaya kampung, yang saya lakukan selama ini masih bisa nyambung.

## 8

# Menabur Benih, Menuai Kebersamaan

*Maryaeni*

Tidak terbayangkan sebelumnya jika hari ini kita bisa menyantap *spageti* dan *dunkin donuts*, di saat yang sama kita sudah berangan-angan besok akan *gathering* di *Pizza Hut*, setelah itu menuju kafe meneguk *black coffee*. Minggu depan ada janji dengan *friends* untuk FGD di restoran mewah di pantai, sambil menghirup udara laut berpasir putih dengan pemandangan yang beragam. Malam harinya, ada janji di sebuah diskotik dengan sajian yang menggugah birahi, diiringi alunan musik untuk berjingkrak-jingkrak setelah menenggak secangkir arak.

Bagaimana kabar tempe *mendoan* dan *bongkreng*, masih adakah *pala pendem* dan *cenil* dengan secangkir kopi pahit? Masih adakah sajian *siter* dengan lagu-lagu *jadul* dan masih sehatkah lidah kita dengan *sambel* bawang dan nasi jagung? Sadarkah bahwa saat ini kita diam dalam era industri dan *milenial*, bahkan mungkin zaman digital yang tidak lagi mengenal *sonjo* dan *jagong*, lebih-lebih *soyo* (dalam ejaan Jawa dibaca *saya*). Ke mana jati diriku berlari, di mana rasaku bersembunyi, kusimpan di mana ketok bumbungku, kukubur di mana senandung desaku?

### **Desaku**

*... the countryside and the village are symbols of stability and security, of order.* (Pedesaan dan desa adalah simbol stabilitas dan keamanan, ketertiban. – Wemyss, GMW2012, hlm. 42).

*Village is a place where you can find peace, unity, strength, inspiration, and most importantly a natural and beautiful life.* (Desa adalah tempat di mana Anda dapat menemukan kedamaian, persatuan, kekuatan, inspirasi, dan yang terpenting adalah kehidupan yang alami dan indah... –Minahil Urfan)

Beberapa saat kita terlena dengan gemerlap lampu kota, gedung tinggi, mal, dan resto berkaraoke, sementara kita terlahir di bilik kecil dengan anyaman bambu milik dukun bayi di sebuah desa terpencil yang sepi dan gelap. Apakah kita melupakan hakikat desa? Apakah kita sudah mengabaikan ringan kaki saudara kita di desa? Bagaimana perubahan desaku saat ini?

Mari kita cermati lirik lagu berikut ini sambil kita bayangkan bagaimana alam pedesaan dengan hijau daun dan rindang pepohonan, rimbun buah, dan sayuran.

### ***Desaku***

*Alam pegunungan di sana rumahku  
Buah dan sayuran kulihat selalu  
Beraneka bunga menarik di hati  
Seakan di surga bukan di dalam mimpi  
Jangan kau biarkan  
Bangunkanlah bersama Desaku  
Sangat disayangkan kalau dilupakan  
Kita kan nikmati sampai di akhir nanti  
Jangan kau biarkan  
Bangunkanlah bersama Desaku  
Sangat disayangkan kalau dilupakan  
Kita kan nikmati sampai di akhir nanti  
Alam pegunungan di sana rumahku  
Buah dan sayuran ku lihat selalu  
Beraneka bunga menarik di hati  
Seakan di surga bukan di dalam mimpi*

Apapun arti dan definisi desa, poin yang utama adalah kehidupan masyarakatnya yang kian mengalami pergeseran ke arah yang positif dan lebih baik daripada kehidupan desa sebelumnya. Lain dahulu lain pula sekarang, masa kini. Hampir separuh lebih penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan. Karena gunung berapi berperan penting, bahkan utama dalam pengembangan dan peningkatan bidang pertanian, ada hubungan yang kuat antara pembangunan pertanian, kepadatan penduduk, dan lokasi gunung berapi. Konsentrasi terbesar gunung berapi aktif adalah di Jawa dan kepadatan penduduk terbesar terjadi di daerah-daerah yang berdekatan dengan gunung berapi, misalnya di selatan dan timur Gunung Merapi, yang tanah diperkaya oleh abu vulkanik. Pulau Jawa, Madura, dan Bali memiliki struktur pedesaan yang sangat sistematis yang sebagian besar didasarkan pada budi daya padi basah. Daerah lain dari populasi pedesaan yang tinggi ditemukan

di beberapa bagian Sumatera dan Sulawesi. Ikatan kuat dan erat antara manusia dan lingkungan dan atau tanah mencerminkan tingkat kepedulian dan kepemilikan. Terjadi juga hubungan simbiosis mutualisme antara manusia dan tanah, terlepas dari istilah tanah tumpah darah.

Kesadaran terhadap kepemilikan tanah di sekitarnya yang juga menghidupi dan bisa digunakan sebagai mata pencaharian, lambat laun terjadi perubahan pandangan dan cara hidup sesuai dengan perubahan perkembangan zaman. Satu hal yang mudah dilihat dan dicermati adalah cara memperlakukan tanahnya dalam arti manajemen pengolahan, teknik bercocok tanam, dan pemilihan tanaman yang disesuaikan dengan kondisi tanahnya. Ada gejala menarik untuk diamati bahwa penduduk desa tidak mengenal leleh memproses tanah dan tanamannya sampai saatnya berpesta panen. Nasi yang kita makan, buah yang kita santap, sayur yang kita masak, dan ikan yang digoreng, adalah hasil panen dan jerih payah petani dan nelayan. Terbayangkan aktivitas berikut ini.

*Wis wayah esuk, jagone kluruk  
Rame swarane, pathing kemrusuk  
Aduh seneng ee, sedulur tani  
Bebarengan, mudhun nandur pari..  
Srengenge nyunar, ngulon parane  
Manuke ngoceh, ono wit-witan  
Pathing cemruit, seneng atine  
Katon asri, dunyo sak isine..*

Digarisbawahi kata *bebarengan, mudhun nandur pari...* artinya bersama-sama, mengerjakan sesuatu secara gotong royong. Apakah gotong royong masih bisa dirasakan pada era industri saat ini? Di desa masih bisa kita rasakan nuansa dan aroma gotong royong, meskipun tidak mencapai angka 100%. Bahayanya jika kondisi ini berlanjut dan suatu saat gotong royong bisa pudar bahkan hilang, misalnya membantu sukarela ketika tetangga mendirikan rumah ("saya"), anggota tahlil dan pengajian juga makin menyusut dan hanya dihadiri para orang tua, sarana untuk meningkatkan gotong royong mulai dikaburkan alias dihilangkan. Bagaimana desa akan asri jika penduduknya tidak pernah menyentuhnya, apa lagi memelihara.

### **Rukun Agawe Santoso**

Rantai makanan terjadi secara alamiah, simbiosis mutualis bergerak sesuai kehendak alam, dan saling membutuhkan adalah hakikat manusia sosial. Seringkali tidak disadari bahwa beberapa dekade terakhir ini telah terjadi pola berpikir dan

gaya hidup kita, dari hal yang sederhana menjadi kompleks, dari hal yang bersumber dari filosofi *ngalah luhur wekasane* menjadi *adigang, adigung, dan adiguna, sapa sira sapa insun*. Filosofinya adalah lagu *Rukun Agawe Santoso* berikut.

*Ajining diri pribadi  
Mung gumantung ing wedaling lathi  
Ojo dianggep sepele nyatane  
Gede pigunane  
Sesanggemaning bebrayan  
Ora cukup pangkat sarto bondo  
Pinongko jangkeping sesrawungan  
Kudu sing waspodo  
Ojo nganti gawe gelo mring sapodo-podo  
Becik ngalah sawetoro pamrihe  
Murih tentrem sakkabehe  
Kang pantes sinudarsono  
Atut runtut tentrem lan raharjo  
Rukun biso agawe santoso  
Yekti kang jinongko*

Rukun tidak hanya dipertontonkan di luar diri kita, tetapi harus muncul dari lubuk hati. Rukun bisa dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui *dolan, sonjo, dan jagongan* dengan niat baik dan tulus, sehingga kerukunan akan terwujud dengan sendirinya. Masyarakat kita meyakini adanya prinsip bahwa meskipun beragam tapi ada keseragaman, meski banyak tapi tunggal, meski multi tapi mono. Artinya, kerukunan dapat tercapai meskipun muncul perbedaan di mana-mana dan dimunculkan siapa saja. Syarat utama terwujudnya umat dan masyarakat yang rukun terletak pada *wedaling lathi, waspodo, ojo nganti gawe gelo, dan ngalah...*

Ingat lirik lagunya Broery dan Dewi Yull yang berjudul “Jangan Ada Dusta di antara Kita”? Lagu ini mengingatkan kita agar berhati-hati dalam bertutur sapa dengan siapapun. Karena itu, wejangan para pujangga agar menjaga *wedaling lathi* tutur kata dan berbahasa dengan siapa saja dan di mana saja. Perpecahan bisa terjadi karena tutur kata, ucapan, dan bahasa yang kita gunakan, sebagaimana ditegaskan oleh para pujangga sebagai berikut ini.

*Pupuh Pangkur Serat Wulangreh  
Kang sekar pangkur winarna,  
lalabuhan kang kanggo wong ngaurip,  
ala lan becik puniku,*

*prayoga kawruhana,  
adat waton puniku dipunkadulu,  
miwah ingkang tata krama,  
den kaesthi siyang ratri.*

## **Sonjo Desa dan Jajah Desa Milangkori**

Pola pikir selayaknya dikembalikan seperti pola pikir dan kehidupan sebelum maraknya perbincangan dan perhelatan tentang era industri, lebih-lebih industri kreatif. Pola pikir dan gaya hidup yang berakar dan mendarah daging, seperti *dolan* dalam arti bermain ke tetangga dekat, tetangga dalam satu desa, dan tetangga lain desa. *Dolan* bertujuan menjalin dan mempererat tali silaturahmi kepada saudara dan tetangga. Kesibukan individu saat ini telah mengganggu bahkan merusak konsep *dolan* menjadi tidak penting, kecuali sangat terpaksa. Berbeda dengan *dolan* dalam arti sempit, seperti “ayo *dolan*” main, keluyuran, *nglayap* dan lain-lain, berbeda juga dengan *ayo dolan nang omahku* yang bermakna ajakan mengobrol di rumah. Selain *dolan*, ada istilah *sonjo* yang mempunyai makna mirip dengan *dolan*, bertandang, mengobrol, *sambang* ke rumah atau wilayah lain dengan tujuan tertentu. *Sonjo* bersifat lebih khusus karena ada tujuan kemanusiaan dan kemasyarakatan. *Sonjo* kampung/desa berarti bermain dan menjalin keakraban ke kampung/desa lain, selain desanya sendiri. Kata yang bermakna sama dan biasanya muncul secara apik adalah *jajah desa milang kori* dari desa ke desa, berkunjung ke desa dengan menghitung jumlah pintu, silaturahmi dengan setiap pemilik rumah. Perjalanan yang dilakukan seseorang untuk melihat, mencari sesuatu, dan menemukan apa yang belum ada pada dirinya. *Dolan*, *sonjo*, dan *jajah desa milang kori* merupakan ciri khas kehidupan masyarakat Jawa secara umum. Tiga hal tersebut biasanya digabung dengan *jagong* atau *jagongan*.

## **Jagong Budaya**

Penduduk desa juga memiliki keinginan dan cita-cita yang sama dengan penduduk kota yang cenderung maju “lebih dulu”. Desa telah berubah bentuk dan makna. Desa dan masyarakatnya berubah sesuai dengan perkembangan zaman, adaptasi dengan teknologi, perubahan peri kehidupan yang berada pada tataran penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Desa telah berubah warna dan masyarakatnya juga menginginkan perubahan yang bermakna di segala bidang. Tidak heran jika bermunculan wajah baru dengan nama dan simbol baru tentang desa. Salah satu contoh mengapa masyarakat desa bisa lebih gubub adalah media

yang digunakan untuk guyub, yaitu *jagong budaya* atau *jagongan*. Jika diurutkan sampai pada keberhasilan yang diraih masyarakat desa adalah sebagai berikut:

Jangan berharap ada gerakan menuju perubahan jika tidak diawali dari hal yang paling mendasar, yaitu keinginan. Keinginan-keinginan dari dalam diri masyarakat merupakan tonggak dasar terciptanya perubahan dan kemajuan, lebih tepatnya adalah hasrat untuk mengembangkan sesuatu dengan tujuan menghasilkan sesuatu yang baru. Keberhasilan pembangunan desa tidak mungkin dicapai secara instan, tapi harus dilakukan secara gotong royong yang tumbuh dari kesadaran berkeinginan maju dan tidak bisa dinikmati dalam waktu singkat. Di samping itu, keberhasilan pembangunan desa seharusnya dilakukan bertahap dan per aspek, bukan menyeluruh dalam seketika. Karena itu, *jagongan* sambil minum kopi bisa menjadi media yang dapat mengakrabkan dan menyebabkan terwujudnya keinginan masyarakat. *Jajah desa milangkori*, mengajak setiap warga untuk “bangun” dengan cara *jagongan* dengan obrolan. Dari sini kita menggali potensi desa, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam.

## **Apa yang Harus Diubah dan Dikembangkan?**

Kunci sukses pembangunan desa adalah partisipasi masyarakat. Faktor ini dikemukakan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo saat ketika menjadi pembicara utama dalam dialog “Teras Kita” yang diselenggarakan Kagama dan sebuah media nasional dengan tema “Mewujudkan Masyarakat Desa Mandiri” di Gedung Kemendes PDTT Jakarta, Kamis (29 Maret 2018). Ia menambahkan, membangun desa bukan sekadar membangun di desa, karena kalau membangun di desa artinya sama dengan orang luar yang membangun desa. Padahal, masyarakat desa memiliki modal sosial, yaitu kekuatan masyarakat desa dalam upaya memperkuat, memberdayakan, dan menggerakkan pembangunan di desa. Sementara itu, partisipasi masyarakat menjadi kekuatannya. Oleh sebab itu, jangan sampai pemberdayaan peran masyarakat desa terpinggirkan dalam proses pembangunan di desa itu sendiri.

Pertanyaan dan pernyataan tersebut mengacu pada dua hal, yaitu manusia dan alam. Semua orang memimpikan dan memerlukan perubahan dalam kehidupannya. Alam mengalami perubahan sesuai usianya, selain disentuh manusia. Maka, yang manakah dan apakah yang perlu diubah? Perubahan yang diperlukan adalah paradigma, pola pikir, dan pola hidup masyarakat desa. Bukan berarti bahwa selama ini mereka tidak ingin berubah dan bukan tidak mau berubah. Masyarakat desa terikat pada sistem organisasi dan pola pikir yang mengikat, kalau tidak boleh dikatakan adat istiadat. Sistem dan pola pikir itulah yang sebenarnya membatasi gerak langkah masyarakat desa pada umumnya. Karena itu, perubahan yang

seharusnya dijadikan target utama adalah paradigma yang terjadi dengan sendirinya atau dengan bantuan atau suntikan-suntikan dari luar.

Sejak pemerintah mengucurkan dana desa untuk mendongkrak taraf hidup masyarakat desa, hasilnya mulai bisa dilihat dan dirasakan. Sejak tumbuhnya kesadaran masyarakat bahwa mereka harus mampu mandiri dan tidak bergantung pada uluran tangan pihak lain, wajah-wajah baru desa bermunculan. Kesadaran tersebut muncul dari individu-individu yang memiliki visi ke depan dan kemauan kuat untuk menumbuhkembangkan masyarakat desanya. Katakanlah dia seorang motivator, fasilitator, penggerak, dan penyemangat bagi masyarakatnya. Dia yang mampu membangunkan dan membangkitkan kepercayaan diri masyarakatnya bahwa desa kita ini bisa maju dan berkembang. Munculnya wajah-wajah baru desa dan kampung bukan tanpa alasan. Minimal ada pemikiran *interpreuner*, ada keinginan agar desa/kampung tersebut layak jual dan dikunjungi. Di sisi lain, ada konsep yang tidak bisa diterapkan bagi desa-desa tertentu, yaitu konsep tentang kota wisata. Tidak semua kota bisa dijadikan objek wisata. Namun, setiap kota memiliki keunggulan masing-masing dan inilah yang seharusnya diunggulkan, bukan mengunggulkan semua unsurnya. Setiap kota/kabupaten memiliki komoditas yang khas dan komoditas inilah yang diunggulkan, misalnya Yogya Kota Gudeg, Madiun Kota Brem, Kediri Kota Tahu. Beberapa kota hadir dengan kekhasan kuliner dan produk lainnya, misalnya Bakso Malang, Lontong Balap Wonokromo Surabaya, Petis Udang Sidoarjo, Mangga Manalagi Probolinggo, Batik Solo Yogya, dan lain-lain. *Brand* yang melekat di beberapa kota tersebut perlu dipelihara dan diteruskan kelangsungannya.

Belum lagi dilihat dari tujuh bidang kebudayaan, setiap kota/wilayah bahkan desa memiliki kekhasan dan karakteristik masing-masing. Sejak lama, Bali dikenal dengan upacara *Ngaben*, sejak zaman dahulu Papua terkenal dengan koteka, beratus tahun lalu hingga sekarang Bugis dikenal dengan perahunya, Padang dengan tari piring dan rendang, begitu pula daerah-daerah lain yang kaya dengan keragaman budayanya. Justru puncak-puncak kebudayaan daerah itu yang mampu menjunjung dan mengharumkan Indonesia di mata dunia, baik warisan benda maupun warisan tak benda.

Kesadaran masyarakat, terutama masyarakat desa tentang pentingnya kerja sama, gotong royong, saling menolong, bahu-membahu sudah ada sejak nenek moyang kita. Hal ini juga menjadi penanda dan ciri masyarakat pada umumnya. Sikap hidup tersebut masih melekat meski tidak setebal dulu. Dengan kesadaran itulah, muncul ide-ide dan keinginan untuk memajukan desa dan meningkatkan taraf hidupnya melalui potensi desanya. Potensi desa terus digali dengan tidak meninggalkan budaya khas desanya. Justru budaya desalah yang mampu menghidupkan kembali kekuatan dan keindahan desanya. Terbukti setelah

dikenalkan istilah desa wisata, masyarakat kemudian berduyun-duyun, bahkan saling mendahului untuk mengubah wajah desanya. Mereka melakukan tambal sulam dan membangun desanya agar desa tersebut bernilai jual dengan menciptakan “keramaian”, festival, upacara, dan lain-lain yang menarik perhatian khalayak. Bisakah dibayangkan seandainya seluruh desa di Indonesia ini menjadi desa wisata? Di sisi lain, ada pula fenomena lain yang perlu dicermati, padahal mestinya tidak boleh terjadi, yaitu perombakan/perusakan hutan, melanggar wilayah daerah aliran sungai, menebang bukit, dan sejenisnya.

Mari kita cermati desa, kota, dan wilayah kita. Ada berapa titik yang dipromosikan sebagai tempat wisata, baik wisata religi maupun alam (yang disulap menjadi destinasi wisata). Kota Batu di Jawa Timur telah berubah menjadi tujuan wisata dengan berbagai idenya, baik wisata alam maupun buatan. Melalui promosi di internet, kita bisa membaca dan melihat ada 10 lokasi wisata dan 7 wisata alam di Batu yang berarti ada 17 titik tujuan wisata, bahkan disebutkan ada 49 tempat, misalnya Batu Night Spectaculer, Museum Angkot, Jawa Timur Park 2, Ecogreen Park, dan lain-lain. Kabupaten Malang menawarkan wisata pantai dan religi. Kota Malang menyajikan karakteristiknya tersendiri, terutama munculnya kampung dengan wajah baru, misalnya kampung warna-warni, kampung 3D, Glintung Go Green, Kampung Cempluk, dan lain-lain. Blitar dan Kediri yang hadir dengan segudang pesonanya, Banyuwangi dengan budaya Osing dan sejumlah destinasinya, Kutai Kartanegara dengan pesona budaya dan desa, Makassar dengan istana kupu-kupu dan pisang epek, dan setiap kota/kabupaten di Indonesia yang khas dengan budaya masing-masing.

Jika beberapa dekade lalu masyarakat kota datang ke desa dengan tujuan mencari ketenangan dan kedamaian serta keasrian alam desa, maka saat ini orientasinya adalah rekreasi sesuai destinasi yang ditawarkan. Selain pulang kampung, mereka juga mengunjungi tempat-tempat wisata di sekitar rumahnya.

....

*kini ku jauh di rantau orang  
bukit desaku tetap terkenang  
sanak dan saudaraku terbayang  
hidup rukun dan damai*

....

Di kota tak lagi damai, tak tampak rukun, masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri. Kejenuhan sudah di ubun-ubun, kepenatan memuncak, pulanglah mereka ke kampung halaman atau ke desanya sekadar melepas penat dan jenuh. Bogor dengan kesejukan udaranya menjadi destinasi wisata keluarga, begitu pula dengan

daerah yang berudara sejuk lainnya menjadi tujuan melepas lelah. Karena alasan ini jugalah, masyarakat desa berbenah menyiapkan segala sesuatu yang menyejukkan, menghibur, dan mendidik. Alam menjanjikan segalanya, didukung tangan-tangan terampil tampil untuk memperindahkannya.

## **Penutup**

*Dolan, sonjo kampung/desa, jajah desa milang kori* merupakan kebiasaan masyarakat tempo dulu yang dilakukan untuk menjalin persaudaraan dan memperkuat persatuan dan kesatuan. Melalui kebiasaan tersebut, dibangun kerukunan dan gotong royong, saling membahu, dan tenggang rasa.

Keberhasilan pembangunan desa dan di desa bukan semata ditandai dengan ketersediaan finansial, melainkan terpukunya rasa *melu handarbeni*. Desa ini adalah milik bersama masyarakat, bukan milik individu atau golongan. Munculnya desa wisata dengan semua keunikannya merupakan hasil olah pikir dan olah tangan para peggiat desa, bukan hanya pejabatnya, melainkan masyarakat desa. Semua ini ditujukan kepada peningkatan taraf hidup masyarakat dan secara lebih luas dilakukan untuk mewujudkan desa mandiri yang swasembada, swadaya, dan swakelola dengan tidak mengabaikan hadirnya pemerintah. Bagaimanapun juga, desa harus tetap bersinergi dengan pemerintah.

# **KISAH KAMPUNG**



# Kampung Cempluk di Tengah Kepungan *Real Estat*

*Dhita Hapsarani*

Kampung Cempluk? Festival Kampung Cempluk? Tidak banyak sopir Grab di Kota Malang yang tahu ketika ditanya tentang kampung ini. Dari sepuluh sopir Grab yang saya temui, hanya dua yang mengaku pernah mendengar tentang Kampung Cempluk dan Festival Kampung Cempluk, meskipun mereka belum pernah datang melihat.

Kampung Cempluk memang tidak berbeda dari perumahan informal di perkotaan yang tidak dikelola oleh pengembang *real estat*. Jika dibandingkan dengan kampung-kampung wisata yang sedang *trending* atau *nge-hit* di Kota maupun Kabupaten Malang, tidak ada yang istimewa dari Kampung Cempluk. Apabila kampung-kampung yang ditetapkan sebagai destinasi wisata menyulap tampilan fisiknya dengan berbagai macam tema, seperti tema topeng di Kampung Topeng, tema warna di Kampung Warna Warni Jodipan dan Kampung Tridi, dan tema motif batik di Kampung Celaket, maka Kampung Cempluk tetap tampil sebagaimana kampung kota pada umumnya. Kampung ini juga tidak muncul dalam berita dan tulisan di media sosial yang membahas kampung wisata di Malang, pun tidak ditetapkan sebagai salah satu Kampung Wisata Malang, lain halnya dengan Kampung 3G Glintung, misalnya.

## **Apa Istimewanya Kampung Cempluk?**

Keistimewaan kampung ini terletak pada pergulatan dan upayanya untuk tetap eksis sebagai kampung kota di tengah pesatnya perkembangan Kota dan Kabupaten Malang. Alih-alih mengubah tampilan fisiknya, Kampung Cempluk memilih cara yang berbeda, yaitu menciptakan peristiwa budaya berupa Festival Kampung Cempluk. Festival tahunan yang diadakan di jalan kecil di kampung ini menarik perhatian media dan juga seniman dari luar negeri. Dengan memanfaatkan media

sosial, acara yang diadakan pertama kali pada tahun 2009 ini lebih dikenal oleh *netizen* ketimbang penduduk Kota Malang. Penduduk yang tinggal di perumahan elite di seputar Kampung Cempluk pun tidak mengetahui keberadaan kampung ini, apalagi mendengar festival yang diadakannya.

Menurut Sullivan (1992) yang meneliti tentang pemerintah lokal dan komunitas di perkotaan di Jawa, ada tiga tipe pemukiman di perkotaan Indonesia. Tipe pertama adalah pemukiman terencana yang memiliki kelengkapan infrastruktur serta sarana dan prasarana. Tipe ini dapat dijangkau oleh kendaraan. Tipe kedua adalah kampung kota yang biasanya bersifat mandiri, tidak terencana, infrastruktur terbatas dan tidak dapat dijangkau kendaraan roda empat. Tipe ketiga adalah pemukiman kumuh yang berada di ruang-ruang marginal kota, seperti di pinggir sungai, rel kereta api, dan di lahan-lahan milik negara yang kosong.

Dilihat dari kondisinya saat ini, Kampung Cempluk dapat dikatakan sebagai sebuah kampung kota tetapi dengan kondisi infrastruktur yang baik karena terletak di sepanjang jalan yang dapat memuat dua mobil. Sebagian rumah warganya, meskipun tidak seragam layaknya perkampungan yang tidak terencana, tampak sudah direnovasi dan dibuat bertingkat untuk tempat kos-kosan.

## **Kisah Kampung Rural menjadi Kampung Kota**

Kampung Cempluk merupakan bagian kecil dari dusun paling timur dari Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Kampung ini sebenarnya hanya meliputi satu RW, yaitu RW 02 di Dusun Sumberjo yang berada di pinggiran atau perbatasan antara Kota Malang dan Kabupaten Malang. Sebagai bagian dari Kabupaten Malang, Dusun Sumberjo, Kecamatan Dau ini berbatasan dengan Kecamatan Lowokwaru dari Kota Malang.



Foto satelit Kampung Cempluk.

Sampai awal tahun 1990-an, sebelum Kota Malang berekspansi ke pinggiran, Dusun Sumberjo merupakan desa atau kampung rural. Mata pencaharian utama penduduk desa ini bertani. Pertambahan penduduk Kota Malang membuat wilayah-wilayah pinggiran kota mulai dikembangkan.

Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 1990 penduduk Kota Malang masih berjumlah sekitar 695.089 orang. Jumlah ini meningkat di tahun 2010, menjadi 820.843 dan pada tahun 2016 mencapai 887.443. Menurut Kepala Sesi Informasi Dispendukcapil Kota Malang dalam wawancara dengan *Tribunnews.com*<sup>2</sup>, laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,58 persen dan ini disebabkan oleh masuknya pendatang dari luar. Keberadaan Kota Malang sebagai kota pendidikan menjadi daya tarik bagi pendatang dari luar daerah. Saat ini di Kota Malang saja terdapat setidaknya 62 Perguruan Tinggi, baik dalam bentuk universitas, institut, sekolah tinggi, maupun akademi. Sementara itu, di seluruh Malang Raya (Kabupaten dan Kota Malang) jumlah perguruan tinggi mencapai angka 80. Peningkatan jumlah perguruan tinggi tentunya membuat Malang menjadi kota yang semakin menarik, baik bagi para pemuda dari daerah lain yang akan melanjutkan studi maupun bagi pedagang dan pengusaha yang melihat peluang bisnis yang mengikuti kehadiran mahasiswa.

Kombinasi antara pertambahan penduduk kota dan keterbatasan lahan di tengah kota mengakibatkan transformasi ruang di pinggiran kota. Lahan di pinggiran kota yang semula merupakan tanah kosong atau area persawahan berubah menjadi

2 "Penduduk Kota Malang Bertambah 1,58 persen Tiap Tahun" <http://suryamalang.tribunnews.com/2016/05/30/penduduk-kota-malang-bertambah-158-persen-tiap-tahun>.

area pemukiman, industri, pendidikan, dan perdagangan. Mahendra dan Pradoto<sup>3</sup> yang meneliti transformasi di pinggiran Kota Malang menemukan bahwa tingkat transformasi di Kecamatan Lowokwaru terbilang tinggi dibandingkan kecamatan-kecamatan lain di pinggiran Kota Malang.

Dalam kebijakan tata kota pemerintah Kota Malang, Kecamatan Lowokwaru diarahkan untuk memenuhi fungsi primer sebagai wilayah pendidikan, perdagangan, jasa, wisata, dan fungsi sekunder sebagai wilayah pemukiman, perkantoran dan fasilitas umum. Sebagai wilayah pendidikan, di Lowokwaru terdapat 12 perguruan tinggi. Kehadiran kampus di wilayah itu menjadikannya pusat aktivitas yang menumbuhkan berbagai fasilitas pendukung seperti pusat pembelanjaan, tempat-tempat usaha, tempat kos-kosan di samping perumahan.

Kehadiran kampus yang diikuti fasilitas pendukungnya ini secara otomatis meningkatkan populasi dan kepadatan penduduk Kecamatan Lowokwaru. Padatnya penduduk di wilayah ini berdampak pada meningkatnya angka kriminalitas. Peredaran narkoba dan *curanmor* merupakan dua jenis kejahatan yang menjadi permasalahan sosial di Kecamatan Lowokwaru. Polres Kota Malang mencatat peningkatan dari 43 kasus narkoba di tahun 2016 menjadi 77 kasus di tahun 2017 yang terjadi di Lowokwaru. Angka ini menempatkan Lowokwaru sebagai kecamatan dengan tingkat kejahatan tertinggi di Kota Malang.

Perkembangan yang terjadi di kecamatan Lowokwaru berdampak pada tetangganya, Kecamatan Dau, tempat Kampung Cempluk berada. Menurut kisah warga Kampung Cempluk, transformasi ruang Kecamatan Dau terjadi pada tahun 1992 dengan dibukanya lahan untuk perumahan elite, Lembah Dieng. Sebelum *real estat* Lembah Dieng dibangun, Kampung Cempluk masih merupakan kampung rural yang terisolasi dari keramaian Kota Malang karena dipisahkan oleh sungai Metro. Saat itu listrik belum masuk ke Dusun Sumberejo, sehingga desa itu masih menggunakan penerangan lampu *teplok* atau lampu *cempluk*. Kampung Cempluk yang berada di dalam wilayah Dusun Sumberejo, Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang merupakan daerah yang paling lambat menerima pasokan listrik. Menurut Ketua RW 02 Dusun Sumberjo, Pak Sutrisno, ketika PLN menawarkan pasokan listrik, warga tidak memiliki cukup uang untuk membayar biaya pemasangannya dan memilih tetap menggunakan lampu *cempluk*. Dari sinilah muncul nama Kampung Cempluk.

Transformasi spasial dan juga kehidupan di Kampung Cempluk dimulai ketika pengembang Lembah Dieng membangun jembatan yang mengakhiri keterisolasian Dusun Sumberejo. Maka, Kampung Cempluk yang semula gelap dan hanya diterangi

---

3 Mahendra, Yusril Iha dan Pradoto, Wishnu. (2016). Transformasi Spasial di Kawasan Peri Urban Kota Malang. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*. Biro Penerbit Planologi Undip Volume 12 (1): 112 – 126 Maret.

pendar remang lampu cepluk dapat menikmati terangnya lampu pijar dan neon. Saat itu pula terjadi transformasi dalam Kampung Cepluk. Dari yang semula sebuah kampung rural, kampung ini bermetamorfosis menjadi kampung kota. Suasana pedesaan segera berganti menjadi suasana perkotaan.

Peruntukan Kecamatan Lowokwaru sebagai daerah pendidikan berdampak pula ke Kampung Cepluk karena setelah terhubung dengan Kota Malang, kampung ini menjadi kampung yang dikelilingi oleh beberapa kampus. Kampus II Universitas Brawijaya yang menjadi lokasi Fakultas Kedokteran Hewan dibuka tidak jauh dari Desa Sumberjo. Di kampus itu terdapat asrama mahasiswa yang menampung mahasiswa baru selama satu tahun. Sebagai akibatnya, perekonomian Kampung Cepluk dan Desa Sumberjo meningkat. Banyak warga yang membuka warung makan, toko kelontong, salon, dan toko-toko lain yang menunjang kebutuhan mahasiswa. Tidak hanya itu, karena setelah satu tahun wajib tinggal di asrama, mahasiswa harus mencari tempat tinggal, maka warga juga mengubah rumah mereka menjadi tempat kos untuk menampung mahasiswa yang tak berasrama lagi. Menurut Redy, jumlah mahasiswa yang kos di Kampung Cepluk masih sekitar 100 sampai 200 orang. Meskipun demikian, mahasiswa yang tinggal di asrama biasanya membeli kebutuhan mereka di kampung sekitar kampus. Satu warga kampung mengatakan kalau sore sampai malam banyak warung dan juga pedagang asongan yang berjualan di tepi jalan.

### **Dikepung *Real Estat***

Pembukaan lahan untuk pemukiman penduduk urban terus berlangsung. Setelah pembangunan perumahan Lembah Dieng, dibukalah Istana Dieng, Puncak Dieng, dan berbagai perumahan urban lainnya di kecamatan Dau, mulai dari perumahan elite dengan harga rumah miliaran sampai perumahan untuk kelas menengah. Lahan persawahan pun berkurang drastis karena tergusur pembangunan. Kondisi ini berdampak pada kehidupan warga Kampung Cepluk yang tidak lagi dapat bertani palawija dan bengkoang karena lahannya telah beralih fungsi. Untuk bertahan hidup, mereka harus bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan perkotaan. Maka, profesi penduduk Kampung Cepluk beralih dari petani menjadi buruh pabrik, tukang bangunan, mandor, tukang kayu, dan pekerjaan lain yang dibutuhkan pengembangan perumahan dan industri yang berkembang di perkotaan.

Dengan semakin bertambahnya permintaan akan perumahan, pengembangan wilayah pemukiman tidak dapat dibendung lagi. Kampung Cepluk yang sudah menjadi kampung kota ini pada akhirnya dikepung oleh perumahan urban yang menggurita. Gambar satelit memperlihatkan Kampung Cepluk dan Dusun Sumberjo yang hanya menempati area di kedua sisi jalan Dieng Atas. Di sekelilingnya

terlihat area perumahan yang dikelola pengembang properti. Berdekatan dengan desa itu terdapat enam perumahan *real estate*, mulai dari perumahan kelas menengah sampai kelas atas. Jika kita berjalan menyusuri Jalan Dieng Atas yang menjadi jalan alternatif menuju Kota Batu, kita akan mendapati dalam jarak yang tidak jauh dari Dusun Sumberjo, ada beberapa lahan yang sedang dibuka dan dikembangkan menjadi perumahan baru. Tak lama lagi, Dusun Sumberjo ini benar-benar akan menjadi satu-satunya kampung kota jika warganya masih tetap bertahan.



*Gerbang Dusun Sumberjo, Desa Kalisongo, dan suasana di Kampung Cempluk.*



*Dua perumahan ini, Indah Dieng dan Panorama Dieng, berada bersebelahan dengan Dusun Sumberjo.*



*Foto Perumahan Bukit Dieng dan Puncak Dieng yang bersebelahan dengan Gerbang Desa Kalisongo.*

Kekhawatiran bahwa mereka terkepeng oleh perumahan *real estat* disuarakan oleh seorang ibu warga Kampung Cempluk yang membuka salon di rumahnya. Pemilik salon ini mengeluhkan ancaman pembelian tanah di seputar kampungnya oleh orang-orang asing. “Orang-orang asing” yang dimaksud adalah pemilik modal dan pengembang perumahan *real estat*. Selain hilangnya lahan, yang dikhawatirkan juga adalah tergerusnya sifat-sifat dan budaya kampung kota oleh budaya urban yang dibawa oleh penghuni perumahan formal *real estat*.

### **Budaya Kampung Kota Versus Urban *Real Estat***

Menurut studi perkotaan, kampung kota memiliki ciri khas yang membedakannya dari permukiman *real estat* atau permukiman yang terencana yang dikelola oleh pengembang. Selain tampilan fisiknya yang berbeda dari permukiman *real estat*, kampung kota memiliki sistem sosial dan budaya yang mengikat. Sullivan (1986) yang meneliti tentang kampung kota di Yogyakarta mengatakan bahwa salah satu ciri yang menonjol dari kampung kota adalah kuatnya sifat dan perilaku kehidupan pedesaan yang ditandai dengan adanya ikatan kekeluargaan yang erat. Sifat ini tidak ditemui dalam kehidupan di permukiman *real estat*.

Dari pengamatan di Kampung Cempluk dan dari bincang-bincang dengan beberapa warga, memang ikatan kekeluargaan ini yang dicoba untuk terus dipertahankan oleh para pamong desa dan warganya. Kebanyakan dari warga Kampung Cempluk telah menjadi warga di kampung itu selama beberapa generasi. Mereka lahir dan besar di sini, demikian juga dengan orang tua dan kakek nenek mereka. Sekarang mereka pun tetap mempertahankan keberlangsungan itu dengan membelikan tanah di seputar Dusun Sumberjo untuk anak-anak mereka. Bu Suparmi (bukan nama sebenarnya), misalnya, lahir dan besar di Kampung Cempluk dan menikah dengan warga kampung yang sama. Di masa mudanya Bu Suparmi yang sekarang berusia 70 tahun bekerja sebagai buruh pabrik. Suaminya yang berasal dari kampung yang sama juga bekerja sebagai buruh pabrik.

Setelah menikah, Bu Suparmi membuka warung kecil-kecilan. Waktu itu menjual minyak tanah dan spiritus yang menjadi bahan bakar untuk kompor dan lampu *teplok* atau *cempluk*. Setelah perumahan elite mulai dibuka di dekat kampung, suaminya menjadi sopir mobil *bak* mengangkut material dan akhirnya menjual material sendiri, sementara Bu Suparmi mulai beralih menjual sembako. Dari hasil usaha mereka itu, warung yang semula terbuat dari papan direnovasi sehingga menjadi bangunan permanen. Mereka berhasil menyekolahkan ketiga anak mereka hingga tingkat sarjana dan bahkan membelikan sebidang tanah bagi setiap anak. Anak yang sulung, laki-laki, telah menikah dan kini menjadi lurah di kampung lain, tetapi keluarganya tetap tinggal di rumah pemberian Bu Suparmi di Dusun Sumberjo. Anak kedua Bu Suparmi juga sarjana dan telah menikah. Suaminya seorang arsitek, tetapi anak Bu Suparmi memilih berjualan sosis bakar dan tempura setiap sore di depan warung ibunya. Bu Suparmi senang anak-anaknya tinggal berdekatan dengannya. Pikiran untuk pindah rumah ke tempat yang lebih bergengsi tidak pernah terlintas dalam benaknya.

“Warga di sini sudah saling kenal,” kata Pak RW 02 Dusun Sumberjo. “*Ndak* ada yang *ndak* kenal. Yang model seperti ini *ndak* ditemukan di perumahan lain,” katanya. Ini menjadi salah satu sebab kenapa warga tidak mau pindah dari kampungnya dan tidak mau menjual tanah atau rumah mereka kepada orang luar meskipun ditawarkan di atas Rp.5.000.000 per meternya. Kuatnya keterikatan warga dengan kampung kelahiran mereka ditambah dengan sistem kekerabatan yang terjalin erat di antara warga menjadi perekat yang membuat mereka enggan beranjak dari kampung itu. “Kampungku Uripku” yang menjadi tema Festival Kampung Cempluk 2018 tampaknya merefleksikan pandangan warga Kampung Cempluk dan Dusun Sumberjo tentang kampung halaman mereka. Kampung bukan sebatas tempat untuk tinggal menetap, tetapi telah menjadi bagian dari hidup dan identitas penduduknya.

## **Pemertahanan Budaya Kampung di Tengah Kepungan Budaya Urban**

Kekhawatiran warga akan masuknya pemodal kuat yang akan mengubah wajah desa mereka menunjukkan adanya kesadaran bahwa budaya kekerabatan yang mengikat warga kampung merupakan aset yang perlu dipertahankan. Mereka menyadari bahwa kekuatan industri perumahan cepat atau lambat akan menggerus budaya yang mereka banggakan itu apabila mereka tidak melakukan sesuatu. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mempertahankan adalah memperkuat budaya kampung itu sendiri di kalangan warga dan memperkenalkannya pada orang di luar kampung. Para pamong desa membuat bazar kuliner zaman dulu. Warga menjual makanan tradisional. Gagasan ini berkembang menjadi sebuah festival yang akhirnya

dikenal dengan sebutan Festival Kampung Cempluk. Pertama kali dibuat dalam rangka merayakan 17 Agustus 2009, festival ini dirasakan sebagai media yang sesuai untuk mempertahankan budaya kampung. Semangat warga untuk berkesenian mulai bangkit kembali. Kesenian Barong Singo Yudho, pencak silat, musik perkusi, jaran kepang (kudan lumping), dan Seni Ande-Ande Lumut dihidupkan kembali.



*Kesenian Barong Singo Yudho.*

Salah seorang warga yang bekerja sebagai tukang bangunan memiliki keterampilan membuat alat musik dari kayu, meskipun hanya menggunakan peralatan minim.



*Dawai Cempluk dan alat musik Centhik.*

Dengan festival itu, warga tidak hanya dapat mempertunjukkan keterampilan mereka dalam berkesenian, tetapi juga dapat memamerkan dan menjual berbagai macam produk yang mereka hasilkan, baik produk makanan maupun produk-produk lainnya. Mereka juga dapat mengembangkan keterampilan lainnya karena harus menyiapkan sendiri kostum dan peralatan yang dibutuhkan untuk festival.

Festival yang diadakan sekali setahun ini menjadi kebanggaan warga kampung dan menjadi *event* yang dinantikan. Ketika melihat persiapan Festival Kampung Cempluk malam sebelum acara dimulai, saya melihat pemuda karang taruna dan mahasiswa yang terlibat dalam kepanitiaan menyiapkan berbagai keperluan festival, seperti panggung, stan pedagang di pinggir jalan kampung, rumah hantu, gapura di ujung jalan, dan berbagai keperluan lain. Sementara itu, terdengar suara musik dari warga yang sedang berlatih tari, dan anak-anak beserta orang tua mereka ke luar ke jalan untuk melihat-lihat kesibukan kampung dan saling berinteraksi. Terasa bahwa warga mengantisipasi acara yang akan digelar keesokan harinya. Mereka mengundang saya untuk datang esok harinya dan mencicipi kuliner *jadul*. Suasana kampung kota yang hangat sangat terasa di sore hari menjelang malam yang mulai dingin. Suasana kekeluargaan seperti inilah yang sebenarnya sedang dipertahankan dan diperjuangkan kelestariannya oleh warga Kampung Cempluk. Kegiatan festival

ini telah berhasil membangun kebanggaan warga kampung, terlihat dari semakin banyaknya warga yang terlibat dalam Festival Kampung Cempluk dari tahun ke tahun. Pada awalnya festival ini hanya melibatkan satu RT, yaitu RT 7 dari RW 2, tetapi sekarang sudah 17 RT dari RW 1 dan RW 2 yang mengikuti acara ini.

Ketika menyaksikan karnaval yang mengawali Festival Kampung Cempluk pada 23 September 2018, selain perwakilan dari 17 RT ada juga perwakilan mahasiswa asing yang turut mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia dan ada perwakilan dari kampung dari desa lain yang turut memeriahkan acara. Rupanya kesadaran pentingnya mempertahankan budaya kampung berhasil ditularkan melalui Festival Kampung Cempluk sehingga festival ini tidak hanya menjadi milik Kampung Cempluk, tetapi juga menjadi wadah yang menampung keinginan warga kampung lain yang ingin mempertahankan budaya kampung mereka. Festival menjadi kegiatan yang mampu menguatkan hubungan antarwarga kampung sekaligus membangun kebanggaan warga atas identitas budayanya yang pada akhirnya memperkokoh keterikatan batin warga pada kampungnya. Meskipun kecil kemungkinan budaya kampung ini dapat ditularkan pada warga perumahan elite di sekelilingnya, paling tidak warga Kampung Cempluk dapat bertahan di tengah kepingan budaya perkotaan.



*Gulali, permen jadul yang masih dicari dan pojok mewarnai di kanvas.*

## **Wawancara dengan Redy Eko Prastyo**

Redy Eko Prastyo yang berasal dari Situbondo menamakan dirinya pembakti kampung dan telah 9 tahun tinggal di Kampung Cempluk. Ia lah yang mengembangkan gagasan Bazar Kuliner Kampung Cempluk menjadi Festival Kampung Cempluk dan yang merintis terbentuknya Jaringan Kampung Nusantara atau lebih dikenal sebagai Japung. Berikut bincang-bincang dengan pembakti Kampung Cempluk.

### ***Apa makna kampung bagi Anda?***

Kampung bagi saya adalah *epicentrum* atau ruang utama yang menjadi pondasi peradaban bangsa. Kenapa penting? Karena ini merupakan ruang hulu utama, karena kampung merupakan ruang yang strategis untuk pembangunan sumber daya manusia muda Indonesia. Hal lainnya adalah perlunya mengubah stigma kampung, termasuk masyarakatnya, sebagai warga kelas dua. Tugas kita bersama agar kampung tidak mendapat stigma semacam itu. Kampung bagi saya adalah lumbung ide karena ide-ide berlian itu berasal dari kampung.

### ***Kapan muncul kesadaran akan pentingnya kampung bagi bangsa?***

Setelah tiga tahun saya tinggal di Kampung Cempluk. Sebelum tinggal di sini, saya tinggal di tempat kos di Sumpersari, Kota Malang.

### ***Anda juga yang menggagas dan membangun kafe Omah Ngopi di Kampung Cempluk. Tujuannya apa, pembiayaannya bagaimana, dan siapa yang mengelolanya?***

Tujuannya adalah untuk mengajarkan *sociopreneurship* kepada adik-adik dari Karang Taruna Cempluk. Saya menyewa rumah warga seharga 7 juta setahun dan mengajarkan cara mengelola kafe kepada pemuda Karang Taruna. Sekarang penghasilan Omah Ngopi Cempluk bisa membayar uang sewa rumah, biaya listrik, *wifi*, belanja kebutuhan Omah Ngopi, dan memberi gaji anak-anak muda yang bekerja di sana.

### ***Bagaimana pembagian tugasnya?***

Omah Ngopi dikelola oleh dua orang pemuda dan mereka *di-rolling* setiap empat bulan. Setiap tujuh jam mereka mendapat upah Rp.25.000. Target minimal per harinya Rp.200.000. Dengan jumlah itu sudah bisa menutup biaya operasionalnya. Karang Tarunanya mencakup 2 RW.

***Berapa jumlah mahasiswa yang kos di Kampung Cempluk?***

Jumlahnya antara 100 sampai 200 mahasiswa dan akan meningkat karena mahasiswa tahun kedua Kampus II Universitas Brawijaya tidak lagi bisa tinggal di asrama mahasiswa. Oleh karena itu, perlu diantisipasi dengan cara menyiapkan *mindset* warga agar tidak melulu bersikap transaksional dalam menyikapi perkembangan ini. Warga perlu terus-menerus disadarkan agar dapat terjadi sinergi antara kampung dengan kampus. Saya menggagas ide Kampung Lingkar Kampus. Tujuannya agar warga kampung juga mendapat manfaat lain, selain manfaat ekonomi dari keberadaan kampus, misalnya adanya prioritas beasiswa kuliah bagi pemuda kampung, terutama pemuda Karang Taruna kampung. Selain itu, kampung juga harus terus mengupayakan kontrol sosial dengan mendata mahasiswa yang kos di lingkungan kampung. Saat ini sudah dibuatkan *form online* untuk data penduduk musiman.

# **Tanoker: Kisah *Egrang* dan Pengasuhan Gotong Royong**

*Adriana Rahajeng Mintarsih, Farha Ciciek,  
dan Sisillia Velayati*

Jika Anda datang ke Desa Ledokombo, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember (sebelah utara), Provinsi Jawa Timur, silakan mampir ke Tanoker. Kata yang berarti kepompong dalam bahasa Madura itu adalah suatu komunitas yang didirikan tahun 2009 untuk anak-anak Desa Ledokombo. Tujuannya agar mereka dapat bersahabat, bermain, bergembira, belajar, dan berkarya. “Mengapa diperlukan komunitas semacam ini? Di Ledokombo, tercatat sekitar 280 anak (kurang lebih 52 merupakan anak pekerja migran) yang bergabung di Tanoker.” (Velayati dalam Munggoro, Maemunah, dan Kismadi, 2018). Sebagian dari mereka dikenal sebagai APM (Anak Pekerja Migran) yang ditinggalkan oleh orang tuanya di desa dan mengalami berbagai masalah sosial.

Ledokombo memiliki luas 146,92 km<sup>2</sup> dan didiami oleh sekitar 64.841 orang (BPS, 2017). Ledokombo dulu dianggap sebagai wilayah tertinggal. Marginalisasi sosial, ekonomi, budaya dan politik terjadi di wilayah ini. Tak banyak pihak yang memberikan perhatian di wilayah ini. Mata pencaharian penduduk pada umumnya buruh tani dan sisanya bekerja sebagai buruh perusahaan, pedagang kecil, pegawai negeri dan swasta. Tiga dekade belakangan, sebagian warga Ledokombo yang berusia produktif, terutama perempuan, bekerja di luar daerah baik di dalam (terbanyak Bali, Lombok, Kalimantan, Surabaya, dan Jakarta) maupun di luar negeri (Malaysia, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Hongkong, Singapura, Taiwan dan sebagian negara di Eropa). (Velayati, 2018).

Mayoritas kasus migrasi dilakukan dengan terpaksa untuk keluar dari kemiskinan. Di antara mereka ada juga yang terlilit hutang karena gaya hidup konsumtif. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang salah satunya disebabkan

oleh pernikahan dini menjadi pendorong yang sangat kuat untuk bermigrasi. Migrasi dianggap sebagai jalan keluar tercepat untuk menuntaskan KDRT. Namun, tren migrasi ke luar negeri yang dilakukan oleh kebanyakan perempuan di Ledokombo akhir-akhir ini mulai bergeser ke migrasi di dalam negeri yang dilakukan oleh laki-laki. Sebagian besar dari mereka bekerja di bidang konstruksi bangunan di Bali.

Akibat dari migrasi ini, ada cukup banyak APM yang menjadi yatim piatu sosial. Ketika salah satu atau kedua orang tua mereka bermigrasi untuk mendapatkan pekerjaan, pengasuhan mereka dilimpahkan kepada kerabat terdekat (keluarga inti maupun keluarga besar) atau tetangga tanpa adanya persiapan yang matang. Pada akhirnya anak-anak seringkali mendapatkan pengasuhan yang kurang layak. Pertama, mereka yang mendapat titipan kurang mampu mengelola dana yang dititipkan orang tua anak kepada mereka untuk biaya pengasuhan anak yang dititipkan. Misalnya, mereka malah menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi daripada untuk membiayai pendidikan anak yang mereka asuh. Kedua, adanya pembiaran oleh wali mereka. Misalnya, adanya kecenderungan nenek dan kakek untuk memanjakan cucunya dengan cara memberikan apapun yang diminta karena ketersediaan uang kiriman orang tua. Ketiga, ada anak-anak yang mengalami kekerasan fisik, psikis, bahkan kekerasan seksual. Selain itu, tidak jarang, anak-anak ini juga mendapat hinaan, ejekan, dan pengucilan dari lingkungan sekitar karena ada anggapan APM adalah anak nakal dan tidak bisa diatur.

Meskipun APM menjadi kelompok anak yang paling rentan, anak-anak lain di Ledokombo tidak berarti bebas dari masalah. Kurangnya pengawasan orang tua atau wali terhadap aktivitas sekolah dan di luar sekolah berdampak pada masalah-masalah seperti membolos dan putus sekolah, kehamilan di luar nikah, pernikahan dini, pencurian, konsumsi Miras dan obat-obatan terlarang. Selain itu, mereka juga mengonsumsi makanan yang tidak sehat (*junk food*).

Permasalahan lain adalah adanya anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya akta kelahiran serta tidak tersedianya dokumen keluarga sebagai syarat pembuatan akta karena dibawa orang tua yang bermigrasi. (Velayati dalam Munggoro, Maemunah, dan Kismadi, 2018). Selain itu, perkembangan informasi dan teknologi dalam bentuk *smartphone* membuat anak-anak terpapar informasi yang tidak seharusnya diakses oleh mereka, seperti pornografi. Di usia yang seharusnya digunakan untuk bermain dan belajar hal-hal baru yang positif, mereka malah seringkali asyik dengan *smartphone* dan lalai melaksanakan kewajiban mereka, seperti masuk sekolah ataupun berinteraksi dengan anak-anak lain dan orang-orang di sekitarnya.

Banyak permasalahan terjadi di kalangan anak-anak Ledokombo, tetapi, tidak semua anak terjerat dalam situasi ini. Sebagian dari mereka justru menjadi motor

penggerak perubahan. Salah satunya melalui permainan tradisional *egrang* sebagai media utamanya. Dalam permainan ini, anak-anak tidak hanya bermain bersama, namun juga mempelajari filosofi *egrang* yang dekat penerapannya dengan kehidupan sehari-hari, yakni keseimbangan dan tolong-menolong. Permainan ini juga yang kemudian dipakai sebagai dasar pembentukan *collaborative parenting* (pengasuhan gotong royong) di Tanoker, Ledokombo. Landasan berpikir dari pengasuhan gotong royong adalah bahwa pengasuhan anak merupakan tanggung jawab bersama, baik masyarakat maupun pemerintah. Tulisan ini akan membahas permainan *egrang* dan pengasuhan gotong royong yang dilakukan oleh Tanoker, berikut dengan kendala yang dihadapi.

## **Permainan *Egrang* yang Menentramkan**

Di tengah berbagai permasalahan anak yang rumit di Ledokombo, anak jugalah yang merupakan penggerak pertama terbentuknya Tanoker. *Egrang* dirakit kembali oleh anak-anak Ledokombo untuk menjadi sumbu pencerah desa, dengan gotong royong sebagai semangatnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Velayati (2014), pada tahun 2009, keluarga Suporahardjo dan Farha Ciciek pindah dari Jakarta ke kampung halaman Suporahardjo di Ledokombo. Di sana kedua anak laki-laki mereka, Mokhsa dan Zero hampir setiap hari memainkannya musik *djembe* sambil melantunkan berbagai lagu. Musik ternyata memanggil anak-anak lain untuk sering kali datang. Suatu hari, Mokhsa dan Zero bertanya kepada ayah mereka, "Dulu sewaktu Ayah kecil main apa?" Salah satu permainan yang disebutkan sang ayah adalah *egrang* yang tak pernah dimainkan oleh kedua anak ini. Akhirnya, dibuatlah tiga pasang *egrang* sebagai sarana bermain. Mokhsa dan Zero kemudian mengajak anak tetangga, lalu menyebarlah informasi bahwa telah ditemukan permainan baru. Meskipun *egrang* adalah permainan yang dulunya akrab di kampung itu, generasi mudanya tidak mengenalinya lagi karena permainan itu sudah tidak populer di kalangan anak-anak pada awal 200-an sebelum Tanoker berdiri.

Semakin hari semakin banyak anak yang datang untuk bermain *egrang*. Dengan didampingi oleh Suporahardjo dan Farha Ciciek, anak-anak ini sepakat untuk belajar berorganisasi. Mereka memberi nama kelompoknya dengan sebutan Tanoker. Di dalamnya dibentuk struktur organisasi dan gugus kegiatan, di antaranya permainan tradisional, membaca dan menulis, memasak, olahraga, bermain musik, menari, dan melukis. Mereka juga mengadakan lomba, seperti balap *egrang*, balap kelereng, makan kerupuk, dan lain-lain. Untuk para pemenangnya, disediakan hadiah senilai Rp.5.000 untuk juara 1, Rp.3.000 untuk juara 2, dan Rp.2.000 untuk juara 3. Selain itu, diadakan juga lomba *egrang* dengan hadiah uang sekitar Rp.2.000-5.000.

Awalnya anak-anak bermain *egrang* di kebun belakang Tanoker. Mereka bermain balap *egrang* dengan penuh semangat, meskipun sempat tejatuh beberapa kali dan mengalami luka-luka. Melalui permainan ini, mereka belajar untuk saling menolong dan memahami bahwa bermain adalah belajar yang tidak main-main karena bermain itu mencerdaskan. Keseimbangan dan saling menolong adalah nilai yang tertaut pada permainan ini. Anak-anak memodifikasi permainan *egrang* dengan perkusi dan gerak tari untuk menghasilkan kreasi seni yang khas, Tarian *Egrang*. Tarian ini telah membuat anak-anak desa dipercaya menjadi wakil daerah untuk mengikuti kegiatan budaya di tingkat lokal, nasional, maupun internasional (Velayati dalam Munggoro, Maemunah, dan Kismadi, 2018).

Anak-anak dengan *egrangnya* juga menginspirasi dilaksanakannya hajatan budaya tahunan Festival *Egrang* yang dimulai pada tahun 2009. Festival ini terdiri atas berbagai kegiatan, di antaranya pawai tarian *egrang*, festival makanan sehat, lomba menggambar dan mewarnai, bazar kuliner dan kerajinan tangan, mural, fotografi, videografi, dan jambore anak. Semua kegiatan tersebut bernuansa *egrang*. Bermula dari anak-anak dengan *egrang* sebagai medianya ini, bergabunglah berbagai pihak dan penjurur ke Tanoker untuk bermain dan belajar bersama masyarakat Ledokombo. Anak-anak di Tanoker saling belajar, kegiatan bermain dan belajar dilakukan secara seimbang. Misalnya, sebelum anak-anak menggunakan fasilitas kolam yang dimiliki oleh Tanoker, mereka harus membaca buku terlebih dahulu untuk mendapatkan tiket. Mereka belajar berbagai hal, seperti kepemimpinan dan kemampuan berorganisasi, *public speaking*, seni musik, drama, tari. Melalui buku, situs web, maupun tamu-tamu asing yang datang berkunjung, anak-anak juga belajar berbahasa Inggris, berbagai pengetahuan tentang Indonesia dan negara-negara lain, serta memperluas wawasan tentang kesehatan reproduksi, pola hidup dan konsumsi sehat, serta belajar tentang kerajinan tangan. (Velayati dalam Munggoro, Maemunah, dan Kismadi, 2018).

Menurut Velayati (2014), *Soker* yang dalam bahasa Madura berarti perselisihan akibat “warisan dan ucapan yang berujung pada kebiasaan tidak bertegur sapa” berkurang secara drastis karena peran anak-anak. Anak-anak pada awalnya sering menampilkan tarian *egrang* dengan berkeliling kampung. Secara tidak langsung, dengan melakukan hal ini mereka tidak meneruskan tradisi permusuhan di antara orang tua mereka, yang tak jarang memiliki kekerabatan satu sama lain. Yang terjadi justru orang tua yang semula bermusuhan bisa bekerja sama karena diajak oleh anak-anak mereka untuk terlibat dalam kegiatan di Tanoker.

Di Tanoker, orang tua tidak diwajibkan memberi bantuan dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk tenaga, masukan gagasan, membuat pernak-pernik pada kostum maupun aksesoris anak, membuat makanan, dan lainnya. Keterlibatan semacam ini akhirnya mengingatkan para orang tua akan kebiasaan gotong royong

yang sebenarnya sudah mengakar dalam masyarakat Madura. Misalnya, ketika salah seorang warga mengadakan hajatan, sudah menjadi suatu kebiasaan di kampung, warga lain akan membantu dengan membentuk dapur bersama.

Berawal dari anak-anak yang memberkahi keluarga dan menyejahterakan desa, kini Tanoker dan Ledokombo menjadi Kampung Wisata Belajar, salah satu tempat yang menarik bagi wisatawan dalam negeri dan mancanegara. Wisatawan datang untuk saling belajar bersama masyarakat. Kampung Wisata Belajar ini dikelola oleh Tanoker bersama masyarakat yang mayoritas adalah mantan pekerja migran dan anggota keluarganya. Tersedia berbagai paket wisata belajar: berkeliling menikmati sumber daya alam Ledokombo, belajar dari inovator kreatif dan tangguh dari desa, berbagi dengan anak-anak, dan berpartisipasi di berbagai inisiatif pengasuhan gotong royong. Wisatawan juga dapat belajar langsung membuat batik *egrang* di *Wâpor Bhâk Kho-Kho*, merangkai berbagai aksesoris manik-manik di kelompok *rainbow*, dan membuat kerajinan tangan dari kain perca, kain flanel dan kulit pisang. Tersedia juga *outbond* berbasis permainan tradisional, paket kuliner dengan kreasi makanan dan minuman *ndeso* nasional maupun internasional yang kreatif dan sehat berbahan lokal. *Homestay* dengan paket ekonomis hingga VIP dapat menjadi alternatif menginap bagi wisatawan. Wisatawan juga tidak perlu bingung untuk mencari *souvenir*. Tanocraft (Tanoker Craft) menyediakan berbagai produk kerajinan tangan mulai dari boneka jari, pensil boneka, boneka *egrang*, aneka dompet dan tas, kaos aplikasi, aksesoris manik-manik, serta batik *egrang*.

Setiap minggu di akhir bulan, dilaksanakan Pasar Lumpur yang menjadi ruang pertemuan berbagai pihak dari berbagai latar belakang. Di Pasar Lumpur terdapat berbagai macam kegiatan, seperti bazar produk kerajinan tangan dan kuliner tradisional berbahan lokal, pentas seni, *outbond* permainan tradisional, dan aneka *workshop*. Di Pasar Lumpur inilah pengunjung dapat bermain *polo lumpur*, sebuah permainan bola tangan di arena sawah berlumpur.

## **Pengasuhan Gotong Royong**

Banyak pihak berkomitmen untuk bekerja sama memberikan pengasuhan terhadap anak-anak Ledokombo, termasuk APM, “Anakku, anakmu, anak kita bersama.” Tanoker bekerja sama dengan masyarakat, pemerintah (lokal dan nasional), berbagai tokoh masyarakat, agama, pendidikan, dan media. Sahabat Tanoker baik lokal maupun internasional melakukan pengasuhan gotong royong. Pengasuhan ini bertujuan mencegah hilangnya generasi, melindungi dan memenuhi hak anak, serta meningkatkan kualitas hidup anak.

Pengasuhan gotong royong terdiri atas dua pilar. Pilar pertama adalah komunitas berupa pendampingan anak yang dilakukan secara rutin setiap harinya.

Pilar ini diperkuat dengan Sekolah Bok-ebok (sekolah ibu), Sekolah Pak-bapak (sekolah bapak), dan Sekolah Eyang. Pilar kedua berupa peran pemerintah sebagai orang tua. Pilar kedua ini mewujudkan, di antaranya dengan dibentuknya forum anak Kecamatan Ledokombo yang SK-nya ditandatangani oleh camat, pengurusan dokumen kependudukan anak terutama APM, dan terbukanya ruang partisipasi aktif untuk anak dan perempuan dalam *musrenbang* desa hingga kabupaten. Salah satu bentuk pengasuhan oleh pemerintah adalah dialokasikannya Anggaran Dana Desa Sumbersalak untuk pemberdayaan anak dan perempuan (mulai tahun 2016) dan diterbitkannya Peraturan Desa Sumbersalak Nomor 05 Tahun 2015 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan Anggota Keluarganya Asal Desa Sumbersalak.

Sekolah Bok-ebok sudah memiliki modul pembelajaran dan difasilitasi dua orang ibu dari masyarakat Ledokombo. Anggota Sekolah Bok-ebok merupakan komunitas akar rumput yang sebagian besar terdiri atas keluarga pekerja migran dan komunitas pengajian di kampung.

Berbagai materi yang ada antara lain, pengasuhan bersama, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, pemenuhan dan perlindungan hak anak dan perempuan, kesehatan reproduksi, pola hidup sehat termasuk pola konsumsi sehat, membangun keluarga damai, migrasi aman dan benar, internet cerdas, peran perempuan pembangunan dan keamanan, seks dan gender, deteksi dini radikalisme, serta materi lainnya yang dibutuhkan (Velayati dalam Munggoro, Maemunah, dan Kismadi, 2018: 30).

Seluruh materi ini telah dibukukan berbentuk modul oleh kedua fasilitator, Siti Latifah dan Enik Jumiati, didampingi pegiat Tanoker. Materi dibuat berdasarkan pengalaman mengajar yang telah dipraktikkan dalam Sekolah Bok-ebok. Mereka juga mengajak pegiat Tanoker yang lain untuk menuliskan beberapa materi.

Sekolah Bok-ebok saja dianggap tidak cukup untuk menyeimbangkan pola pengasuhan yang damai, aman, dan nyaman di dalam keluarga. Bapak-bapak meminta agar diadakan sekolah untuk bapak karena banyak laki-laki yang ditinggalkan istrinya yang berjuang di luar daerah. Mereka merasa kurang siap untuk mengasuh dan mengelola keluarga. Sekolah Pak-bapak masih belum terorganisir dengan baik dan belum memiliki modul. Pertemuan dilakukan pada saat arisan kampung yang diadakan setiap dua minggu sekali. Cara-cara kreatif untuk belajar bersama dilakukan oleh para bapak. Selain di rumah warga, sekolah Pak-bapak juga dilaksanakan saat berziarah ke makam leluhur dan saat para bapak bergotong royong membangun rumah.

Dua sekolah pengasuhan ini dirasakan masih kurang mencukupi karena kakek dan nenek memiliki persoalan sendiri terkait dengan usianya sementara mereka juga harus berfungsi sebagai pengasuh bagi cucu yang ditinggalkan orang tuanya karena bekerja di luar desa. Kelompok ini berinisiatif melaksanakan Sekolah Eyang untuk belajar tentang pengasuhan cucu yang lebih baik dan kesehatan keluarga. Pendekatan yang digunakan untuk Sekolah Eyang melalui senam dan pengajian. Ternyata, para lansia tidak bisa diremehkan karena semangat belajar mereka sangat tinggi. Secara mandiri mereka membuat struktur organisasi dan kurikulum untuk setiap pertemuan. Jika ada salah satu dari anggota mendapatkan kesempatan belajar di luar sekolah, maka ketika pulang ia akan membagikan ilmunya kepada sesama anggota.

## **Tanoker dan Kendalanya**

Sejak berdirinya Tanoker di tahun 2009, tidak hanya anak-anak, orang dewasa di Ledokombo juga mendapat manfaat dari keberadaan Tanoker. Label keras kepala dan sulit diajak maju yang tadinya melekat pada masyarakat Madura yang merupakan penduduk mayoritas Ledokombo berhasil dipatahkan. Meskipun demikian, pekerjaan mendampingi masyarakat ini tidak selalu berjalan mulus. Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh Tanoker saat ini. Pertama, meskipun kemandirian masyarakat dibangun oleh Tanoker, hanya dua kelompok yang paling menunjukkan kemandirian, yakni anak-anak (hulu) dan lansia (hilir).

Menurut refleksi saya (Farha Ciciek), pendampingan intensif yang diberikan kepada kelompok usia produktif (yang tergabung di Sekolah Bok-ebook dan Pak-bapak) menimbulkan ketergantungan pada Tanoker. Selain itu, kompleksitas masalah di antara mereka sepertinya lebih rumit. Mereka masih mempunyai beban individual, seperti masalah finansial keluarga yang belum terselesaikan sehingga menghambat partisipasi mereka dalam membangun Ledokombo sebagai kampung ramah anak. Oleh karena itu, Tanoker sedang melakukan pembenahan strategi pendampingan untuk menghindari ketergantungan dari warga yang didampingi.

Kendala kedua terkait dengan kaderisasi. Saat ini Tanoker mengalami kesulitan mendapatkan sumber daya manusia militan sebagai pendamping masyarakat. Hal ini sangat terkait dengan perubahan dalam masyarakat maupun dunia kampus. Sejak berdirinya Tanoker, mahasiswa merupakan salah satu pendamping aktif, terutama untuk anak-anak. Namun, dalam tiga tahun terakhir semakin sedikit mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan di Tanoker. Sementara itu, anak muda di desa lebih berminat untuk merantau mencari pengalaman dan penghasilan yang lebih menjanjikan. Ketiga, masih diperlukan upaya untuk menumbuhkembangkan rasa kepedulian terhadap pengasuhan bersama oleh berbagai sektor dalam

masyarakat, misalnya sektor pendidikan dan pemerintahan desa, dan keagamaan. Keempat, masih belum terbangun sistem yang sinergis mulai dari keluarga, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan pemerintahan untuk mengawal proses tumbuh kembang anak yang aman dan bahagia

## Cerita dari Karanggeneng Jamuskauman<sup>4</sup>

*Paryati*

Karanggeneng adalah sebuah subdusun dari sebuah pedukuhan bernama Kauman. Letaknya di penghujung Desa Jamuskauman dan perbatasan kecamatan, antara Kecamatan Ngluwar dan Kecamatan Salam Magelang. Penduduknya ada 63 kepala keluarga, di antara jumlah tersebut, 40% berstatus janda yang mayoritas bekerja sebagai buruh tani, tani, dan pedagang sayur keliling. Buruh tani hidup dari upah mengerjakan lahan sebesar Rp.3.500 per jam, sedangkan pemilik lahan seluas 300 m<sup>2</sup> mendapatkan hasil, jika dipotong bagi hasil, tak lebih dari Rp.400.000 selama 3 bulan. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, perempuan dan janda melakukan pekerjaan menumbuk emping dengan upah Rp.3.000 per kilogram. Dalam sehari penumbuk emping maksimal mendapatkan Rp.13.000. Dapat disimpulkan bahwa warga dusun tergolong masyarakat ekonomi bawah yang tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kondisi yang serba kekurangan memaksa mereka mencari pekerjaan sambilan dan tidak sedikit yang bermigrasi ke kota kota besar seperti Jakarta. Akibatnya, dari 63 kepala keluarga, yang tersisa hanya 44 kepala keluarga yang tinggal di kampung tersebut.

Pada pertengahan tahun 2013, diadakan suatu acara pengajian yang melibatkan masyarakat. Iuran sebesar Rp.10.000 yang telah disepakati, ternyata tidak mampu dipenuhi oleh warga. Seorang pendatang dari Lampung yang beristrikan gadis kampung tetangga dan baru saja membuat rumah di Kampung Karanggeneng merasa tertantang. Ia kemudian menawarkan suatu gagasan untuk mengubah kondisi tersebut. Pemuda tersebut bernama Supriyadi.

Motivasi Supriyadi untuk membuat transformasi sosial di Dusun Karangreneng tidak muncul begitu saja. Sebelum bermukim di Karanggeneng, Supriyadi tinggal di Yogya, tempat pemuda asal Lampung ini bekerja di bagian *marketing* di sebuah

---

4 Dituris berdasarkan hasil wawancara dengan Supriyadi.

perusahaan *hospitality*. Pada malam ketika terjadi letusan Gunung Merapi yang meluluh lantakkan Yogya dan sekitarnya di tahun 2006, Supriyadi kebetulan menginap di rumah mertuanya, di Dusun Jamus Kauman. Keesokan harinya, ketika ia kembali ke Yogya, didapatinya rumah kontrakan beserta seluruh isinya telah rata dengan tanah. Supriyadi pun mengungsi di Dusun Jamus Kauman, yang merupakan zona aman. Meskipun demikian, ia melihat bagaimana sawah ladang tertutup debu vulkanik, dan seluruh padi dan hasil bumi yang siap panen rusak tak terselamatkan. Warga dusun mengalami trauma, kehilangan penghasilan. Pada saat yang sama, karena termasuk zona aman, mereka tidak mendapat bantuan pemerintah seperti halnya kampung seberang, yang masuk dalam zona bencana. Supriyadi menyaksikan kemiskinan dan ketidakberdayaan warga, dan ia pun berpikir keras untuk mencari solusinya. Beberapa tahun kemudian ia pun membangun rumah di Karanggeneng, tak jauh dari dusun mertuanya. Di situ ia mulai menjalin relasi dengan warga, dan mulai memetakan permasalahan yang ada.

Sebagai seorang pakar marketing, ia berniat mengalirkan uang dari kota ke desa. Terinspirasi oleh sebuah acara di TV, ia menggagas program bagi anak-anak kota untuk *live in* di desa dengan melibatkan seluruh masyarakat dusun setempat. Padahal, dusun Karanggeneng bukanlah dusun yang istimewa alamnya. Yang ada hanya sawah dan ladang, serta rumah-rumah sederhana ala desa. Jadi, yang akan dijadikan fokus untuk kunjungan ke desa bukanlah lokasinya, melainkan keseharian warga dusun yang tidak dijumpai di kota. Tetapi tentu kehidupan petani miskin sehari-hari tidak cukup untuk acara *live-in*. Supriyadi pun memikirkan cara untuk menghidupkan kembali kesenian dan permainan anak tradisional yang sudah lama dilupakan di dusun tersebut.

Program tersebut disampaikan kepada warga, Pak Bahroni dan Pak Serka Maryono (seorang anggota TNI aktif) yang peduli dengan kampung. Keduanya menanggapi secara positif gagasan tersebut dan terjadilah perbincangan menarik dari ketiganya. Supriyadi mengajak Pak Bahroni dan Pak Serka Maryono untuk mengumpulkan enam orang kepala keluarga yang berpikiran maju dan berjiwa sosial. Dalam musyawarah di kediaman Pak Bahroni, warga yang berkumpul menyetujui usulan tersebut. Pada kesempatan berikutnya, warga dalam musyawarah kecil melakukan dua kali pertemuan dalam seminggu untuk mematangkan konsep hingga mencetuskan nama baru untuk Kampung Karanggeneng. Desa inipun bermetamorfosa menjadi Kampung Dolanan Jamuskauman. Kini masyarakat mengenal kampung ini dengan nama tersebut.

Inisiatif lanjutan adalah mengumpulkan semua warga untuk menawarkan program tersebut. Alhamdulillah masyarakat menyetujui dan mendukung program itu. Semua warga berpartisipasi untuk melakukan kerja bakti setiap minggu pagi dan berlatih permainan tradisional yang dulu pernah dinikmati oleh generasi

sebelumnya. Tak sedikit orang yang menonton dan menertawakan apa yang dilakukan. “Tapi tekad kami bulat, silakan tertawakan kami, suatu saat kami akan menertawakan kalian.” Itu kata salah seorang penggiat kampung dan kini kalimat itu terbukti.

Banyak perubahan terjadi setelah Kampong Dolanan Jamuskauman menjadi tempat acara *live in* yang didominasi oleh sekolah-sekolah favorit di Jakarta, Bandung, dan sekitarnya. Setiap kali rombongan anak sekolah datang, rata-rata warga mendapatkan Rp.400.000-500.000 dari hasil penjualan dan ongkos menampung tamu yang ditetapkan oleh pengurus. Dalam satu tahun, kunjungan tamu rata-rata mencapai 2.300-2.500 orang dan setiap sekolah yang sudah pernah merasakan tinggal di kampung tersebut dan selalu kembali lagi di tiap tahunnya dengan membawa siswa yang merupakan adik kelasnya.

Secara sosial program *live in* juga menghasilkan perubahan positif, bukan saja pada anak-anak kota yang menginap, tetapi juga pada masyarakat desa. Kegiatan yang harus disiapkan dan dilakukan secara bersama-sama menumbuhkan semangat gotong royong untuk membangun kampung mandiri berbasis kekeluargaan. Dari hasil kunjungan tamu perdana, masyarakat bisa membangun sebuah pendopo yang dijadikan balai musyawarah kampung. Pendapatan dari kunjungan selanjutnya digunakan oleh masyarakat untuk membeli gamelan karawitan, seragam kesenian, kursi, juga membangun perpustakaan dan jalan.

Pembiayaan nonfisik digunakan sebagai modal masyarakat dalam berjualan, sehingga warga tidak perlu meminjam ke bank atau koperasi. Untuk kebutuhan acara-acara kampung, tidak diperlukan lagi iuran masyarakat. Dana yang terkumpul juga digunakan untuk sumbangan ketika ada anggota masyarakat yang sakit atau meninggal dunia, dan masih banyak lagi manfaat yang telah diberikan oleh kegiatan kampung bagi masyarakatnya.

Suasana gotong royong di antara masyarakat bertambah dengan menguatnya rasa memiliki dusun dan berbagai inisiatif untuk membuat kegiatan bersama. Kegiatan yang rutin dilakukan oleh masyarakat ketika tidak ada kunjungan tamu adalah:

- Senin-Minggu : Ronda malam
- Minggu : Kerja bakti lingkungan
- Minggu : Les bahasa Kawi (untuk anak-anak)
- Minggu malam : Pengajian ibu-ibu
- Senin malam : Les anak-anak (Siswa SD diajar oleh siswa yang sudah SMP & SMA, yang SMP & SMA diajar oleh guru les yang dihadirkan oleh kampung.)

Kini, warga terbiasa dengan gotong royong, baik untuk lingkungan atau untuk layanan sosial masyarakat dan mereka merasa berkepentingan untuk terus menjaga dan melestarikan budaya warisan leluhur yang sempat dilupakan. Dengan pedoman *memayu hayuning bawono*, warga mulai mempercantik lingkungan dengan memanfaatkannya sebagai lahan berkebun. Kini, buruh tani merasa bisa menanam sendiri tanpa harus bertumpu pada sistem buruh bagi hasil. Mereka menanam dengan sistem *tabulampot*. Warga tidak berorientasi pada penjualan hasil karena lahan yang dimiliki warga tidak seberapa, tetapi warga menjual bibit yang telah disiapkan, sehingga banyak yang memesan bibit dan itu sangat membantu perekonomian warga desa.

Sistem gotong royong yang terbangun sangat berbeda dengan program padat karya yang dicanangkan pemerintah. Oleh warga, program padat karya dipandang tidak mendidik karena menghilangkan budaya gotong royong yang asli milik masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena dengan adanya program yang membayar tenaga masyarakat untuk membangun infrastruktur, masyarakat merasa gotong royong tidak lagi penting. “Kan sudah ada program pemerintah yang disebut padat karya,” begitu alasan mereka ketika diajak membangun bersama. Akan tetapi, warga dusun Karanggeneng kini telah keluar dari paradigma tersebut. Menurut mereka, alasan yang mendasarinya adalah,

Karena kami masyarakat pedesaan yang kebetulan tinggal di wilayah perbatasan, sehingga dusun kami sering luput dari program-program pemerintah. Maka, kami melakukan protes dengan cara yang elegan menurut kami. Apa protes kami? Protes itu berbentuk tekad bulat untuk memajukan kampung dengan cara mandiri tanpa bergantung dari Dana Desa atau bantuan pemerintah (karena kami merasa pesimis dana itu akan sampai dan belum tentu setahun sekali program akan datang).

Dengan gotong royong, warga berhasil membangun kepercayaan diri. Rasa percaya diri ini diperkuat dengan dukungan dari luar dusun yang dibawa oleh rekan dari Supriyadi dari Banyuwangi. Pada awal tahun 2016, setelah mengunjungi Kampoeng Dolanan Jamuskauman, Supriyadi diperkenalkan oleh temannya itu kepada Redy Eko Prastyo. Redy adalah pendiri Jaringan Kampung Nusantara, sebuah jejaring yang menghubungkan aktivis kampung melalui media sosial.

Ketika Surpiyadi masuk dalam komunitas Japung, banyak ilmu dan pengalaman yang telah diberikan kepada masyarakat Jamuskauman, termasuk bagaimana mengembangkan ekonomi, seni, budaya, dan lain sebagainya. Melalui jaringan kampung tersebut, banyak penggiat kampung yang datang untuk saling silang ide. Tidak jarang Japung menghadirkan berbagai ahli, mulai dari praktisi seni, budaya,

lingkungan sampai guru besar dari universitas terkemuka untuk berdiskusi dengan warga.

Satu pengalaman berharga yang membuat masyarakat sekitar takjub adalah acara pesta rakyat di dusun yang diisi oleh orang-orang ternama dan pelaku seni ibu kota yang kemudian menjadi saudara bagi warga. Muncullah pertanyaan dari masyarakat sekitar, “Kok bisa sebuah kampung kecil membuat acara yang spektakuler seperti itu?” Jawabnya, hanya dengan modal gotong royong. Saat ini, Kampong Dolanan Jamuskauman sudah sedemikian maju, tapi warga dusun tidak pernah merasa puas, “Kami terus berimajinasi tentang kampung yang maju tanpa meninggalkan budaya warisan leluhur”.

## Kampung Kopi Rakyat di Lereng Gunung Ijen

*Bachtiar Djanan M. dan Tri Andri Marjanto*

Kampung Kopi Gombengsari. Demikianlah penyebutan kekinian bagi Kelurahan Gombengsari yang berada di lereng sebelah tenggara Gunung Ijen. Kampung ini terletak di ketinggian 400-700 meter di atas permukaan laut, hanya berjarak sekitar 12 km dari pusat Kota Banyuwangi atau sekitar 25 menit perjalanan menggunakan kendaraan bermotor. Nenek moyang warga kampung yang kini dihuni sekitar 7.000 jiwa ini rata-rata bekerja di perkebunan kopi Kaliklatak, sebuah perkebunan yang dulunya dimiliki perusahaan swasta Belanda Mij. Moorman & Co. Pada tahun 1957, perkebunan ini beralih kepemilikan kepada pengusaha pribumi.

Keturunan para pekerja perkebunan Kaliklatak ini kemudian membuka lahan baru di luar perkebunan sebagai tempat mereka tinggal. Mereka menanam kopi di lahan mereka dari bibit yang diselundupkan dari bibit kopi milik Perkebunan Kaliklatak. Saat ini, luas keseluruhan kebun kopi milik warga di Gombengsari telah mencapai sekitar 850 hektar. Sebagian besar jenis tanaman kopi yang dibudidayakan adalah jenis robusta, hanya sebagian kecilnya kopi dari jenis ekselsa serta liberika.

### **Anak Muda Tidak Tertarik**

Warga Gombengsari sejak dulu hanya terbiasa menanam dan merawat kebun kopi, tapi tidak tahu cara memasarkannya. Sebelum tahun 2016, sebagian besar hasil panen biji kopi (*green bean*) dari kebun mereka dibeli para tengkulak dengan sistem ijon dan dengan harga yang sangat murah, yaitu berkisar antara Rp.16.000-17.000 per kilo dan harga kopi itu ditentukan secara sepihak oleh tengkulak. Hasil dari penjualan kopi ke tengkulak ini dianggap tidak menjanjikan pendapatan yang bagus, kurang sebanding dengan tenaga dan upaya yang dikeluarkan dalam merawat kebun selama setahun. Padahal, dalam setahun kopi dipanen hanya kurang lebih 3

bulan sekali, selebihnya adalah kegiatan merawat kebun kopi yang tentu saja selalu membutuhkan biaya operasional.

Kondisi pendapatan yang minim ini mengakibatkan aktivitas mengurus kebun kopi menjadi tidak menarik bagi kalangan generasi muda warga kampung Gombengsari. Rata-rata anak muda kampung lebih memilih untuk bekerja di luar kampung, terutama di Bali, agar bisa berpenghasilan cukup. Akibatnya, kampung sepi pemuda, yang tersisa kebanyakan adalah anak-anak dan warga berusia 40 tahun ke atas.

## **Punya Kebun, tapi Anonim**

Pada November 2015, atas undangan lurah setempat, komunitas Hidora (Hiduplah Indonesia Raya) “menemukan” kampung dengan harta karun berupa kebun kopi rakyat ini. Saat kunjungan pertama ke Gombengsari, di mata Tim Hidora, kampung ini ibarat surga. Kebun kopi, peternakan kambing etawa, kebun kelapa, hutan, dan panorama alam di kampung ini demikian menarik, unik, dan indah, sehingga langsung bisa disimpulkan kampung ini memiliki potensi wisata yang sangat besar, bahkan bisa berkelas internasional.

Gombengsari memiliki panorama yang begitu indah. Sejauh mata memandang, terlihat ratusan hektar kebun kopi di lahan yang berbukit-bukit. Ironisnya, ketika ingin mencoba seduhan kopi hasil kebun warga di warung kopi yang ada, kopi yang disajikan justru kopi kemasan. Warga tidak menjual kopi asli dari kebun kopi mereka sendiri. Dari sini, diketahui bahwa warga kampung ini tidak terbiasa memproduksi kopi bubuk untuk dijual. Mereka membuat kopi bubuk untuk mereka konsumsi sendiri. Hal ini disebabkan karena hampir seluruh hasil panen kopi dijual dalam bentuk biji kopi (*green bean*) kepada tengkulak dengan sistem ijon. Rata-rata hasil panen kebun kopi ini dibeli oleh tengkulak dari Kabupaten Malang yang kemudian dijualnya lagi ke pabrik kopi perusahaan besar dan ternama. Jadi, walaupun memiliki kebun kopi yang sangat luas, produk kopi dari kampung Gombengsari ini anonim, tidak bermerek, dan tidak pernah dikenal masyarakat luas. Menurut cerita warga, ada salah satu petani kopi Gombengsari yang mencoba memproduksi kopi bubuk, tapi karena kesulitan dalam pemasaran, akhirnya kembali hanya menjual biji kopi kepada tengkulak.

Selama beberapa kali kunjungan, Tim Hidora melakukan pemetaan atas potensi dan permasalahan yang ada di kampung. Pemetaan dilakukan melalui diskusi dengan pihak kelurahan, warga kampung, para petani kopi dan istri mereka, serta anak mudanya. Dari hasil pemetaan, Hidora bersama dengan beberapa warga merancang *road map* program pemberdayaan masyarakat melalui aktivitas wisata dengan tema utama wisata kopi dan program pengembangan produk kopi Gombengsari.

## **Perjalanan Secangkir Kopi**

Dengan gotong royong, Hidora bersama warga kampung menata dan mempersiapkan potensi yang ada untuk dijadikan atraksi wisata. Proses sosialisasi dari rumah ke rumah, diskusi sambil *ngopi*, sampai forum-forum *workshop* informal dilakukan tim bersama warga, sambil mulai mengumpulkan dan mengorganisasi anak-anak muda yang masih tinggal di kampung.

Dalam proses awal ini, Tim Hidora lebih banyak *sharing* tentang apa dan bagaimana wisata kampung atau wisata desa dan berusaha membangkitkan rasa percaya diri warga, bahwa kampung mereka dan aktivitas keseharian warga ini sebetulnya sangat menarik bagi wisatawan. Tinggal bagaimana membuat rute perjalanan wisata dan alur kegiatan jika tamu wisata datang, serta mengemas sedikit mengenai kebersihan dan kerapian, agar tamu merasa lebih nyaman.

Hasil dari beberapa kali *sharing*, diskusi, dan *workshop* kecil-kecilan itu, jadilah sebuah skenario tur sederhana menjelajah kebun kopi, dari memperkenalkan tanaman kopi ciri khas Gombongsari, menunjukkan proses *roasting* (sangrai) secara tradisional dengan tungku kayu bakar dan wajan gerabah, mendinginkan kopi hasil sangrai, menumbuk, menyaring, sampai menyeduh kopi dan menikmatinya. *The journey of a cup of coffee*, demikianlah tema wisata kopi di kampung ini. Wisata ini merupakan sebuah perjalanan untuk menikmati indahnya suasana kebun kopi, memproses kopi, sampai menikmati secangkir kopi panas ditemani jajanan khas desa.

Selain kebun kopi, warga di kampung ini rata-rata memiliki ternak kambing etawa. Susu kambingnya diperah dan dijual, kotoran kambingnya dikumpulkan untuk dimanfaatkan sebagai pupuk bagi tanaman kopi, karena rata-rata warga tidak sanggup membeli pupuk kimia yang harganya relatif mahal. Kegiatan pemerah susu kambing, memberi makan kambing dan minum anak kambing menggunakan dot dikembangkan juga menjadi salah satu atraksi wisata. Anak-anak kambing dilatih minum dari dot supaya mereka terbiasa.

## **Swadaya dan Mandiri**

Sesekali melalui jejaring Hidora dari kalangan tur operator dan penginapan di Banyuwangi, wisata ke kebun kopi rakyat dan peternakan kambing etawa di kampung ini diperkenalkan kepada wisatawan, terutama dari mancanegara. Ternyata kegiatan wisata yang menawarkan atraksi berbasis aktivitas keseharian masyarakat kampung ini mendapatkan sambutan sangat baik dari wisatawan. Sebagian besar wisatawan yang telah bertahun-tahun menjadi penikmat kopi, ternyata belum pernah mengetahui wujud tanaman kopi maupun cara memproses kopi dari biji mentah

sampai menjadi bubuk kopi. Pengalaman wisata kopi yang ditawarkan Kampung Gombengsari menjadi hal baru yang sangat menarik bagi mereka.

Dokumentasi dari semua aktivitas wisatawan di kampung, baik berupa foto maupun video, meskipun hanya menggunakan perangkat telepon genggam, dipakai untuk mempromosikan wisata di Kampung Gombengsari melalui *Facebook*, *Instagram*, *Youtube*, dan juga melalui grup-grup *WhatsApp*. Dalam waktu relatif singkat, potensi wisata kebun kopi rakyat ini mulai dikenal. Semua proses penggalian serta penataan potensi, penguatan SDM, penentuan standar layanan, proses manajerial, sampai langkah-langkah promosi, sepenuhnya dilakukan secara swadaya dan mandiri oleh warga bersama Tim Hidora, tanpa keterlibatan pemerintah.

## **Menyangrai dan Mengemas**

Saat tamu wisata mulai berdatangan ke kampung ini, mulailah muncul permintaan dari tamu-tamu yang ingin membeli produk kopi sebagai oleh-oleh. Pada awalnya warga tidak mempunyai kopi siap jual karena hampir seluruh hasil panen kopi dijual kepada tengkulak dan hanya disisakan sedikit untuk dikonsumsi sendiri. Selain itu, produksi kopi yang diproses secara tradisional oleh warga juga belum bisa menghasilkan kualitas kopi yang enak rasanya.

Atas dasar kebutuhan ini, diupayakan agar warga dapat menyuplai kopi bubuk hasil produksi mereka yang berkualitas. Langkah pertama yang dilakukan adalah mencari tahu warga yang sudah memiliki keterampilan mengolah kopi dengan benar. Cara yang dilakukan adalah membuat lomba menyangrai kopi secara tradisional pada saat kegiatan ulang tahun Kelurahan Gombengsari. Pesertanya hanya khusus warga Gombengsari. Lebih dari 70 orang warga yang menjadi peserta lomba. Lomba ini dinilai oleh seorang ahli sangrai kopi tradisional.

Dari proses dan hasil lomba sangrai kopi ini, terpetakan bahwa rata-rata proses pengolahan kopi yang dilakukan warga belum benar sehingga wajar jika hasil kopinya juga menjadi kurang enak. Kebanyakan warga menyangrai kopinya terlalu lama, sehingga biji kopi yang dihasilkan terlalu gosong. Selain itu, jumlah biji kopi yang disangrai terlalu banyak yang menyebabkan hasil sangrai menjadi kurang merata. Di akhir lomba, juri mempraktikkan dan menjelaskan cara menyangrai kopi yang benar secara mendetil dan lengkap.

Meskipun telah dibuat sesi demo dan pengajaran menyangrai kopi, sulit bagi warga untuk mengubah kebiasaan yang telah terbentuk selama bertahun-tahun. Ketika berkunjung ke rumah-rumah warga untuk mengecek proses produksi kopi warga kampung pascalomba sangrai, ternyata belum banyak perubahan. Rata-rata warga masih tetap melakukan proses sangrai dengan cara lama, sehingga hasilnya masih belum memuaskan. Untuk menyiasatinya, dilakukan edukasi tentang proses

menyangrai kopi secara tidak langsung. Caranya adalah sesekali mengajak warga yang sudah mulai sering menyangrai kopi ke kafe milik juri lomba sangrai untuk melihat dan belajar langsung bagaimana sang juri menyangrai kopinya. Sekali waktu juri ini diajak berkunjung ke rumah warga dan mengajari proses menyangrai. Dibutuhkan waktu, kesabaran, dan ketelatenan untuk membuat perubahan.

Selain memberi pendampingan dalam meningkatkan kualitas produk, Tim Hidora juga memberi masukan mengenai kemasan produk kopi yang menarik. Biasanya warga hanya memakai plastik biasa sebagai bungkus kopi. Untuk menyegelnya, mereka membakar ujung plastik dengan lilin, sementara mereknya hanya berupa kertas foto kopian atau berupa sablon di plastik pembungkus. Untuk meningkatkan nilai jual, diperkenalkanlah kemasan kopi berbahan *aluminium foil*, dengan merek yang ditempel pada kemasan. Meskipun harganya lebih mahal, kemasan seperti ini meningkatkan nilai jual kopinya sehingga warga bisa mendapat keuntungan yang lebih besar.

## **Gotong Royong**

Setahun setelah kunjungan pertama, pada Oktober 2017, diselenggarakanlah sebuah Festival Kampung Kopi Lerek Gombengsari (Festival Kopilego). Lerek adalah nama lingkungan (*dusun*) tempat bermulanya pengembangan aktivitas wisata kebun kopi. Festival ini menjadi salah satu bagian penting dari *road map* pengembangan kampung Gombengsari, terkait publikasi dan promosi. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan potensi kampung Gombengsari secara lebih luas.

Festival ini diselenggarakan oleh warga secara swadaya dan mandiri, tanpa sedikitpun bantuan dana dari pemerintah. Kegiatan ini melibatkan jejaring seniman dari berbagai kota dan kabupaten yang tergabung di Jaringan Kampung Nusantara serta seniman dari mancanegara. Lebih dari lima puluh orang seniman berpartisipasi dalam acara ini. Mereka berasal dari tujuh negara, serta delapan kota dan kabupaten di Indonesia, termasuk dari lokal Banyuwangi sendiri. Warga bergotong royong membuat panggung, menyiapkan rumah-rumahnya sebagai tempat menginap bagi para seniman pengisi acara, sampai menyediakan konsumsi. Semua dilakukan secara sukarela. Para seniman pun berpartisipasi dengan sukarela, mereka hadir karena ingin mendukung gerakan warga untuk membangun kampungnya. Klop dan bersinergi.

Festival Kopilego dimeriahkan oleh berbagai atraksi menarik, mulai dari kegiatan bazar UMKM warga, *fam trip* tur wisata kopi dan peternakan kambing, *workshop* proses kopi untuk para petani kopi, panggung seni budaya musik dan tari, sampai memunculkan kembali tradisi sepak bola api khas Kampung Gombengsari yang sudah bertahun-tahun mati suri tak pernah lagi dimainkan warga. Karena

acaranya yang unik, Festival Kopilego mendapatkan peliputan maksimal oleh kalangan pers, dari berbagai media lokal, regional, sampai nasional, baik dari media cetak, elektronik, sampai media *online*. Hal ini membuat Kampung Kopi Gombengsari bertambah *viral* dan semakin dikenal luas.

## **Jati Diri dan Identitas**

Setelah Festival Kopilego, Kampung Kopi Gombengsari semakin banyak mendapat kunjungan rutin dari tamu-tamu wisata, baik wisatawan mancanegara, nusantara, maupun lokal. Anak-anak muda kampung yang tadinya bekerja di Bali maupun di luar kampung, mulai tertarik pulang kembali ke kampungnya untuk mencoba berbisnis kopi maupun bisnis-bisnis lain terkait pariwisata.

Saat ini, tiga tahun semenjak dimulainya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kampung Gombengsari, warga telah memiliki posisi tawar atas harga kopi mereka. Pada musim panen kopi tahun 2018, warga sudah menjadi penentu harga kopi mereka sendiri, yaitu sekitar 2 kali lipat dari harga biji kopi (*green bean*) yang dulunya selalu ditentukan secara sepihak oleh tengkulak. Kampung penghasil kopi ini sekarang telah melahirkan 8 merek kopi produksi warga kampung yang dikemas secara menarik. Selain dibeli oleh tamu wisata, kopi mereka telah tersebar dan dijual di berbagai toko oleh-oleh di Banyuwangi, maupun dipasarkan secara *online*, dan dikirim ke kota-kota di berbagai penjuru nusantara. Selain itu, di kampung Gombengsari saat ini telah bermunculan beberapa bisnis kafe dan *home stay* milik warga. *Home industry* oleh-oleh dan *souvenir* juga mulai tumbuh, dan kini mulai dikembangkan aneka varian kegiatan wisata yang dikelola oleh warga yang tersebar di enam lingkungan (*dusun*) di Kelurahan Gombengsari.

Daerah wisata di Kelurahan Gombengsari yang selalu ramai dikunjungi wisatawan pun meluas meliputi kebun kopi dan peternakan kambing di lingkungan Lerek (Kopilego), di Kacangan (Kampung Kahyangan), dan di Gombeng (Gombengsari Nirvana Coffee), Bukit Puncak Asmoro yang memiliki panorama indah, Wana Wisata Sumber Manis dan Air Terjun Gua Istana di Suko, dan perkebunan kopi Kaliklatak. Kelurahan Gombengsari yang dulunya tidak banyak dikenal, bahkan oleh sebagian besar warga Kabupaten Banyuwangi sendiri, kini telah *go internasional*. *Brand* Kampung Kopi Gombengsari menjadi sebuah ikon wisata desa di Banyuwangi yang sukses dan berdampak langsung pada meningkatnya kesejahteraan warga. Gombengsari terus bermetamorfosis, seiring dengan proses perjalanan warga kampung yang telah menemukan kembali jati diri dan identitasnya. Kini mereka bangga menjadi warga Kampung Kopi Gombengsari.

Bagi para pencinta kopi di manapun berada, kalau Anda mengaku sebagai penikmat kopi sejati, kenali produk yang Anda cintai itu dengan, “Ngopilah di tempat yang semestinya, yaitu di kebun kopi”. Ini *tagline* yang kian populer di Banyuwangi.

## Kampungmu, Kampungku

*Tri Andi Yuniarso*

Ketika mengurus seni, bahasa, dan sastra di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara, saya dan istri saya, Sundari, seorang dosen Fakultas Pertanian Universitas Kutai, mempunyai hobi menjelajahi desa dan kampung-kampung. Berawal dari hobi tersebut, kami semakin ketagihan untuk menelusuri lebih jauh tentang apa dan bagaimana sebuah kampung itu. Dari sekadar menikmati suasana kampung yang asri dengan pemandangan yang menyejukkan mata, udara segar, serta keramahan orang-orangnya, kini kami lebih dari sekadar berjalan-jalan. Kampung-kampung yang kami datangi sudah serasa menjadi kampung sendiri, yang akhirnya muncul sebuah rasa kepedulian, kepemilikan, dan tanggung jawab moral terhadap perkembangan dan kemajuannya. Kami berkenalan dengan para pemuda dan tokoh masyarakatnya hingga akhirnya terjadi obrolan-obrolan yang mengasyikkan. Begitulah yang kami lakukan ketika memasuki kampung yang sama sekali belum pernah kami kenal karena memang bukan kampung sendiri. Kami membuka obrolan seputar apa yang ada di kampung itu, misalnya tentang kegiatan pemudanya, hasil pertaniannya, kegiatan seni budaya dan macam-macam. Saya selalu banyak bertanya, ingin mengetahui apa saja tentang isi dan kondisi di kampung tersebut.

Dari hasil obrolan-obrolan santai seperti itu, ternyata kampung-kampung itu sangat luar biasa, menyimpan begitu banyak potensi-potensi besar, baik potensi budaya, alam, dan sumber daya manusia. Namun, sering sekali warga kampung itu tidak menyadari adanya potensi-potensi tersebut. Ibarat peribahasa, gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di seberang lautan tampak. Salah satu contoh yang pernah saya temukan adalah ketika memasuki sebuah satu Desa Handil yang terletak di Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara yang sebagian besar wilayahnya adalah pantai. Sepanjang pantai tersebut banyak ditumbuhi oleh nipah dengan luas ratusan hektar. Ketika kami bertanya apa yang dimanfaatkan dari nipah oleh penduduk setempat, ternyata nipah hanya diambil daunnya untuk dijadikan atap.

Padahal, ternyata pohon nipah juga mempunyai buah yang bisa dimakan (yang masih muda) dan hanya seperti air kental, walaupun sedikit sekali. Namun, buah yang tua bisa sebesar buah rambutan tetapi keras seperti batu. Ternyata buah-buah nipah itu tidak ada yang menyentuhnya, dibiarkan jatuh dan tumbuh atau busuk hingga menjadi sampah di tengah habitatnya. Dari sebuah ketertarikan untuk memanfaatkan buah nipah yang tak termanfaatkan, kami melakukan eksperimen untuk mengolah buah tersebut menjadi sebuah olahan makanan dengan cara memarut buah yang keras tadi untuk dijadikan bahan dasar. Akhirnya, jadilah olahan makanan berupa dodol, bolu, dan kue kering. Pada acara Festival Kampung Handil, produk-produk tersebut dikenalkan kepada seluruh masyarakat yang hadir. Saya mengajarkan warga (ibu-ibu) cara mengolah nipah. Akhirnya, sekarang Kampung Handil semakin berkembang dengan berbagai macam produk olahan nipahnya.

Desa berikutnya adalah sebuah desa yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Baik petani padi maupun sayur mayur (palawija). Bermula dari bincang-bincang bersama tokoh pemuda di salah satu RT, maka tercetuslah ide untuk membuat sebuah kegiatan yang kemudian disepakati dengan nama Festival Bukit Biru. Nama tersebut adalah nama sebuah bukit yang menjadi ikon desa tersebut dan menjadi salah satu objek yang ramai dikunjungi anak-anak muda. Di lereng bukit biru tadi kami menggelar acara Festival Bukit Biru dengan menampilkan berbagai atraksi seni dengan mengundang partisipan dari beberapa daerah terdekat. Kegiatan tadi mendapat respons yang cukup bagus dari pihak pemerintahan desa. Nama desa tersebut adalah Sumber Sari, terletak di kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Seperti disebutkan di atas, desa tersebut mayoritas penduduknya adalah petani, maka dari hasil bincang-bincang dan diskusi bersama tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan kepala desa, akhirnya disepakati akan digelar sebuah *event* kelas desa dengan nama Festival Kampung Tani Desa Sumber Sari. Segala persiapanpun dilakukan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Tanpa adanya anggaran, mereka terus semangat dalam mempersiapkan acara tersebut. Kami menemani mereka dalam menyusun/mendesain acara yang akan dilaksanakan dalam durasi waktu selama empat hari.

Semangat kegotongroyongan terus kami kobarkan. Kami terus memberi motivasi kepada mereka. Sebenarnya mereka pun mengakui bahwasannya semangat itu sudah jarang sekali mereka lakukan. Momen inilah yang membangkitkan kembali semangat kebersamaan dan kegotongroyongan untuk desa/kampungnya. Ternyata, tidak hanya di perkotaan, bahkan di desa juga budaya gotong royong mulai terkikis. Ada kebanggaan tersendiri bagi warga Desa Sumber Sari pada saat pembukaan Festival Kampung Tani yang secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara saat itu. Festival diawali dengan karnaval kostum palawija yang diikuti oleh siswa/siswi salah satu sekolah menengah di desa tersebut. Di luar dugaan,

partisipan untuk pawai tersebut sangat luar biasa. Bahkan, kelompok-kelompok seni dari desa-desa tetangga juga sangat antusias untuk ikut memeramaikan acara itu. Beberapa acara pendukung yang berkaitan dengan pertanian juga kami gelar, seperti lomba-lomba, pelatihan, dan diskusi.

Akhirnya, dampak dari kegiatan Festival Kampung Tani sangat dirasakan oleh masyarakat. Tidak lama setelah itu kemudian ditetapkan sebagai Desa Agrowisata. Tentu saja, ini akan melibatkan para pemudanya dalam hal pengelolaan objek wisata yang otomatis akan berdampak bagi lini ekonomi desa tersebut. Bahkan, setelahnya ada penancangan Pemuda Tani kerja sama antara Dinas Pertanian, Pemdes Sumber Sari, Faperta, dan Karang Taruna Pemkab Kutai Kartanegara.

Kemudian, kami berkenalan dengan seorang tokoh pemuda di salah satu desa yang masih berada di kecamatan yang sama, yaitu Kecamatan Loa Kulu, yaitu Desa Jembayan. Desa ini awalnya tidak pernah dilirik yang ternyata menyimpan potensi besar. Desa ini dibelah oleh anak sungai Mahakam, yaitu sungai Jembayan. Dulu desa ini pernah menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Kutai Kartanegara sebelum pindah ke Tenggarong. Situs-situs dan peninggalan bersejarah banyak terdapat di desa ini, tetapi tidak pernah terpublikasi dengan baik. Pemandangan alam di sepanjang sungai Jembayan sangat eksotis, tapi tidak pernah tersentuh. Potensi budayanya pun tidak terangkat. Demikian halnya dengan potensi perikanan yang sangat luar biasa. Maka, ketika suatu kali kami berbincang bersama beberapa pemuda setempat, kami sepakat untuk melakukan “sesuatu” untuk mengangkat kemajuan desa. Peran kami hanya sebagai pemantik dan penyemangat bagi pemuda-pemuda desa untuk lebih peduli pada kampungnya, sehingga mereka melek bahwa kampungnya memiliki potensi yang sangat luar biasa.

Kami menemani pemuda-pemuda Desa Jembayan dengan visi dan misi yang sama. Sebagai langkah awal, kami mengangkat kembali prosesi panen padi yang sudah lama ditinggalkan untuk diperkenalkan lagi kepada generasi sekarang. Prosesi petik/panen awal yang tidak bisa dilakukan sembarangan sebagai wujud penghargaan dan penghormatan kepada padi yang akan menjadi beras yang akan kita masak menjadi nasi, kemudian kita makan. Prosesi itu banyak sekali mengandung nilai dan nilai-nilai itulah yang ingin kami sampaikan kepada anak-anak generasi sekarang bahwasannya itu adalah warisan adiluhung para leluhur yang sepatutnya dilestarikan. Akhirnya, banyak pemuda yang mulai tergerak untuk bergabung dalam aktivitas kami. Bersama mereka kami mulai melakukan pendataan potensi-potensi di desa, mencari informasi tentang adat budaya yang sudah mulai hilang, mendatangi seniman-seniman tua, dan tokoh masyarakat untuk menggali semua informasi tentang desa tersebut. Bersama semangat para pemuda inilah kemudian kami sepakat untuk mempersiapkan sebuah acara di Desa Jembayan dengan nama Festival Jembayan Kampung Tuha (Jembayan Kampung Tua).

Gotong royongpun dimulai untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Seniman-seniman tua kembali diajak beraktivitas untuk melatih anak-anak mudanya. Situs-situs dan peninggalan bersejarah mulai dibersihkan dan dirapikan. Kita dorong setiap RT/dusun untuk mempersiapkan dan mengenalkan produk-produknya (yang sebelumnya kami ajarkan olahan hasil pertanian) agar bisa ditampilkan di bazar. Kelompok-kelompok seni mulai giat berlatih. Sampai pada hari pelaksanaan Festival Jembayan Kampung Tuha dibuka secara resmi oleh Bupati Kutai Kartanegara. Konten kegiatannyapun bermacam-macam, mulai dari bazar kerajinan, pertunjukan seni, *ngapeh* budaya (bincang-bincang), napak tilas sejarah, susur sungai, prosesi *ngentul* benda (*nyadap aren*), hingga pembuatan gula aren. Kegiatan dilaksanakan selama 5 (lima) hari dan berjalan dengan cukup meriah dan menghibur. Kegiatan tersebut juga melibatkan partisipasi dari beberapa tetangga desa.

Tujuan kegiatan festival bukan hanya membuat keramaian dan menciptakan euforia, bukan itu. Festival tadi hanya menjadi sebuah pintu gerbang bagi kami untuk bisa mengenal dan memahami kampung yang kami datangi, sehingga tak mengherankan jika kemudian muncullah sebuah pekerjaan yang berat bagi kami selaku teman dan pemantik. Festival menjadi kesempatan untuk kemudian bersama-sama mencari ide, merealisasikan, membangun dan menciptakan hal-hal baru lagi yang tentunya harus sesuai dengan karakter desa dan masyarakatnya. Setelah kegiatan tersebut, kami kembali mengangkat dan memperkenalkan prosesi membuka ladang dan prosesi tanam padi gunung dengan melibatkan pemuda dan mahasiswa pertanian di Tenggarong. Mereka masih perlu mengingat kembali bahwa nenek moyang mereka sudah menerapkan teknologi dalam hal bercocok tanam. Generasi lampau, walau tidak pernah bersekolah, lebih menguasai ilmu astronomi. Banyak sekali hal-hal yang bisa dipelajari dari prosesi-prosesi yang kembali diangkat bersama-sama.

Selanjutnya kami masuk ke desa lain yang kebetulan kepala desanya kami kenal dengan baik, yaitu Desa Jembayan Tengah, Kecamatan Loa Kulu. Desa ini merupakan pemekaran dari Desa Jembayan Induk yang dipecah menjadi tiga desa. Salah satunya adalah Desa Jembayan Tengah. Kepala desanya tergolong masih muda dan penuh semangat, ia sering mengajak kami berdiskusi. Dalam obrolan-obrolan itu, lebih banyak keluhan yang dilontarkan mengingat letak geografis Desa Jembayan Tengah yang tidak strategis. Desa ini seolah hanya menjadi *lewatan* para pekerja tambang batu bara. Menurut kami, justru hal yang dianggap kelemahan itulah yang harus diperkuat. Kelemahan harus diubah menjadi sesuatu yang unik dan menarik perhatian.

Karakter desa Jembayan Tengah ini unik, dan ini menjadi tantangan bagi kami. Kami melakukan pendekatan dengan warga dan para pemudanya yang akhirnya disepakati untuk melaksanakan kegiatan atau acara kampung. Desa/kampung yang

kami dampingi harus memiliki karakter yang tidak sama dengan desa/kampung lain. Kamipun sepakat untuk mengangkat kembali apa yang disebut dengan “seraong”, yaitu sebuah alat penutup kepala khas milik orang Kutai (seperti caping di Jawa), tetapi tidak terbuat dari anyaman bambu, melainkan terbuat dari daun “bengkoang” atau daun “selingsing” yang banyak tumbuh di tepi sungai. Selingsing juga nama salah satu dusun tua yang dulu banyak penduduknya merupakan pembuat seraong.

Dari hasil musyawarah bersama, disepakati bahwa akan digelar hajatan kampung (*kampung*, bahasa Kutai) dengan nama Festival Kampung Seraong, Desa Jembayan Tengah. Persiapanpun dimulai dengan diawali pelatihan jurnalistik bagi pemuda-pemudanya, yang tujuannya nanti pada saat acara sudah ada yang akan medokumentasikannya melalui gambar maupun tulisan. Mediana juga kita siapkan, kami buat *website* dan operatornya juga kami beri pelatihan. Selain itu, kami juga memberikan pelatihan kerajinan dan pembuatan makanan/minuman olahan dari hasil pertanian yang ada di kampung itu. Tidak hanya pada ranah pengolahan, tapi juga kemasan dan pelabelan. Sehingga nanti akan menjadi produk yang akan menambah penghasilan dan meningkatkan perekonomian warga. Kami juga membantu tentang metode pemasaran, agar produk tersebut bisa dijual ke luar. Meskipun demikian, lebih kami tekankan untuk dihubungkan dengan Bumdesnya.

Dampak yang dirasakan bagi warga, terutama pemuda-pemudanya adalah mereka lebih memiliki wawasan yang luas. Mulailah terbuka lapangan kerja, minimal untuk dirinya sendiri bagi yang mau berproses kreatif. Saat ini, selain produk seraong yang semakin banyak peminatnya, kami juga mengarahkan untuk pembuatan produk kerajinan lainnya seperti pembuatan plakat dan piala berbahan kayu dengan pemanfaatan limbah kayu yang banyak terdapat di daerah ini. Kelompok senipun sudah mulai bermunculan.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Desa Jembayan Tengah ini memiliki karakter topografi masyarakatnya yang unik. Di samping desa ini membentang sungai Jembayan, sementara sebelah daratnya adalah lahan tambang batu bara yang mengepung lahan pertanian. Letak dusun-dusunnya pun tidak terkumpul dalam satu wilayah, tetapi terpisah-pisah jauh ataran dusun satu dengan dusun lainnya dan memiliki latar belakang etnis yang berbeda. Desa Jembayan Tengah memiliki beberapa dusun, Dusun Lempatan, Selingsing, Lembonang, Lembu Lompat, Tudungan, Alhidayah. Dusun Lempatan mayoritas warganya adalah suku Banjar, Dusun Selingsing warganya mayoritas Kutai (merupakan kampung tertua), Dusun Lembu Lompat mayoritas orang Jawa, Dusun Tudungan mayoritas Madura, Dusun Alhidayah mayoritas Bugis, sementara Dusun Lembonang ada etnis Timor, Toraja, dan lain-lain. Sementara itu, jarak antara dusun satu dengan dusun lainnya terpisah setidaknya 2 km ke atas, dengan medan yang berbukit dan jurang.

Keberagaman etnis yang ada di desa ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Diperlukan pendekatan yang ekstra hati-hati. Namun demikian, hal itu tidak menjadi halangan yang berarti. Kami selalu mengingatkan bahwa kegiatan ini untuk kepentingan dan kemajuan desa, bukan untuk RT/dusun semata, apalagi kepentingan golongan-golongan tertentu. Kami selalu menyampaikan bahwa kami juga pendatang yang tidak memiliki kampung halaman di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Prinsip “di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung” selalu kami tekankan. Untuk menyamakan persepsi masyarakat Jembayan Tengah, perlu kehati-hatian ekstra mengingat latar belakang etnis yang berbeda. Namun, justru di situlah letak keunikan desa Jembayan Tengah ini. Maka, tidak salah ketika kami mengangkat *seraong* sebagai ikon desa ini, karena filosofi *seraong* adalah melindungi dan mengayomi dalam satu naungan.

Desa berikutnya yang baru bulan Agustus kemarin melaksanakan hajatan kampungnya adalah Desa Tanjung Isuy Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat. Bagi kami, pengabdian dalam budaya tidak mengenal sekat atau batasan wilayah. Desa Tanjung Isuy terletak di tepi Danau Jempang yang merupakan desa adat etnis Dayak Benuaq. Di desa ini ada terdapat lima buah Lamin (rumah panjang/rumah adat suku Dayak). Desa ini dulu pernah menjadi primadona bagi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara di saat masih tergabung dalam wilayah Kabupaten Kutai. Setelah pemekaran Desa Tanjung Isuy ini masuk dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat. Sejak itu, pamor desa ini mulai redup, tidak lagi diperhatikan pemerintah daerah, apalagi jaraknya sangat jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Kutai Barat. Para pemudanya mulai meninggalkan desa untuk mencari kehidupan yang lebih layak. Penginapan-penginapan yang dulunya tidak pernah sepi lambat laun mulai ditinggalkan pengunjung. Kelompok-kelompok seni yang biasanya setiap minggu tampil dalam acara penyambutan tamu sudah tidak lagi tampak. Praktis Desa Tanjung Isuy dalam kurun waktu kurang lebih 17 tahun sepi wisatawan.

Untunglah, karena mayoritas penduduk di desa ini adalah etnis Dayak Benuaq yang masih kuat memegang dan menjunjung nilai adat, adat warisan leluhur mereka tidak lantas langsung hilang. Hukum adat masih tegak dijalankan, selain ada Petinggi Kampung juga ada Ketua Adat dan Pemangku Adat. Kebetulan kami berteman dengan salah seorang pemuda asal Tanjung Isuy yang melanjutkan studinya di Tenggarong dan sering berkegiatan seni bersama. Dari sinilah awal bincang-bincang dimulai hingga kemudian kami mendatangi Desa Tanjung Isuy yang berjarak kurang lebih lima jam perjalanan dari Tenggarong. Di sana kami bertemu dengan tokoh pemuda, masyarakat, dan kepala adat. Kami banyak belajar dari saudara-saudara di Tanjung Isuy. Desa ini mempunyai potensi yang luar biasa. Potensi alamnya eksotik dan budayanya sangat luar biasa. Sayangnya, selama bertahun-tahun desa ini tidur dan tak terperdulikan. Hingga akhirnya terjadi kesepakatan melalui restu

dari Kepala Adat untuk kemudian mempersiapkan sebuah hajatan *kampung* Tanjung Isuy. Prosespun dijalankan menuju Festival Tanjung Isuy.

Kami membuat pelatihan-pelatihan sederhana untuk para pemudanya. Ada satu tanaman yang menjadi salah satu obat herbal yang banyak tumbuh di daerah ini. Obat ini ternyata tidak termanfaatkan, sehingga kami mengajak warga untuk mengolahnya. Sebut saja tanaman itu bawang Tiwai (bawang sabrang) atau lebih dikenalnya sebagai bawang dayak. Ini adalah tumbuhan sejenis bawang yang tidak memiliki rasa seperti bawang. Manfaat dan kegunaannya sudah banyak yang tahu. Kami ajari mereka mengolah dalam bentuk olahan lainnya. Bisa sebagai teh (minuman), sirup, sebagai bahan pembuat kue kering, dan campuran untuk puding. Kami menggugah mereka untuk lebih peduli lagi pada kampungnya yang banyak menyimpan potensi luar biasa dan memang luar biasa Desa Tanjung Isuy ini sebagai Desa induk untuk etnis Dayak Benuaq. Desa-desa sekitarnya pun turut berpartisipasi dalam hajatan tersebut. Kami banyak mendapat pelajaran tentang gotong royong, toleransi beragama, dan menjaga adat.

Akhirnya, dengan penuh kebersahajaan dan kekeluargaan Festival Tanjung Isuy dilaksanakan. Semua desa-desa di wilayah Kecamatan Jempang ikut terlibat. Ini menjadi suatu ruang interaksi budaya yang luar biasa. Panggung yang dibuat di halaman "Lamin" (Rumah adat Dayak) penuh setiap malamnya dengan tampilan keseniannya. Ruang di bawah Lamin disulap menjadi arena bazar kerajinan. Ternyata produk-produk kerajinan warga Tanjung Isuy sangat unik, beragam, dan memiliki daya tarik. Desa Tanjung Isuy juga dikenal sebagai sentra pembuatan kain tenun doyo yang diambil dari serat daun doyo. Selama tiga hari, hajatan kampung Tanjung Isuy digelar. Kami bisa berbangga melihat kebersamaan dan kekompakan para pemuda Dayak Benuaq di Desa Tanjung Isuy yang sudah berkomitmen untuk membangun dan mengembalikan kejayaan Tanjung Isuy.

Perjalanan kami masih panjang, masih banyak kampung di daerah kami yang minta didatangi untuk sekadar berbagi cerita, berbagi ide dengan para pemudanya. Aktivitas yang sudah menjadi "candu" bagi kami ini tidak selamanya mendapatkan kemudahan dalam pengaplikasiannya. Banyak kendala-kendala yang kami hadapi, yang kami sadari bahwa kami hanya sebagai tamu di kampung orang. Dalam perjalanannya, kami tidak hanya memberikan ide-ide pada mereka, tapi kami juga harus mentransfer apa saja yang pernah kami pelajari, ketahui, dan miliki. Hanya berbekal niat baik dan ikhlas kami memberanikan diri memasuki kampung-kampung untuk belajar bersama. Pada dasarnya kami bukan siapa-siapa, kami hanya perantau yang meninggalkan kampung halaman. Tidak memiliki kampung halaman di rantauan, tetapi banyak kampungnya. Di situlah muncul tanggung jawab dan beban moral kami untuk ikut menggerakkan roda-roda aktivitas positif di sebuah kampung. Kami juga merasa memiliki dan menjadi bagian dari kampung itu.

Dalam setiap proses persiapan menuju hajatan kampung (Festival Kampung) selalu ditekankan bahwa itu adalah acara milik mereka. Kami hanya menemani mereka, merekalah yang berperan, merekalah yang harus muncul, merekalah yang akan menjadi *leader* di kampungnya. Kami hanya berbagi apa yang kami miliki. Kami sering menyebut aktivitas ini sebagai “sedekah ilmu”. Kami mengedepankan dan mengutamakan swadaya dalam hal pendanaan. Ini juga mengedukasi mereka agar tidak selalu bergantung pada pemerintah. Terbukti, ternyata mereka bisa dan hal ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi mereka. Setiap partisipan yang hadir pun tidak ada yang dibayar, walau mereka datang dari luar daerah. Ketika pada suatu kampung kami menghadapi hal-hal yang dianggap bisa memunculkan konflik, kami lebih baik menghindar. Bahkan, sebenarnya kendala-kendala yang banyak kami hadapi justru dari pihak luar yang ingin menunggangi aktivitas di desa. Baik dari perorangan, kelompok, bahkan OPD yang punya kepentingan. Hal-hal semacam itulah yang selalu kami ingatkan kepada pemuda-pemuda penggerak.

Beberapa desa di Kecamatan Loa Kulu yang sudah pernah menggelar Festival Kampungnya banyak didatangi OPD menawarkan program ini-itu yang kesemuanya hanya berbau proyek. Namun, itu semua akan menjadi kebijakan pihak pemerintah desa yang bersangkutan. Kami sekadar menemani para pemudanya. Beberapa program yang kami jalankan di kampung-kampung adalah “Kisah Kampung” (Cerita Kampung). Dengan konsep bercerita, yaitu kami akan berkumpul di sebuah halaman mengundang tokoh masyarakat yang akan bercerita tentang asal mula kampungnya. Mengapa diberi nama kampung “A” misalnya, dihadapan anak-anak, remaja, dan pemuda. Kami yakin para pemuda, remaja, dan anak-anak di kampung itu tidak mengenal asal-usul kampungnya. Melalui program ini, kami mencoba untuk mendokumentasikan cerita kampung ataupun cerita rakyat yang ada dalam bentuk tulisan dan audio visual, sekaligus menjalankan program Gerakan Literasi. Kami juga menawarkan program ke desa-desa berupa sebuah “Gerakan Sarjana Pulang Kampung”. Bagaimana penerapannya, tidak harus orangnya yang balik ke kampung. Tapi pikiran-pikirannya, ide-idenya, kalau perlu menjadi sponsor atau investor untuk pemberdayaan dan kemajuan kampung halamannya. Mereka yang sudah sukses di kota dan menetap di sana diingatkan kembali pada kampung halamannya tempat ia dilahirkan.

Ibarat sebuah komputer, maka kampung itu merupakan tempat kita untuk menyimpan *file*, yang pada suatu saat kita lupa akan ilmu tersebut, maka kita dapat membuka kembali *file* yang tersimpan. Kampungmu, Kampungku.

## **Kampung dan Ekologi: Glantung Go Green**

*Bambang Irianto dan Ari Anggari Harapan*

Kampung Glantung di Kota Malang memiliki semua ciri khas pemukiman kumuh perkotaan yang terpinggirkan. Kampung ini rawan banjir dan tandus. Selain itu, kawasannya mempunyai ruang terbuka hijau kurang dari 5%, angka kriminalitas dan tingkat pengangguran tinggi, tingkat kesehatan rendah, tempat tinggal sempit dan berdesakan, dan sampah berserakan. Penduduk tidak banyak memiliki peluang kerja dan profesi mereka pun berada di kelas paling bawah (buruh cuci, tukang parkir). Padahal, Kampung Glantung, khususnya RW 23, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, terletak di lokasi strategis yang dilalui oleh jalur utama perekonomian. Ternyata bermukim dekat dengan urat nadi perekonomian tidak berarti memperoleh keuntungan finansial dan menjadi makmur. Akibatnya, suasana Kampung Glantung terasa tidak nyaman, kecemburuan sosial tinggi, tidak ada kebanggaan menjadi warga kampung. Rasa rendah diri menghambat sosialisasi dengan warga di luar kampungnya. Situasi ini semakin memperparah kondisi mental warga Kampung Glantung. Tidak sedikit warga yang terjerat rentenir dan terbelunggu oleh hutang yang tak kunjung mampu dilunasi.

Saya (Ir. H. Bambang Irianto) yang terpilih menjadi ketua RW 23 Kampung Glantung tergerak untuk membantu warga agar mampu meningkatkan kualitas hidupnya. Langkah terpenting adalah mengupayakan agar warga lepas dari belunggu rentenir. Sudah pasti bukan pekerjaan mudah mengajak dan menggerakkan warga untuk keluar dari kondisi yang menyengsarakan. Apalagi mendorong warga berupaya mandiri serta mampu memenuhi semua kebutuhan sendiri. Sekilas semua ini tampak sebagai pekerjaan yang muskil, tapi Bambang Irianto bertekad melaksanakannya dan berhasil melakukannya dengan sukses.

## Dari Kampung Terpinggirkan menjadi Percontohan

Prioritas utama adalah melepaskan warga dari jeratan rentenir. Upaya ini dapat dilakukan jika warga memiliki keberanian. Saya percaya, bahwa keberanian dimulai dari kebanggaan akan identitas diri. Maka, warga kampung harus memiliki kebanggaan atas kampungnya. Kebanggaan itu akan terbangun jika kampung memiliki identitas yang menjadi milik semua warga. Identitas kampung yang unik, yang berasal dari kampung itu sendiri, bukan menjiplak atau mencontoh dari tempat lain. Oleh karena itu, langkah pertama adalah mengenali kampung dari segala aspeknya. Permasalahan kampung harus diidentifikasi untuk dicari solusinya. Setelah itu, warga diajak mengubah kerangka pikir agar terbangun motivasi untuk mengerjakan solusi yang ditemukan bersama. Penyamaan persepsi dan kerangka pikir akan meningkatkan rasa kebersamaan. Kebersamaan inilah yang mampu menggerakkan warga untuk memulai membangun kampungnya.

“Minimal 40 persen orang Indonesia tinggal di kampung, oleh karena itu kita tidak boleh minder jadi orang kampung. Kalau problem kampung diselesaikan, paling tidak separuh perjalanan negara terbantuan.”  
(Bambang Irianto)

Dalam kasus Kampung Glintung, yang menjadi prioritas utama adalah lingkungan hidup. Jika lingkungan kampung nyaman, wargapun akan merasa nyaman tinggal di kampung dan akan tumbuh rasa memiliki. Dari rasa memiliki akan muncul rasa bangga dan dari rasa bangga akan timbul motivasi untuk memperbaiki kualitas hidup. Berdasarkan kerangka pikir ini, program pertama di Kampung Glintung adalah penanggulangan banjir dan penghijauan. Dilakukan upaya untuk mengatasi banjir dengan membuat biopori dan sumur injeksi. Warga diwajibkan membuat biopori di halaman rumah masing-masing. Didorong untuk mulai menanam di lahan di rumahnya masing-masing. Jika lahan terlalu sempit, maka bisa menanam di pot-pot yang dibuat dari berbagai barang bekas. Selain penghijauan, juga dilakukan upaya mengatasi banjir dengan membuat biopori dan sumur injeksi. Sedikit demi sedikit lingkungan Kampung Glintung membaik dan semboyan “3 G” (Glintung Go Green) menjadi identitas warga Kampung Glintung.

Upaya perbaikan lingkungan Kampung Glintung dimulai sejak tahun 2012. Program ini sejalan dengan program penghijauan Pemerintah Kota Malang, yaitu “Malang Ijo Royo-royo”. Warga belajar bercocok tanam sayuran dan tanaman pangan lainnya untuk konsumsi sehari-hari. Warga juga membuat biopori di rumah masing-masing, sementara sumur injeksi dibangun bersama-sama. Semua warga diwajibkan

menanam di rumah masing-masing sebagai persyaratan pelayanan administrasi. Peraturan ini ditegakkan dengan cukup keras. Siapa tidak memiliki tanaman di rumahnya, tidak akan mendapat cap RW yang diperlukan untuk mengurus surat-surat. Tidak adanya uang untuk membeli bibit tanaman tidak dapat dijadikan alasan karena pihak RW menyediakan bibit bagi yang tidak mampu membeli. Persyaratan yang diberikan hanya kerajinan dalam merawat tanaman. Pendekatan yang keras ini pada awalnya banyak menuai reaksi negatif dari warga. Warga menuduh Ketua RW telah melanggar HAM, meskipun begitu program tetap dijalankan. Pada akhirnya, warga menjadi terbiasa dan menjadikan kegiatan menanam dan merawat tanaman sebagai bagian dari keseharian mereka.

### **Pendekatan ala Bambang Irianto**

Ada warga saya RT 2, baru wisuda di UI, Antropologi, anak muda, mau kawin. Rumahnya *nggak* ada tanaman. Saya bilang, kamu dilarang kawin. *Wah geger ...* Ketua RW, diktator, melanggar HAM. “Pak, Anda melanggar HAM.” Iya *emangnya* kenapa? Kalau *nggak* cocok dengan Pak RW, pecat Pak RW. Makin *cepat* makin baik. *Lu* kira enak jadi ketua RW? Gajinya 150 ribu dipotong pajak. Tamunya banyak, *tekor*. Dapet *nggak*, habis gula kopi banyak.

Dia kan pasti *deal* sama calon mertua. Bulan apa tanggal berapa, saya tunggu *aja*. Bener, calon mertuanya telepon. “Eh *lu* niat *ngawinin* anak *gue* apa *enggak*? Mana surat pengantar untuk nikah?” Terpaksa dia harus nanam. Dan tidak boleh beli. Saya *liat*, [di halaman rumahnya sudah ada] tanaman dari sungai. *Wah* hebat, [nanam] tanpa uang. “Mana suratnya? Saya cap sini.”

Memang tahap pelaksanaan tidak pernah mudah, tapi akhirnya kerja keras warga Kampung Glintung membuahkan hasil. Tahun 2014 Kampung “Glintung Go Green” menjadi juara pertama lomba Kampoeng Hijau Sekota Malang. Pembuatan biopori dan sumur injeksi yang disebut sebagai “Gerakan Menabung Air” telah menghasilkan sumber air baru di beberapa RW yang bertetangga dengan RW 23. Awalnya kemunculan sumber air baru ini membingungkan warga. Mereka mengira ada pipa PDAM yang bocor karena air yang keluar jernih dan bersih. Ternyata setelah diperiksa, air tersebut berasal dari sumber air baru. Hingga sekarang belum jelas bagaimana pemanfaatan sumber air baru tersebut. Sedang dilakukan kajian oleh Pemerintah Kota dan Universitas Brawijaya untuk memastikan dan menentukan pemanfaatan sumber-sumber air tersebut. Memang menurut warga, sebelum menjadi pemukiman, wilayah tersebut banyak memiliki sumber air. Namun, seiring

dengan pesatnya perkembangan bangunan dan pemukiman, sumber-sumber air tersebut lenyap. Sekarang, berkat Gerakan Menabung Air sumber-sumber air muncul kembali. Hasil ini merupakan buah dari kerja keras dan inovasi. Tidak mudah menemukan formula yang tepat untuk menyukseskan Gerakan Menabung Air. Masukan dari para pakar mengenai teknik sumur injeksi dan biopori ternyata tidak selalu cocok dengan kondisi lapangan di Kampung Glintung. Melalui proses *trial and error* akhirnya ditemukan formula yang tepat.

### **Pembuatan Sumur Injeksi dan Biopori ala Glintung**

Membuat sumur biopori ala Kampung Glintung sangatlah sederhana dan murah. Untuk membuatnya, cari pipa pralon atau kaleng cat bekas. Ada tiga ukuran, yaitu standar (pipa pralon), jumbo (kaleng cat 5 kg), dan super jumbo (kaleng cat 1 pail).

Lubangi bagian bawah kaleng. Lalu, gali lubang di tanah sedalam 1 sampai 1,5 meter dengan diameter seukuran pipa atau kaleng cat yang dipakai. Buat tatakan penumpu kaleng di bibir lubang dengan semen. Letakkan pipa atau kaleng cat ke dalam lubang. Sebagai penutup, buat cor semen atau *grill* besi yang dapat dibuka tutup. Masukkan sampah daun dan sampah dapur ke dalam sumur biopori untuk membuat kompos.

Agar penyerapan air maksimal, diperlukan kurang lebih 30 sumur untuk satu RT yang dapat menghasilkan.

Proses penghijauan Kampung Glintung berlanjut dengan kegiatan bercocok tanam yang tidak hanya memenuhi konsumsi sendiri. Balai Pengkajian Teknologi Jawa Timur memberikan pelatihan kepada warga tentang berbagai teknik menanam dan merawat tanaman, termasuk teknik hidroponik. Kampung Glintung pun berkembang menjadi proyek percontohan untuk kampung-kampung lain. Konservasi air dan penghijauan lingkungan menjadi andalan Glintung Go Green. Hasil dari bercocok tanam melimpah dan menjadi sumber penghasilan tambahan untuk warga. Kampung Glintung menjadi tujuan wisata hijau (*eco green*) dan tempat belajar bagi warga kampung lain.

Keberhasilan Glintung Go Green tidak terbatas di dalam negeri. Informasi mengenai keberhasilan Kampung Glintung pun sampai ke luar negeri. Tahun 2016, Walikota Malang meminta Kampung Glintung mengikuti lomba antarkota se dunia yang finalnya diselenggarakan di Guangzhou, China. Dari 304 kota yang mengikuti lomba, Kampung Glintung yang mewakili Malang berhasil masuk 15

besar. Penghargaan diterima pada bulan Desember 2016. Sejak itu, Kampung Glintung menjadi terkenal ke seluruh dunia. Hampir setiap hari datang rombongan wisatawan untuk melihat keberhasilan Kampung Glintung.

Tahap selanjutnya dalam pengembangan kampung adalah “komersialisasi” untuk meningkatkan pendapatan penduduk kampung. Kedatangan wisatawan untuk melihat maupun belajar menjadi peluang bisnis. Penghasilan warga kampung meningkat sangat signifikan. Bahkan, warga kampung berhasil membiayai beberapa anak muda hingga berhasil menyelesaikan pendidikan hingga jenjang S2. Karena keberhasilannya ini, Kampung Glintung menjadi contoh bagi kampung-kampung lain yang ingin meningkatkan kualitas hiduparganya.

## **Perjalanan Menuju Kesuksesan**

Proses penghijauan lingkungan yang dijalani warga Kampung Glintung bukan tanpa persoalan. Di masa-masa awal, tantangan dari berbagai pihak. Pihak yang menentang termasuk warga yang tidak percaya bahwa usaha menabung air akan mendatangkan kebaikan. Banyak yang khawatir bahwa pembuatan biopori dan sumur injeksi akan mengganggu bahkan merusak bangunan tempat tinggal mereka. Mereka khawatir *septic tank* akan terkena rembesan biopori dan dinding akan rusak. Untuk mengatasi kekhawatiran ini, Ketua RW mengambil inisiatif membuat biopori dan sumur injeksi di lingkungan rumahnya sendiri. Terbukti kemudian air sumur di rumahnya tetap melimpah di musim kemarau. Setelah melihat sendiri hasil usaha ini, barulah masyarakat ikut membuat biopori dan bergotong royong membangun sumur injeksi.

Setelah keberhasilan tersebut, proses selanjutnya relatif menjadi lebih mudah. Kerja bakti menjadi kegiatan sehari-hari di Kampung Glintung. Tidak hanya siang hari dan di akhir pekan, tapi juga malam hari. Mereka yang tidak sempat ikut kerja bakti di siang hari dan akhir pekan, menebus kewajibannya dengan melakukan kerja bakti di malam hari. Kegiatan ini menjadi salah satu ciri khas Kampung Glintung. Kelompok kerja bakti malam hari mendapat sebutan “Suku Dalu”. Diambil dari bahasa Jawa “ndalu” yang berarti “malam hari”. Jadi, “Suku Dalu” memiliki arti harfiah “kelompok malam hari”. Tidak mengherankan jika lingkungan Kampung Glintung menjadi sangat terawat, bersih, rapi, dan asri.

Upaya pemberdayaan kampung sempat mendapat perlawanan dari beberapa pihak. Perlawanan paling keras datang dari kelompok “kaum berada” yang memiliki *showroom* di pinggir jalan raya. Mereka keberatan dengan kedatangan wisatawan ke Kampung Glintung karena khawatir lingkungan akan menjadi kotor. Keadaan lingkungan seperti itu akan “merusak” bisnisnya. Namun, melalui proses negosiasi

yang cukup “alot”, akhirnya tercapai kesepakatan antara pemilik *showroom* dan warga Kampung Glintung.

Kesepakatan memang tidak terjadi dalam sekejap. Banyak hal yang harus dapat disepakati bersama dan seringkali kesepakatan itu baru dapat dicapai setelah melalui proses panjang dan berliku. Tidak jarang terjadi pula kekerasan dalam proses tersebut. Dibutuhkan ketegasan, kesabaran, dan strategi yang tepat untuk mengatasi konflik. Pilihan terbaik adalah memperoleh *win-win solution*. Untuk menghadapi pengusaha, dilakukan strategi “bertahan sekaligus menyerang” sehingga akhirnya pihak pengusaha bersedia memberikan fasilitas yang dibutuhkan warga Kampung Glintung.

Konflik yang terjadi bukan hanya antara pihak “luar” dengan warga Kampung Glintung. Di antara warga sendiri ada pro dan kontra. Banyak yang setuju dan mendukung semua upaya Pak RW, tapi ada pula yang menentang. Umumnya mereka yang menentang tidak menyatakan dengan terang-terangan, cenderung diam. Oleh karena itu, sulit diketahui motivasi dari warga yang menentang. Diduga bahwa alasannya sebenarnya banyak yang lebih bersifat pribadi, seperti merasa tersingkir, diperlakukan tidak adil, imbalan yang diterima dari wisatawan dirasa kurang, dan sejenisnya. Sejauh ini tidak ada wacana menentang program itu sendiri.

## **Kesuksesan yang Menyimpan Tantangan**

Keberhasilan Kampung Glintung membangun lingkungan dan *ecotourism* atau wisata lingkungan tidak terlepas dari kerja keras dan kepemimpinan yang kuat dari pamong warga. Dari kampung kumuh terpinggirkan yang tidak nyaman dan dihuni banyak preman, Kampung Glintung menjadi kampung mandiri yang memiliki penghasilan sendiri bagi seluruh warganya. Fasilitas kesehatan tersedia dan dibiayai oleh kas RW.

Penghasilan diperoleh dari kunjungan wisata yang sudah ditentukan paket dan harganya. Begitu pula para peneliti, mahasiswa yang datang dikenakan biaya sesuai jenjangnya (S1, S2, S3). Selain itu, penghasilan diperoleh dari pengelolaan bank sampah yang terintegrasi dengan bank sampah di tingkat kotamadya. Disediakan juga *homestay* di rumah-rumah penduduk dengan fasilitas yang beragam. Dari semua kegiatan ini diperoleh dana sekitar 50-75 juta yang kemudian dibagi untuk kas RW (40%) dan honor para petugas (60%). Para petugas ini adalah warga yang terlibat dalam persiapan, penyambutan, dan pelaksanaan *ecotourism* di Kampung Glintung. Kini mayoritas warga melihat kegiatan tersebut sebagai sumber penghasilan dan termotivasi untuk sepenuhnya terlibat.

Kampung Glintung menjadi contoh dan teladan bagi banyak kampung lain di berbagai tempat. Selain mendapat penghargaan di Guangzhou di tahun 2017, saya

(Bambang Irianto) juga meraih penghargaan Kalpataru di tahun 2018. Banyak wilayah lain yang ingin meniru keberhasilan Kampung Glitung, tapi yang sudah sampai pada tahap pelaksanaan adalah kampung-kampung di Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Saya diminta untuk memberi pelatihan intensif di kampung-kampung tersebut. Ternyata warga Karawaci sangat antusias dan dalam waktu singkat semua yang dilakukan di Glitung telah dilaksanakan di Karawaci. Bahkan, salah satu kampung tersebut, yaitu Kampung Gerendeng Pulo, berhasil meraih juara 3 lomba PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat). Luar biasanya dari prestasi ini adalah waktu persiapan hanya 3 bulan. Kampung Gerendeng Pulo atau sering diplesetkan menjadi Green Pool atau Grenpul berhasil mengubah diri dari kampung terkumuh dan terkotor di Tangerang menjadi kampung bersih dan sehat. Keberhasilan ini, di mata warga Gren Pul, adalah keberhasilan Pak Guru dari Glitung.

Sukses finansial yang diraih warga Kampung Glitung sebenarnya dapat diibaratkan seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, jumlah dana yang besar adalah berkah dari warga karena kesejahteraan meningkat. Di sisi lain, uang tersebut dapat mendatangkan perselisihan di antara warga karena kemudian yang berperan adalah ego masing-masing. Semakin besar dana yang mengalir masuk, semakin besar potensi perpecahan warga. Hal ini sudah mulai terlihat dengan adanya upaya yang signifikan dari kelompok “penentang” untuk merebut jabatan RW. Motivasinya dapat ditebak, yakni uang yang berputar dalam jumlah besar dari para tamu. Agaknya perlu juga dipertimbangkan dana maksimal yang dapat dikelola dengan “aman” dalam komunitas setingkat RW ini. Dana terlalu besar dapat menyebabkan perpecahan, tapi jika tidak mencukupi, warga sulit bergerak atau tergerak untuk merawat kampung. Diperlukan pemahaman mendalam mengenai situasi, kondisi, dan karakter warga agar uang menjadi berkah, bukan musibah.

Hal berikutnya yang perlu dicermati adalah keberlanjutan berbagai program Kampung Glitung. Sejauh ini tampaknya semua hal terlalu bertumpu kepada satu orang. Jika situasi ini terus berlanjut, dikhawatirkan suatu saat semua program yang telah dirintis dengan susah payah akan terhenti. Dengan kesibukannya sekarang melakukan banyak pelatihan di berbagai tempat, termasuk di Karawaci, Tangerang, tentunya waktu dan tenaga untuk Glitung menjadi sangat berkurang. Memang benar bahwa sudah ada mekanisme di Glitung yang tetap berjalan meskipun ia tidak berada di tempat. Namun, semua yang datang ke Glitung masih tetap ingin bertemu dengan Pak RW yang telah menjadi ikon Kampung Glitung. Juga belum ada pembicara yang mampu sepeunhnya menggantikan posisinya dalam menjelaskan sejarah dan kiprah Kampung Glitung.

Selain itu, warga Glitung masih merasakan perbedaan situasi jika Pak RW mereka hadir atau tidak hadir. “Rasa” yang beda itu menyebabkan warga sendiri belum percaya diri. Masih ada ungkapan, “Maaf sayang sekali Pak Bambang tidak

ada/berhalangan hadir hari ini sehingga yang kami berikan tidak bisa optimal”. Seperti halnya Suku Dalu yang merasa tidak “sreg” jika Pak RW tidak menunggui mereka bekerja, seperti itulah sikap rata-rata warga Kampung Glintung. Oleh karenanya, pertanyaan “Apa yang akan terjadi jika Pak RW sudah tidak aktif lagi” bukanlah pertanyaan sepele. Hal ini menyangkut keberlanjutan kesejahteraan warga Kampung Glintung, bahkan juga keberadaan Kampung Glintung itu sendiri.

# Melestarikan Mata Air, Mengelola Wisata Desa Cempaka

*Bachtiar Djanan M. dan Tri Andri Marjanto*

Desa Cempaka berada di Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal. Desa yang terletak di lereng Gunung Slamet ini memiliki udara sejuk yang berasal dari rimbunnya pepohonan, ratusan hektar lahan pertanian, dan adanya tujuh *tuk* atau mata air. Ketujuh mata air tersebut bernama Tuk Mudal, Tuk Nangka, Tuk Pengayeman, Tuk Gorang, Tuk Pucung, Tuk Kele, dan Tuk Blambangan. Nama-nama ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Aneh dan unik, ada nama Tuk Blambangan di desa yang jaraknya 816 km dari Kabupaten Banyuwangi yang sebelum tahun 1771 bernama kerajaan Blambangan. Semua mata air tersebut bertemu di satu titik bernama Tuk Pitu atau Tujuh Mata Air. Pada hari-hari tertentu seperti malam Jumat Kliwon, titik pertemuan tujuh mata air ini ramai dikunjungi orang dari berbagai daerah untuk mandi dan berendam di sana, biasanya pada saat tengah malam.

## **Melestarikan Mata Air**

Kesemua mata air di desa ini menjadi sumber irigasi bagi 130 hektare sawah milik masyarakat Desa Cempaka hingga hari ini. Ribuan orang bergantung hidupnya pada kesuburan sawah-sawah ini, mulai dari pemilik-pemilik sawah sampai orang-orang yang bekerja di sawah, berikut keluarga mereka tentunya. Namun, ketika musim hujan, aliran lumpur dari dataran yang lebih tinggi masuk ke dalam mata air. Hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya pendangkalan yang cukup serius pada mata air. Belum lagi risiko bila hutan bambu dan pepohonan di sekitar mata air rusak, yang akan membuat air tidak dapat terserap ke dalam tanah.

Mayarakat Desa Cempaka tak ingin melihat sumber mata air di desanya rusak atau mati seperti yang terjadi di beberapa desa tetangga. Salah satu desa tetangga pernah ada yang memiliki mata air seluas lapangan sepak bola, tetapi sekarang mata

air itu benar-benar telah mengering dan mati. Oleh sebab itu, masyarakat Desa Cempaka beranggapan bahwa merawat mata air sama halnya dengan merawat nafas mereka sendiri.

Beberapa tahun terakhir, warga Desa Cempaka mulai melakukan aksi nyata dalam menjaga kelestarian alam di sekitar tujuh mata air di desanya. Beberapa aksi tersebut dimulai dari hal sederhana, seperti kerja bakti membersihkan sumber mata air, penanaman pohon, menjaga hutan bambu, hingga membuat talud atau dinding penahan di area mata air agar tanah dinding mata air tidak ambrol, terutama di musim hujan. Berbagai usaha merawat mata air tersebut dilakukan secara gotong royong antara masyarakat dan pemerintah desa. Bahkan, Kepala Desa Cempaka telah menggerakkan para pemuda desa untuk membuat perkumpulan atau komunitas berbasis konservasi alam, yakni Cempaka Pecinta Alam atau Cempala.

## **Wisata dan Konservasi**

Dalam perkembangannya, mata air Tuk Mudal yang telah dirawat oleh masyarakat ternyata “mengundang” minat para pelancong dari desa sekitar untuk berwisata. Di akhir pekan, Tuk Mudal mulai banyak dikunjungi orang. Di sana pengunjung dapat bersantai menikmati segarnya sumber mata air, berswafoto, dan makan di warung-warung di sekitar. Potensi yang lain di Desa Cempaka, yaitu bukit Bulak Cempaka, sebuah bukit yang berada tidak jauh dari Tuk Mudal. Tempat ini juga mulai ramai dikunjungi orang karena panoramanya yang indah. Demikian pula dengan Bukit Brongkol, sebuah bukit yang bisa didaki dalam waktu sekitar 40 menit. Bukit ini juga memiliki pemandangan sangat indah. Biasanya pada pagi hari awan berkumpul menutupi puncak bukit sehingga Bukit Brongkol dikenal dengan julukan Bukit Atas Awan.

Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Desa Cempaka memacu semangat warga dan perangkat desa untuk berbenah diri. Melalui komunitas Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) Desa Cempaka yang dibentuk warga, mereka melakukan berbagai inovasi agar wisata Desa Cempaka semakin dikenal masyarakat luas. Agaknya kepercayaan masyarakat desa bahwa merawat lingkungan sekitar mata air berarti membuka tumbuhnya peluang ekonomi kerakyatan terbukti benar. Warga berharap perkembangan pariwisata di desa mereka dapat memotivasi para pemuda desa untuk tetap berkarya di desanya, membangun dan mencari rezeki di desanya, dan tidak lagi harus pergi merantau. Saat ini memang lebih dari 80% pemuda desa pergi merantau ke berbagai kota besar, khususnya ke Jakarta, untuk mencari rezeki.

Mata air, hutan bambu, pohon-pohon berusia 200-an tahun, keindahan persawahan, bukit dengan panorama indah, dan kearifan lokal masyarakat menjadi

anugerah Tuhan bagi Desa Cempaka yang wajib dijaga dan dikembangkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran bagi masyarakat Desa Cempaka.

## **Memilih Desa Cempaka**

Sebenarnya pada bulan September 2017, Bupati Tegal dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tegal telah meresmikan Desa Wisata Cempaka. Namun, setelah peresmian dilakukan, belum ada kelanjutan mengenai strategi maupun langkah yang akan dilakukan untuk mengembangkan wisata di Desa Cempaka. Tanpa disengaja, Hidora mengenal Desa Cempaka di akhir bulan November 2017. Saat itu sebetulnya Hidora bersama Bappeda Kabupaten Tegal sedang melakukan survei untuk mencari desa di Kecamatan Bumijawa yang memiliki kebun teh dan ditemukanlah Desa Muncanglarang. Usai melakukan survei di Desa Muncanglarang, tim melanjutkan eksplorasi ke desa-desa sekitar karena hari masih sore. Dalam eksplorasi ini sampailah tim di Desa Cempaka.

Di Desa Cempaka ini, tim dan Bappeda Kabupaten Tegal melihat keindahan mata air Tuk Mudal dan hutan bambu di sebelahnya, serta berdialog dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan beberapa anak muda Pokdarwis Desa Cempaka. Kemudian Tim Hidora bersama Bappeda diajak meninjau Bukit Bulak Cempaka sambil berdiskusi tentang potensi dan kondisi Desa Cempaka. Hasil diskusi tersebut kemudian dipetakan berbagai potensi dan permasalahan yang ada, termasuk mengenai status baru Desa Cempaka sebagai Desa Wisata dan kegelisahan penduduk karena tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan wisata di desanya.

Pada kunjungan kedua, dilakukan pemetaan lanjutan untuk menggali informasi lebih dalam dari Pemerintah Desa Cempaka, anggota-anggota Pokdarwis, dan warga desa, serta survei mendetail di semua titik yang menjadi potensi andalan wisata Desa Cempaka. Hasil analisis menunjukkan bahwa potensi yang ada di Desa Cempaka sudah bagus. Visi yang diusung Desa Cempaka untuk pelestarian mata air juga sangat urgen dan perlu banyak dukungan, sumber daya manusia anak-anak muda desa yang siap untuk bekerja keras juga ada dan cukup solid. Karenanya, Hidora memutuskan memilih Desa Cempaka untuk menjadi desa dampingan pertama di Kabupaten Tegal dalam program Hidora bersama Bappeda Kabupaten Tegal.

## **Simulasi Wisata Desa**

Karena desa sudah memiliki modal yang cukup kuat berupa potensi wisata yang sudah siap, visi yang bagus, dan tersedianya sumber daya manusia, yaitu anak muda yang sudah siap berjuang, maka hal yang perlu dilakukan adalah merancang strategi akselerasi. Strategi yang akan melibatkan masyarakat luas ini sekaligus berfungsi sebagai sebuah simulasi tentang bagaimana wisata desa berjalan. Diharapkan

strategi ini memiliki "daya dobrak" yang akan membuat wisata Desa Cempaka terpublikasikan secara luas.

Strategi tersebut berupa kegiatan festival seni budaya yang disepakati berjudul Bumijawa Festival. Langkah awal persiapannya adalah membentuk kepanitiaan. Panitia yang terbentuk mempelajari festival-festival sejenis yang pernah digarap oleh Hidora bersama desa yang didampinginya. Dengan cara ini, tim panitia memiliki visi yang sama tentang bentuk festival seni budaya yang akan digelar. Proses pembelajaran dipermudah karena Hidora sudah memiliki modul sederhana berupa panduan persiapan festival seni budaya desa, lengkap dengan beberapa alternatif bentuk struktur organisasi kepanitiaan, penjabaran tupoksi kepanitiaan, berbagai tabel kebutuhan perlengkapan, panggung, dan dekorasi, serta aneka formulir untuk setiap seksi di kepanitiaan. Dengan dibekali panduan ini, Panitia Bumijawa Festival menyusun *timeline* kerja kepanitiaan.

Seperti halnya festival sejenis yang sudah dikerjakan Hidora dengan desa dampungannya di Banyuwangi, ada empat tujuan mendasar dari penyelenggaraan Bumijawa Festival. Keempat tujuan itu adalah membangun gotong royong warga desa mempersiapkan festival, menjadi sarana berlatih dan simulasi kegiatan wisata desa, menggali dan menampilkan aneka potensi Desa Cempaka, dan melibatkan seniman Nusantara serta seniman mancanegara untuk berpartisipasi mendukung perjuangan warga dalam membangun desanya.

## **Merajut Sinergi**

Waktu yang dimiliki panitia Bumijawa Festival untuk mempersiapkan acara hanya dua puluh lima hari. Cukup singkat, tetapi panitia festival dan Tim Hidora sangat yakin dapat melakukannya dengan dukungan seluruh warga desa. Untuk itu, hal pertama yang dilakukan adalah mensosialisasikan festival ini kepada warga desa, yaitu kepada kalangan anak muda, ibu-ibu PKK, para Ketua RT dan RW, para sesepuh, dan tokoh masyarakat. Sosialisasi dilakukan melalui dialog tentang kegiatan Bumijawa Festival, tujuan penyelenggaraannya dan hal-hal teknis, seperti pengisi acara, panitia, dan waktu serta tempat pelaksanaannya.

Setelah warga memahami dan merasa antusias, barulah mereka diajak membahas teknis pelaksanaannya. Untuk memupuk gotong royong, warga diikutsertakan dalam urun rembuk dan pengambilan keputusan. Dengan cara ini muncul rasa memiliki dan keinginan untuk terlibat aktif di dalamnya. Menjelang acara, warga bergotong royong membuat panggung dan dekorasi, menata rumah mereka sebagai tempat menginap bagi para pengisi acara, menyediakan konsumsi, mempersiapkan lahan parkir dan sistem parkir, memenuhi kebutuhan perlengkapan, membangun

stan untuk pedagang kuliner dan UMKM, dan lain-lain. Oleh karena dianggap sebagai hajatan desa, maka warga melakukannya secara sukarela.

Para seniman yang diundang sebagai pengisi acara juga diberi pemahaman mengenai latar belakang dan tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini. Ini dilakukan untuk membangun kesadaran bahwa tugas para bukan sekadar tampil di atas pentas, tapi juga memberikan dukungan dan semangat bagi warga yang tengah bergelora membangun desanya. Dukungan juga diupayakan dari kalangan OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) Kabupaten Tegal dengan dasar pemikiran bahwa dukungan masing-masing OPD di Kabupaten Tegal ikut bergotong royong sangat dibutuhkan bagi pelaksanaan Bumijawa Festival sehingga dapat memberi hasil yang maksimal meskipun tanpa membutuhkan pendanaan yang besar. Sekda Kabupaten Tegal membantu Bappeda dan Hidora dalam memfasilitasi beberapa kali pertemuan dengan OPD-OPD terkait untuk mensosialisasikan konsep, tujuan, siapa yang terlibat, dan waktu serta tempat pelaksanaan kegiatan hingga mendiskusikan peran setiap OPD dalam kegiatan ini. Pada awalnya, sebagian besar OPD di Kabupaten Tegal menyangsikan pelaksanaan Bumijawa Festival mengingat waktu persiapan yang sangat pendek. Namun, setelah memantau laporan perkembangan dari kepanitiaan Bumijawa Festival, sebagian OPD terkait mulai mengambil peran untuk mendukung kegiatan ini.

Panitia festival dan Tim Hidora mempersiapkan tabel kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan festival yang belum terpenuhi. Dari data tersebut, dipetakan OPD mana yang diperkirakan dapat memenuhinya. Dalam pertemuan bersama OPD-OPD ini, data kebutuhan ini dikomunikasikan kepada setiap OPD. Sebagai contoh, Humas Pemkab Tegal bersedia membantu pendokumentasian acara dalam bentuk foto, video, dan publikasi. Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung dalam bentuk penyediaan jaringan internet dan *live streaming*. Bagian Umum menyediakan *sound system*, *lighting*, dan tenda untuk stan kuliner dan UMKM. Badan Penanggulangan Bencana Daerah meminjamkan kamar mandi portabel dan tenda. Dinas Perhubungan mendukung pengadaan penunjuk arah dan pemasangan *banner* kegiatan, sementara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyumbang pengisi acara dari beberapa kesenian khas Tegal. Dengan keterlibatan semua pihak, terbangunlah sinergi yang indah antara Pemerintah Desa, Pokdarwis, panitia festival, dan warga. Sementara itu, di level Pemkab Tegal juga terjadi kolaborasi yang baik antara berbagai OPD terkait. Dalam semua ini, Hidora berperan sebagai fasilitator, menjadi pihak yang menjembatani komunikasi, mensosialisasikan, dan merajut sinergi antara berbagai komponen yang ada.

## Bumijawa Festival

Bumijawa Festival diselenggarakan pada minggu pertama di bulan Februari 2018 selama dua hari. Pentas seni budaya ditampilkan di dua buah panggung. Panggung utama berada di lapangan sepak bola dan panggung kedua yang lebih kecil berada di hutan bambu di sebelah mata air Tuk Mudal. Kedua panggung ini berjarak sekitar 100 meter. Area di sekitar panggung utama, dan ruang publik di antara dua lokasi panggung ini menjadi area berjualan aneka kuliner dan produk UMKM dari warga Desa Cempaka dan desa-desa sekitar.

Selain pentas seni budaya, kegiatan Bumijawa Festival juga menyelenggarakan Sarasehan “Pariwisata Berbasis Konservasi” yang menghadirkan narasumber Prof. DR. M. Baiquni (Pascasarjana Pariwisata UGM Jogja) dan Ary S. Suhandi (Indonesia Ecotourism Network, pemateri ekowisata dari Kementerian Pariwisata); Sarasehan Budaya “Melestarikan Budaya sebagai Identitas dan Jati Diri” dengan narasumber Trie Utami (artis, budayawan), Marcel Hartawan (*production house*, Kompas Gramedia Group) dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Tegal; *Workshop* “Musik Tradisional Go Global” dengan narasumber Rayhan Sudrajat (seniman dari Bandung yang sudah *go internasional*) dan Agus “Hewodn” Nur Wahidin (seniman dari Tuban, pelestari alat musik purba).

Pada pembukaan festival, para seniman dan penonton diajak melakukan kirab budaya keliling desa dengan aneka kostum tradisional, iringan musik tradisional dan *drum band* pelajar, serta mengarak gunungan buah-buahan sebagai wujud ungkapan rasa syukur warga. Di waktu lain, para pengisi acara dari luar kota dan luar negeri juga diajak untuk *field trip* atau berkarya wisata mengunjungi beberapa titik potensi wisata yang ada di Desa Cempaka. Kegiatan seni budaya Bumijawa Festival itu sendiri melibatkan lebih dari 100 orang seniman yang terdiri dari artis nasional Trie Utami, belasan seniman dari delapan negara (Amerika, Inggris, Rusia, Jerman, Perancis, Jepang, Argentina, Indonesia), seniman dari berbagai daerah di Nusantara (Jakarta, Bandung, Jogja, Solo, Tuban, Malang, Ubud Bali), seniman dari Kabupaten Tegal, Kecamatan Bumijawa, dan dari Desa Cempaka sendiri. Mereka menampilkan beragam jenis kesenian, seperti musik dan tari tradisional, musik dan tari kontemporer, teater, musikalisasi puisi, pameran melukis, dan pentas kolaborasi *anthropological dance* yang melibatkan para seniman dan warga. Untuk kesenian lokal Kabupaten Tegal sendiri ditampilkan Tari Topeng Endel, Kesenian Terbang Kencer, Kesenian Sintren, Tari Guci, Wayang Pring, dan Musik Bambu.

Berkat dukungan semua pihak, Bumijawa Festival terselenggara dengan sukses dan bukan sekadar menjadi sebuah kegiatan biasa, melainkan menjadi sebuah peristiwa budaya. Rangkaian acara terlaksana dengan baik, penonton membludak dan antusias, dagangan warga laris manis terjual, dan kegiatan Bumijawa Festival

mendapatkan liputan yang maksimal dari berbagai media lokal, regional, dan nasional.

## **Melahirkan Kesenian Baru**

Uniknya, Desa Cempaka yang pada awalnya tidak memiliki kesenian lokal untuk ditampilkan di Bumijawa Festival, pada akhirnya berhasil mementaskan kesenian musik bambu dan teater yang mengisahkan sejarah Desa Cempaka. Penyelenggaraan festival budaya ini berhasil memotivasi warga untuk membentuk dan mengembangkan kesenian mereka sendiri. Mengingat keterbatasan waktu untuk berlatih, pemuda Desa Cempaka hanya dapat membuat beberapa kentongan dengan berbagai ukuran yang dikolaborasikan untuk mengiringi gitar akustik, bas, angklung Jawa Barat, dan vokal. Meskipun fasilitas dan waktunya sangat terbatas, mereka disiapkan oleh Tim Hidora agar dapat berkolaborasi dengan para musisi profesional dari dalam dan luar negeri.

Pada saat pelaksanaan Bumijawa Festival, kolaborasi berlangsung dengan baik. Pada sesi *workshop* musik, musik bambu Desa Cempaka berhasil mengiringi Trie Utami dalam melantunkan musik Jawa Barat dan menari. Karena kesibukan dalam persiapannya, kelompok musik bambu ini ternyata belum diberi nama sehingga Trie Utami menamainya Amuba, singkatan dari Alunan Musik Bambu. Sepanjang acara, tampil setiap hari, bergantian dari panggung utama ke panggung kedua. Selain berkolaborasi dengan seniman lain, Amuba juga tampil sendiri dengan karyanya.

Setelah Bumiwijaya Festival, Amuba mendapat undangan untuk tampil dalam beberapa *event* di luar desanya, antara lain di *event* Konser Kesenian Ramadhan di Tonjong-Brebes, *event* Pembukaan Festival Film Raya Film Pantura Tegal, dan mengisi acara di Cafe Kanopi Tegal, *event* Pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata Kabupaten Tegal, *event* Gelar Budaya Kabupaten Tegal, *event* Festival Musik Etnik di Cirebon, *event* Festival Sintren Luwijaya, dan tampil di hotel Sankita Guci. Amuba juga tampil secara reguler setiap hari Minggu di kegiatan Pasar Slumpring Desa Cempaka yang diselenggarakan oleh Pokdarwis pascafestival. Melalui jejaring Hidora, Amuba juga diundang untuk tampil dalam kegiatan budaya Festival Lima Gunung di Kabupaten Magelang yang merupakan salah satu kegiatan budaya bergengsi di kalangan pegiat seni budaya nasional dan internasional. Dalam festival ini, Amuba menampilkan musik dan tarian serta berkolaborasi bersama seniman dari Jepang. Amuba telah menjadi Duta Besar Seni Budaya Desa Cempaka yang juga mewakili Kabupaten Tegal. Kini orientasi proses kreatif Amuba adalah mengembangkan karya musiknya sehingga dapat masuk dapur rekaman. Hal ini diperlukan sebagai bagian dari strategi untuk memperkenalkan seni budaya dan potensi wisata Desa Cempaka dan Kabupaten Tegal kepada kalangan yang lebih luas.

## Pasar Slumpring

Linimasa (*road map*) lanjutan dari penyelenggaraan Bumijawa Festival adalah membuat beberapa kegiatan kecil yang dilaksanakan secara rutin agar gaung Desa Cempaka yang berhasil dibunyikan melalui acara Bumijawa Festival tidak berhenti setelah kegiatan festival selesai. Dalam forum evaluasi kepanitiaan, digali berbagai gagasan yang dianggap sesuai sebagai bentuk tindak lanjut dari Bumijawa Festival. Tim Pokdarwis mengusulkan diadakannya kegiatan pasar kuliner dengan menghadirkan makanan dan jajanan khas desa dan dengan menggunakan hutan bambu sebagai lokasi pasar. Ide ini direspons secara positif. Pada awalnya, pasar kuliner ini direncanakan akan diadakan sebulan sekali atau dua mingguan, tapi dengan pertimbangan efektifitas pembangunan *branding*, Tim Hidora mengusulkan agar pasar kuliner diadakan setiap minggu. Usul ini diterima dan akhirnya pada hari Minggu, seminggu setelah Bumijawa Festival selesai, dimulailah tradisi baru pasar kuliner mingguan yang dinamai Pasar Slumpring. Slumpring adalah nama lokal dari daun pohon bambu, mengingat pasar ini berlokasi di area hutan bambu. Pasar ini dimulai dengan sederhana karena hanya melibatkan 11 orang pedagang yang berjualan pada waktu festival. Pasar Slumpring dilaksanakan setiap hari Minggu mulai jam 07.00 sampai 12.00. Sementara berbelanja di pasar kuliner, pengunjung dihibur dengan sajian kesenian yang melibatkan grup Amuba dan seniman-seniman lain.

Agar perputaran uang dalam Pasar Slumpring bisa tercatat dengan baik, digunakan sistem pembayaran menggunakan koin bambu. Dengan cara ini, pengunjung tidak bisa bertransaksi langsung dengan pedagang menggunakan uang. Pengunjung harus membeli koin bambu sebagai alat pembayaran kepada pedagang. Di akhir kegiatan, pedagang menukarkan koin yang mereka dapatkan dengan uang tunai ke panitia Tim Pokdarwis. Dari setiap koin yang terjual, sudah disepakati bagi hasil antara pedagang dan Pokdarwis.

Minggu pertama pelaksanaan Pasar Slumpring, belum banyak pengunjung yang hadir sehingga total pendapatan dari penjualan koin hanya Rp.1,7 juta. Meskipun omzetnya masih kecil, penghasilan ini memberikan semangat dan keyakinan bahwa pasar ini memiliki prospek yang bagus jika dijalani dengan tekun. Minggu berikutnya, untuk menarik minat pengunjung, dibuatlah kegiatan lomba mewarnai untuk pelajar TK sekecamatan Bumijawa. Lomba ini diikuti oleh 120 peserta anak-anak yang datang bersama orang tuanya. Hasilnya, pemasukan pasar meningkat dua kali lipat. Kegiatan Pasar Slumpring terus berlangsung. Selain dari hasil penjualan kuliner dan pemasukan dari parkir, Tim Pokdarwis juga mendapatkan pemasukan dari penambahan fasilitas berupa *gethek* (perahu bambu) yang bisa disewa pengunjung. Setelah itu, pemasukan bertambah ketika ditambahkan wahana *water ball* (bola besar dari plastik, yang bisa diisi 1-2 orang penumpang). Jumlah pedagang

di Pasar Slumpring pun terus bertambah dan dalam waktu lima bulan, dengan 20 kali pelaksanaan, didapatkan total pendapatan sebesar Rp.140.000.000, dengan bagi hasil Rp.91,8 juta untuk pedagang, dan Rp.44,4 juta untuk Pokdarwis. Jumlah pedagang bervariasi antara 11 sampai 21 orang setiap minggunya. Pendapatan pasar ini terus meningkat. Pendapatan terbesar diperoleh pada pertengahan bulan Oktober 2018, yaitu sebesar Rp.24,3 juta untuk satu kali kegiatan Pasar Slumpring. Dari angka tersebut, penjualan koin mencapai Rp.18,1 juta, lebih dari 10 kali lipat pendapatan dari penjualan koin pada saat pertama kali Pasar Slumpring dibuka pada bulan Februari 2018.

Keberhasilan Pasar Slumpring juga ditandai dengan banyaknya liputan dari berbagai media massa, baik media cetak, media *online*, radio, sampai televisi nasional. Video dan foto kegiatan Pasar Slumpring sangat viral berseliweran di sosial media. Tim Pokdarwis dan pengunjung Pasar Slumpring yang datang dari berbagai kota dan kabupaten di luar Kabupaten Tegal, turut berperan dalam memviralkannya.

## **Paket Wisata Desa Cempaka**

Dengan potensi alam Desa Cempaka yang indah dengan segala keunikannya, ditunjang dengan aktivitas pertanian dan berbagai kuliner khas desa yang lezat, paket wisata Desa Cempaka memiliki banyak peluang untuk dikembangkan. Melalui diskusi panjang, aneka eksperimen, dan simulasi disusunlah beberapa paket wisata dengan mengeksplorasi beragam potensi yang ada. Paket wisata yang dikembangkan meliputi Paket Camping dan Sunrise di Bukit Atas Awan, Paket Sunrise Bukit Atas Awan, Paket Sunset Bukit Atas Awan, Paket *Hiking* Bukit Barisan Desa Cempaka (Bukit Atas Awan, Bukit Mengger, Bukit Cengis, Bukit Bulakan, Bukit Bulak Cempaka), Paket Tur Desa (tur ke persawahan, hutan bambu, dan Bukit Bulak Cempaka), Paket *Outbound*, dan Paket MICE (*Meeting, incentive, Convention, dan Exhibition*).

Tim Hidora membuat beberapa kali *workshop* bersama Tim Pokdarwis Desa Cempaka untuk membagikan materi dasar mengenai cara merancang paket tur, menghitung biayanya, strategi pemasaran secara *online* maupun *offline*, menyiapkan *guide* dan *service*, dan membangun mentalitas dan *leadership*. Selain paket wisata di Desa Cempaka, dirancang pula paket wisata terintegrasi yang terdiri dari serangkaian tour ke tujuan wisata di Desa Cempaka dan tujuan wisata di luar Desa Cempaka. Paket ini dibentuk mengingat desa-desa lain di sekitar Desa Cempaka juga memiliki potensi alam dan aktivitas keseharian warga yang menarik yang bisa ditawarkan sebagai varian paket wisata Pokdarwis Desa Cempaka. Beberapa paket wisata yang ditawarkan ini sudah mulai diminati, walaupun memang belum terlalu banyak order

yang masuk. Paket-paket wisata yang mulai laris saat ini adalah Paket Camping dan Sunrise di Bukit Atas Awan, dan Paket *Outbound*.

## **Membangun Jejaring Strategis**

Langkah penting berikutnya dari program pengembangan wisata Desa Cempaka adalah membangun jejaring strategis yang berkaitan dengan jejaring bisnis pariwisata, budaya, media massa, akademisi, pemerintahan, dan komunitas. Jejaring bisnis pariwisata dibangun dalam kalangan *tour operator*, *guide* (melalui Himpunan Pramuwisata Indonesia), dan hotel-hotel di Kabupaten Tegal dan sekitarnya. Untuk jejaring budaya sudah mulai terbangun melalui jejaring Hidora yang hadir pada kegiatan Bumijawa Festival, dan dari kegiatan Festival Lima Gunung di Magelang ketika Amuba diundang untuk tampil. Demikian pula jejaring media massa yang mulai terbangun saat Bumijawa Festival dan saat wartawan diundang untuk meliput kegiatan Pasar Slumpring.

Di kalangan pemerintahan lebih banyak dibangun jejaring melalui jalur Pemerintah Desa Cempaka, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Dinas-dinas terkait di Kabupaten Tegal, Bappeda Provinsi Jawa Tengah, calon gubernur (dan kini sudah terpilih sebagai gubernur) Ganjar Pranowo, Kementerian Keuangan RI, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPR RI, sudah cukup banyak yang hadir ke Desa Cempaka. Jejaring ini harus terus dipertahankan dan dimaksimalkan dalam mendukung kebutuhan pengembangan wisata Desa Cempaka.

Jejaring komunitas dibangun dengan melihat segmen pasar dan penunjang publikasi wisata Desa Cempaka. Komunitas yang pernah mengunjungi Desa Cempaka antara lain komunitas ibu-ibu PKK, guru, pencinta reptil, motor, fotografi, dan lain-lain. Sementara itu, jejaring akademisi banyak dibangun melalui jaringan Hidora. Universitas Taruma Negara Jakarta telah dua kali datang ke Desa Cempaka membawa puluhan mahasiswa dan dosen untuk membuat pemetaan dan perencanaan wisata desa. Demikian juga dengan Universitas Pelita Harapan Jakarta. Sekarang ini mulai dibangun jejaring dengan Universitas Indonesia.

## **Magang dan Akselerasi**

Salah satu cara untuk mengakselerasi peningkatan mentalitas dan Omes (organisasi, manajerial, dan sistem) yang dibutuhkan dalam pengembangan wisata Desa Cempaka adalah dengan metode magang. Hidora memilih seorang pemuda Desa Cempaka untuk magang di *homebase* Hidora di Banyuwangi selama tiga bulan. Dalam proses magang ini, pemuda tersebut belajar mengenai model penampungan yang dilakukan Tim Hidora kepada desa-desa Banyuwangi. Ia juga belajar tentang pengelolaan bisnis pariwisata, membuat paket wisata, standar *guiding* dan *service*,

teori dan praktik teknik dasar *digital marketing communication*, serta belajar tentang manajemen dan keorganisasian. Namun, materi utama yang dipelajari selama masa magang adalah menumbuhkan mentalitas pemimpin (*leadership*). Sebanyak apapun ilmu yang dimiliki, jika tidak dibarengi dengan mental pemimpin yang unggul, maka ilmu itu tidak akan pernah bisa mengantarkan pada kesuksesan. Pembelajaran ini menjadi proses untuk mencetak kader generasi muda yang militan dan tangguh.

Proses magang memang menjadi sebuah bagian penting dari *road map* program pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh Hidora di berbagai desa di Banyuwangi dan Kabupaten Tegal. Agar desa bisa berkembang, kuncinya adalah mencetak kader-kader generasi muda yang bermental pemimpin yang sangat cinta pada negerinya, berjiwa kreatif, pandai berkomunikasi, menguasai teknologi informasi, dan memiliki keterampilan berorganisasi, keterampilan manajerial, dan sistematis. Setelah selesai masa magang, pemuda itu kembali ke desanya dan diharapkan dapat menjadi agen perubahan di desa masing-masing, mampu menginspirasi, dan sanggup menggerakkan anak-anak muda desa lainnya untuk berkarya bagi desanya dan bagi bangsanya.

Sekembalinya ke Kabupaten Tegal, pemuda Desa Cempaka yang telah magang di Banyuwangi ini mendapat beberapa tugas utama, yaitu menjadi motivator dan penggerak di Desa Cempaka sendiri, sekaligus menjadi penggerak sehari-hari bagi desa-desa dampingan Hidora di Kabupaten Tegal, terutama saat tim tidak sedang berada di Kabupaten Tegal.

## **Cempaka sebagai Prototipe**

Untuk tahun 2018, program pendampingan masyarakat yang dilakukan Hidora di Kabupaten Tegal mencakup enam desa. Untuk Kecamatan Bumijawa pendampingan dilakukan di Desa Cempaka, Desa Begawat, dan Desa Sigedong. Untuk kecamatan mencakup Desa Luwijawa Kecamatan Jatinegara, Desa Pangkah Kecamatan Pangkah, dan Desa Munjungagung Kecamatan Kramat.

Desa Cempaka telah menjalani hampir seluruh proses pengembangan wisata desa dengan cukup lengkap, walaupun belum sepenuhnya sempurna. Mulai dari proses pemetaan potensi alam dan budaya, pemetaan permasalahan yang terdiri dari analisis sosial dan analisis politik, pembuat *road map* program, kegiatan festival seni budaya sebagai simulasi wisata desa sekaligus sebagai media publikasi, pengembangan kelompok kesenian hingga menjadi duta besar seni budaya desa, pengembangan pasar kuliner, perancangan paket wisata, pembangunan jejaring strategis, pembelajaran *marketing*, sampai yang terpenting adalah pengembangan

SDM pemuda desa melalui program akselerasi magang di Banyuwangi sampai pembentukan kader-kader pemuda desa, telah dilalui oleh Desa Cempaka. Masing-masing proses ini harus memiliki indikator keberhasilan yang terukur berupa target minimum dan target ideal, target kuantitatif maupun kualitatif. Dalam program pendampingan masyarakat yang dilakukan Hidora, kesemua proses berikut indikator keberhasilannya dibahas dan diputuskan bersama berbagai pihak terkait di desa.

Hidora mengkombinasikan beberapa metode dasar pendampingan masyarakat, yaitu menentukan proses partisipatif yang tepat yang dapat diterapkan di desa, sesuai situasi dan kondisi lokal. Metode dasar yang digunakan adalah *Participatory Action Research* (PAR) atau Partisipasi Riset Aksi sebagai metode yang diterapkan dalam meriset, merencanakan, serta melaksanakan program pembangunan dan pengembangan wisata desa berbasis masyarakat (*community based tourism*).

*Community Based Tourism* (CBT) merupakan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat, sebagai model pembangunan yang memberikan peluang sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi membangun pariwisata di desanya. Ide kegiatan dan pengelolaan dilakukan oleh masyarakat secara partisipatif dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Masyarakat sebagai pemangku kepentingan merupakan unsur terpenting dan berperan strategis dalam pengembangan pariwisata di desanya.

Dalam program pengembangan wisata desa di Kabupaten Tegal, Hidora mengambil peran sebagai pelaku pendampingan masyarakat. Kata “pendampingan” dipilih dan bukan kata “pembinaan” dengan alasan kata “pembinaan” memberi kesan adanya hirarki antara pembina (aktif) dan yang dibina (pasif) sehingga terkesan pembina sebagai subjek sementara yang dibina adalah objek. Kata “pendampingan” menunjukkan kesetaraan, tidak ada yang lebih unggul, sementara pihak yang aktif dan menjadi subjek adalah yang didampingi. Pendamping bertugas mendorong dan membantu saja. Dengan demikian, pendampingan dapat diartikan sebagai satu interaksi yang terus-menerus antara pendamping dengan kelompok atau masyarakat dampingan hingga terjadi proses perubahan kreatif yang diprakarsai oleh anggota kelompok atau masyarakat yang sadar diri dan telah mengembangkan wawasan maupun ketrampilannya. Pendamping lebih pada peran sebagai konsultan, fasilitator, dan pelatih.

Pada kegiatan pendampingan masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan wisata desa di Kabupaten Tegal, Desa Cempaka memang diorientasikan sebagai model atau prototipe. Semua proses yang sudah dilakukan Hidora bersama Pemerintah Desa, Pokdarwis, dan warga Desa Cempaka, diharapkan

bisa menjadi percontohan dan menginspirasi desa-desa lainnya. Sumber daya manusia yang merupakan anak-anak muda dari Desa Cempaka “dikader” agar dapat berfungsi sebagai motivator dan mitra pendukung pemuda dari desa lainnya. Dengan cara ini diharapkan proses pembangunan dan pengembangan wisata desa-desa lain bisa terlaksana dengan lebih cepat.

## **Terobosan Transparansi di Gondowangi<sup>5</sup>**

*Ari Anggari Harapan*

Transparansi sejatinya adalah penerangan dan kejelasan yang membuat tenteram karena memberikan pemahaman mengenai situasi yang dihadapi. Tanpa transparansi, dapat terjadi kebingungan dan kekacauan yang mungkin saja berujung pada konflik. Itulah yang terjadi di Gondowangi, sebuah desa di Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

### **Ketiadaan Transparansi yang Memicu Konflik**

Pada periode 2000–2008, Desa Gondowangi mengalami penurunan dalam hal kualitas pelayanan bagi masyarakat desa. Penurunan kualitas layanan ini merata di semua bidang, mulai dari surat-menyurat sampai pembangunan fisik. Pada tahun 2005, ketidakpercayaan publik yang sebelumnya dipendam akhirnya meluap dan mencapai puncaknya. Akibatnya, tahun 2006 kepala desa dituntut mundur. Sempat terjadi ketegangan selama beberapa minggu dan selang satu bulan kepala desa tersebut mengundurkan diri. Selama periode 2006–2008 posisi kepala desa diisi oleh pejabat sementara yang diamanahkan kepada sekretaris desa. Pada masa ini terjadi stagnasi, baik pada program maupun layanan. Tidak ada perubahan situasi apalagi kemajuan. Dapat dibayangkan betapa masyarakat semakin tidak puas.

Pada tahun 2008 diselenggarakan pemilihan kepala desa untuk periode 2008–2013 dan terpilihlah kepala desa yang baru. Harapan muncul kembali karena warga desa mendapat kesempatan untuk memilih pemimpinnya sendiri. Namun, apa yang terjadi kemudian memusnahkan semua harapan yang telanjur dibangun. Ternyata kepala desa yang dipilih oleh masyarakat, tidak jauh berbeda dari kepala desa sebelumnya. Sikapnya sangat antikritik dan tidak transparan dalam menyusun dan melaksanakan berbagai program desa. Warga kesulitan mendapat pelayanan yang

---

5 Ditulis berdasarkan wawancara dengan Danis Setyo Budi Nugroho.

sangat dibutuhkan karena kepala desa nyaris tidak dapat ditemui. Tidak terjadi komunikasi antara kepala desa dan masyarakatnya. Akibatnya, selama periode itu Desa Gondowangi terpaksa menghadapi warga yang menjadi “liar” dalam beropini dan bertindak. Terbentuk sekat-sekat dalam masyarakat yang merasa tidak memiliki pengayom dan pelindung. Warga mencari panutan yang dianggap dapat melindungi dan mengayomi. Dampak negatifnya adalah terjadi persaingan antarkelompok yang terpisah dalam sekat-sekat tersebut, yang seringkali berujung pada konflik fisik. Kepala desa tidak berupaya mengatasi kondisi ini, bahkan membuat kebijakan yang memperuncing keadaan. Pembangunan fisik di desa dilakukan oleh orang-orang terdekat kepala desa dengan alasan yang sesungguhnya bersifat politis. Memang selalu dikatakan bahwa mereka yang terpilih tersebut adalah orang yang ahli di bidangnya. Padahal, jika melihat hasil kerjanya, patut dipertanyakan keahlian mereka. Ini semua menunjukkan ketidakterbacaan yang terjadi akibat aparat pemerintah yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan benar. Dapat diambil kesimpulan bahwa pada periode 2000–2013 Desa Gondowangi mengalami krisis pemerintahan desa yang berimbas pada kondisi dan perkembangan sosial kemasyarakatan.

### **Ketertutupan yang Menyengsarakan**

Ada banyak peristiwa yang menyebabkan beberapa warga berusaha mengakhiri kondisi yang dirasa merugikan tersebut. Tiga orang pengurus Karang Taruna desa berinisiatif membuat terobosan dengan mengajukan usulan program pembangunan desa kepada pemerintah desa. Tim tersebut menyelenggarakan pertemuan-pertemuan dengan warga di tingkat RW untuk menggali pendapat, keinginan, dan gagasan masyarakat tentang pembangunan desa. Hasilnya didokumentasikan, disusun, dan diserahkan kepada kepala desa untuk ditindaklanjuti. Namun, ternyata pada proses finalisasi oleh pemerintah desa dan perwakilan masyarakat (Badan Permusyawaratan Desa), hasil tersebut diubah karena pemerintah desa mempunyai cara berpikir yang berbeda. Akibatnya, anggapan masyarakat terhadap pemerintah desa menjadi semakin negatif.

Kasus lain yang hingga kini masih segar dalam ingatan masyarakat adalah bantuan sapi sebanyak 6 ekor untuk warga miskin. Pada awalnya, pemberian bantuan yang dikawal pemerintah kabupaten ini berjalan sesuai dengan aturan, yakni diperuntukkan bagi warga miskin yang dilakukan secara bergiliran dari satu keluarga miskin ke keluarga miskin yang lain. Ketika proses ini belum genap 6 bulan, sapi tersebut direkayasa mati agar mendapat bantuan kembali dengan alasan yang dipaksakan, yaitu bahwa sudah waktunya bantuan sapi tersebut pindah ke keluarga

yang lain. Pada kenyataannya, sapi yang dikatakan sudah mati itu sudah dijual ke pihak lain.

Berbagai peristiwa di atas membuat masyarakat kehilangan kepercayaan mereka kepada pemerintah. Warga tidak lagi mengajukan permintaan bantuan kepada pemerintah, meskipun bantuan itu adalah hak warga dan kewajiban pemerintah. Jikapun ada yang mengajukan bantuan, dapat dipastikan bahwa 80% bantuan tersebut akan diterima oleh keluarga dan kerabat kepala dan perangkat desa. Akibatnya, timbul rasa antipati dan pesimis di antara warga desa.

Dalam tupoksinya, kepala desa wajib menulis laporan, terutama laporan keuangan; tapi, laporan keuangan ini tidak pernah disampaikan kepada warga. Warga tidak pernah mendapat informasi mengenai jumlah pendapatan, pembelanjaan, dan pengeluaran. Informasi yang sampai kepada warga selalu merupakan pernyataan bahwa pemerintah desa menderita kerugian. Semua kegiatan, baik kegiatan sosial, kegiatan yang didanai secara swadaya, maupun yang didanai oleh pemerintah selalu menyebabkan kas desa menjadi minus. Kondisi ini membuat warga mempertanyakan tentang kejujuran pemerintah desa, mengingat semua kegiatan, apapun bentuknya, selalu merugi secara finansial. Hal lain yang menjadi pertanyaan warga adalah jumlah iuran/pungutan yang dikenakan untuk setiap layanan administrasi yang dibutuhkan warga. Nominalnya besar untuk ukuran warga desa, tapi warga terpaksa memenuhinya karena kebutuhan. Tidak ada penjelasan mengenai jumlah nominal yang besar itu dan warga tidak dapat menanyakan kepada aparat desa yang tidak pernah berada di tempat.

Ketidakhadiran aparat menyulitkan warga yang memerlukan layanan. Penyebab ketidakhadiran tidak diketahui pasti, tapi yang jelas hubungan antara warga dan aparat desa memang jauh dari akrab. Akibatnya, banyak warga yang tidak memperbarui identitas kependudukannya sehingga berimbas kepada data kependudukan. Pemerintah desa tidak lagi memiliki data akurat mengenai identitas kependudukan warga dan ini dapat berujung pada ketidaktepatan bantuan dana dari pemerintah.

Menghadapi kondisi ini, warga mencoba mengadu kepada badan yang dianggap lebih tinggi dari pemerintah desa tentang kinerja kepala desa. Warga datang ke kantor DPRD kabupaten yang diharapkan dapat menilai kinerja kepala desa. Upaya ini tidak mendatangkan hasil karena tidak ada perubahan dalam kinerja kepala desa. Warga mengupayakan melakukan mediasi, tapi tanpa hasil. Di pihak lain, para pemuda akhirnya bergerak sendiri karena tidak ada tanggapan sama sekali dari aparat desa. Selain itu, banyak warga yang umumnya sudah terpecah dalam sekat-sekat dan kelompok-kelompok, sering terlibat tawuran. Kondisi seperti ini jelas tidak kondusif untuk kehidupan apalagi kesejahteraan warga.

## **Perjuangan Mengakhiri Ketertutupan dan Kesengsaraan**

Pada pemilihan kepala desa tahun 2013, sekelompok anak muda mendorong Danis Setyo Budi Nugroho, salah satu mantan aktivis Karang Taruna, untuk ikut maju sebagai salah satu calon kepala Desa Gondowangi yang baru. Danis adalah satu dari 3 orang anggota Karang Taruna yang pernah mengajukan usulan perubahan kepada kepala desa yang menjabat pada periode 2008–2013. Lulusan Sarjana Bahasa Inggris dari Universitas Negeri Malang ini sebelumnya bekerja di bidang pariwisata di Bali dan tidak pernah berpikir untuk kembali ke Gondowangi, setidaknya pada saat itu. Namun, teman-temannya berpendapat bahwa Danis satu-satunya orang yang cocok untuk menghadapi dua calon kepala desa lainnya, yaitu petahana dan seorang calon lagi yang dikenal sebagai tokoh judi setempat. Ada kegelisahan di kalangan anak muda memikirkan masa depan Gondowangi, desa tempat mereka lahir dan dibesarkan. Ternyata kegelisahan ini juga dirasakan oleh para sesepuh desa yang cemas akan masa depan Gondowangi. Danis, yang aktif di berbagai organisasi dan perkumpulan sejak masih remaja, dipandang sebagai orang yang tepat untuk mengakhiri kegelapan dan mengawali kecerahan di Gondowangi.

Pendekatan dan bujukan teman-teman akhirnya meluluhkan hati Danis dan ia memutuskan pulang ke Gondowangi untuk mengikuti pemilihan kepala desa. Hanya satu bulan waktu yang tersisa sebelum pemilihan. Danis berkampanye siang malam nonstop untuk meyakinkan masyarakat bahwa ia mampu menjalankan tugas sebagai kepala desa. Dengan dukungan penuh dari kedua orang tua, para sesepuh, anak muda, ditambah dengan jejaring yang telah dibangun sebagai aktivis desa sejak masa remaja, Danis Setyo Budi Nugroho akhirnya berhasil meraih kedudukan sebagai kepala desa Gondowangi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang untuk periode 2013–2019.

Di awal masa kerjanya, langkah pertama Danis sebagai kepala desa yang baru adalah mengumpulkan Kartu Keluarga (KK) semua warga untuk diproses sebagai sarana memperoleh data yang benar tentang jumlah warganya. Ia membangun pangkalan data (*database*) sebagai dasar pedoman kebijakan yang menyangkut kesejahteraan warga. Pada saat itu memang sudah waktunya KK diganti dengan yang baru, sehingga kesempatan ini dimanfaatkan untuk memberikan layanan pertama kepada masyarakat. Kepala desa mencurahkan seluruh tenaga dan waktunya untuk masyarakat. Jam kerja kantor desa dimulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Bahkan, bila ada warga yang membutuhkan layanan pada malam hari, perangkat desa siap melayani. Setiap 4 bulan diselenggarakan program jemput bola untuk administrasi kependudukan dengan mengadakan program layanan prima selama seminggu agar warga tertarik dan bersedia mengurus kebutuhan dasar sebagai warga negara Indonesia yang sah.

Langkah selanjutnya adalah transparansi keuangan. Sebagai kepala desa, Danis membuat terobosan dengan menyampaikan laporan keuangan secara terbuka dalam bentuk poster/baliho yang dipasang di kantor desa. Dengan demikian, setiap orang dapat membaca sendiri laporan keuangan desa. Ini adalah tindakan yang sangat berani dan mengandung risiko. Kepala desa lainnya bisa saja merasa tidak senang dan menentang upaya transparansi ini. Namun, kepala desa yang masih muda ini terus maju dengan konsep transparansinya dan pada akhirnya masyarakat menjadi terbiasa dengan transparansi keuangan ala Gondowangi. Danis berhasil merebut kepercayaan warganya meskipun awalnya agak sulit meyakinkan warga bahwa kepala desa yang sekarang benar-benar bekerja untuk masyarakat. Kesulitan ini ada menurut Danis antara lain akibat apatisme warga akibat kinerja buruk aparat desa selama lebih dari 10 tahun.

Upaya kepala desa muda ini untuk memenuhi segala kebutuhan dan mengatasi permasalahan masyarakat membuat warga selalu datang meminta solusi atas berbagai macam persoalan. Danis menceritakan, “Pernah ada masyarakat yang habis kemalingan, minta modal ke saya untuk memulai usahanya lagi, antara haru, bangga, dan bingung menjadi satu”. Cerita ini menunjukkan bahwa kepala desa telah menjadi sandaran dan kepercayaan warga, sekaligus solusi untuk berbagai permasalahan. Untuk mendapat modal usaha yang sebetulnya bersifat pribadi pun warga datang kepada kepala desa.

Langkah selanjutnya adalah menggali potensi masyarakat yang dapat dikembangkan untuk menjadi penguatan masyarakat Gondowangi itu sendiri. Berdasarkan pengamatannya, Danis yakin bahwa jika ada kegiatan seni dan budaya, warga lebih antusias dan bersemangat untuk melaksanakannya. Bahkan, kadang-kadang kegiatan dilaksanakan tanpa berkoordinasi dengan pemerintah desa. Namun, bagi Danis ini justru menunjukkan bahwa warga memiliki gagasan menarik yang akan menjadi kegiatan luar biasa jika didukung dengan fasilitas dan dana dari pemerintah desa. Oleh karena itu, kepala desa baru ini memutuskan bahwa semua kegiatan seni budaya akan difasilitasi dan didukung oleh pemerintah desa.

Salah satu potensi seni budaya yang dikembangkan untuk menjadi ikon Desa Gondowangi adalah wayang krucil. Wayang krucil terbuat dari kayu pipih (seperti wayang klithik), tapi dengan tangan dari kulit sehingga mudah digerakkan. Ukurannya lebih kecil dari wayang kulit biasa sehingga disebut wayang krucil. Tokoh-tokoh wayang krucil juga berbeda dari tokoh-tokoh wayang kulit biasa karena yang dimainkan adalah lakon-lakon seperti cerita-cerita Panji, kisah-kisah Menak atau Damar Wulan<sup>6</sup>, Wayang krucil yang terdapat di Dukuh Wiloso, Desa Gondowangi ini diperkirakan sudah berusia 300 tahun dan sudah jarang dimainkan.

---

6 <https://festivalpanji.id/2018/04/04/wayang-krucil/>

Danis kemudian berusaha untuk melakukan revitalisasi wayang krucil dengan mengadakan pertunjukan pada saat bersih desa. Untuk menjaga kelestarian wayang krucil yang sudah rusak, direncanakan untuk menggandakan wayang tersebut. Sekarang ini wayang krucil banyak yang dibuat dari kardus dan dimainkan oleh anak-anak<sup>7</sup>. Selain itu, pemerintah desa mendanai pencetakan dan penerbitan wayang krucil yang sudah tersebar ke seluruh PAUD/TK dan SD di Desa Gondowangi dan menjadi modal pengembangan pendidikan karakter generasi penerus bangsa.

Untuk semakin meningkatkan kegiatan seni budaya, pemerintah desa mendirikan Rumah Budaya bertempat di kantor desa sebagai ajang latihan berkesenian bagi anak-anak dan remaja. Selain itu pemerintah desa juga membuka taman baca/perpustakaan bagi anak-anak, remaja, dan masyarakat umum yang dikelola oleh para ibu yang rata-rata memiliki anak yang masih kecil. Taman Baca Desa Gondowangi mengikuti lomba taman baca untuk seluruh kabupaten Malang di bulan Oktober 2018 dan berhasil menjadi juara 1.

Sejak awal menjabat, Danis melihat potensi seni budaya masyarakat Gondowangi dan ingin mengembangkannya untuk kepentingan desa dan warga. Kesempatan untuk melaksanakan hal ini juga ada, yaitu ritual bersih desa yang diadakan setahun sekali di bulan Sura. Meskipun hanya berlangsung dalam satu hari saja, ritual ini dapat menjadi ajang bagi masyarakat untuk berkesenian. Pada tiga tahun pertama menjabat, Danis sebagai kepala desa menyelenggarakan ritual bersih desa selama satu hari. Sambutan masyarakat desa sangat positif. Pada tahun keempat, ritual bersih desa menjadi salah satu acara dalam festival yang berlangsung selama satu minggu penuh. Perubahan ini dilakukan setelah melihat keberhasilan berbagai festival di kampung-kampung di wilayah Kabupaten Malang dan Kotamadya Malang. Mengingat Desa Gondowangi memiliki potensi dan kemampuan untuk menyelenggarakan festival serupa, diselenggarakanlah Festival Kampung Dilem yang pertama pada tahun 2016.

Kegiatan ini dinamai Festival Kampung Dilem karena memakai nama Mbah Dilem, yaitu *punden* atau leluhur yang dipercaya sebagai orang pertama yang membangun Desa Gondowangi. Konsepnya adalah festival yang dibuka dengan karnaval, pasar malam dengan berbagai pertunjukan, dan diakhiri dengan ritual *hajatan* yang merupakan puncak kegiatan bersih desa. Pada tahun 2018, Festival Kampung Dilem berlangsung dari 1-6 Oktober dan dimeriahkan dengan berbagai pertunjukan tradisional, termasuk pertunjukan oleh anggota Rumah Budaya atau nama resminya sekarang Sanggar Budaya Kampung Dilem. Ada pula pertunjukan wayang krucil dan *bantengan*, semacam pertunjukan reog dengan penari berkostum banteng yang biasanya mengalami *trance*. Suasana festival seperti pasar malam,

---

7 <https://www.malang-post.com/berita/malang-raja/wayang-krucil-malangan-segera-digandakan>

dengan lapak penjual sepanjang lebih kurang 300 meter di kiri-kanan jalan. Pengunjung cukup padat dan datang dari berbagai desa di luar Gondowangi.

Secara ekonomi, festival ini memberikan kontribusi cukup besar pada kas desa. Menurut pengakuan beberapa pedagang, keuntungan yang diperoleh cukup memuaskan, meskipun ada juga pedagang yang mengaku memperoleh hasil yang tidak jauh berbeda dari pendapatan sehari-hari. Pemasukan untuk kas desa cukup signifikan jika diingat bahwa semua persiapan dilakukan secara mandiri, tanpa sponsor. Stan para penjual dan panggung pertunjukan disiapkan oleh warga desa sendiri, terutama para pemuda. Menariknya lagi, para pemuda juga memiliki stan tempat menjual hasil karya mereka berupa barang kerajinan, sketsa foto, dan juga kedai kopi Balera.

Masyarakat Desa Gondowangi yang sebelumnya pernah terpecah dalam sekat-sekat tampak bersatu dalam festival ini. Para ibu menyediakan konsumsi gratis untuk seluruh anggota panitia di salah satu rumah di sepanjang jalan tempat penyelenggaraan festival. Ibu kepala desa yang masih muda menjadi motor penggerak para ibu menyediakan konsumsi yang dimasak sendiri. Ibu kepala desa ini memiliki kisah tersendiri. Karena usianya yang masih muda, pada awalnya ia sangat kesulitan meyakinkan para ibu untuk melakukan kegiatan, seperti PKK dan Posyandu. Namun, berkat ketekunan, kegigihan, dan dukungan dari kepala desa, kendala ini dapat diatasi.

Langkah selanjutnya adalah menyejahterakan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan warga. Langkah pertama adalah membentuk Balai Ekonomi Rakyat (Balera) untuk mengoordinasi semua usaha masyarakat agar bantuan (bila diperlukan) lebih mudah disalurkan. Setelah berjalan beberapa waktu, menurut Danis, “Balera yang terintegrasi dengan Rumah Budaya dan Taman Baca Desa telah memperlihatkan efek yang riil dan signifikan terhadap daya juang warga desa untuk mengembangkan diri”. Rupanya koordinasi yang lebih erat dalam mengelola usaha diiringi dengan revitalisasi pertanian telah berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat secara signifikan.

Peningkatan pendapatan ini telah membuat warga percaya diri sehingga muncul motivasi untuk terus berjuang meningkatkan dan mengembangkan kemampuannya. Di Balera ada beberapa UKM yang bergabung dan juga kedai kopi yang digiatkan oleh para pemuda desa. Kegiatan kedai kopi ini sangat positif untuk para pemuda. Mereka berkumpul dan beraktivitas di kedai kopi, meracik dan menjual kopi, berdiskusi atau merancang kegiatan lain yang menguntungkan secara ekonomi. Kedai kopi dibuka dari pukul 8 petang hingga tengah malam. Ini membuat para pemuda Desa Gondowangi merasa nyaman tinggal di desa karena malam hari pun ada kegiatan yang dapat dilakukan.

Upaya selanjutnya adalah pembentukan lumbung desa di bawah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gondowangi yang menjamin kemandirian desa. Lumbung desa ini juga sudah berjalan dengan baik dan beras yang dihasilkan menjadi konsumsi wajib masyarakat Desa Gondowangi, khususnya petani di Desa Gondowangi. Keberhasilan revitalisasi pertanian dibenarkan oleh salah seorang warga yang mengatakan bahwa hasil panen sekarang lebih banyak daripada hasil panen di masa lalu. Kemudian, ada pula usaha dari ibu-ibu desa yang membentuk UKM Griya Arum yang bergerak di bidang konveksi. UKM ini juga telah mulai melakukan promosi melalui media dan beberapa kegiatan yang diselenggarakan di sekitar Desa Gondowangi. Hal yang paling membanggakan dari semua usaha ini adalah keberhasilan tim pemandu ekowisata. Tim ini belum lama terbentuk namun telah berhasil memandu tamu dari Singapore International School dan Tszu Chi School. Tim ekowisata tampak percaya diri menghadapi perkembangan yang lebih menantang ke depan.

Dalam masalah kebersihan desa, tim pengelola sampah telah memperluas jaringan dan kualitas pelayanannya. Sebidang tanah *bengkok* digunakan untuk mengolah kompos dari sampah rumah tangga. Warga senang karena ada pupuk gratis dan tersedia bidang tanah secara cuma-cuma. Namun, kondisi ini tidak dicapai semudah membalik telapak tangan. Ternyata sulit melakukan edukasi pada warga untuk membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Pada awalnya, warga membuang sampah sembarangan sehingga lingkungan menjadi kotor. Karena peringatan seperti apapun tak mempan, maka Danis memasang jaring di atas tumpukan sampah yang menyebabkan sampah akan berbalik jika dibuang ke timbunan tersebut. Trik ini berhasil dan warga tidak lagi membuang sampah di tempat itu. Trik lain adalah membiarkan sampah bertumpuk hingga mengeluarkan bau busuk sehingga akhirnya warga terpaksa mengangkat dan membuangnya di tempat yang telah disediakan. Akal cerdas dari kepala desa ini berhasil memaksa warga untuk tertib dalam membuang sampah. Apalagi setelah terbukti bahwa pengelolaan sampah yang benar menguntungkan warga.

## **Dukungan yang Membawa Kesuksesan dan Harapan**

Danis mengakui bahwa keberhasilannya bukanlah semata-mata dari usahanya sendiri. Ia menyadari bahwa masyarakat Desa Gondowangi memiliki potensi terpendam dan kepedulian terhadap desanya. Hal ini terbukti dari upaya sebagian besar warga yang mendukung Danis memenangkan jabatan kepala desa dengan hanya berkampanye selama satu bulan. Tanpa dukungan yang kuat dari warga, mustahil ia akan terpilih.

Dukungan juga diterima Danis dari para sesepuh desa, termasuk kedua orang tuanya. Para sesepuh juga yang menurut Danis “mempunyai perhatian dan kemampuan berkomunikasi, membuat acara yang awalnya tampak ‘kecil’ menjadi penting. Mereka juga mengajak warga untuk memulai berpikir bahwa masih banyak kesempatan untuk berubah”. Para sesepuh ini aktif dalam pertemuan warga dan bagi Danis ini adalah bukti kesertaan dan kepedulian mereka. Maka, ia merasa yakin akan berhasil ketika para sesepuh mendukungnya mencalonkan diri. Setelah menjadi kepala desa, Danis tetap mendengarkan suara para sesepuh. Termasuk ketika diingatkan agar jangan terlalu cepat melakukan berbagai perombakan dan pembaruan di desa.

Desa Gondowangi sekarang sudah menjadi jauh berbeda dari sebelumnya. Menurut Danis sendiri, “Banyak yang mengatakan bahwa antara kami (kepala desa) dengan warga tidak ada sekat, kantor desa menjadi rumah rakyat seutuhnya. Semua bisa menikmati fasilitas kantor desa, semua bisa *kongkow* di kantor desa tanpa harus merasa minder”. Tampaknya semua warga, terlepas dari posisinya dalam masyarakat dapat berkumpul dan menikmati kebersamaan. Ini jelas suatu kemajuan yang luar biasa dan merupakan modal untuk pengembangan ke depan.

Menanggapi apresiasi warga, Danis menyatakan bahwa ia belum sepenuhnya yakin dan percaya diri bahwa ia telah mampu memenuhi harapan dan keinginan warga. Bahkan, Danis sendiri meragukan apakah ia sanggup mencapai kinerja yang diinginkan warga. Sesuai dengan rencana Danis sendiri, yaitu meningkatkan beberapa potensi keahlian warga, membuat dokumentasi, dan melakukan kerja sama dengan beberapa universitas akan menjadikan poin tawar kami sebagai desa meningkat. Selain itu, juga *branding* budaya kekinian perlu dikembangkan. Rencana pengembangan ini besar kemungkinan akan terlaksana bila Danis terpilih kembali sebagai kepala desa tahun 2019. Kepastian terpilih kembali barangkali juga cukup besar, mengingat anak muda Gondowangi yang aktif berkiprah di desa mereka merupakan pengikut kepala desa ini. Menurut salah seorang anak muda, kekuatan Danis sebagai kepala desa terletak pada usianya yang masih muda dan sifatnya yang enerjik dan dinamis, serta visi, dan keberaniannya. Masalahnya, apakah semua itu mencukupi?

Menjadi pemimpin tidak mudah. Selalu ada orang atau pihak lain yang merasa “kalah” dan oleh karena itu ingin merebut posisi pemimpin. Tidak terkecuali Danis, ia pun menghadapi “musuh” yang ingin merebut posisinya. Mereka ini rata-rata adalah orang-orang yang tidak memperoleh bagian dari “kue kesejahteraan” karena tidak mau bekerja sama. Misalnya saja, para mantan preman yang sudah tidak lagi mendapat “jatah” menjaga tempat parkir, satu-satunya tempat di mana pengunjung harus membayar saat festival. Menurut Danis, orang-orang seperti ini biasanya

diajak bicara dan dijelaskan mengapa mereka “tersisih”. Biasanya setelah itu mereka diam, hanya saja tidak ada jaminan apakah mereka akan diam seterusnya.

Masalah lain yang juga patut dipikirkan adalah keberlanjutan dari semua program yang telah disusun dan dikembangkan oleh Danis sebagai kepala desa. Tidak ada jaminan bahwa semua program dan sistem yang sudah dibuat akan terus digunakan bila ia tidak lagi menjabat sebagai kepala desa. Memang Danis sudah berupaya memulai proses regenerasi dan kaderisasi di kalangan anak muda pengikutnya. Namun, sekali lagi tidak ada jaminan bahwa regenerasi dan kaderisasi yang telah dilakukan akan berhasil mempertahankan sistem dan program yang telah disusun. Selama yang diandalkan untuk keberlanjutan program dan sistem adalah individu, selama itu pula keberlanjutannya terancam. Langkah yang perlu diupayakan adalah bagaimana sistem dan program yang sudah baik tersebut terintegrasi dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perilaku masyarakat, sehingga sesungguhnya warga sendirilah yang menjamin keberlanjutan tersebut.

# Belajar dari Kampung Temenggungan

*Bachtiar Djanan M. dan Tri Andri Marjanto*

Kampung Temenggungan adalah sebutan untuk Kelurahan Temenggungan, Kecamatan Banyuwangi (kota), Kabupaten Banyuwangi. Kampung ini merupakan sebuah kelurahan yang terletak tepat di jantung Kota Banyuwangi, tepatnya di belakang area pendopo Kabupaten Banyuwangi dan merupakan salah satu kelurahan terkecil di kabupaten ini yang dibatasi jalan lingkar mengelilingi kampung, dengan gang-gang sempit di dalam kampung padat penduduk. Kampung Temenggungan merupakan salah satu kampung pertama yang dibangun pada saat dipindahkannya pusat pemerintahan Kadipaten Blambangan dari Ulupampang (Muncar) ke daerah hutan Tirtaganda, yang saat ini menjadi wilayah Kota Banyuwangi, pada era Bupati Mas Alit (Raden Tumenggung Wiraguna I) pada tahun 1774. Pendopo Kabupaten Banyuwangi dulunya merupakan pendopo Kadipaten Blambangan, dan Kampung Temenggungan merupakan area pendukung sebagai tempat bermukim bagi para pejabat pemerintahan maupun pengurus rumah tangga pendopo kabupaten.

Semenjak masa lalu, kampung ini telah dikenal sebagai salah satu pusat dari berbagai aktivitas seni dan budaya di Kabupaten Banyuwangi. Kerajinan batik di kampung ini telah berkembang secara turun-temurun, demikian pula kesenian yang sampai saat ini tumbuh subur di Kampung Temenggungan juga merupakan warisan turun-temurun dari para pendiri kampung ini.

## **Kampung Gendjer-gendjer**

Pada era tahun 50-60-an, di kampung ini berkembang pesat kelompok kesenian Sri Muda (Seni Rakyat Indonesia Muda), pimpinan Muhammad Arif, yang mengembangkan tarian dan lagu-lagu Banyuwangi dengan diiringi musik angklung Banyuwangi. Muhammad Arif adalah pencipta lagu “Gendjer-gendjer”

yang kemudian dilarang dinyanyikan pada masa pemerintahan orde baru karena dianggap identik dengan PKI.

Lagu “Gendjer-Gendjer” diciptakan Muhammad Arif pada tahun 1942, lirik lagu ini menceritakan tentang sayuran genjer (*limnocharis flava*) yang menjadi makanan rakyat, saat pendudukan Jepang di Banyuwangi pada tahun 1942. Jepang menguras kekayaan alam Banyuwangi sampai rakyat menjadi miskin, kelaparan, dan terpaksa memakan sayur genjer yang tumbuh liar di persawahan. Sekitar tahun 1960-1965-an, lagu ini pernah direkam dan dinyanyikan oleh Bing Slamet dan Lilis Suryani dan tenar hingga beberapa waktu.

Kelompok kesenian Sri Muda bernaung di bawah Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat), sebuah organisasi massa di bawah PKI. Kelompok seni ini menjadi kiblat kesenian di Banyuwangi. Mereka kerap melatih musik dan tarian bagi kelompok kesenian dari kampung-kampung lain di Banyuwangi, bahkan dari luar Banyuwangi.

## **Stigma Berkepanjangan**

Tahun 1950-1960-an menjadi era emas bagi kesenian di Kampung Temenggungan. Kejayaan kesenian ini berlangsung sampai tahun 1965. Setelah meletusnya G-30S PKI, banyak seniman Lekra yang ditangkap, dibunuh, ataupun hilang, walaupun sebenarnya sebagian besar dari mereka tidak tahu-menahu tentang politik. Kegiatan berkesenian pun sempat dilarang di seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi, terutama di Kampung Temenggungan. Kesenian di kampung ini pun vakum bertahun-tahun dan baru mulai dihidupkan kembali pada tahun 1977.

Setelah kejadian tahun 1965, Kampung Temenggungan mendapatkan stigma sebagai “kampung PKI” atau “kampung merah”. Stigma ini menimbulkan banyak masalah baru, seperti KTP warga kampung ini “tidak laku” untuk melamar pekerjaan, terutama untuk mendaftar PNS, belum lagi warga kampung ini seringkali “kurang diterima” dalam urusan perjodohan, tak sedikit pernikahan yang digagalkan karena warga daerah lain di Banyuwangi “alergi” punya calon menantu warga Kampung Temenggungan. Dampaknya, banyak warga yang menganggur dan hanya bekerja serabutan. Muncul berbagai masalah sosial, seperti narkoba dan minuman keras yang sudah menjadi kehidupan kampung sehari-hari dan dilakukan secara terbuka di jalanan kampung, perjudian, togel, menggantungkan hidup dari “koperasi rentenir”, banyak rumah-rumah beralih kepemilikan, dijual untuk bayar hutang, digadaikan, disita bank, dan lain-lain.

Temenggungan menjadi kampung di jantung Kota Banyuwangi yang “tersisih” oleh stigma sejarah masa lalu. Kampung ini kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah, bahkan konon menjadi lurah di kampung ini serasa menjadi “lurah yang

terbuang”. Kampung ini juga mendapat julukan “Kampung Texas” karena beraneka masalah sosial yang melekat dalam kehidupan keseharian warga kampung.

Sebagian warga merasa malu dengan identitas mereka sebagai warga Kampung Temenggungan. Bahkan warga yang ingin keluarganya “hidup sehat” memilih untuk pindah dari Kampung Temenggungan bila memiliki kesempatan dan dana.

## **Harta Karun Tersembunyi**

Dalam kondisi yang rumit seperti itu, ternyata masih ada beberapa “dampak positif” yang patut disyukuri, seperti hidupnya kegiatan kesenian yang menjadi “pelarian” bagi sebagian warga yang tak mendapatkan ruang dalam pekerjaan formal. Hampir setiap sore dan malam hari, jalanan kampung menjadi “panggung” warga dalam berkesenian. Kesenian tradisional tumbuh subur dalam kehidupan keseharian warga, tak lupa ditemani minuman keras arak yang diteguk secara bergantian.

Selain itu, karena tidak terlalu “terjamah” orang dari luar kampung, masih banyak rumah kuno berusia lebih dari 100 tahun yang bisa dijumpai di sudut-sudut kampung, baik yang berarsitektur kolonial Belanda, rumah-rumah “jengki” era peralihan pascakemerdekaan, dan rumah-rumah Osing kuno dari kayu yang masih cukup utuh, walaupun banyak yang kurang terawat. Rumah Bupati Banyuwangi kelima, KRT (Kanjeng Raden Tumenggung) Pringgokusumo, yang menjabat pada tahun 1867-1881 juga masih tegak berdiri di sebuah gang sempit. Dulu, di lokasi tersebut, bangunan bergaya arsitektural Belanda ini merupakan satu-satunya bangunan yang ada, tapi kini telah berubah menjadi sebuah pemukiman padat. Meskipun sudah dilakukan renovasi, sebagian besar ruangan di rumah utama yang berusia lebih dari 150 tahun ini masih tetap utuh sesuai aslinya, walaupun dalam kondisi kurang terawat.

Selain kesenian tari dan musik, kampung ini juga dikenal sebagai kampung batik. Kerajinan batik yang dikerjakan di rumah-rumah warga di gang-gang sempit telah berkembang secara turun-temurun. Batik dari Kampung Temenggungan yang dikenal sebagai batik tertua di Banyuwangi, dulunya dibuat untuk memenuhi kebutuhan seragam bagi pejabat dan pegawai pemerintahan.

Tidak hanya batik, kampung ini menyimpan berbagai potensi lain, seperti pencak silat Suaka Pasung Laksa yang merupakan kelompok pencak silat tertua di Banyuwangi, aneka kuliner hasil masakan warga kampung yang lezat, baik di warung-warung maupun masakan rumahan, dan ada juga sumur Sri Tanjung yang konon berbau wangi pada saat-saat tertentu dan menjadi legenda asal-usul nama Kota Banyuwangi. Semua ini menjadi “harta karun” dari kelurahan kecil seluas 15,90 hektare ini.

## **Re-branding Temenggungan**

Bulan Oktober tahun 2015 komunitas Hidora mengenal kampung ini dan masuk untuk pertama kalinya ke kelurahan yang dihuni oleh sekitar 700 KK ini. Tim Hidora langsung bisa merasakan berbagai potensi unik yang terpendam, berikut aneka permasalahan yang ada di kampung, setelah berkeliling dan blusukan ke kampung dan berbincang-bincang dengan warga di warung kopi, di balai desa, di tempat-tempat nongkrong warga, serta di rumah-rumah warga.

Dari hasil pemetaan yang dilakukan, sudah mulai bisa dirumuskan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk melakukan *re-branding* kampung, karena keresahan warga Kampung Temenggungan adalah mengenai “identitas kampung” mereka. Sebagian besar warga sudah lelah dengan stigma masa lalu yang terus “menjerat” mereka. Mereka sudah bosan dengan beragam pandangan miring tentang kampung tempat mereka tinggal.

Berdasarkan analisis hasil pemetaan potensi dan masalah di kampung ini, Hidora mengusulkan konsep pengembangan wisata kampung, yang memiliki beberapa tujuan, antara lain untuk membangun *brand image* baru Kampung Temenggungan, mengangkat potensi-potensi kampung yang selama ini terkubur, membangun kebanggaan warga terhadap kampungnya, mengembangkan kualitas sumber daya manusia, membuat aktivitas yang produktif bagi warga sebagai salah satu solusi permasalahan ekonomi warga, dan memotong mata rantai masalah sosial antara generasi tua dan anak-anak.

Beberapa kali pertemuan formal diselenggarakan antara Hidora bersama warga dan pihak kelurahan, bergantian dari kelompok ketua RT/RW, tokoh masyarakat, kelompok ibu-ibu, kelompok seniman, sampai kelompok para “preman”. Dalam pertemuan-pertemuan ini, selain dibahas penggalian potensi dan masalah di kampung, digali pula apa yang sebetulnya menjadi keinginan dan harapan warga, sekaligus mensosialisasikan konsep wisata kampung.

Semua pihak sepakat untuk membuat *branding* baru bagi kampung, sampai mengerucut pada pilihan tiga *branding*, yaitu: Kampung Batik Temenggungan, Kampung Seni Budaya Temenggungan, dan Kampung Wisata Temenggungan. Dalam pembahasan, usulan *branding* kampung batik dan kampung seni budaya dianggap masih membawa identitas masa lalu dan secara psikologis masih bisa menimbulkan trauma masa lalu. Akhirnya dipilihlah Kampung Wisata Temenggungan, disingkat Kawitan. Selain sebagai singkatan dari Kampung Wisata Temenggungan, kata “kawitan” (*kawitan* berarti asal mula, *-bahasa Jawa*) dianggap mewakili sejarah Temenggungan, sebagai kampung pertama yang dibangun di wilayah Banyuwangi kota, saat dipindahkannya pusat pemerintahan dari Ulupampang ke Banyuwangi kota (dulu hutan Tirtaganda) pada tahun 1774.

## **Lembaga Kawitan**

Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mengelola sumber daya manusia di Kawitan. Di tahap awal dibentuklah lembaga Kawitan. Lembaga ini diistilahkan sebagai lembaga adat karena berada di luar sistem organisasi yang ada di pemerintah kelurahan, walaupun belum sepenuhnya merupakan hasil musyawarah seluruh warga karena baru dibahas pada tataran perwakilan tokoh masyarakat dan kelompok-kelompok ibu-ibu, pemuda, seniman, dan para preman. Namun, untuk sementara lembaga ini dianggap cukup representatif.

Lembaga Kawitan berisi perwakilan tokoh masyarakat, perwakilan “kekuatan” kelompok informal, perwakilan seniman, perwakilan kelompok pemuda, perwakilan ibu-ibu, dan perwakilan warga yang tinggal di area yang secara administratif disebut “lingkungan” (jika di desa disebut dusun). Beberapa anggota Tim Hidora diminta masuk dalam Lembaga Kawitan sebagai penasihat, bersama Pak Lurah dan beberapa sesepuh kampung. Lembaga Kawitan dipersiapkan untuk menjadi motor penggerak dalam merencanakan dan merancang program wisata Kampung Temenggungan, berikut segala keterkaitannya dengan berbagai hal seperti urusan keamanan, pengembangan UMKM, kaderisasi kesenian untuk anak-anak, dan lain-lain.

## **Dari Pasar Minggu ke Festival**

Program awal yang dikerjakan lembaga Kawitan adalah menghidupkan kembali aktivitas Pasar Minggu (dua mingguan), sebuah kegiatan yang dulu pernah dijalankan tapi berhenti di tengah jalan karena tidak memberi hasil sesuai harapan. Pasar Minggu coba dikemas kembali. Selain menjual kuliner produk warga kampung, Pasar Minggu dikembangkan dengan tambahan aktivitas panggung kesenian. Melalui jejaring Hidora, beberapa kali didatangkan bintang tamu dari luar Banyuwangi, antara lain pemain saxophone dari Amerika yang kebetulan datang ke Indonesia, musisi dari Kota Malang dan Bali.

Dengan hadirnya musisi dari luar Banyuwangi, dan ditunjang promosi yang lebih maksimal menggunakan sosial media, kegiatan Pasar Minggu bisa menjadi lebih semarak. Cukup banyak pengunjung dari luar kampung yang hadir ke Kampung Temenggungan. Ini cukup menggembirakan mengingat sebelumnya orang luar kampung rata-rata takut atau tidak nyaman masuk ke Kampung Temenggungan, karena citra negatif kampung ini.

Dalam semua aktivitas ini, Tim Hidora bersama beberapa anak muda kampung selalu rajin melakukan pendokumentasian, baik foto maupun video. Selain itu, dibuat juga tulisan pendek yang menceritakan aktivitas di Kampung Temenggungan untuk di-*posting* di sosial media. Strategi komunikasi publik seperti ini cukup efektif

dan jitu untuk membuat orang-orang luar Kampung Temenggungan penasaran dan berminat datang di kegiatan Pasar Minggu.

Setelah cukup sukses menyelenggarakan beberapa kali kegiatan Pasar Minggu setiap dua minggu sekali, lembaga Kawitan makin bersemangat. Mereka merencanakan membuat *event* yang lebih besar, yaitu festival seni budaya, sebagai sebuah langkah untuk mempromosikan potensi Kampung Temenggungan dalam skala yang lebih luas. Dalam *rembug* evaluasi Pasar Minggu di pertengahan bulan Desember 2015, lembaga Kawitan, pihak kelurahan, dan Hidora bersepakat untuk menyelenggarakan kegiatan festival seni budaya pada bulan keempat pendampingan, yaitu pada tanggal 16-17 Januari 2016. Festival seni budaya ini diberi judul Festival Kampung Temenggungan.

Mulailah disusun kepanitiaan festival berikut *job desk* masing-masing bidang di kepanitiaan. Ketua panitia dipilih dari lembaga Kawitan, yang didampingi wakil ketua panitia dari Hidora, dengan anggota divisi-divisi kepanitiaan gabungan antara lembaga Kawitan, pihak Kelurahan, dan Hidora, Pak Lurah sebagai pelindung kegiatan, dan beberapa sesepuh kampung serta Ketua Hidora sebagai penasihat.

## **Gotong Royong**

Empat konsep utama kegiatan Festival Kampung Temenggungan adalah mengajak keterlibatan warga kampung untuk bergotong royong dalam mempersiapkan festival, membuat sarana berlatih dan simulasi aktivitas wisata kampung, menggali dan menampilkan berbagai potensi yang ada di Kampung Temenggungan, dan melibatkan partisipasi seniman dari berbagai kota/kabupaten serta mancanegara untuk mendukung upaya warga membangun kampungnya.

Untuk memberikan pemahaman kepada warga, maka pihak Hidora, pihak kelurahan, dan lembaga Kawitan melakukan serangkaian sosialisasi kepada warga, baik dalam forum pertemuan formal, pertemuan dengan ketua RT/RW, bertemu dengan ibu-ibu PKK, berdialog dengan kelompok anak muda, dan berdiskusi dengan kelompok-kelompok informal secara *door to door*. Proses sosialisasi ini dilakukan secara bergerilya. Hampir setiap sore dan malam hari dilakukan proses sosialisasi kepada kelompok-kelompok warga yang belum memahami atau yang belum mengetahui informasi ini. Ternyata hasil dari sosialisasi ini sangat menggembirakan karena sebagian besar warga mendukung kegiatan ini dan ingin berpartisipasi.

Konsumsi selama persiapan dan pelaksanaan acara merupakan sumbangan dari warga yang dikumpulkan melalui masing-masing RT. Dibuatlah jadwal giliran penyediaan logistik dari setiap RT. Dengan pola seperti ini, panitia tidak mengeluarkan dana untuk membeli konsumsi dan warga pun juga tidak merasa dibebani karena setiap keluarga pada prakteknya hanya menyumbangkan 3-5 porsi

nasi kotak saja. Jenis masakannya pun bebas, yang penting pantas. Warga juga memfasilitasi kebutuhan akomodasi para pengisi acara. Ada sekitar 30 rumah warga yang masing-masing menyediakan 1-2 kamar di rumahnya untuk tamu dengan kondisi apa adanya, yang penting bersih dan layak. Ke depannya, rumah-rumah ini akan diorientasikan untuk dipersiapkan sebagai *homestay* bila wisata Kampung Temenggungan sudah berjalan. Yang perlu dilakukan panitia adalah melakukan survei rumah warga untuk mendata fasilitas yang tersedia dan dan mengklasifikasi kelas-kelas kamarnya.

Pengerjaan panggung, dekorasi, dan aksesoris panggung, juga dilakukan secara bersama oleh warga. Ada warga yang menyumbang bambu dan cat, ada yang meminjamkan kain-kain, tanaman untuk dekorasi, dan *genjot* (panggung kayu), karpet, dan kebutuhan lainnya. Semua serba sumbangan dan pinjaman dari warga. Dengan penggalangan potensi dan gotong royong ini, praktis biaya riil yang dikeluarkan oleh panitia tidak banyak, hanya biaya untuk sewa *sound system*, lampu untuk panggung, dan biaya fotokopi pamflet publikasi acara. Selebihnya merupakan hasil penggalangan sumbangan dan pinjaman dari warga kampung yang dilakukan dengan sukarela dan atas dasar kesadaran untuk turut berpartisipasi, tanpa ada paksaan.

Selain itu, dipersiapkanlah beberapa anak muda kampung sebagai *Liaison Officer* (LO), yang bertugas untuk mendampingi tamu-tamu para pengisi acara. Para LO sengaja dipilih dari kalangan anak-anak muda yang memiliki keterampilan berkomunikasi. Mereka ini nantinya setelah kegiatan festival selesai, diorientasikan untuk menjadi *guide* dan humas dalam kegiatan wisata Kampung Temenggungan.

## **Festival Kampung Temenggungan**

Dengan persiapan kurang dari satu bulan, akhirnya Festival Kampung Temenggungan dapat terselenggara dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Walaupun tidak sempurna, proses kerja keorganisasian dalam kepanitiaan berjalan maksimal. Dalam waktu singkat, warga kampung, khususnya para aktivis lembaga Kawitan, belajar banyak mengenai bagaimana mengorganisasi kegiatan yang cukup kompleks.

Dalam Festival Kampung Temenggungan, warga menampilkan berbagai potensi seperti musik patrol, gamelan anak-anak, kesenian barong Osing anak-anak, pencak silat, praktik membatik, dan aneka produk UMKM serta produk kuliner yang dijual di stan-stan warga. Sementara jumlah pengisi acara dari luar Banyuwangi mencapai lebih dari 25 orang seniman yang berasal dari berbagai daerah seperti Malang, Situbondo, Tuban, Jogja, Bandung, Jakarta, Ubud Bali, Denpasar Bali, Penajam Paser Utara (Kalimantan Timur), dan NTT, serta beberapa seniman mancanegara

yang berasal dari Australia, Perancis, Inggris, Cyprus, Amerika, Lithuania, Republik Ceko, dan Swiss. Seperti halnya warga yang bergotong-royong, para seniman pun hadir secara sukarela, dengan biaya masing-masing, sebagai bentuk dukungan terhadap apa yang tengah diperjuangkan warga Kampung Temenggungan.

Berbagai pertunjukan menarik disajikan oleh para seniman, seperti tari kontemporer, pencak silat, permainan api, puisi, musik kontemporer dengan aneka ragam alat musik yang berasal dari berbagai daerah dan negara. Terjadi berbagai bentuk kolaborasi kesenian antarseniman yang baru saja saling mengenal. Dua panggung yang ditempatkan di jalanan kampung ini berhasil menyajikan tampilan-tampilan kesenian yang menarik, unik, berkesan, dan berkelas.

Selama dua hari kampung ini ramai dikunjungi ribuan orang, baik warga Kampung Temenggungan sendiri, orang-orang dari luar kampung, wisatawan, sampai wartawan. Warga kampung yang berdagang kuliner maupun produk UMKM mendapatkan kelimpahan rezeki karena dagangannya laris manis. Festival yang diselenggarakan secara swadaya dan mandiri oleh warga kampung tanpa dukungan dana dari pemerintah ini diapresiasi publik dengan sangat positif.

## **Deklarasi Japung Nusantara**

Dalam salah satu rangkaian kegiatan Festival Kampung Temenggungan, pada hari Minggu pagi, 17 Januari 2016, di Balai Kelurahan diselenggarakan diskusi yang diikuti oleh perwakilan seniman dari berbagai kampung yang hadir. Diskusi ini melahirkan kesepakatan bersama pembentukan Jaringan Festival Kampung Nusantara sebagai jejaring ataupun forum komunikasi antarkampung.

Usai diskusi, dilakukan kirab budaya oleh para pengisi acara dan warga kampung yang mengenakan kostum tradisional dan membawa aneka alat musik sebagai tetabuhan, mulai kenong, gong, alat musik patrol, kendang, dan beberapa perangkat gamelan. Pawai budaya ini berangkat dari Balai Kelurahan, berjalan melalui jalan utama kampung, keluar ke jalan raya lingkaran kampung, dan berakhir di depan Pendopo Kabupaten Banyuwangi yang terletak di seberang Alun-alun Taman Sri Tanjung.

Di depan Pendopo Kabupaten Banyuwangi inilah, tepat pada jam 12.00 dideklarasikan terbentuknya Jaringan Festival Kampung Nusantara (yang di kemudian hari diubah menjadi Jaringan Kampung Nusantara). Deklarasi ini diawali dengan orasi singkat oleh Redy Eko Prastyo, penggagas jaringan antarkampung ini, kemudian dilanjutkan foto bersama dan penandatanganan spanduk Jaringan Festival Kampung Nusantara sepanjang tujuh meter yang dibuat secara mendadak sebelum kirab budaya berlangsung. Deklarasi ditutup dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Sebagai media komunikasi bersama, pascadeklarasi Jaringan Festival Kampung Nusantara di kegiatan Festival Kampung Temenggungan ini, dibuatlah grup *WhatsApp*, *Facebook*, dan *website*. Dari diskusi-diskusi di grup *WhatsApp*, berdasarkan berbagai pertimbangan dan masukan, akhirnya nama Jaringan Festival Kampung Nusantara diubah menjadi Jaringan Kampung Nusantara, disingkat Japung Nusantara.

## **Ruang Kolaborasi Budaya**

Kegiatan Festival Kampung Temenggungan membuahkan hasil sesuai harapan. Berbagai media, mulai dari media lokal, regional, sampai nasional, baik media cetak, radio, televisi, sampai media *online*, memuat liputan rangkaian kegiatan Festival Kampung Temenggungan dengan berbagai ulasan yang sangat positif. Nama Kampung Temenggungan bergaung luas.

Pascafestival, lahirlah gagasan dari salah satu pengisi acara Festival Kampung Temenggungan dari Bali untuk membuat paket wisata seni budaya. Selama beberapa hari, wisatawan belajar tari tradisional, pencak silat, musik tradisional, membatik, sejarah dan *spirit* budaya kampung, kemudian di hari terakhir dibuatlah pentas seni budaya kolaborasi antara wisatawan bersama warga. Paket wisata ini dipasarkan di Bali dengan membidik sasaran wisatawan mancanegara. Paket wisata seni budaya bertajuk *Motion and Dance Retreat* ini berhasil terlaksana sebulan setelah Festival Kampung Temenggungan. Walaupun jumlah peserta tidak mencapai target, hal-hal prinsip bisa tercapai, peserta dan warga pun puas dengan proses dan hasil kegiatan.

Selain itu, Kampung Temenggungan semakin dikenal di kalangan jejaring seniman nusantara, bahkan mancanegara. Tak sedikit seniman dari berbagai daerah di Nusantara dan seniman mancanegara yang kebetulan “berlintasan” di Banyuwangi, dari Bali ke Jawa, dan sebaliknya, meluangkan waktu untuk mampir di Banyuwangi selama 1-2 hari, untuk kemudian berkolaborasi dan pentas bersama seniman-seniman Kampung Temenggungan.

Seniman-seniman yang pernah mampir berkolaborasi dan pentas bersama seniman Kampung Temenggungan antara lain seniman dari Kota Malang, Batu, Situbondo, Tuban, Jogja, Bandung, Jakarta, Ubud, Denpasar, Mataram, sedangkan untuk seniman mancanegara antara lain dari Perancis, Lithuania, Jepang, Amerika, Inggris, Spanyol, Mesir, dan Rusia.

Kolaborasi seniman-seniman Nusantara dan mancanegara bersama seniman Kampung Temenggungan biasanya dilakukan dalam sebuah pentas kecil sederhana di jalanan kampung depan Balai Kelurahan, tanpa panggung dan hanya memanfaatkan gubuk bambu sebagai *backdrop*, ditambah lampu dan *sound system* ala kadarnya.

Kadang kolaborasi ini hanya berupa *jams session* latihan bersama tanpa pentas, yang terpenting adalah terjadinya “ruang komunikasi” lintas budaya melalui kesenian.

Aktivitas berkesenian ini semakin membuat Kampung Temenggungan hidup dan berkembang menjadi potensi utama kampung dan membangun citra positif di mata masyarakat Banyuwangi. Warga kampung kini bangga dengan identitas mereka sebagai warga Temenggungan dan tidak lagi merasa rendah diri dan termarginalkan.

## **Paket Wisata Kampung**

Seiring dengan maraknya aktivitas kesenian di Kampung Temenggungan, lembaga Kawitan dan Hidora mulai merencanakan pengembangan paket wisata Kampung Temenggungan. Dirancanglah bentuk pertunjukan seni budaya sederhana yang bisa ditawarkan kepada wisatawan sebagai paket wisata dengan materi berupa potensi kesenian yang sudah ada. Dibuatlah paket wisata menonton pertunjukan seni budaya berupa gamelan anak-anak, kesenian barong Osing, dan musik akustik hasil kolaborasi dengan kesenian patrol, dan diakhiri dengan acara menari bersama antara seniman, tamu wisatawan, dan warga. Semua kegiatan itu memakan waktu sekitar 1,5-2 jam. Pertunjukan ini dipaketkan dengan makan siang, makan malam, atau *coffee break*.

Selain itu, aktivitas latihan kesenian yang dilakukan warga hampir setiap hari di Kampung Temenggungan juga ditawarkan sebagai paket wisata yang bisa dipaketkan pula dengan makan siang, makan malam, atau *coffee break*. Bedanya jika paket wisata menonton pertunjukan, para pemainnya menggunakan seragam dan ditunjang *sound system*, dalam latihan kesenian para pemainnya tidak berseragam dan tidak menggunakan *sound system*. Jika pertunjukan ada biaya yang dipatok, untuk menonton latihan kesenian sifatnya hanya berupa donasi seikhlasnya.

Menu lain dari wisata Kampung Temenggungan adalah *heritage tour*, yaitu wisata menjelajah kampung, masuk ke gang-gang kecil mengunjungi rumah-rumah kuno milik warga yang berusia lebih dari 100 tahun, melihat aneka koleksi barang antik atau koleksi keris milik warga, dan berdiskusi tentang sejarah kampung maupun sejarah rumah kuno dan koleksi benda antik. Tak hanya itu, dibuatkan juga paket wisata batik. Paket ini berupa *tour* ke rumah-rumah warga di gang-gang sempit Kampung Temenggungan untuk melihat koleksi batik, proses membatik, dan belajar membatik langsung pada warga kampung yang memang berprofesi sebagai pembatik. Aktivitas membatik di kampung ini memang sudah menjadi pekerjaan warga turun-temurun. Wisata unik lainnya di kampung ini adalah paket wisata menjaring ikan. Sebagian warga kampung memang hobi menangkap ikan menggunakan jaring di pantai yang jaraknya tidak jauh dari kampung. Wisatawan

diajak berjalan ke pantai dan diajari cara menjaring ikan. Hasil ikan tangkapannya dibawa ke kampung untuk digoreng dan dimakan bersama-sama.

Selain itu, pada tahun 2015 Kampung Temenggungan pernah memenangkan lombalayang-layangse-kabupatenBanyuwangi. Layangan yang menang itu berbentuk penari gandrung berukuran hampir tiga meter dan untuk menerbangkannya butuh beberapa orang untuk menarik talinya. Bermain layang-layang gandrung raksasa di pantai juga menjadi salah satu paket wisata yang ditawarkan di wisata Kampung Temenggungan. Dari jenis-jenis paket tersebut, urutan paket wisata dari yang paling laris sampai yang kurang laku adalah: paket wisata pertunjukan kesenian, paket wisata latihan kesenian, *heritage tour*, batik, bermain layang-layang, dan menjaring ikan. Rata-rata wisata ini dikombinasikan dengan paket makan malam, makan siang, atau *coffee break*.

## **Pemerataan Rezeki**

Dengan arahan dari Hidora, lembaga Kawitan mengatur pembagian honor setiap orang yang terlibat dalam sebuah paket wisata. Jumlahnya tidak harus besar, tetapi tetap harus cukup layak untuk ukuran warga kampung. Selain itu, warga selalu harus dilibatkan secara bergiliran untuk menghindari monopoli oleh orang-orang tertentu. Para pemuda yang menjadi *guide*, seksi dokumentasi, seniman yang tampil, petugas dekorasi, personil yang bertugas jaga keamanan, warga yang rumahnya menjadi tempat kunjungan tamu, semua yang ikut berkeringat harus kebagian rezeki.

Bila tamu memesan konsumsi, maka akan ada beberapa keluarga yang mendapatkan tugas memasak sehingga tidak dimonopoli oleh satu keluarga. Ada yang bertugas memasak nasi, sayur, daging atau ikan, mempersiapkan minuman, menyediakan buah dan jajanan. Pengaturan siapa yang dilibatkan dilakukan dengan mempertimbangkan keterampilan serta kualifikasi warga dan disesuaikan kebutuhan.

Dengan aturan main seperti itu, maka manajemen keuangan lembaga Kawitan harus dilakukan secara terbuka. Semua pemasukan dan pengeluaran keuangan harus tercatat rapi, dengan dilengkapi tanda terima, dan semua anggota tim lembaga Kawitan harus dapat mengakses informasi laporan keuangan. Metode ini memberi hasil yang cukup efektif, warga cukup antusias terlibat dalam pengelolaan wisata Kampung Temenggungan. Namun, proses berjalannya pola aturan main pengelolaan wisata kampung berorientasi pada pemerataan rezeki ini juga tidak mudah. Tim Hidora harus bisa menjadi “wasit” yang adil dan jeli untuk menjaga agar proses ini bisa berjalan dengan baik dan benar.

## Kampung Preman? Tidak Lagi!

Sebelum adanya kegiatan wisata Kampung Temenggungan, salah satu julukan kampung ini adalah “Kampung Texas” atau “Kampung Preman”. Bagaimana tidak, setiap harinya di kampung ini warga menenggak minuman keras di beberapa sudut kampung, trotoar, emper toko, dan di ujung-ujung gang. Mulai sore hingga malam hari minuman keras diminum secara terbuka.

Minuman keras diminum oleh anak muda, orang dewasa, sampai kakek-kakek. Tak jarang sekeluarga bapak, anak, dan kakek, duduk bersama meminum arak sambil bermain musik dan bernyanyi. Warga yang mabuk berat kemudian muntah ataupun jatuh tertidur di pinggir jalan. Itu adalah pemandangan yang lumrah di kampung ini. Minuman keras, terutama jenis arak, dapat dengan mudah diorder melalui telepon dan diantar sampai di tempat. Demikian pula dengan narkoba yang menjadi barang yang tidak sulit didapat, meskipun tidak ditawarkan secara terbuka. Pada masa itu narkoba tidak terlalu diminati karena selain harganya mahal, sudah ada beberapa orang seniman di kampung ini yang meninggal dunia akibat *over dosis* narkoba. Para orang tua yang hobi menenggak minuman keras pun tidak suka jika anaknya menggunakan narkoba, tapi kalau minuman keras tidak apa-apa.

Banyak warga yang berperawakan cukup seram, tak sedikit yang bertato, dan terlihat jelas karena kebanyakan kaum pria di kampung sehari-harinya bertelanjang dada akibat udara yang panas. Belum lagi aktivitas judi juga seringkali dilakukan warga secara terbuka. Ini semua menambahkan kesan angker. Namun, di balik penampilan yang “sangat” ini, pada dasarnya warga di kampung ini adalah orang yang baik, ramah terhadap orang lain, dan menghormati tamu. Mereka sangat mengapresiasi apabila ada orang luar kampung yang datang ke kampungnya. Bila orang bertamu ke rumah warga, aneka suguhan kopi dan kue-kue selalu “dipaksakan” diadakan untuk disuguhkan kepada tamu.

Saat kegiatan wisata Kampung Temenggungan mulai berkembang, tanpa arahan Hidora, warga ternyata berinisiatif membuat kesepakatan, apabila ada kunjungan tamu, kampung harus bersih dari botol minuman keras dan orang mabuk. Mabuk tidak dilarang, tapi bila ada tamu, silakan mabuk di rumah masing-masing, tidak boleh di ruang publik. Jika ada tamu wisata yang menginap di kampung, selama tamu belum pulang tidak boleh ada orang yang mabuk di tempat umum. Untuk itu, harus ada warga yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban kampung setiap ada kunjungan tamu. Dipilihlah koordinator keamanan dari warga yang dikenal sebagai “rajanya” pemabuk dan dedengkotnya preman. Ini merupakan cara mengambil keputusan yang sangat unik dan ternyata kesepakatan ini benar-benar bisa terlaksana dengan baik. Selain itu, mereka juga bersepakat, ketika ada tamu warga harus bersikap ramah, murah senyum, menyapa tamu, tidak boleh terlihat

seram, dan warga tidak boleh duduk bergerombol karena akan bisa membuat tamu merasa takut atau kurang nyaman.

Satu hal yang menjadi pesan penting yang disampaikan Tim Hidora kepada warga adalah jangan pernah menganggap wisatawan sebagai mesin ATM yang uangnya boleh diperas. Tamu wisata harus dianggap sebagai kawan bahkan saudara, harus dilayani dengan tulus, dan jangan pernah menawarkan sesuatu kepada wisatawan dengan memaksa, serta jangan pernah membeda-bedakan harga untuk tamu lokal dan tamu mancanegara. Pesan ini ternyata benar-benar dipraktikkan oleh warga. Seiring Kampung Temenggungan yang makin ramai dikunjungi tamu wisata, secara otomatis aktivitas orang mabuk di kampung ini semakin berkurang, minimal tidak terlihat lagi di ruang publik. Wajah kampung pun tak lagi terlihat seram. Tamu senantiasa merasa nyaman saat datang di kampung ini, bahkan ketika mereka berjalan-jalan ke berbagai sudut kampung.

Perubahan drastis terjadi pada beberapa warga kampung. Semula mereka ini sangat hobi mabuk, tetapi ketika mereka terlibat penuh dalam semua proses kegiatan wisata Kampung Temenggungan, mereka menyatakan diri akan berhenti minum minuman keras dan ada pula yang bertekad untuk berhenti berjudi. Lebih mengharukan lagi, ada salah satu warga yang meminta izin dan doa restu kepada Tim Hidora untuk bisa berhenti dari segala kehidupan yang negatif dan ia benar-benar mencoba “hidup baru” yang halal serta barokah dengan membuka usaha warung kopi yang dinamai Warung Hidora. Sampai hari ini, Warung Hidora masih buka dan cukup ramai dikunjungi pembeli.

## **Promosi Melalui *Story Telling***

Sejak masuknya Hidora ke Kampung Temenggungan, dokumentasi atas semua proses yang dijalankan dan semua konten yang ada di kampung ini selalu dilakukan. Dokumentasi meliputi berbagai pertemuan, baik formal maupun informal, kegiatan survei, kepanitiaan acara, aneka potensi kampung (kesenian, rumah-rumah kuno, koleksi barang antik), keseharian warga, dan kegiatan maupun kunjungan tamu wisata. Dokumentasi ini ada yang berupa video, foto, maupun notulensi pertemuan. Dokumentasi dilakukan dengan menggunakan kamera DSLR, kamera *handphone*, termasuk rekaman audio pertemuan-pertemuan dengan menggunakan *handphone*. Tim Hidora mendorong beberapa anak muda kampung untuk “sadar proses dokumentasi” dan ikut serta melakukan pendokumentasian. Mereka diberi pemahaman bahwa pendokumentasian adalah sesuatu yang sangat penting dan hasil dokumentasi merupakan harta karun yang sangat berharga. Secara berkala, hasil-hasil dokumentasi ini dipublikasikan di sosial media, baik *Facebook*, *Instagram*,

dan *Youtube*. Inilah bentuk teknis promosi paling sederhana, mudah, dan murah yang bisa dilakukan oleh Tim Hidora dan warga Temenggungan.

Tim Hidora cukup sering membuat *workshop* atau diskusi kecil-kecilan secara informal mengenai dasar-dasar teknis pendokumentasian foto dan video, teknik pengambilan gambar yang baik, teknik pengambilan gambar yang bisa “bercerita”, sekaligus mengevaluasi bersama-sama hasil dokumentasi yang dibuat. Selain itu, Tim Hidora juga membagikan pengetahuan kepada anak-anak muda mengenai cara memanfaatkan media sosial sebagai media promosi kampung, prinsip-prinsip teknik promosi yang efektif dan mengena, tips dan trik membuat potensi kampung bisa viral di media sosial, dan berbagai tema terkait.

Konsep promosi Kampung Temenggungan adalah *story telling* atau bercerita tentang kampung melalui video pendek, foto, dan tulisan-tulisan singkat pada status di media sosial. Selain potensi utama yang ada di kampung, ditampilkan pula hal-hal keseharian, seperti aktivitas penjual warung mempersiapkan dagangannya, kegiatan warga yang hobi menjaring ikan di laut, suasana warung kopi, profil singkat warga kampung yang memiliki kisah sejarah atau keunikan tertentu. Setiap sudut kampung diupayakan untuk dijelajahi dan didokumentasikan.

Selain ditampilkan di sosial media, sesekali hasil dokumentasi foto maupun video yang dibuat oleh Tim Hidora dan tim dokumentasi Kawitan ditayangkan di LCD *projector* dalam acara nonton bareng, biasanya pada acara nonton bareng sepak bola atau ditayangkan sebelum pentas paket wisata seni budaya. Hal ini cukup efektif untuk mengomunikasikan kepada warga tentang perkembangan dari program yang sedang dilakukan lembaga Kawitan bersama Tim Hidora, sekaligus sebagai hiburan bagi warga, dan sebagai alat untuk semakin membangun kebanggaan warga terhadap kampungnya.

Selain itu, setiap ada kegiatan di kampung, baik aktivitas kolaborasi kesenian antara seniman Temenggungan dan seniman-seniman Nusantara ataupun seniman mancanegara, dan kegiatan paket wisata seni budaya yang dipesan oleh wisatawan, dibuat pers rilis yang dibagikan kepada rekan-rekan dari berbagai media massa yang diundang untuk hadir. Dalam pers rilis selalu disampaikan latar belakang, tujuan, narasi potensi kampung, deskripsi program wisata Kampung Temenggungan, dan tentang kegiatan yang dilaksanakan. Pers rilis seperti ini bertujuan untuk “menanamkan” informasi secara terus-menerus tentang apa, siapa, kenapa, untuk apa, dan bagaimana Kampung Temenggungan pada kalangan pers. Tak jarang dari Hidora atau lembaga Kawitan menyampaikan usulan kepada wartawan tentang potensi kampung atau tokoh-tokoh yang unik dan menarik untuk diliput. Dengan cara ini, berbagai media mulai rajin membuat liputan dan ulasan tentang Kampung Temenggungan beserta kegiatan yang dilaksanakannya.

Kampung ini telah diliput oleh berbagai media, mulai dari media lokal Banyuwangi, regional, nasional, sampai internasional. Beberapa kali media nasional dan media internasional membuat liputan tentang Kampung Temenggungan, antara lain *TV NHK Jepang* dan *National Geographic*. Kampung Temenggungan bahkan pernah dipilih untuk masuk dalam program *talkshow* andalan CNN Indonesia yaitu *Insight with Desi Anwar*, pada bulan November 2016.

## **Duta Besar Seni Budaya**

Berbagai aktivitas kesenian dan wisata Kampung Temenggungan yang marak di media sosial dan berbagai media massa, melalui jejaring Hidora dan Jaringan Kampung Nusantara, pada bulan Mei 2016 seniman-seniman Kampung Temenggungan mendapatkan undangan untuk tampil dalam acara bergengsi Malang Jazz Festival 2016 di Kota Malang, berkolaborasi bersama artis nasional Trie Utami. Kesempatan ini sekaligus dijadikan sebagai cara mensosialisasikan Kampung Temenggungan ke ruang lingkup yang lebih luas. Dirancanglah sebuah strategi yang diistilahkan dengan Duta Besar Seni Budaya yang mempersiapkan kelompok seniman Kampung Temenggungan untuk dapat dan layak melakukan pertunjukan kesenian di luar kampung, luar kota, dan bahkan luar negeri.

Potensi kesenian musik (dengan bumbu tarian) dikemas dengan konsep unik, membawa nafas tradisional Banyuwangi, mudah diterima oleh berbagai generasi, dapat secara *luwes* berkolaborasi dengan musik modern maupun tradisional, dan memiliki kemasan tampilan yang mampu mencuri perhatian. Musik patrol dipilih untuk diutak-atik dan dikemas ulang, dikawinkan dengan musik keroncong Banyuwangi-an, musik jaz, dan sedikit warna musik *blues*. Musik hibrid ini dinamai Banyuwangi Jazz Patrol agar *marketable* dan merefleksikan warna musik mereka.

Musik patrol sendiri adalah musik tradisional berbasis bambu yang merupakan salah satu kesenian lama. Dinamakan musik patrol karena pada zaman penjajahan Belanda dulu memang menjadi alat patroli keamanan. Kayu atau bambu dipukul sambil berjalan berkeliling kampung dan supaya tidak bosan dikembangkan berbagai teknik memukul alat-alat patroli ini. Setelah Indonesia merdeka, musik patrol biasanya dimainkan di bulan Ramadhan. Dulu sebelum ada televisi, internet, dan *handphone*, warga kampung-kampung di Banyuwangi aktif memainkan musik patrol di bulan Ramadhan sambil berjalan keliling kampung untuk membangunkan orang makan sahur.

Musik patrol banyak berkembang di daerah berbasis masyarakat Madura, yaitu di pesisir utara Jawa Timur, dan daerah-daerah tempat orang keturunan Madura tinggal, seperti di Jember, Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, Banyuwangi, dan Malang. Setiap daerah mempunyai kekhasan masing-masing. Di Jember, Bondowoso,

Situbondo, biasanya alat musik patrol menggunakan kayu yang dilubangi. Ada juga yang menggunakan kentongan, yaitu bambu yang dilubangi agak lebar. Namun, musik patrol Banyuwangi berbeda. Alat musik utamanya bernama *katir*. Katir adalah penyebutan untuk bambu yang digunakan sebagai *cadik* (penyeimbang) perahu. Kemungkinan besar musik patrol di Banyuwangi semula dikembangkan oleh masyarakat nelayan pesisir yang rata-rata memang keturunan Madura. Bambu katir ini dipotong satu ruas dan dilubangi berupa celah kecil dua garis, sehingga alat ini memiliki beberapa variasi suara. Lain tempat memukul lain pula bunyinya.

Selain alat musik *katir*, instrumen lain yang digunakan Banyuwangi Jazz Patrol adalah *cello bass*, gitar akustik, cuk, ukulele, angklung Banyuwangi, *kluncing* (*triangle*), seruling (yang terbuat dari bahan pipa PVC), harmonika, *abasa*, dan *marakas*. Semua personil Banyuwangi Jazz Patrol berasal dari Kampung Temenggungan, kecuali pemain gitar dan pemain harmonika yang merupakan Tim Hidora.

Banyuwangi Jazz Patrol memilih memainkan lagu-lagu Banyuwangi kuno era tahun 60-70-an dengan kemasan *jazzy*, dengan salah satu tujuan yaitu untuk melestarikan lagu-lagu kuno Banyuwangi. Lagu-lagu lama biasanya memiliki tema lirik yang kuat, sayang kini banyak dilupakan, kalah dengan lagu-lagu baru yang seringkali kurang memiliki tema kuat, bahkan terkadang tidak lagi menggunakan nada *pentatonis slendro* Banyuwangi.

Dalam *event* Malang Jazz Festival 2016 yang dihadiri tak kurang dari 4.000 orang penonton ini, selain lima lagu yang mereka bawakan sendiri, Banyuwangi Jazz Patrol juga tampil berkolaborasi dengan musisi-musisi jaz papan atas yaitu Trie Utami, Nita Aartsen and Friends, Jean Sebastian (pemain terompet dari Perancis), dan seniman-seniman dari Jaringan Kampung Nusantara. Penampilan Banyuwangi Jazz Patrol mendapat apresiasi sangat bagus dari penonton.

Setelah tampil di Malang Jazz Festival 2016, Banyuwangi Jazz Patrol mulai sering mendapatkan undangan untuk tampil di luar Banyuwangi, seperti di kampus UIN Jember, di acara budaya Festival Kampung Cempluk di Malang, di Festival Argopuro Situbondo, dan juga di berbagai acara kampus di Banyuwangi. Ketika nama Kampung Temenggungan dan Banyuwangi Jazz Patrol makin berkibar di dunia sosial media, paket wisata seni budaya yang dikelola lembaga Kawitan makin laris dipesan tamu-tamu wisata, khususnya tamu grup, yang dipaketkan dengan makan siang, makan malam, ataupun *coffee break*.

## **Hampir Go International**

Viral di sosial media, beberapa musisi mancanegara tertarik datang ke Kampung Temenggungan untuk menjajal kolaborasi musik bersama Banyuwangi Jazz Patrol. Ada Junichi Usui (pemain biola dari Jepang), Rodrigo Parejo (pemain *flute* dari

Spanyol), dan Claude Colpaert (pemain terompet dari Perancis dan presiden jazz festival di Perancis Utara). Melalui Claude Colpaert, profil Banyuwangi Jazz Patrol masuk sebagai liputan dalam majalah *Impro Jazz*, sebuah majalah informasi musik yang terbit di Perancis.

Di bulan Agustus 2016, dalam rangka peringatan Proklamasi Kemerdekaan, lembaga Kawitan bersama Hidora menyelenggarakan pentas Jazz Patrol Kemerdekaan di depan Alun-alun Sri Tanjung Banyuwangi. Dalam acara ini ditampilkan Banyuwangi Jazz Patrol berkolaborasi dengan musisi dari Jepang, beberapa seniman nusantara, dan seniman Banyuwangi. Kemudian, melalui jejaring Hidora dan Jaringan Kampung Nusantara, Banyuwangi Jazz Patrol mendapatkan undangan untuk tampil di Malaysia dalam acara Rainforest World Music Festival di Sarawak dan Jazz Ampang di Kuala Lumpur. Selama beberapa bulan, Hidora dan Banyuwangi Jazz Patrol mulai mempersiapkan diri untuk acara internasional tersebut. Namun, sayangnya persiapan tersebut terpaksa tidak dilanjutkan karena terjadi perubahan situasi dan kondisi di Kampung Temenggungan.

## **Gejala Tidak Sehat**

Menjelang akhir tahun 2016, mulai terasa ada gejala-gejala “tidak sehat” ketika Pemkab Banyuwangi mengadakan beberapa kali kunjungan ke Kelurahan Temenggungan. Beberapa seniman Temenggungan juga beberapa kali diundang ke Pemkab Banyuwangi, tapi tidak ada koordinasi dengan Hidora. Semula Hidora tidak punya prasangka apa-apa terhadap hal itu. Pada bulan Januari 2017, terjadi mutasi di jajaran Pemkab Tegal, mulai dari level kepala dinas, Kabid dan Kabag, camat, sampai lurah, termasuk Lurah Temenggungan. Pergantian ini ternyata berimbas pula pada organisasi di level kelurahan. Tiba-tiba muncul organisasi Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) bentukan kelurahan yang berisi orang-orang dari kelompok tertentu. Organisasi ini mendapat tugas mengelola kegiatan wisata Kampung Temenggungan. Segala perubahan ini sama sekali tidak dikomunikasikan dengan Hidora yang sudah setahun lebih mendampingi Kampung Temenggungan secara swadaya dan mandiri.

Beberapa waktu kemudian, Kelurahan Temenggungan dan Pokdarwis membuat sebuah acara *Launching* Banyuwangi Putra Ethno Collaboration, sebuah kelompok kesenian yang sebagian besar anggotanya adalah dari Banyuwangi Jazz Patrol dan pengurus Pokdarwis. Kegiatan inipun sama sekali tidak dikoordinasikan dengan pihak Hidora, dan terkesan dilakukan secara diam-diam, dimotori oleh sekelompok orang.

## **Program Kampung Kelir**

Puncaknya adalah pada bulan April 2017, tiba-tiba di berbagai media muncul berita bahwa akan ada kegiatan besar, yaitu Festival Wirakarya Kampung Kelir Pramuka di Kampung Temenggungan yang akan diselenggarakan di awal April 2017 dengan melibatkan 1.000 orang anggota Pramuka dari Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso. Kegiatan ini pun tidak berkoordinasi dengan Hidora. Pada acara tersebut, 1.000 orang anggota Pramuka tinggal di rumah warga selama 4 hari dan melakukan kegiatan mengecat rumah warga di kampung menjadi berwarna-warni. Rupanya ide mengecat kampung warna-warni ini meniru konsep Kampung Warna-warni di Kota Malang yang saat itu menjadi viral di sosial media.

Program ini didanai oleh Pemkab Banyuwangi dan dibuka oleh Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka yang juga Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf, bersama Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, yang saat itu sedang hangat-hangatnya masuk di bursa pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Keduanya secara simbolis membuka acara dengan menorehkan cat di tembok rumah warga yang kemudian diteruskan oleh peserta Festival Wirakarya dari Pramuka.

Warga Kampung Temenggungan yang sudah puluhan tahun termarjinalkan dan tidak mendapatkan perhatian dari Pemkab Banyuwangi, menyambut kegiatan ini dengan gembira. Bagi warga, inilah kali pertama mereka mendapatkan perhatian besar dari Pemkab Banyuwangi. Saat itu warga kampung sepenuhnya mendukung kegiatan ini dengan sangat bersemangat. Rumah-rumah warga di hampir seluruh area kampung, baik yang berada di jalan utama sampai di sudut gang-gang sempit, mendapat jatah pengecatan warna-warni oleh para anggota Pramuka yang terdiri atas pelajar SMA/SMK dan yang sederajat. Sayangnya, karena memang bukan ahlinya melukis di dinding, hasil pengecatannya pun sebagian besar tidak rapi, kurang artistik, dan tidak menarik. Tentunya ini bukan murni kesalahan mereka karena memang mereka bukanlah orang yang tepat untuk diminat melukis mural. Hal yang sangat disesalkan adalah pengecatan dilakukan tanpa memperhitungkan keadaan beberapa rumah warga yang tergolong rumah kuno. Apa yang dilakukan terhadap rumah-rumah kuno ini sudah melanggar prinsip-prinsip perawatan dan pelestarian bangunan warisan budaya. Dalam waktu empat hari, lengkaplah sudah kerusakan masal yang terjadi di kampung ini.

Dalam hal ini, masyarakat kampung dan para anggota Pramuka tentu tidak bisa disalahkan. Masyarakat kampung yang biasa diabaikan merasa begitu bersemangat ketika akhirnya “mendapatkan perhatian” dari Pemkab, sementara para anggota Pramuka hanya mengerjakan apa yang menjadi tugas dalam program mereka. Tidak jelas apakah tidak ada kajian sebelumnya atau memang Pemkab tidak paham akan

cara memperlakukan bangunan warisan dengan benar sehingga membuat program seperti itu.

## Setelah Cat Warna-warni

Pada awal pascaprogram pengecatan, kampung ini sempat menjadi viral sesaat karena hampir semua media lokal Banyuwangi memuat berita dan foto-foto kegiatan pengecatan kampung. Selama satu-dua minggu pertama pascaprogram pengecatan, banyak warga Banyuwangi mengunjungi kampung ini untuk sekedar berjalan-jalan dan *selfie* di beberapa titik di kampung, yang kini di-*branding* oleh Pemkab Banyuwangi dengan sebutan Kampung Keliir (kelir = warna, bahasa Jawa). Namun, dalam waktu singkat antusiasme publik terhadap kampung ini mulai surut. Tak banyak lagi orang yang datang ke kampung ini untuk berjalan-jalan atau *selfie* dan mulai bermunculan komentar-komentar kritis mengenai tema dan kualitas lukisan-lukisan di dinding rumah warga yang dinilai kurang menarik, bahkan ada yang menganggapnya kumuh.

Menyikapi kondisi yang sudah berubah di Kampung Temenggungan, Hidora memilih untuk diam, tidak melakukan tindakan apapun secara fisik. Hidora hanya mengkritisinya dengan membuat sebuah tulisan mengenai kajian dan evaluasi terhadap program pengecatan warna-warni di Kampung Temenggungan melalui sosial media. Tulisan ini sempat menimbulkan pro dan kontra yang cukup berkepanjangan. Sekitar tiga bulan kemudian, beberapa warga Kampung Temenggungan silih berganti berdatangan ke *basecamp* Hidora, bercerita mengenai kondisi kampung mereka sekarang. Berbagai keluhan, curhat, dan aneka laporan tentang banyaknya kejanggalan pada pengelolaan kampung Temenggungan dan "penguasaan" aktivitas oleh salah satu kelompok.

Sebagian warga yang datang ke *basecamp* Hidora meminta Tim Hidora kembali ke kampung untuk membenahi kondisi di Kampung Temenggungan yang menurut mereka sangat tidak kondusif dan tak lagi *guyub* seperti dulu. Mereka berharap Tim Hidora bisa menata kembali apa yang dulunya sudah terbangun sebelum masuknya program Pemkab Banyuwangi di kampung, dan Hidora diminta kembali menjadi "wasit" yang adil terhadap aneka kepentingan yang saat ini dianggap tidak terkendali.

Pada prinsipnya, sebenarnya Tim Hidora tidak keberatan untuk kembali ke Kampung Temenggungan. Namun, belajar dari kondisi yang sudah terjadi sebelumnya, walaupun tidak bermaksud untuk *sok* birokratis, kali ini Tim Hidora meminta dibuatkan surat dari masyarakat yang menyatakan meminta pendampingan dan ditandatangani (diketahui) oleh pihak kelurahan. Menurut pertimbangan Tim Hidora, pembuatan surat resmi ini perlu dilakukan agar tidak

terkesan Hidora yang memiliki kepentingan. Jika tanpa surat resmi, dikawatirkan menimbulkan fitnah dan Hidora dianggap mengadu domba antarkelompok warga. Perlu disadari bersama bahwa semua anggota Tim Hidora bukan warga kampung Temenggungan. Sayangnya, surat yang diminta tak kunjung dibuat. Jadi, sampai hari ini Tim Hidora belum bergerak kembali di Kampung Temenggungan. Tim Hidora hanya bisa memantau dan menyaksikan dari jauh bagaimana sebagian besar potensi yang dulu sudah terbangun kini meredup kembali. Kampung Temenggungan yang pernah begitu bergairah dan hidup dengan kegiatan-kegiatan yang produktif kini kembali lesu.

Hari ini Kampung Temenggungan tak lagi semarak. Walaupun kabarnya sesekali masih ada tamu wisata yang berkunjung, tapi sudah sangat jarang. Belum tentu sebulan sekali ada tamu. Saat ini segala kegiatan pengelolaan wisata Kampung Temenggungan “dikuasai” oleh orang-orang dari kelompok tertentu, dengan manajemen keuangan yang tertutup, dan tak lagi terdengar pelaksanaan konsep “pemerataan rezeki” seperti dulu.

# **PESAN DARI KAMPUNG**



# Pesan dari Kampung

Pengetahuan dan pengalaman yang dihimpun dalam buku ini membuka ruang perbincangan yang tidak bisa ditutup dengan sebuah ringkasan. Namun, proses menyusun buku ini bersama pembakti dan warga kampung mengkristalkan 3 pesan inti:

## **Pesan 1: Kampung itu Penting**

### **Kampung merupakan unit sosial dengan identitas yang khas**

Kampung adalah pemukiman tak terencana di wilayah rural, urban, dan persinggungan rural-urban yang membangun unit sosial dengan identifikasi terhadap suatu identitas bersama. Dengan demikian, kampung bukan sekadar wilayah geospasial belaka, tetapi merupakan komunitas yang berakar pada lokalitas dengan kesejarahan dan kekhasan yang beragam.

### **Dinamika rural-urban mewarnai kehidupan abad ke-21**

Pelebaran kota ke wilayah pedesaan menyebabkan persinggungan urban-rural, antara lain migrasi warga desa ke kota untuk mencari penghidupan, merasuknya gaya hidup dan konsumsi urban ke desa, dan sebaliknya juga, meresapnya unsur rural dalam gaya hidup perkotaan.

### **Mayoritas penduduk Indonesia tinggal di kampung**

Menurut perkiraan Badan Pusat Statistik, di tahun 2025 jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan berjumlah 60%. Dari jumlah tersebut, “Kampung menjadi tumpuan perumahan 70 sampai 85% warga kota” (Setiawan, 2010). Berarti, mayoritas penduduk Indonesia tinggal di kampung kota dan kampung di wilayah pedesaan.

## **Pesan 2: Menyadari Potensi kampung**

Sudah waktunya melepaskan perspektif modernitas warisan kolonial yang melihat kampung sebagai tempat kumuh, sumber penyakit dan masalah sosial atau sebagai wilayah eksotik untuk dijadikan sekadar komoditi wisata. Dengan

perspektif berbeda, kampung justru menjadi lumbung potensi sumber daya alam, dan kekayaan sosial-budaya

### **Kampung adalah lumbung sumberdaya alam dan sumberdaya budaya**

Jika lingkungan alam kampung (sumber air, hutan, kekayaan hayati) dirawat dan dijaga, maka kampung menjadi sumber energi dan pangan yang berkelanjutan bagi dirinya, negerinya dan planet bumi. Kampung juga merupakan lumbung kekayaan budaya yang tak ternilai. Ritual agraris dan maritim dengan filosofi ramah lingkungan, kesenian lokal, permainan anak-anak, kuliner dan praktik solidaritas sosial adalah sebagian dari kekayaan lokal. Ingatan kampung yang dirawat dan dikembangkan akan menjadi warisan bagi generasi mendatang.

### **Model semangat berbagi dan keriaan gotong royong**

Ketika kota tertelan oleh kapitalisme global, tertekan oleh persaingan dan individualisme yang mengisolasi, ekonomi kampung yang berbasis pada kemurahan berbagi untuk saling memberdayakan dapat dijadikan model untuk membangun kesejahteraan komunitas. Keriaan kerja gotong royong melalui berbagai aktifitas seni budaya yang mengakar pada kehidupan sehari-hari merupakan kunci pemberdayaan kampung.

### **Ruang strategis untuk memupuk keragaman lintas budaya dan solidaritas**

Ketika kota tersegregasi oleh identitas agama, etnis dan kelas melalui pemukiman dan ruang konsumsi, dan radikalisme tumbuh di kampus-kampus, kampung dan pedesaan yang terbuka dan terhubung secara lintas batas dapat menjadi ruang untuk memupuk solidaritas dan kelenturan terhadap keragaman. Akar pada tradisi lokal dan kreativitas untuk mengolah yang lokal dengan perspektif global berpotensi menjadi penyaring paham-paham eksklusif dan intoleran.

### **Belajar dari dan antarkampung**

Kampung adalah ruang untuk membangun pengetahuan. Diperlukan pendamping dan penyuluh dari universitas, pemerintah, pihak swasta dan masyarakat, bukan untuk mengajari, melainkan untuk belajar bersama warga kampung dan membangun pengetahuan secara partisipatoris. Sesama kampung dapat saling belajar dengan berbagai pengalaman dan strategi, bukan untuk mengikuti satu model yang sama karena keragaman dan kekhasan tiap kampung membutuhkan pendekatan yang berbeda.

### **Pesan 3: Sinergi Merawat Kampung**

Merawat kampung bukan hanya tugas warga, pembakti, pemerintah, melainkan tugas semua pihak. Ketika satu kampung terserang bencana, seluruh dunia turut mengulurkan tangannya. Tapi, untuk melaksanakannya diperlukan etika, sinergi, dan koordinasi.

Berikut beberapa pesan untuk merawat kampung:

#### **Mendengarkan dan mengutamakan kepentingan warga kampung**

Ketika dana dan perhatian mengalir pada desa dan kampung, muncul pula berbagai kepentingan untuk memanfaatkan kampung sebagai panggung dan arena untuk mendapatkan manfaat politik, sosial, maupun ekonomi. Diperlukan etika untuk mendengarkan suara warga kampung dan memprioritaskan kepentingan mereka dalam seluruh proses pendampingan dan upaya “membantu” kampung.

#### **Menghindari kebijakan *top-down* dan seragam**

Tiap kampung mempunyai keunikan dan berbeda-beda dari segi latar sosial-budaya, demografi, potensi alam dan ekonominya. Kebijakan dari atas, seperti penunjukan tema-tema untuk kampung, dan penyeragaman atau peniruan atas sukses kampung lain, seperti pengecatan warna-warni, justru akan mematikan kekhasan dan gerak dan nafas kampung itu sendiri. Semakin bergairah partisipasi dan kreativitas warga dalam menentukan arah pengembangan kampungnya sendiri, semakin besar kekuatan kampungnya.

#### **Meningkatkan daya tawar kolektif**

Dalam era digital di abad ke-21, kampung tak bisa tidak harus bernegosiasi dan bersinergi dengan pemerintah, lokal sampai nasional, partai politik, dan kekuatan kapital. Kampung juga menghadapi arus budaya lokal-global, termasuk konflik internal akibat perbedaan dan radikalisme agama. Untuk itu, warga perlu meningkatkan daya tawar secara kolektif, agar tidak mudah dipecah-belah oleh berbagai kepentingan. Di sinilah pentingnya ruang-ruang informal untuk membangun kesadaran dan solidaritas kolektif seperti yang secara kreatif digagas oleh warga kampung (ngobar, forum komunikasi masyarakat, festival kampung dan kegiatan kesenian).

#### **Menuju transformasi sosial**

Penting bagi pembakti untuk mengarahkan kegiatan ke arah transformasi sosial, menuju kampung yang mandiri, sejahtera, dan bahagia. Bagi pembakti Jaringan Kampung Nusantara yang memilih festival budaya kampung sebagai

arena pemberdayaan budaya lokal, ada tantangan agar tidak terjebak pada kegiatan membuat tontonan rutin, apalagi menjadikan warga menjadi penonton atau pelaksana acara belaka. Belajar dari jejaring pegiat kampung lain, pembakti dituntut menghindari sekadar “produksi simbol dan tontonan” menuju pada upaya untuk membangun “laku pengelolaan kebersamaan ... yang menubuh dalam relasi sosial keseharian” (Isabella, 2018)

### **Membangun jejaring budaya antarkampung**

Kampung-kampung tidak dapat bergerak sendiri. Diperlukan jejaring antarkampung untuk saling belajar, membantu, dan menguatkan. Program sonjo kampung (saling mengunjungi dan saling silang ide antarkampung) yang digagas oleh Jaringan Kampung Nusantara dapat dijadikan model untuk mengaitkan satu kampung dengan kampung lainnya. Pemanfaatan media sosial dan teknologi informasi sangat berperan dalam membangun jejaring antarkampung. Selain itu, satu kelompok jaringan, seperti Jaringan Kampung Nusantara, perlu membangun sinergi dengan jaringan kampung lainnya yang mempunyai fokus dan pendekatan berbeda-beda. Tak tertutup kemungkinan jaringan meluas ke kampung-kampung lintas negara, seperti di Asia Tenggara, dan negara lain. Dengan demikian, gerakan membangun kampung untuk Indonesia dan dunia, bukan merupakan slogan belaka.

# Daftar Acuan

- Bowen, J.R. (1986). On the Political construction of tradition: gotong royong in Indonesia. *The Journal of Asian Studies*. 45 (3), 545-561.
- BPS (2014). Persentase Penduduk Daerah Perkotaan menurut Provinsi, 2010-2035 <https://www.bps.go.id/statictable/2014/02/18/1276/persentase-penduduk-daerah-perkotaan-menurut-provinsi-2010-2035.html>
- BPS Jember. (2015). Jumlah penduduk Kabupaten Jember hasil sensus penduduk tahun 2010 menurut kecamatan. <https://jemberkab.bps.go.id/statictable/2015/03/12/64/jumlah-penduduk-kabupaten-jember-hasil-sensus-penduduk-tahun-2010-menurut-kecamatan-.html>
- BPS Jember. (2015). Luas wilayah menurut kecamatan. <https://jemberkab.bps.go.id/statictable/2015/03/12/36/luas-wilayah-menurut-kecamatan-.html>
- Colombijn, F. and Coté, J. (2015). *Cars, conduits, and kampungs: the modernization of the Indonesian city, 1920-1960*. Brill.
- Cunningham, G. (2011). Community economic literacy and the leaky bucket. Issue 9 of Occasional paper series, Coady International Institute, St. Francis Xavier University.
- Djajadiningrat, H.M. (1994). Sustainable urban development in the kampung improvement programme: a case study of Jakarta-Indonesia. University of Sheffield.
- Ehrenberg, A.S.C. (1988). *Repeat buying: facts, theory and applications*. London: Charles Griffin.
- Isabella, B. (2018). Pengantar Editorial. *Unjuk Rasa. Yayasan Kelola*, hlm. xix
- Kloczko-Gajewska, A. (2014). Can we treat thematic village as social innovation?. *Journal of Central European Green Innovation*. 2 (3), 49-59.
- Korten, D. (1999). *The post-corporate world: life after capitalism*. Berrett-Koehler Publishers.
- Kuwado, F.B. (2013). Ini kesulitan Jokowi bangun kampung tematik. <http://megapolitan.kompas.com/read/2013/09/15/1614280/Ini.Kesulitan.Jokowi.Bangun.Kampung.Tematik>.
- Mahendra, Y.I. dan Pradoto, W. (2016). Transformasi spasial di kawasan peri urban kota malang. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*. Biro Penerbit Planologi Undip. Volume 12 (1): 112-126 Maret.
- Malang Post (17-1-2018). Wayang krucil malangan segera digandakan. <https://www.malang-post.com/berita/malang-roya/wayang-krucil-malangan-segera-digandakan>.

- McGee, T.G. (1991). The Emergence of desa kota regions in Asia, expanding a hypothesis. *The Extended Metropolis, Settlement Transition in Asia*. Honolulu: University of Hawaii Press, 3-26.
- McGee, T.G. (2009). The spatiality of urbanization: the policy challenges of mega-urban and Desa kota regions of southeast asia. UNU-IAS Working Paper 161. [http://archive.ias.unu.edu/resource\\_centre/161%20Terry%20McGee.pdf](http://archive.ias.unu.edu/resource_centre/161%20Terry%20McGee.pdf)
- Munggoro, D.W., Maemunah, M. S., & Kismadi, B. (Eds). (2018). *Menyemai inklusi sosial: buku praktik cerdas perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat*. Jakarta: The Asia Foundation.
- Richter, R. (2017). Rural social enterprises as embedded intermediaries: The innovative power of connecting rural communities with supra-regional networks. *Journal of Rural Studies*. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2017.12.005>.
- Setiawan, Bakti (2010) "Kampung Kota dan Kota Kampung: Tantangan Perencanaan Kota di Indonesia, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Perencanaan Kota, UGM. [http://pidato.net/2691\\_pengukuhan-prof-ir-bakti-setiawan-ma-ph-d](http://pidato.net/2691_pengukuhan-prof-ir-bakti-setiawan-ma-ph-d)
- Sullivan, J. (1986). Kampung and state: the role of government in the development of urban community in Yogyakarta. *Jstor Edisi Khusus tentang Indonesia*. No. 41, hlm. 66-88. [https://www.jstor.org/stable/3351036?seq=1#page\\_scan\\_tab\\_contents](https://www.jstor.org/stable/3351036?seq=1#page_scan_tab_contents).
- Surya Malang. (2016). Penduduk Kota Malang bertambah 1,58 persen tiap tahun. <http://suryamalang.tribunnews.com/2016/05/30/penduduk-kota-malang-bertambah-58-persen-tiap-tahun>.
- Tamara, A.P. & Rahdiarawan, M. (2018). Kajian pelaksanaan konsep kampung tematik di kampung hidroponik Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan* , 6 (1), 40-57.
- Velayati, S. (2014). Tanoker ledokombo community: encourage rural social changes through culture approach in ledokombo district, Jember Regency, East Java. (Skripsi). Brawijaya University, Malang, Jawa Timur, Indonesia.
- Wemyss, G.M.W. (2012). *Sensible places: essays on place, time, & countryside*. Bapton Literary Trust No.1.

# Biodata Penulis dan Pembakti

**Adriana Rahajeng Mintarsih** mendapatkan gelar sarjana humaniora dan magister sains dari Universitas Indonesia. Ia mengajar di Prodi Inggris FIB UI sejak 2009. Selain mengajar, ia terlibat dalam pelatihan Bahasa Inggris secara gratis untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu dan sebuah program daring pemberdayaan PMI di Singapura melalui medium karya sastra.

**Agus Wayan Prihatin Gusindra** lahir di Pasuruan tahun 1983. Pembakti yang dikenal dengan panggilan Aak ini mengajar musik di berbagai sekolah, yayasan yatim piatu, dan universitas sejak masa kuliah. Menguasai berbagai alat musik, khususnya musik tradisional, Aak pergi ke berbagai kampung untuk membangun rasa percaya diri anak Indonesia melalui musik. Tahun 2018 ia mendapat penghargaan sebagai motivator budaya lokal oleh Media berita *Radar Malang*.

**Akmad Bustanul Arif** tinggal di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dan aktif di pemberdayaan ekonomi masyarakat dan menjadi konsultan CSR. Ia pernah bekerja di Yayasan Sahabat Cipta sebagai fasilitator di program *Coconut Sector Development (CSD)* - Hivos dan program *Promoting Rural Integrated Farming, Small Enterprise Cluster, and Microfinance Access (PRISMA)* – CSR Chevron.

**Ari Anggari Harapan** adalah pengajar Program Studi Prancis Departemen Kewilayahan FIB UI. Doktor ilmu sejarah ini mengajar Bahasa, sejarah dan kebudayaan Prancis dan Eropa. Di tingkat fakultas ia mengajar metode penelitian kebudayaan serta Kebudayaan Indonesia dan meneliti ritual kelompok etnis di Indonesia.

**Bachtiar Djanan Machmoed** lahir di Malang, 23 Juni 1974. Aktif di dunia penulisan, teknologi informasi, pelatihan pengembangan SDM, dan riset serta aplikasi pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat. Saat ini menjadi Wakil Ketua Perkumpulan HIDORA (Hiduplah Indonesia Raya), sebuah pergerakan yang melakukan pemberdayaan dan pendampingan masyarakat di desa-desa di beberapa kota dan kabupaten.

**Bambang Irianto** lahir 5 Mei 1957 di Malang. Lulusan Fakultas Pertanian Jurusan Sosial ekonomi Brawijaya ini meneruskan rintisan usaha Ibunya sebagai produsen Kripik Tempe. Pernah menjadi direktur Jatim Park, konsultan HRD, pertanahan dan agrarian, ia menggunakan posisinya sebagai Ketua RW untuk mengubah kampung yang kumuh menjadi kampung yang hijau. Atas keberhasilannya,

ia mendapat penghargaan sebagai innovator sosial dari Guangzhou International award tahun 2016 dan Kalpataru sebagai pembina lingkungan di tahun 2018.

**Danis Setyo Budi Nugroho** lahir tahun 1986. Sejak remaja ia aktif di Karang Taruna di desa kelahirannya, Desa Gondowangi, Malang. Setelah memperoleh gelar Sarjana Bahasa Inggris dari Universitas Negeri Malang, ia bekerja di bidang pariwisata di Bali. Tahun 2013 Danis pulang ke Gondowangi dan terpilih sebagai kepala desa pada usia 27 tahun.

**Dhita Hapsarani** adalah doktor Ilmu Susastra FIBUI yang meneliti dan mengajar tentang sastra anak, kajian alih wahana, dan representasi perempuan dalam wacana publik. Saat ini ia menjabat sebagai Ketua Program Pascasarjana Ilmu Susastra dan terlibat dalam pengembangan modul pendamping buku cerita anak tentang keberagaman.

**Farha Abdul Kadir Assegaf** (Farha Ciciek) sejak di perguruan tinggi terlibat dalam gerakan perempuan, aktivitas lintas agama, dan pendampingan masyarakat. Sekarang ia merupakan ketua Tanoker dan aktif melakukan pendampingan di bidang pendidikan, sosial budaya, peningkatan kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan untuk anak desa, sekolah ibu, bapak, dan eyang di Kecamatan Ledokombo Jember.

**Kristanto Budiprabowo**, biasa dipanggil Tatok. Menyelesaikan studi master Theologi di Universitas Kristen Duta Wacana dan sempat studi doktoral *interreligious studies* pada program ICRS-UGM. Lama menjadi pendeta kampung di pedalaman Lampung sembari aktif di lembaga pemberdayaan masyarakat. Sekarang bergiat di jaringan Gusdurian dan dipercaya menjadi salah satu presidium Jawa Timur dengan fokus minat pada Sonjo Kampung dan memerjumpakan beragam komunitas.

**Maryaeni**, lahir di Kediri 10 Oktober 1959. Selain menulis tentang Sastra Indonesia Modern, Guru besar Sastra Universitas Malang ini menggeluti kesenian tradisional seperti ludruk dan jemblung. Lulusan S3 di bidang sastra dan humaniora UGM ini aktif berkegiatan teater, dan terlibat dalam sejumlah asosiasi profesi, seperti Asosiasi Jurusan Pendidikan dan Bahasa dan Sastra Indonesia, Asosiasi Tradisi Lisan, dan Himpunan Sarjana Kesusasteraan Indonesia.

**Melani Budianta** adalah Guru Besar FIBUI di bidang sastra dan kajian budaya. Mengajar tentang keragaman dan interaksi lintas budaya, ia bergabung dalam relawan kemanusiaan antikekerasan terhadap perempuan di masa Reformasi. Ia meneliti dan menulis tentang permasalahan gender, poskolonial, gerakan budaya dan komunitas.

**M. Dwi Cahyono** adalah dosen Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial UM. Lulusan S2 arkeologi UI ini menekuni kajian eko-sosio-budaya Nusantara, khususnya masa Hindu-Budha, dan sejarah mikro, termasuk sejarah desa dan

kampung. Bersama Jaringan Kampung Nusantara, ia terlibat dalam kegiatan sonjo kampung di berbagai daerah, dari Jawa Timur hingga Kalimantan Timur.

**Paryati**, lahir di Magelang 23 Desember 1979. Ibu rumah tangga yang tinggal di Dusun Karanggreneng, Desa Jamus Kauman, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang ini merupakan pengurus Kelompok Wanita Tani Teratai di Desa Jamus Kauman dan menjadi pengurus dapur umum dalam kegiatan wisata edukasi Kampoeng Dolanan Jamuskauman.

**Redy Eko Prastyo**, lahir di Besuki 21 September 1979. Lulusan Jurusan Psikologi yang mendalami manajemen media di Program Pasca FISIP UB Malang ini tinggal di Kampung Cempluk, Desa Kalisongo Kabupaten Malang. Sehari-hari bekerja sebagai manajer UBTV Radio, ia membuat komposisi musik ilustrasi untuk film. Bersama pembakti kampung Jaringan Kampung Nusantara, ia menemani generasi muda untuk berkarya di kampung masing-masing.

**Sisillia Velayati** sejak 2010 melakukan pendampingan masyarakat (isu perdamaian, perlindungan anak dan perempuan) di beberapa komunitas di Jember dan Malang. Fokus risetnya gender dan Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya (terutama anak-anak). Sekarang ia merupakan pengurus Yayasan Tanoker dan aktif melakukan pendampingan kader masyarakat, kewirausahaan dan pengasuhan gotong royong di Tanoker.

**Supriyadi**, lahir di Kotaagung, Lampung 28 Juli 1981. Merantau ke Yogya seusai menamatkan SMA, ia menekuni karier di bidang marketing, khususnya untuk industri kuliner dan perhotelan. Tinggal bersama keluarga di Dusun Karanggreneng, Desa Jamuskauman, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, Supriyadi melakukan inovasi untuk membangun Kampoeng Dolanan dan mendisain kunjungan wisata edukasi.

**Tri Andi Yuniarso**, lahir di Bondowoso 4 Juni 1969. Saat ini bekerja sebagai staf di Seksi Kesenian Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Menggeluti beberapa bidang seni (teater, musik dan seni rupa), juga aktif sebagai pembakti kampung wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

**Tri Andri Marjanto** lahir di Jember, 31 Maret 1972. Saat ini memiliki beberapa bisnis (rumah makan, jasa pariwisata, penginapan, teknologi informasi, dan training SDM), serta aktif dalam pemberdayaan masyarakat sebagai Ketua Perkumpulan HIDORA (Hiduplah Indonesia Raya) yang mendampingi desa-desa di Kabupaten Banyuwangi, Jember, Lamongan, dan Tegal.

**Trie Utami Sari**, lahir di Bandung 8 Januari 1968, adalah seorang penyanyi, pencipta lagu, dan pianis, yang memenangkan berbagai penghargaan dan kejuaraan nasional dan internasional. Dibesarkan dalam lingkungan yang peduli pada

pendidikan musik, Iie, demikian nama panggilannya, menaruh perhatian besar pada budaya nusantara. Vokalis yang juga dikenal sebagai juri Akademi Fantasi Indonesia ini aktif mengawal etika pembakti dalam berkarya di kampung.